



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, menengah, dan pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati dalam kurun waktu 20 tahun mendatang agar berkesinambungan, efektif dan efisien dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Rencana . . .

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh).
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 September 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(3-292/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan proses berkesinambungan dan terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera sesuai amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang sistematis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara komprehensif berdasarkan jangka waktu yang diperlukan sesuai prioritas dan sasaran pembangunan.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Daerah menyusun RPJPD untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2045.

Tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk merumuskan cita-cita, visi, misi, arah dan tujuan pembangunan daerah jangka panjang yang terintegrasi dengan tujuan nasional secara terpadu, berkesinambungan, representatif dan akuntabel serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang.

RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah tahunan yang merupakan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 166

DAFTAR ISI

Daftar Isii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangI-1

1.2. Dasar Hukum PenyusunanI-4

1.3. Hubungan Antar DokumenI-6

1.4. Maksud dan TujuanI-8

1.4.1.MaksudI-8

1.4.2.TujuanI-8

1.5. SistematikaI-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.Geografi II-1

2.1.2.DemografiII-12

2.2. Aspek Kesejahteraan MasyarakatII-15

2.2.1.Kesejahteraan EkonomiII-15

2.2.2.Kesejahteraan Sosial Budaya II-30

2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-35

2.3.1.Daya Saing Ekonomi DaerahII-35

2.3.2.Daya Saing SDM II-51

2.3.3.Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-54

2.3.4.Daya Saing Iklim Investasi II-56

2.4. Aspek Pelayanan Umum II-58

2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 II-69

2.5.1.Capaian Pembangunan II-69

2.5.2.Rekomendasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 II-73

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Pelayanan Publik II-75

2.6.1. Proyeksi DemografiII-75

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarpras Pelayanan Publik II-82

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah II-93

2.7.1. Pusat Pertumbuhan WilayahII-93

2.7.2. Indikasi Program/Proyek Strategis II-98

2.7.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana sesuai RPJPN 2025-2045 II-108

2.7.4. Arah Kebijakan Kewilayahan dalam KLHS II-111

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1	Permasalahan	III-1
3.1.1.	Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi	III-1
3.1.2.	Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III-2
3.1.3.	Permasalahan Aspek Daya Saing	III-2
3.1.4.	Permasalahan Aspek Pelayanan Umum	III-4
3.1.5.	Permasalahan berdasar KLHS	III-4
3.2	Isu Strategis	III-12
3.2.1	Isu Global	III-12
3.2.2.	Isu Nasional dalam RPJPN 2025-2045	III-13
3.2.3.	Isu Provinsi Jawa Tengah dalam RPJPD 2025-2045	III-14
3.2.4.	Potensi Daerah	III-14
3.2.5.	Aspirasi Masyarakat	III-15
3.2.6.	Rumusan Isu Strategis Daerah.....	III-16

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1	Visi Daerah Tahun 2025-2045	IV-1
4.2	Misi Daerah Tahun 2025-2045	IV-8

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1.	Arah Kebijakan	V-1
5.1.1	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	V-4
5.1.2	Arah Kebijakan Periode 2030-2034	V-5
5.1.3	Arah Kebijakan Periode 2035-2039	V-6
5.1.4	Arah Kebijakan Periode 2040-2045	V-7
5.2.	Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	V-8
5.2.1	Sasaran Pokok 1	V-11
5.2.2	Sasaran Pokok 2	V-13
5.2.3	Sasaran Pokok 3	V-17
5.2.4	Sasaran Pokok 4	V-18
5.2.5	Sasaran Pokok 5	V-20

BAB VI PENUTUP

6.1.	Manajemen Risiko.....	VI-1
6.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
6.3.	Pedoman Transisi	VI-2

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sementara itu Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD disusun oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Penyusunan RPJPD sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, dalam Pasal 16 ayat 1 Permendagri 86/2017, bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan, mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan

rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. RPJPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan berorientasi pada proses. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan perpaduan antara bottom-up dan top down. Integrasi antara pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis dapat menghasilkan RPJPD yang komprehensif, berdaya saing, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penjelasan masing-masing pendekatan diuraikan sebagai berikut: (1) Pendekatan teknokratik berfokus pada peran para ahli dan pakar teknis dalam perencanaan pembangunan. Dalam pendekatan ini, keputusan pembangunan didasarkan pada data, analisis, dan ilmu pengetahuan yang mendalam. Para teknokrat dan ahli merancang rencana pembangunan berdasarkan pertimbangan teknis, efisiensi, dan rasionalitas; (2) Pendekatan partisipatif; Proses penyusunan RPJPD melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) daerah. Proses partisipatif ini mencakup konsultasi, dialog, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rencana pembangunan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan warga, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lainnya untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan mereka. Partisipasi aktif ini memungkinkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal; (3) Pendekatan Politis, menitikberatkan pada peran politik dan dinamika kekuasaan dalam proses penyusunan RPJPD. Dalam pendekatan ini, keputusan pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, termasuk kepentingan politik; dan (4) Pendekatan *Bottom-Up* dan *Top-Down*, merupakan perpaduan menggabungkan elemen pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan dari atas (*top-down*) untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan teknis dan politis, serta partisipasi masyarakat yang memadai. Dalam pendekatan ini, pada tahap awal, pemerintah daerah menyusun visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan (*top-down*), selanjutnya masyarakat dan para pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses konsultasi, diskusi, dan partisipasi untuk memberikan masukan dan mempengaruhi detail rencana pembangunan (*bottom-up*).

Secara substansi, penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Dalam penyusunan RPJPD yang efektif, pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dapat saling melengkapi dan memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan, berimbang, dan berdaya guna. Penjelasan masing-masing pendekatan diuraikan sebagai berikut: (1) Pendekatan Holistik-Tematik berfokus pada pemahaman menyeluruh tentang berbagai aspek pembangunan daerah dan bagaimana aspek-aspek tersebut saling terkait.

Dalam pendekatan ini, berbagai sektor pembangunan dianalisis secara komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang diusulkan dapat mencapai keseimbangan dan keselarasan; (2) Pendekatan Integratif menekankan pada keterkaitan dan sinergi antara berbagai kebijakan pembangunan yang diusulkan dalam RPJPD. Dalam pendekatan ini, rencana pembangunan dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor, tujuan, dan sumber daya yang ada agar dapat mencapai efisiensi dan hasil yang optimal; dan (3) Pendekatan Spasial menitikberatkan pada pengorganisasian dan penataan wilayah dalam RPJPD. Dalam pendekatan ini, daerah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan karakteristik, potensi, dan kebutuhannya. Dengan memahami perbedaan wilayah tersebut, program dan kegiatan pembangunan yang spesifik dan relevan dapat diarahkan ke masing-masing wilayah.

RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 akan habis masa berlakunya. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1, setiap daerah menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD daerah tersebut. Artinya, di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pati harus menyusun RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045.

Dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 2045, dengan gambaran berupa: pendapatan per kapita sekitar US\$ 23.000–30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, serta sasaran prioritas nasional lainnya. Untuk mencapai sasaran di Tahun 2045 sebagaimana dimaksud, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Sebagai upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam rangka

mewujudkan RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional dan memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, kemudian diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, selain mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati juga mengacu pada Inmendagri dimaksud.

Selain Inmendagri dimaksud, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor: 600.t/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. SEB dimaksud dalam rangka memastikan keselarasan RPJP Daerah Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-204 dan selanjutnya gubernur sebagai wakil pemerintah memastikan RPJP Daerah kabupaten/kota di wilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

RPJPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap periode lima tahun. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis penyusunan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Inmendagri No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Secara rinci dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

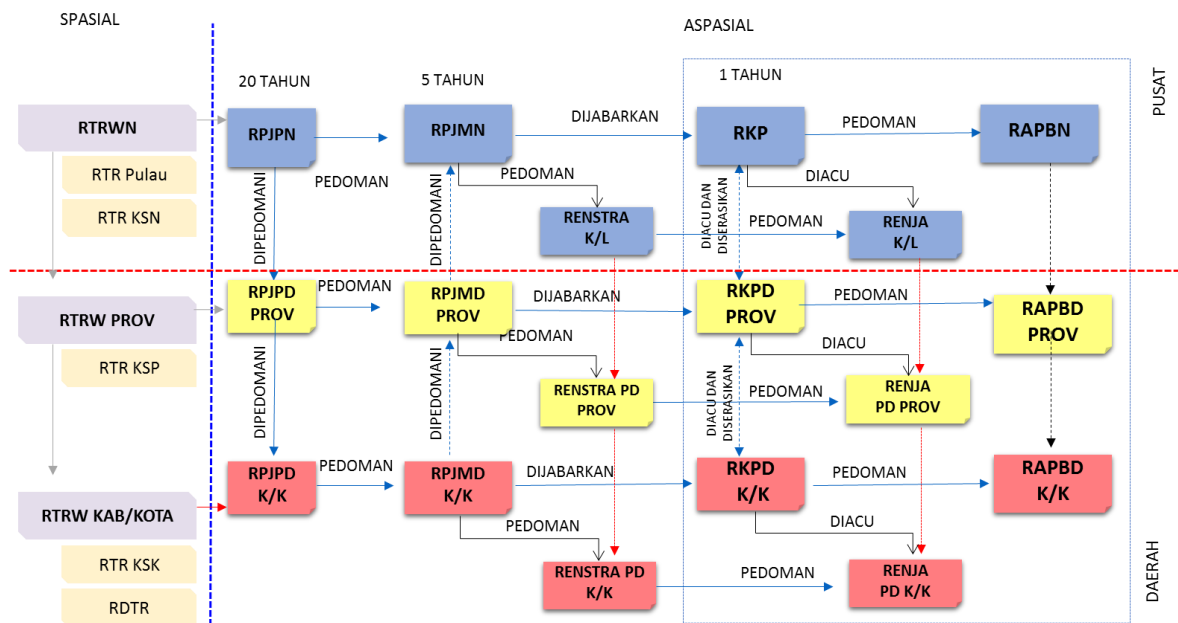
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun

- 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 145);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan antara dokumen RPJPD Kabupaten Pati dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 dalam penyusunannya mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pati dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah sangat penting karena RPJPD harus selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. RPJPD akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah;
2. RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 dalam penyusunannya juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030; dan
3. RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD Renstra PD dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

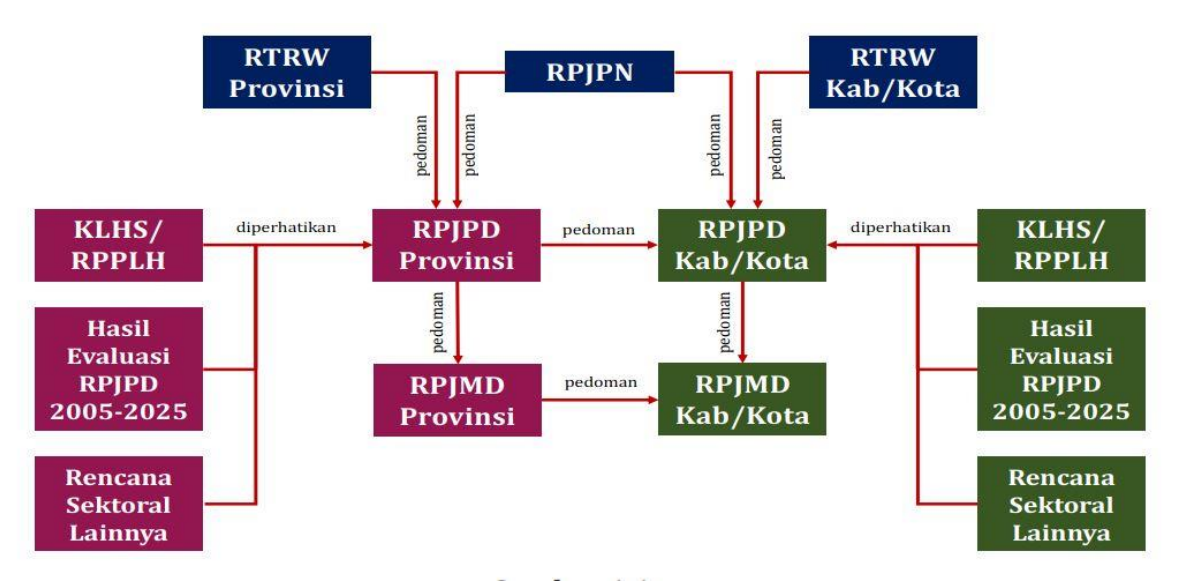


Gambar I.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Pembangunan Daerah Lainnya

Sementara itu, menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah;
2. RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045;
3. RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045;
4. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dari hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya;
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045;
6. Berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW; dan
7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Energi Daerah, dan sebagainya.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:



Gambar I.2 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1.Maksud

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 dimaksudkan antara lain untuk:

1. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
2. Pedoman perencanaan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
3. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun; dan
4. Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

1.4.2.Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, dan sasaran pokok; dan

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

1.5. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi tentang:

1. Aspek Geografi dan Demografi
 - a. Geografi, menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
 - b. Demografi, menjelaskan karakteristik demografi daerah.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan Ekonomi, menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
 - b. Kesejahteraan Sosial Budaya, menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
3. Aspek Daya Saing
 - a. Daya Saing Ekonomi Daerah, menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
 - b. Daya Saing SDM, menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor pendorong perekonomian daerah.
 - c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
 - d. Daya Saing Iklim Investasi, menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.
4. Aspek Pelayanan Umum, menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
 - b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah).
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisi tentang:

1. Permasalahan, memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
2. Isu strategis daerah, memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Berisi tentang:

1. Visi daerah Tahun 2025-2045
Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.
2. Misi daerah Tahun 2025-2045
Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Berisi tentang:

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Memuat pernyataan penutup dan salah satunya tentang manajemen risiko pembangunan nasional sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di jalur Pantura. Secara astronomis Kabupaten Pati terletak antara 6°25' – 7°00' Lintang Selatan dan 110°15' – 111°15' Bujur Timur memiliki luas wilayah 157.324 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar atau 1.573,324 km² dengan batas wilayah administratif di Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara. Secara administrasi, Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 1.485 RW, dan 7.556 RT.

Klimatologi; Secara umum kondisi iklim di wilayah Kabupaten Pati termasuk dalam tipe tropis dengan temperatur udara terendah adalah 23°C dan tertinggi adalah 39°C. Secara letak geografisnya, Kabupaten Pati beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Kabupaten Pati mempunyai rata-rata curah hujan pada tahun 2018 sebanyak 115,32 mm dengan 78 hari hujan.

Topografi; Kabupaten Pati dilihat ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Tlogowungu dengan ketinggian > 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), seluas masing-masing 90 ha, 735 ha, 358 ha, dan 238 ha. Untuk ketinggian 100 – 500 mdpl juga terdapat di keempat kecamatan tersebut selain itu juga terdapat di Kecamatan Kayen, Pucakwangi, Sukolilo, dan Tambakromo yang berada di selatan wilayah Kabupaten Pati yang merupakan wilayah pegunungan kapur. Wilayah kecamatan lain rata-rata berada di ketinggian 0 – 7 mdpl. Kabupaten Pati berdasarkan kondisi kemiringannya terbagi menjadi 5 (lima) kategori. Pada umumnya tergolong kemiringan relatif datar (dominan: 0%-8%), seluas kurang lebih 122.527 hektar atau 77,88% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah dengan kemiringan 8% hingga 15% seluas 18.101 hektar atau 11,51% dari total keseluruhan, wilayah dengan kemiringan lereng 15% hingga 25% seluas 11.657 hektar atau 7,41%, dan kemiringan 25%-45% seluas 3.067 hektar (1,95%). Wilayah dengan kemiringan lereng yang paling curam atau lebih dari 45% seluas 1.972 hektar atau sekitar 1,25% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal dan Tlogowungu.

Geologi; Keadaan geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pati berupa sesar dan kubah. Daerah ini merupakan bagian dari antiklinorium rembang dengan sumbu antiklin dan siklin yang mempunyai arah barat-timur dan barat laut-tenggara. Struktur sesar normal dengan arah timur laut-barat daya yang mensesar litologi batu gamping pada Formasi Bulu. Struktur Kubah dijumpai di daerah Pati Ayam, merupakan suatu diapir. Diduga terbentuknya kubah ini berkaitan dengan proses tektonika setempat sebelum terjadinya kegiatan Gunung Api Muria. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pati yaitu Aluvial, Grumusol, Latosol, Litosol, Mediteran dan Regosol. Didominasi

jenis tanah aluvial, latosol, dan mediteran, dimana jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburan cukup tinggi.

Hidrologi; Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai/kali yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun, pada musim kemarau banyak dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Ada beberapa sungai yang memiliki sumber mata air, akan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari aliran drainase kota saja. Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati. Sungai-sungai yang ada di suatu daerah berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai dan mengeluarkannya melalui outlet tunggal. Apabila turun hujan di daerah tersebut, maka air hujan yang turun akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di sekitar daerah yang dituruni hujan. Sistem sungai yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Penggunaan lahan Kabupaten Pati pada tahun 2023 didominasi oleh penggunaan lahan sawah yaitu sebesar 37,6% atau seluas 59.402,84 Ha, sedangkan penggunaan lahan dengan luasan terkecil adalah penggunaan lahan mangrove yaitu sebesar 0,001% atau seluas 1,57 Ha.

Berdasarkan hasil reklasifikasi jenis penggunaan lahan diatas maka didapat perkembangan perubahan penggunaan lahan selama tahun 2010-2023. Untuk lebih jelasnya berikut ini perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Pati Tahun 2010 -2023.

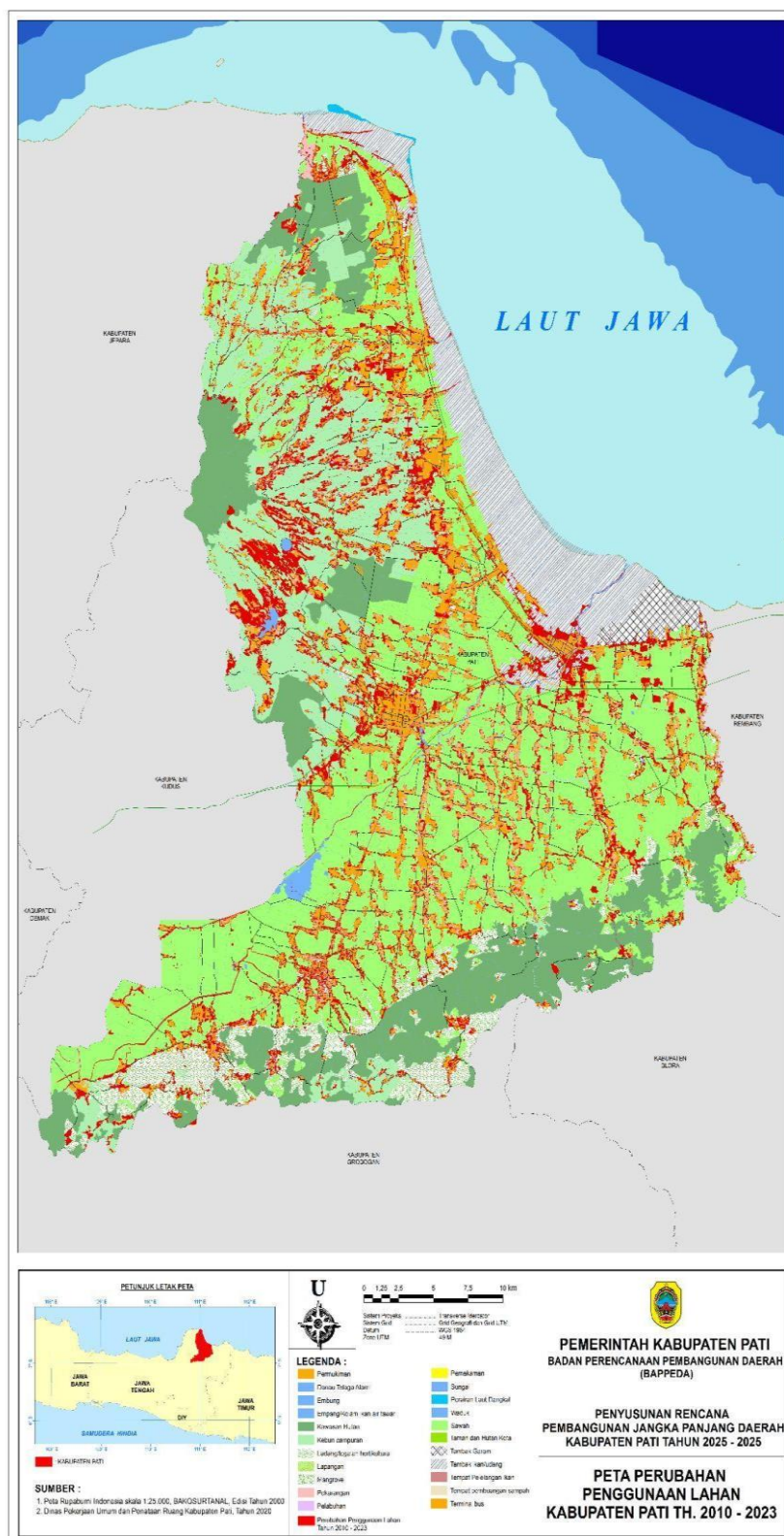
Tabel II.1 Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2010 -2023 (ha)

Penggunaan Lahan	2010	2015	2021	2023
Danau	408,10	172,29	227,38	234,18
Air Laut	3,70	-	-	-
Empang	-	386,29	448,64	481,07
Hutan	2.310,95	22.119,44	22.017,74	22.016,31
Kebun	22.227,29	20.403,86	22.027,02	22.015,81
Perbedaan Data Garis Pantai	-	485,14	11,63	11,63
Perbedaan Batas Terbaru	1.431,28	-	-	-
Penggaraman	253,74	-	-	-
Permukiman	20.808,39	19.319,88	31.236,69	31.406,39
Sawah	69.367,75	65.654,12	59.680,14	59.402,84
Sungai	-	1.430,25	1.434,85	1.436,66
Tambak	10.239,12	13.013,90	13.165,10	13.035,68
Tegal	30.885,12	14.950,22	7.686,19	7.894,81
Kabupaten Pati	157.935,45	157.935,38	157.935,38	157.935,38

Sumber : DPUTR, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pemanfaatan ruang untuk permukiman dan berkurangnya lahan sawah dan tegalan. Namun demikian, persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW

sebesar 99,364% dan persentase alih fungsi lahan atau ketidaksesuaian dengan RTRW sebesar 0,636%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW relatif kecil. Perubahan penggunaan lahan juga dapat dilihat dalam peta berikut.



Gambar II.1 Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2010-2023

a. Kualitas Lingkungan Hidup

Keberlangsungan pembangunan akan terjamin apabila kualitas lingkungan hidup terus dijaga. Beberapa hal telah dilakukan untuk memperbaiki degradasi lingkungan akibat pembangunan sosial dan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dari tahun 2018-2023. Namun demikian nilainya masih di bawah nilai nasional dan berada dalam kondisi sedang. Berikut ditampilkan hasil perhitungan IKLH Kabupaten Pati tahun 2018- 2023.

Tabel II.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tahun	IKLH Nasional	Nilai	IKLH Pati	NILAI	IKA	IKU	IKTL
2018	65,14	baik	51,20	sedang	26,32	95,53	36,6
2019	66,55	baik	54,68	sedang	44,4	78,83	44,26
2020	70,27	baik	53,88	sedang	32,86	76,33	48,44
2021	71,45	baik	52,35	sedang	35,33	76,46	36,99
2022	72,42	baik	53,82	sedang	37,5	78,03	37.07
2023	72,54	baik	60,63	sedang	50	82,9	37,67

Sumber : DLH Kab. Pati, 2023

Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh tingkat pencemaran udara dan air, maupun kualitas lahan. Untuk mengetahui kualitas air di Kabupaten Pati diambil 30 titik sampel dari 5 sungai dengan hasil pada tahun 2023 sebagai berikut: 6 titik memenuhi baku mutu, 18 titik tercemar ringan, dan 6 titik tercemar sedang. Dari data ini diperoleh nilai akhir indeks kualitas air sebesar 50, lebih baik dari nilai tahun 2022 sebesar 37,5, dan berada dalam kategori sedang. Parameter yang paling berpengaruh terhadap kualitas air sungai ini adalah COD dan fecal coliform yang disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga dan kotoran hewan ke badan sungai. Sementara itu peningkatan kualitas air sungai turut dipengaruhi oleh peningkatan pengolahan sampah sebesar 10,19% pada tahun 2022 menjadi 14,21% pada tahun 2023 dari total timbulan sampah. Secara keseluruhan berdasarkan neraca sampah SIPSN, persentase sampah terkelola pada tahun 2023 mencapai 41,51% meningkat dari tahun 2022 sebesar 35,69%. Di lain pihak, tingkat pencemaran udara pada tahun 2023 mengalami penurunan, terlihat dari meningkatnya indeks kualitas udara sebesar 6,2% dari 78,03 pada tahun 2022 menjadi 82,9 pada tahun 2023 dan berada dalam kategori baik. Indikator terakhir yang turut mempengaruhi kualitas lingkungan hidup adalah indeks kualitas lahan. Indeks ini memiliki nilai terkecil sebesar 37,67 dan berada dalam kategori kurang, walaupun terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanaman pohon untuk pelestarian lingkungan belum secara optimal mendukung peningkatan kualitas lahan.

Tabel II.3 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Tertangani (ton/tahun)	Sampah Terkurangi (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola (%)
1	2019	182.981,65	44.318,16	36.815,91	101.847,59	44,34
2	2020	239.060,58	47.023,22	56.681,26	135.356,10	43,38
3	2021	241.664,31	44.369,57	60.077,75	137.217,00	43,22
4	2022	246.223,89	62.787,09	25.090,21	158.346,58	35,69
5	2023	251.092,63	68.322,30	35.906,25	146.864,08	41,51

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Sementara itu berdasarkan hasil ekspose IKLH 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH Kabupaten Pati Tahun 2023 mengalami perubahan menjadi 71,95 dan masuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan karena perubahan metode perhitungan. Adapun komponen indeks penyusun IKLH juga mengalami perubahan sebagai berikut: IKU dari 82,9 menjadi 84,23 berada dalam kategori baik; IKA dari 50,00 menjadi 68,59 berada dalam kategori sedang; dan IKL dari 37,67 menjadi 55,00 berada dalam kategori sedang.

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim merupakan salah satu krisis global yang bisa memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia maupun laju pembangunan. Untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim diupayakan untuk membatasi kenaikan suhu global jangka panjang di angka 1,5 celsius. Tindakan yang dapat memperlambat pemanasan adalah dengan segera mengurangi emisi karbon. Hal ini berimplikasi pada tuntutan untuk beralih ke aktivitas yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor. Untuk itu Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari *bussiness as usual* pada tahun 2030. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pati melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK). Total emisi berdasarkan sektor di Kabupaten Pati ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel II.3 Emisi GRK Kabupaten Pati Tahun 2019-2023 (Gg CO2eq)

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan dan Penggunaan Energi	512,95	424,26	438,01	450,17	459,99
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	51,67	53,09	55,53	55,60	59,19
AFOLU (<i>Agriculture, Forestry, and Other Land Use</i>)	299,11	421,67	391,28	476,91	401,42
Pengelolaan Limbah	99,40	105,50	111,34	115,14	119,55
Total	963,13	1.004,52	996,16	1.097,81	1.040,16

Sumber: Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pati Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2019-2023, emisi tertinggi dihasilkan pada tahun 2022 sebesar 1.097,81 Gg CO2eq, sedangkan di tahun 2021 terjadi penurunan emisi menjadi sebesar 996,16 Gg CO2eq karena terjadi kebijakan perubahan penggunaan BBM dengan tidak menggunakan bahan bakar premium dan beralih ke pertalite dan pertamax. Adapun besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Pati tahun 2023 sebesar 1040,16 Gg CO2eq, mengalami penurunan emisi sebesar 5,54% atau setara dengan 57,65 Gg CO2eq jika dibandingkan tahun 2022.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan emisi yang signifikan di sektor AFOLU. Penurunan emisi disektor AFOLU dipicu karena adanya penurunan emisi dari pengelolaan sawah selain itu terdapat penyerapan emisi dari subsektor kehutanan.

Emis Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pati dihasilkan dari 4 (empat) sektor dengan masing-masing sektor mempunyai proporsi yang berbeda-beda. Sektor Energi memberikan kontribusi sebesar 44% dan merupakan kontributor utama dalam penyumbang emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Pati. Pada tahun 2020 terjadi penurunan emisi karena adanya penurunan penggunaan BBM transportasi sebesar 16,34% atau setara dengan 24.565 kilo liter BBM, karena terjadi penurunan konsumsi bahan bakar akibat adanya Pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun pada tahun 2021 penggunaan BBM mengalami kenaikan yang signifikan hingga tahun 2023. Selain itu dari kegiatan *residential* yang berupa penggunaan LPG, selama tahun 2019-2023 terjadi peningkatan penggunaan LPG sebesar 2.532 ton atau 7%. Selanjutnya sektor IPPU memberikan kontribusi sebesar 6%, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Pati. Selama tahun 2019-2023 terjadi peningkatan jumlah kendaraan 16,33% yang didominasi oleh peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang, sehingga penggunaan pelumasnya juga mengalami peningkatan. Penggunaan pelumas di industri juga berkontribusi dalam penyumbang emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Pati. Selain itu sektor AFOLU berkontribusi sebesar 39% dimana dalam kurun waktu 2019-2023 terjadi peningkatan emisi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah populasi ternak serta adanya peningkatan kegiatan pertanian berupa penggunaan pupuk Urea dan NPK yang masih tinggi karena luasan sawah padi dan hortikultura di Kabupaten Pati juga masih sangat luas. Terakhir sektor Limbah memberikan kontribusi sebesar 11%, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dalam kurun waktu tahun 2019-2023 terjadi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati sebesar 8 %. Meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada peningkatan volume sampah dan limbah cair domestik.

b. Kebencanaan

Kabupaten Pati merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dimana Kabupaten Pati berada pada kategori Indeks risiko tinggi multibahaya bencana. Kabupaten Pati rentan terhadap bahaya banjir (termasuk banjir bandang), gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran dan gelombang ekstrem atau abrasi. Nilai IRBI Kabupaten Pati Tahun 2015-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.4 Indeks Risiko Bencana

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Status
174	174	174	174	174	171,10	171,10	165,53	150,21	Tinggi

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi penurunan nilai IRBI Kabupaten Pati walaupun masih masuk dalam kategori tinggi. Seiring dengan penurunan nilai IRBI, urutan kabupaten dengan risiko bencana tinggi juga ikut turun. Pada tahun 2023 Kabupaten Pati berada pada urutan 140, sedangkan pada tahun

2021 dan 2022 berada pada urutan 94 dan 95 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Sedangkan penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas di Kabupaten Pati dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Sedangkan keadaan bencana termasuk luasan maupun kerugian dapat dilihat dalam gambar berikut



Gambar II.2 Kondisi Kebencanaan

Informasi tentang kebencanaan tersebut mengindikasikan bahwa berdasarkan luas bahaya, jiwa terpapar, kerugian fisik, kerugian ekonomi, dan lingkungan terdampak menunjukkan bahwa bencana alam banjir (termasuk banjir bandang), tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrem merupakan jenis bencana yang paling berdampak. Secara spasial, wilayah Pati bagian selatan merupakan wilayah dengan dampak bencana paling besar.

c. Ketahanan Daerah

Pembahasan tentang ketahanan daerah meliputi ketahanan daerah terhadap risiko bencana, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Sebagaimana urusan energi dan sumber daya mineral saat ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi, rancangan awal ini membahas ketahanan energi hanya secara umum.

1) Ketahanan Daerah (terhadap Bencana)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya

mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit PD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana Perolehan data IKD dilakukan melalui diskusi grup terfokus (FGD) yang terdiri dari berbagai pihak yang dipandu oleh fasilitator, sehingga peserta mampu menjawab dengan obyektif. Hasil IKD diolah menggunakan MS Excel. Secara lebih detail, cara penilaian ketahanan daerah dapat dilihat pada buku Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah (71 Indikator) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengurangan Risiko Bencana – BNPB. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0–1, dengan pembagian Indeks tingkat ketahanan daerah: Indeks $\leq 0,4$ (Rendah); Indeks 0,4–0,8 (Sedang); dan Indeks 0,8–1 (Tinggi).

Di Kabupaten Pati terdapat 267 desa yang termasuk kategori Indeks rendah dan terdapat 139 desa masuk kategori Indeks Sedang serta tidak ada desa yang mempunyai tingkat kapasitas Tinggi di Kabupaten Pati. Setelah dihitung persentase per Indeks kapasitas untuk Indeks rendah mempunyai persentase 66%, Indeks sedang sebesar 34% dan Indeks tinggi sebesar 0%.

2) **Ketahanan Pangan**

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Tabel II.5 Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2014-2023

No	Indikator	Realisasi Capaian									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Pangan	NA	NA	NA	NA	NA	86,05	88,25	88,38	88,01	89,27
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	NA	NA	NA	NA	NA	11,54	12,96	11,20	,83	7,78

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2024

Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir (2019-2023) berada di kisaran 86-89, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah

sebesar 84,80 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Pati dengan kategori sangat tahan (angka IKP > 75,68). Daya dukung pangan Kabupaten Pati kedepan akan menghadapi tantangan yang cukup besar khususnya dalam hal isu perubahan iklim global dan alih fungsi lahan.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami penurunan, hanya di periode tahun 2020 terjadi kenaikan di angka 12,96 % akibat menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli karena kurangnya pendapatan dan keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan yang disebabkan oleh pengaruh pandemi Covid-19. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 PoU berangsur turun seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19 dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan akses untuk pemenuhan kebutuhan mulai terbuka didukung dengan jumlah ketersediaan cadangan pangan dan pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat untuk memperhatikan asupan gizi. Hingga ditahun 2023 angka PoU Kabupaten Pati turun diangka 7,78 %. Hal ini berarti bahwa penduduk di Kabupaten Pati yang mengkonsumsi makanan, tetapi kebutuhan energinya kurang, tidak sampai 7,78% dari total penduduk. PoU di Kabupaten Pati berada di urutan ke-7 diantara 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Wilayah dengan PoU terendah (urutan teratas) yakni Kota Salatiga (5,83%) dan tertinggi (urutan terakhir) yakni Kabupaten Purworejo (14,71%).

Sama halnya dengan nilai PoU, nilai IKP Kabupaten Pati tahun 2022-2023 juga menunjukkan peningkatan dari skor 88,01 menjadi 89,27. Kabupaten Pati menempati urutan ke 6 (enam) se Indonesia pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena perekonomian semakin membaik setelah pandemi. Meredanya pandemi berpengaruh terhadap kembali normalnya proses produksi dan konsumsi masyarakat sehingga aspek ketahanan pangan meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan semakin membaik. Membaiknya ketersediaan pangan meliputi membaiknya produksi pangan, amannya stok pangan dan kembali berjalannya kegiatan perdagangan lintas daerah dan lintas negara. Aspek keterjangkauan meliputi kegiatan distribusi yang normal, stabilitasi pasokan dan harga yang stabil, sistem logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar. Aspek pemanfaatan meliputi perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, dan keamanan dan mutu pangan juga semakin baik. Namun jika dilihat dari analisa, daya dukung pangan Kabupaten Pati kedepan cenderung mengalami penurunan sehingga memerlukan strategi yang tepat untuk mempertahankannya.

3) **Ketahanan Energi**

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pemanfaatan energi di Kabupaten Pati masih sebagian besar memanfaatkan energi fosil. Namun demikian pemanfaatan energi baru dan terbarukan sudah dimulai meskipun masih dalam skala yang kecil. Sebagai contoh, pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukoharjo Kecamatan Margorejo, yang dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga

Sampah (PLTSa) yang sudah mulai dimanfaatkan meskipun masih di sekitar lingkungan TPA.

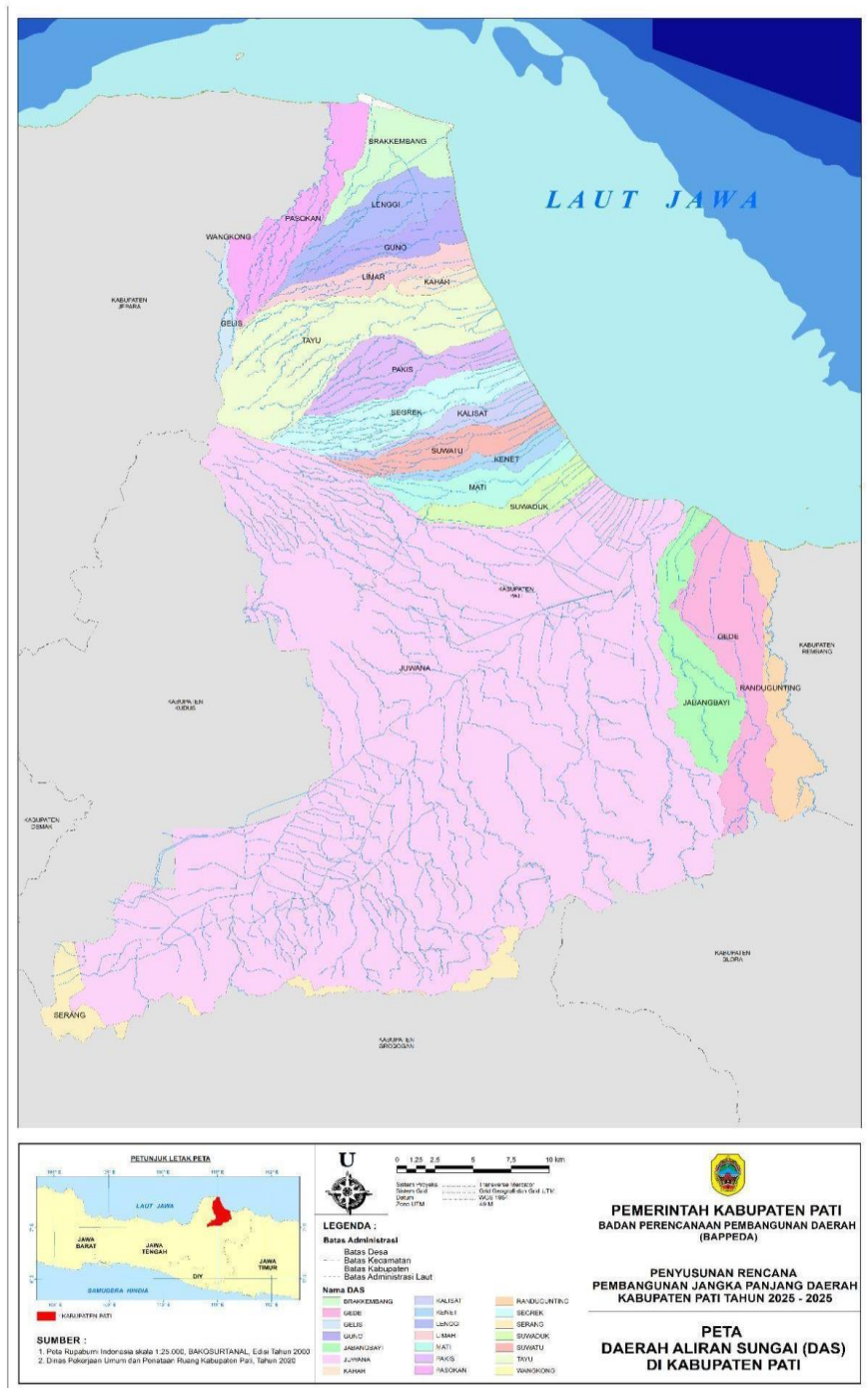
Selain itu penggunaan solar cell juga sudah banyak digunakan utamanya untuk lampu penerangan jalan dan taman kota serta kantor-kantor pemerintah, BUMN, maupun swasta. Embrio pemanfaatan energi bersih juga sudah mulai tumbuh dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan baik mobil, sepeda motor, maupun sepeda listrik, didukung tempat-tempat penjualan kendaraan listrik, serta penyediaan subsidi dari pemerintah. Kondisi tersebut juga semakin baik dengan sudah tersedianya stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk eks-Karesidenan Pati yang berada di Kabupaten Kudus.

4) **Ketahanan Air**

Kondisi hidrologi Kabupaten Pati sangat dipengaruhi oleh air permukaan. Air permukaan di Kabupaten Pati sangat bergantung pada curah hujan yang ditampung dalam sungai dan embung-embung buatan. Jika dilihat dari penilaian daya dukung air, sebagian besar Kabupaten Pati statusnya sudah terlampaui sehingga memerlukan upaya penanganan kedepan.

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun, pada musim kemarau banyak dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Ada beberapa sungai yang memiliki sumber mata air, kan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari aliran drainase kota saja. Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati.

Sungai-sungai yang ada di suatu daerah berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai dan mengeluarkannya melalui outlet tunggal. Sistem sungai yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi hal yang harus diperhitungkan mengingat terdapat keterkaitan dalam aspek hidrologis khususnya curah hujan. Berikut pembagian DAS berdasarkan kecamatan di wilayah Kabupaten Pati.

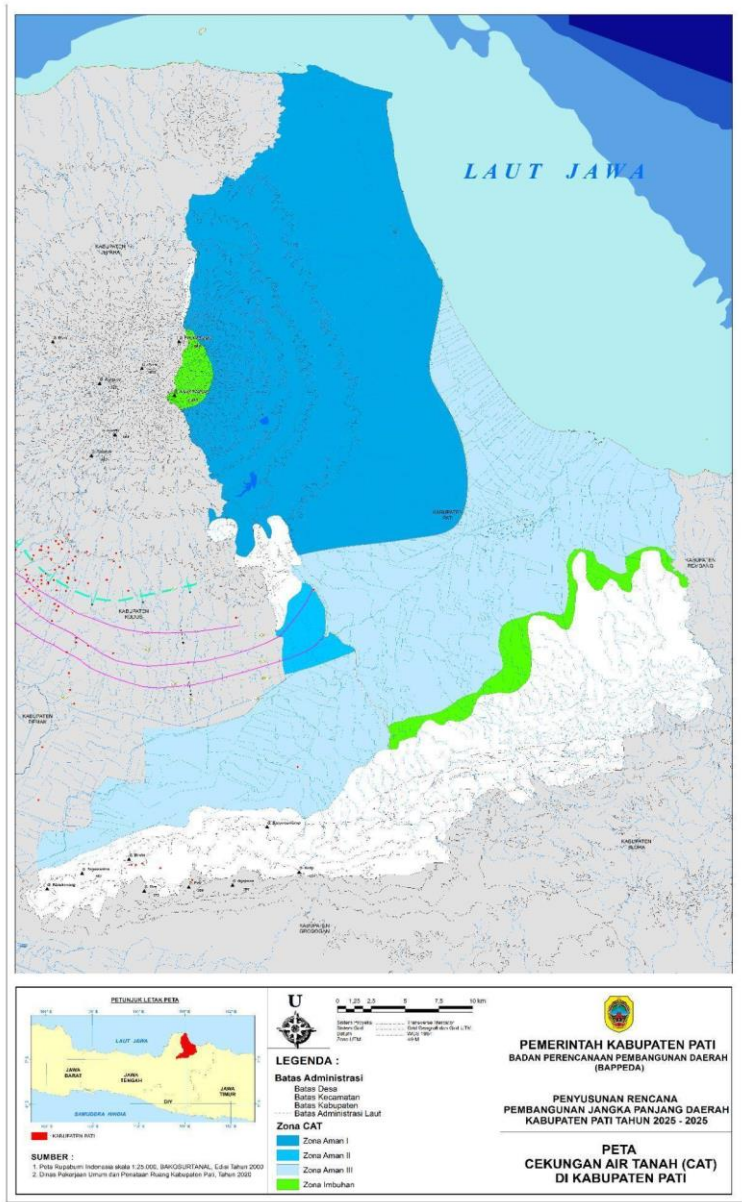


Gambar II.3 Daerah Aliran Sungai

Potensi air tanah di Kabupaten Pati meliputi akuifer dangkal, akuifer produktivitas tinggi, akuifer produktivitas sedang, akuifer produktivitas kecil, akuifer produktivitas setempat dan daerah air tanah langka. Berdasarkan kondisi hidrogeologi tersebut, Kabupaten Pati mempunyai dua Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Kudus dan CAT Pati-Rembang. Cekungan air tanah tersebut mendukung cadangan air baku di Kabupaten Pati namun penggunaan air tanah harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kelestarian akuifer air tanah.

Tabel II.6 Cekungan Air Tanah

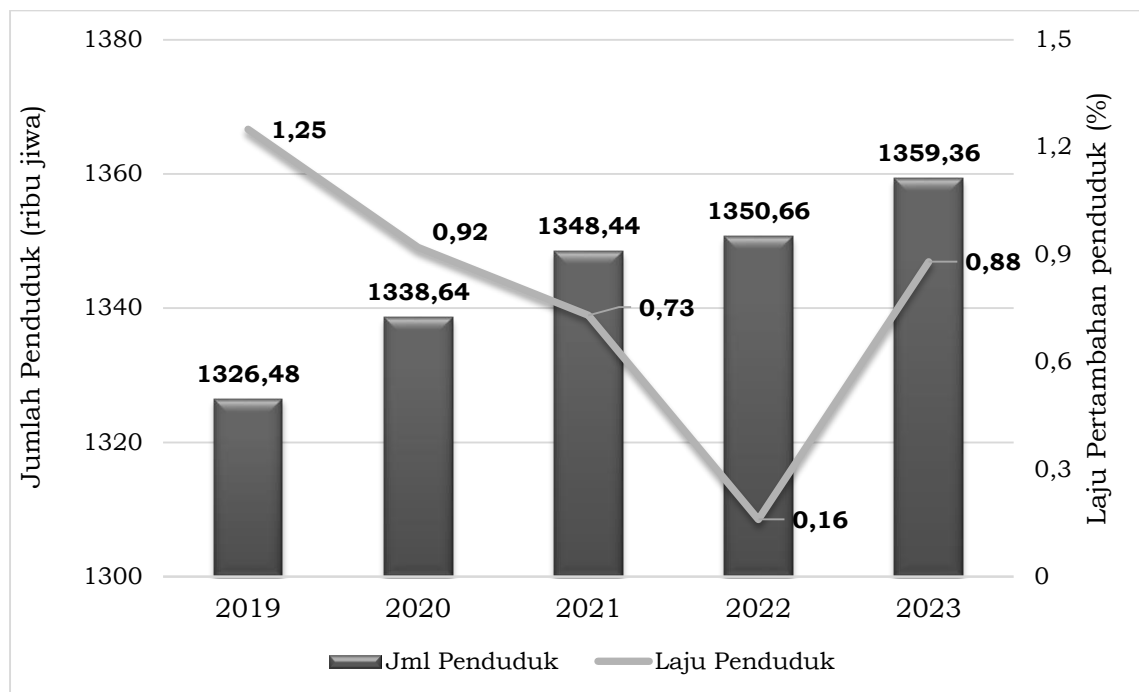
No	Nama CAT	Zona CAT	Luas (Ha)
1	CAT Kudus	Zona Imbuhan	0,61
		Zona Aman I	709,88
		Zona Aman II	2.073,37
		Zona Aman III	17.151,21
2	CAT Pati Rembang	Zona Imbuhan	4.706,60
		Zona Aman I	55.324,70
		Zona Aman II	35.337,77
Total CAT di Kabupaten Pati			115.304,15



Gambar II.4 Cekungan Air Tanah

2.1.2. Demografi

Selama periode 2019 hingga 2023, penduduk Kabupaten Pati mengalami pertumbuhan namun dengan tingkat pertumbuhan yang menunjukkan fluktuasi. Gambaran jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati selama periode 2019 hingga 2023 ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: Disdukcapil diolah (2019-2024)

Gambar II.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertambahan Penduduk Tahun 2019-2023

Pada periode 2019 hingga 2022, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati mengalami perlambatan dari 1,25% menjadi 0,16%, dimana angka tersebut menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati berada pada kategori rendah. Namun demikian, di tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,88%, lebih tinggi jika dibandingkan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 dan 2022. Di tahun tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pati hampir mencapai 1,4 juta jiwa. Berdasarkan wilayahnya, laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Winong dengan laju sebesar 2,35%, sedangkan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah Kecamatan Margoyoso sebesar 0,38%.

Peningkatan jumlah penduduk selanjutnya berpengaruh terhadap peningkatan kepadatan penduduk. Selama kurun waktu 2019-2023, kepadatan penduduk Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh karenanya, kepadatan penduduk tertinggi selama kurun lima tahun terakhir terjadi di tahun 2023 sebesar 904,02 yang artinya setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 904 jiwa yang berarti kepadatan penduduk Kabupaten Pati berada pada kategori sedang. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pati (2.557 jiwa/km²), Kecamatan Juwana (1.739 jiwa/km²), dan Kecamatan Wedariaksa (1.602 jiwa/km²). Sementara itu, kepadatan penduduk yang rendah berada di Kecamatan Pucakwangi (405 jiwa/km²), Kecamatan Sukolilo (577 jiwa/km²), dan Kecamatan Tlogowungu (589 jiwa/km²). Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya merupakan wilayah pusat pemerintahan maupun wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan kepadatan penduduk rendah merupakan wilayah yang berada di dataran tinggi dan atau berbatasan dengan kabupaten lain.

Penduduk Kabupaten Pati tersebar di 21 kecamatan dengan intensitas yang berbeda. Persebaran penduduk di setiap kecamatan tahun 2019-2023 ditampilkan pada Tabel II.7.

Tabel II.7 Persebaran Penduduk per-Kecamatan
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sukolilo	89.104	91.905	92.834	93.467	91.602
2	Kayen	77.468	79.566	80.475	81.004	80.855
3	Tambakromo	55.681	56.519	57.066	57.302	57.834
4	Winong	64.136	64.616	65.107	65.353	68.227
5	Pucakwangi	47.584	48.389	48.828	49.030	49.844
6	Jaken	46.883	46.503	46.792	46.891	47.203
7	Batangan	45.252	45.129	45.344	45.447	45.586
8	Juwana	96.477	96.542	96.860	96.862	97.280
9	Jakenan	48.532	48.294	48.673	48.845	49.716
10	Pati	111.611	110.837	111.200	110.621	109.504
11	Gabus	62.860	63.249	63.704	63.911	65.392
12	Margorejo	62.622	62.951	63.371	63.561	66.463
13	Gembong	47.079	47.799	48.209	48.539	48.780
14	Tlogowungu	53.671	54.920	55.439	55.711	55.655
15	Wedarijaksa	63.888	64.412	64.764	64.757	65.452
16	Trangkil	63.468	63.832	64.236	64.027	64.199
17	Margoyoso	73.901	74.647	75.251	75.269	75.129
18	Gunungwungkal	37.915	38.272	38.659	38.699	38.610
19	Cluwak	47.430	47.921	48.282	48.269	48.660
20	Tayu	70.068	70.516	71.144	71.064	71.404
21	Dukuhseti	60.851	61.817	62.204	62.034	61.969
	Kab. Pati	1.326.481	1.338.636	1.348.442	1.350.663	1.359.364

Sumber: RKPD Kab Pati (2024) dan BPS Kab. Pati (2023)

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pati. Di tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Pati mencakup lebih dari 8% dari total penduduk Kabupaten Pati di tahun tersebut. Selain Kecamatan Pati, jumlah penduduk yang tinggi juga ditemukan di Kecamatan Juwana. Kondisi tersebut disebabkan oleh kedua kecamatan tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan ketersediaan pelayanan kebutuhan dasar yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lain.

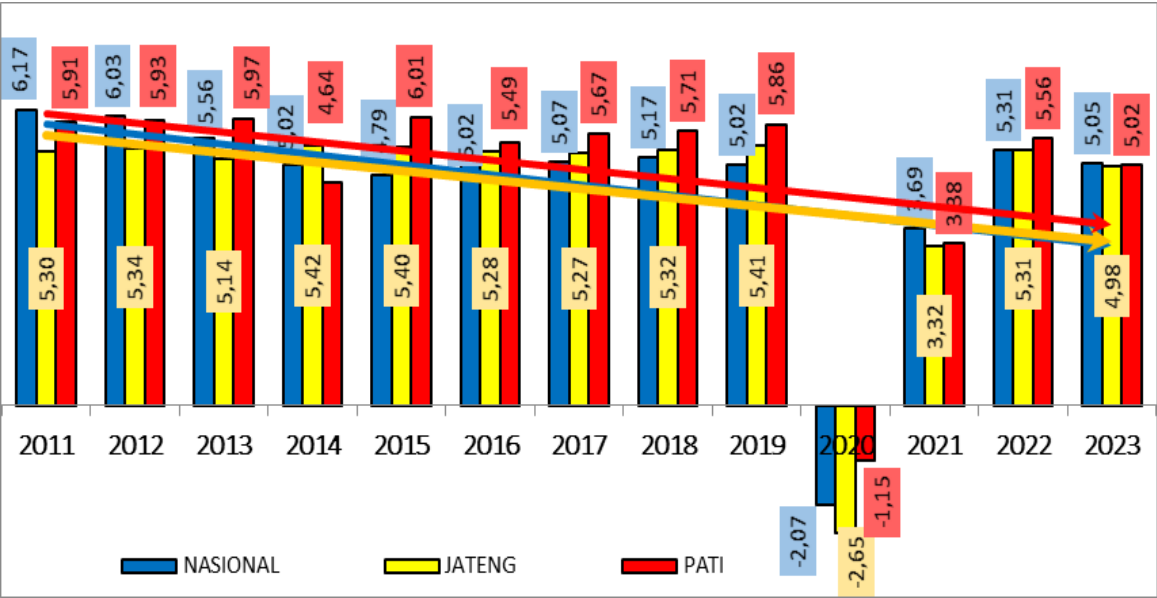
Berdasarkan jenis kelamin, selama lima tahun terakhir, penduduk perempuan di Kabupaten Pati lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki sehingga rasio penduduk perempuan berdasarkan gender lebih dari satu. Di tahun 2022, pertumbuhan penduduk perempuan (0,39%) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk laki-laki yang justru mengalami penurunan (-0,04%). Kondisi ini menyebabkan kesenjangan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin semakin besar. Rasio penduduk berdasarkan gender dengan nilai lebih dari 1 (satu) ditemukan di sebagian besar kecamatan, dimana kesenjangan terbesar berada di Kecamatan Jakenan (1,044) dan Kecamatan Jaken (1,040).

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir (2011-2023), perekonomian Kabupaten Pati tumbuh cukup fluktuatif dan ada kecenderungan penurunan yang antara lain disebabkan karena faktor alam seperti bencana dan perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian baik di tingkat regional maupun nasional. Tahun 2014 dan 2020 merupakan tahun dimana Kabupaten Pati mendapatkan “musibah” yaitu bencana alam (banjir besar) dan wabah Covid-19. Bencana banjir besar Tahun 2014 berdampak pada produksi pertanian (dalam arti luas) yang mengalami pertumbuhan minus (kontraksi) dan industri pengolahan yang tumbuh melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Tahun 2020 merupakan bencana global yang berdampak pada pelemahan ekonomi (bahkan berkontraksi) baik secara nasional maupun regional (provinsi dan kabupaten), termasuk Kabupaten Pati, dan bahkan pengaruh dampak Covid19 masih terasa hingga di Tahun 2021, perekonomian cenderung mulai pulih (positif) namun dengan pertumbuhan yang relatif lambat. Sebagai gambaran untuk perbandingan, berikut grafik pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2011-2023.



Sumber : BPS Kabupaten Pati 2011-2023 (data diolah)

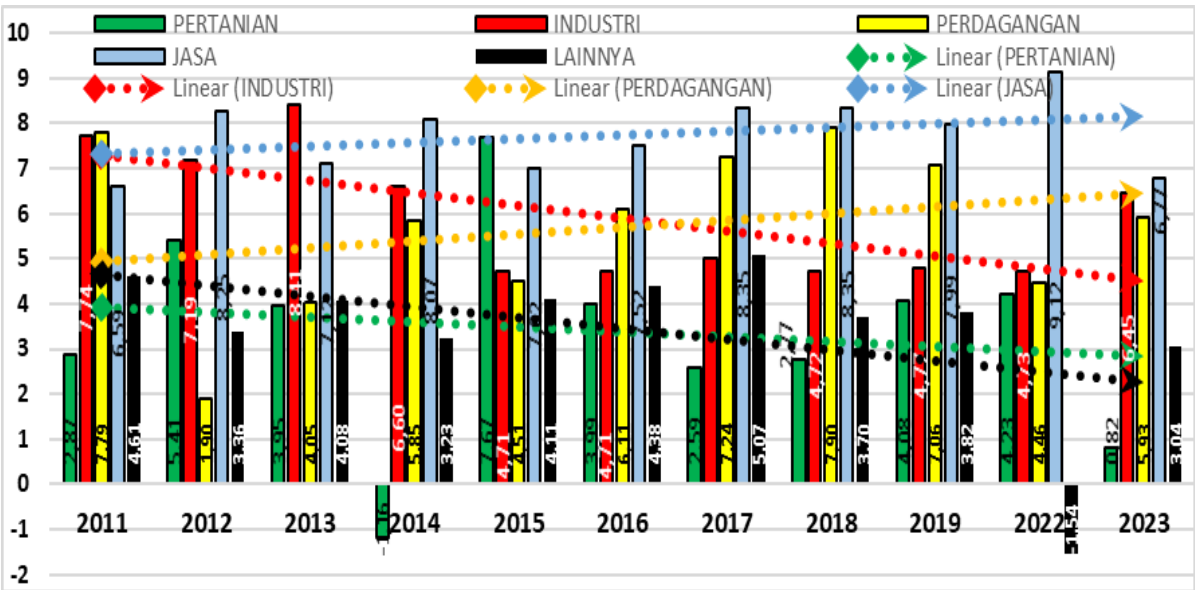
Gambar II.6 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2011-2023

Informasi di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati cenderung selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, bahkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dimana terjadi kontraksi ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati berada di antara Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan pada Tahun 2022 posisi Kabupaten Pati pertumbuhannya kembali menjadi yang tertinggi.

Gambar II.6 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati Tahun 2023 terpaut 3 poin di bawah pertumbuhan Nasional dan selisih 4 poin di atas Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian 2023 tampak melemah dibandingkan tahun sebelumnya, yang secara rata-rata di Daerah maupun Nasional dapat tumbuh di atas 5,3%. Efek ekonomi global secara empirik

berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi dalam negeri. Perlambatan ekonomi berimplikasi pada daya serap tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pendapatan dan distribusinya. Grafik di atas juga memberikan gambaran bahwa terjadi tren penurunan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun terakhir. Hal ini patut dijadikan catatan penting yang harus dicarikan solusi untuk periode perencanaan jangka panjang berikutnya. Sinyalemen adanya produktivitas yang rendah bisa jadi menjadi penyebab utama terjadinya downtrend tersebut, selain faktor bencana atau faktor penyebab yang lain.

Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa Kabupaten Pati memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor atau lapangan usaha Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan. Sedangkan 14 (empat belas) sektor yang lain dimasukkan dalam kelompok Sektor Jasa dan Lainnya. Berikut gambaran tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati menurut 5 (lima) lapangan usaha/ sektor utama.



Sumber: BPS Kabupaten Pati 2011-2023 (data diolah);
Ket : Tahun 2020-2021 tidak dimasukkan dalam analisa grafik

Gambar II.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2011-2023

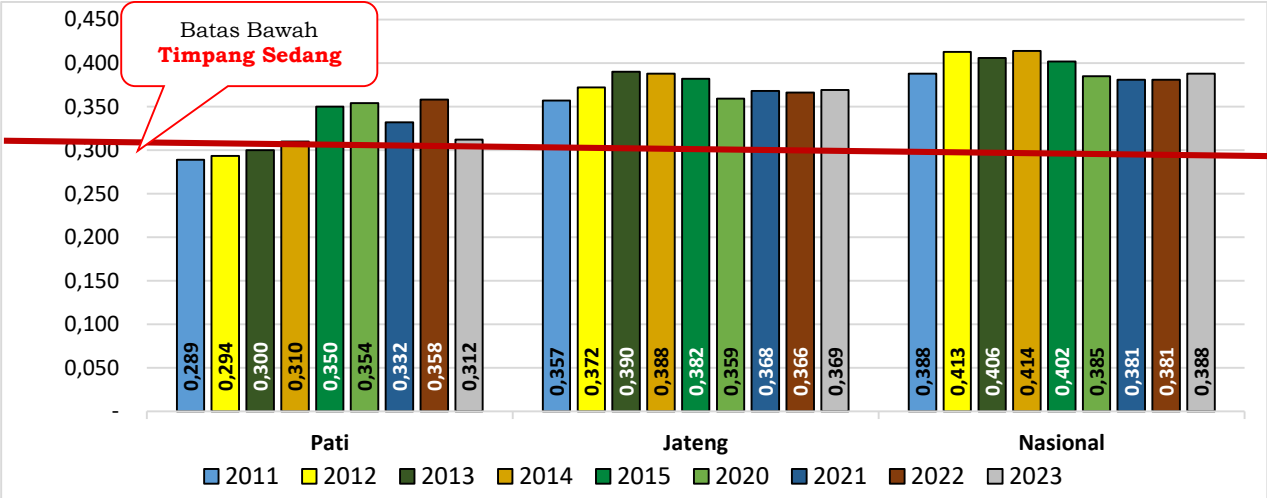
Apabila ditinjau dari pertumbuhan ekonomi secara sektoral, pertanian dan industri pengolahan mengalami tren penurunan (turun landai dan agak curam), demikian juga sektor lainnya (pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta administrasi pemerintahan) mengalami penurunan (bahkan sangat curam). Sementara sektor perdagangan dan jasa secara simultan mengalami kecenderungan terus meningkat. Indikasi penurunan pertanian dan industri pengloahan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius, mengingat 2 (dua) lapangan usaha ini menjadi sektor unggulan diantara 3 (tiga) sektor paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Pati, serta memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan lapangan kerja yaitu sebesar kurang lebih 50% atau sekitar 342.673 orang dari total penduduk bekerja (BPS Pati, 2023). Produktivitas di dua sektor dimaksud harus terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Kesenjangan

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran yang ditandai dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena terjadi pertumbuhan ekonomi. Namun, seringkali pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak disertai dengan pemerataan kesejahteraan atau justru menciptakan kesenjangan/ketimpangan antar penduduk/kelompok masyarakat, yaitu kesenjangan antara kelompok penduduk kaya dan kelompok miskin yang semakin besar.Salah satu instrumen untuk mengukur kesenjangan antar kelompok penduduk yaitu dengan gini coefficient atau gini ratio (indeks gini).

Indeks Gini (IG) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang menggambarkan besaran ketimpangan distribusi pendapatan yang dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Mengacu pada pengklasifikasian/ pengkategorian ketimpangan pendapatan menurut HT.Oshima, seorang ahli ekonomi dan kependudukan Jepang, kategori ketimpangan rendah jika $IG < 0,30$; ketimpangan sedang jika $IG 0,30-0,40$; dan ketimpangan tinggi jika $IG > 0,40$.

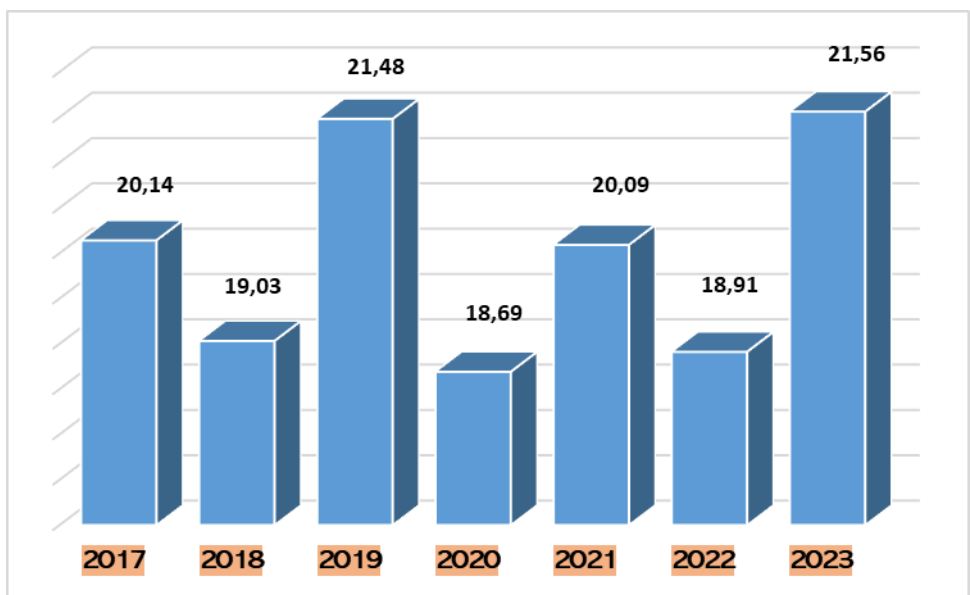
Ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun terakhir (2011-2023) baik pada lingkup Nasional maupun lingkup Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat, hal ini juga dialami oleh Kabupaten Pati, yang bahkan konsisten mengalami kenaikan ketimpangan.



Sumber: BPS Kabupaten Pati 2011-2023 (data diolah)

Gambar II.8 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2001-2023

Rata-rata ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pati relatif lebih rendah dibandingkan ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Berdasarkan klasifikasinya, ketimpangan pendapatan Kabupaten Pati beranjak dari timpang rendah ke timpang sedang, yaitu dari IG sebesar 0,289 (timpang rendah) di Tahun 2011, naik menjadi 0,358 (timpang sedang) di Tahun 2022 dan kemudian ada penurunan ketimpangan kembali di Tahun 2023 meski masih dalam kategori timpang sedang yaitu menjadi 0,312. Ketimpangan yang diukur menggunakan kriteria Bank Dunia juga menunjukkan tren yang semakin menurun.



Sumber : BPS Kabupaten Pati 2017-2023

Gambar II.9 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kab.Pati 2017-2023

Menurut kriteria Bank Dunia, Kabupaten Pati dari Tahun 2017-2023 masuk ke dalam kriteria ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah karena 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari pendapatan masyarakat daerah, dan ada kecenderungan memiliki ketimpangan yang semakin rendah.

Pemerintah Kabupaten Pati masih memiliki tantangan besar untuk lebih mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah di masa-masa mendatang, agar distribusi pendapatan terus meningkat menyentuh hingga wilayah pedesaan dan wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Pati harus lebih fokus pada upaya peningkatan produktivitas daerah, diantaranya dengan menarik investasi yang lebih besar dan lebih luas di sektor riil yang bersifat *labour intensive* agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta upaya penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan keahlian (skill) kewirausahaan.

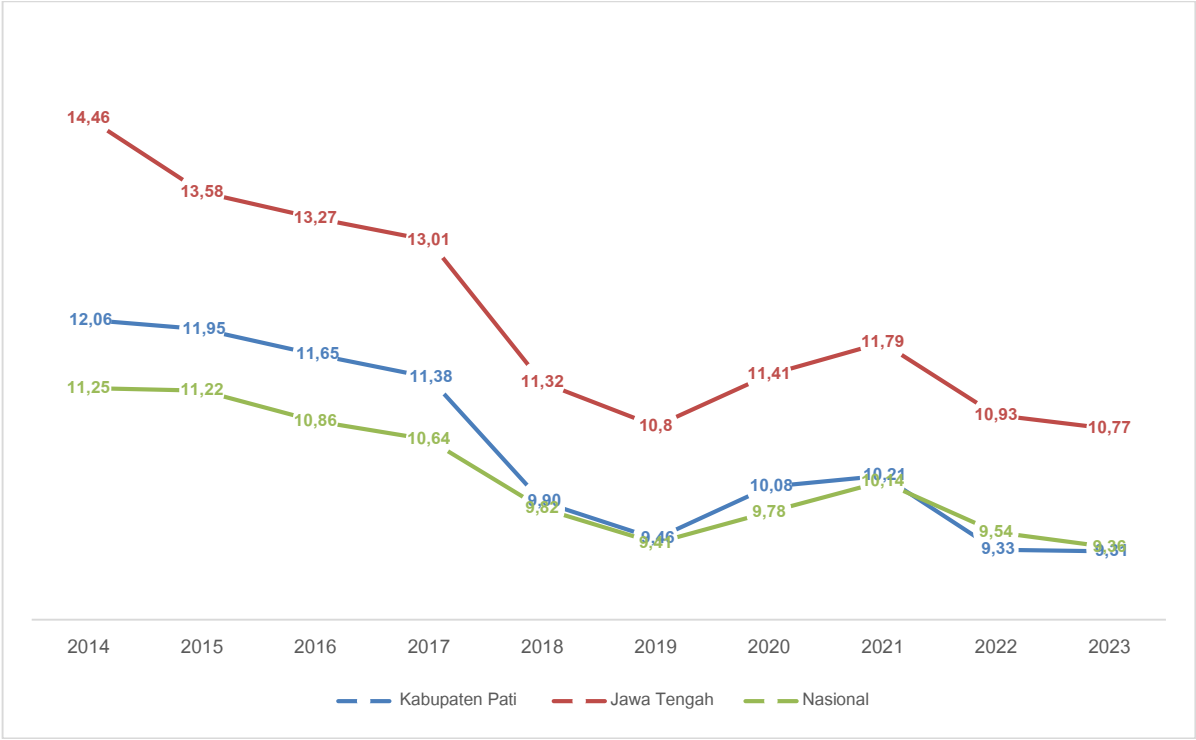
c. Kemiskinan

Selama periode 2013 hingga 2023, garis kemiskinan di Kabupaten Pati terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Pati sebesar Rp532.545,00/kapita/bulan, meningkat hingga 69,27% dari garis kemiskinan tahun 2013. Bahkan garis kemiskinan Kabupaten Pati di tahun tersebut jauh melampaui garis kemiskinan Jawa Tengah sebesar Rp477.580,00/kapita/bulan. Hal tersebut mengindikasikan rata-rata pengeluaran minimum penduduk Kabupaten Pati melampaui rata-rata pengeluaran minimum penduduk Jawa Tengah.

Walaupun garis kemiskinan mengalami peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati selama kurun waktu tersebut mengalami penurunan. Tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati adalah 118,02 ribu jiwa. Jumlah tersebut turun sekitar 31,54% dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati di tahun 2013. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati sempat mengalami peningkatan, yaitu di tahun 2019, 2020, dan 2023. Di tahun 2019 dan 2020, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19. Sementara, peningkatan penduduk miskin diakibatkan oleh tingginya angka

inflasi di tahun 2023 sehingga menurunkan daya beli masyarakat, termasuk keluarga miskin.

Peningkatan jumlah penduduk miskin sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan. Gambaran angka kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 2013 hingga 2023 ditampilkan pada grafik berikut

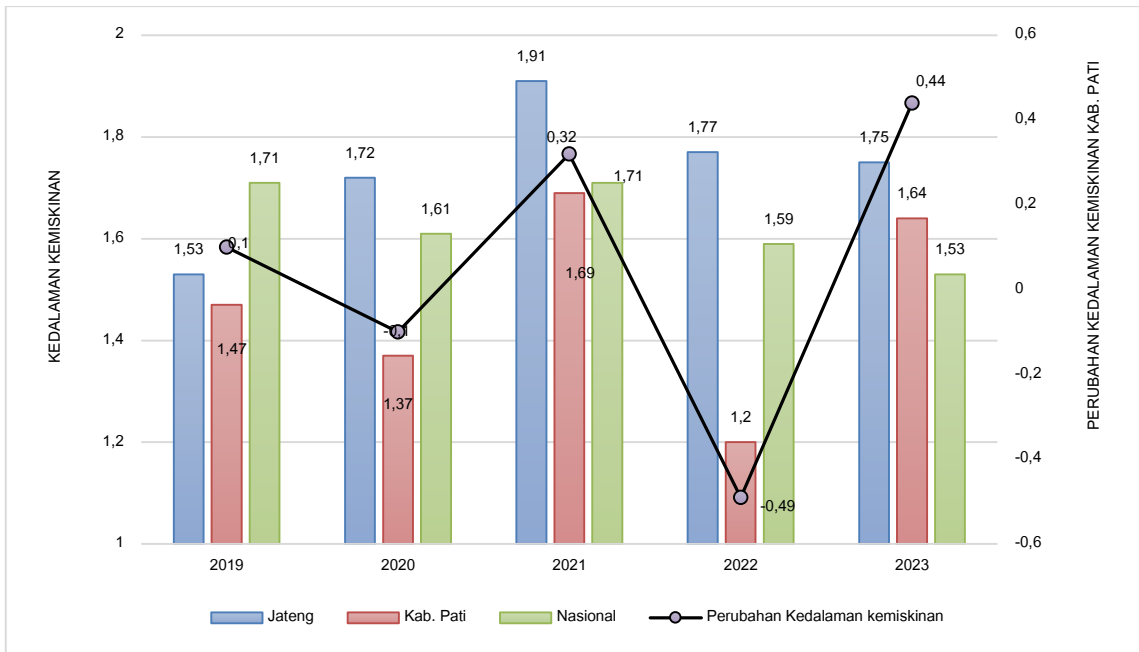


Gambar II.10 Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2014-2023

Dari tahun 2014 hingga tahun 2023, Kabupaten Pati menunjukkan tren penurunan kemiskinan, walaupun terdapat beberapa periode angka kemiskinan Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Selama periode 10 tahun terakhir, kemiskinan Kabupaten Pati mengalami penurunan sebesar 2,75%. Kemiskinan Kabupaten Pati sempat mengalami peningkatan yaitu di tahun 2020 dan tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2022, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, angka kemiskinan mengalami penurunan kembali hingga di tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Pati menjadi 9,31 dan menjadi yang terendah selama 10 tahun terakhir.

Selama 10 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Pati lebih relatif lebih baik dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah, namun lebih tinggi jika dibandingkan angka kemiskinan Nasional. Sementara itu, jika dibandingkan kabupaten sekitar, angka kemiskinan Kabupaten relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Rembang, Blora, dan Grobogan, namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jepara dan Kudus.

Selain berdasarkan rasio, kondisi kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat dari kesenjangannya melalui parameter kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir berfluktuasi sebagaimana indeks kedalaman kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama kurun waktu 2019-2023 ditampilkan pada grafik berikut.

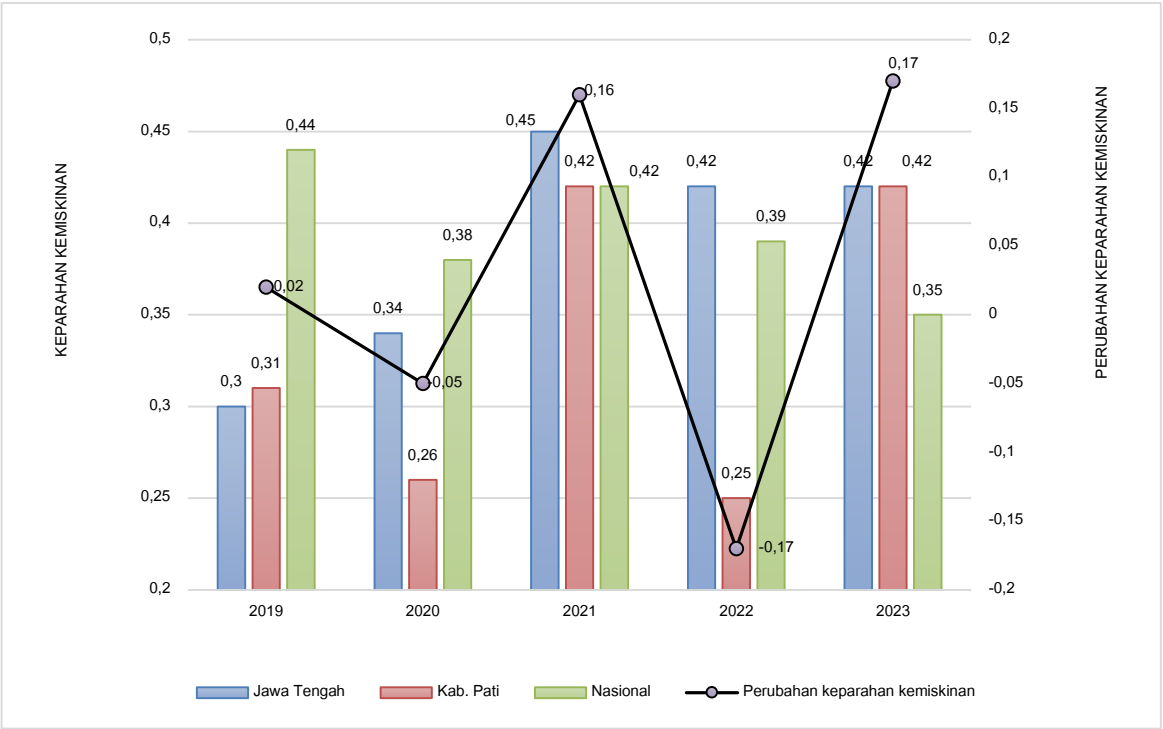


Gambar II.11 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik berikut, dapat dinyatakan sejak tahun 2019 hingga 2022 kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati relatif lebih baik dibandingkan kedalaman kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Namun di tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati (1,64) lebih tinggi dari indeks kedalaman kemiskinan Nasional (1,53), namun masih lebih baik dibandingkan kedalaman kemiskinan Jawa Tengah (1,75). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa di tahun tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Pati memiliki selisih yang cukup jauh dengan garis kemiskinan sehingga meningkatkan kesenjangan kemiskinan.

Selain itu, selama kurun waktu lima tahun terakhir, kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati mengalami perubahan yang fluktuatif. Tahun 2020 dan 2022, kabupaten Pati mampu menurunkan kedalaman kemiskinan. Bahkan di tahun 2022, penurunan kedalaman kemiskinan tersebut merupakan yang tertinggi selama kurun lima tahun terakhir. Oleh karena itu, capaian kedalaman kemiskisn di tahun tersebut menjadi yang terbaik. Sementara itu, tahun 2021 dan tahun 2023, kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati justru mengalami peningkatan. Di tahun 2021, peningkatan kedalaman kemiskinan terjaid sebagai imbas dari penurunan kondisi ekonomi masyarakat karena pandemi Covid-19 gelombang kedua. Di tahun 2023, kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati kembali mengalami peningkatan yang cukup drastis, bahkan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan kedalaman kemiskinan di tahun tersebut utamanya disebabkan oleh tingkat inflasi yang cukup tinggi sehingga melemahkan daya beli masyarakat, terutama penduduk miskin.

Selain kedalaman kemiskinan, kesenjangan kemiksian juga terukur melalui keparahan kemiskinan. Sebagaimana kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan Kabupaten Pati juga berflutuasi sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.

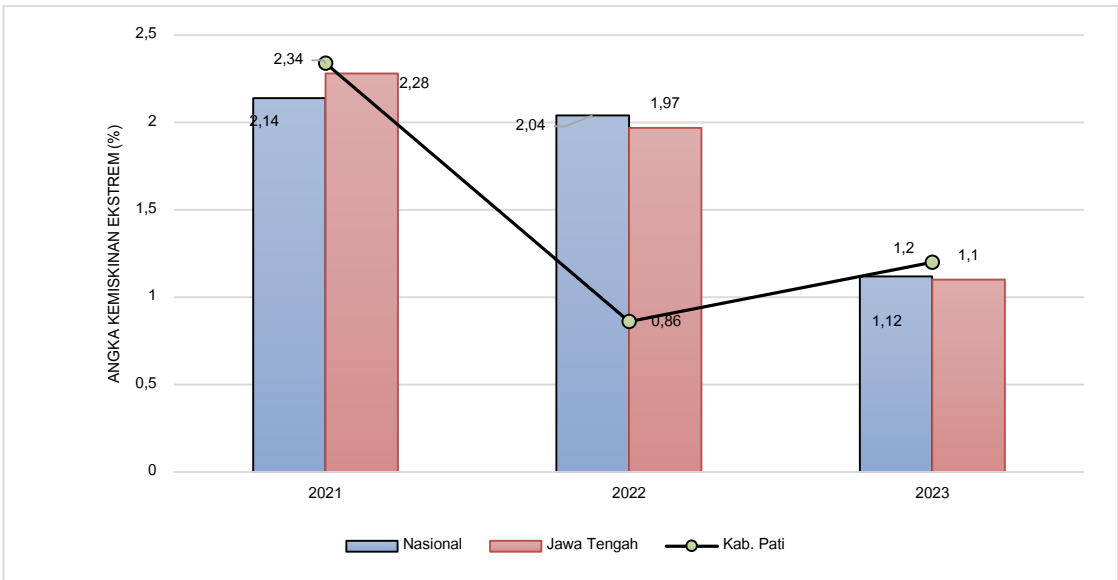


Sumber: BPS Tahun 2024

Gambar II.12. Keparahen Kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, keparahan kemiskinan Kabupaten Pati relatif lebih baik dibandingkan keparahan kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Capaian keparahan kemiskinan terbaik Kabupaten Pati terbaik terjadi di tahun 2022. Di tahun tersebut, keparahan kemiskinan Kabupaten Pati adalah 0,25. Sementara itu, keparahan kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2021 dan 2023 dengan nilai indeks masing-masing 0,42. Di tahun 2021, tingginya keparahan kemiskinan disebabkan oleh pandemi Covid-19 gelombang kedua menyebabkana dampak ekonomi lebih besar dibandingkan pandemi gelombang pertama. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatang yang cukup signifikan, sementara pengeluaran penduduk miskin jauh di bawah garis kemiskinan. Peningkatan keparahan kemiskinan kembali terjadi di tahun 2023. Di tahun tersebut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Selain itu, tingkat inflasi yang cukup tinggi juga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama penduduk miskin.

Proporsi dan kesenjangan kemiskinan selanjutnya berpengaruh terhadap angka kemiskinan ekstrem, semakin tinggi proporsi dan kesenjangan kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan ekstrem. Gambaran kemiskinan ekstrem Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama kurun waktu tiga tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut.



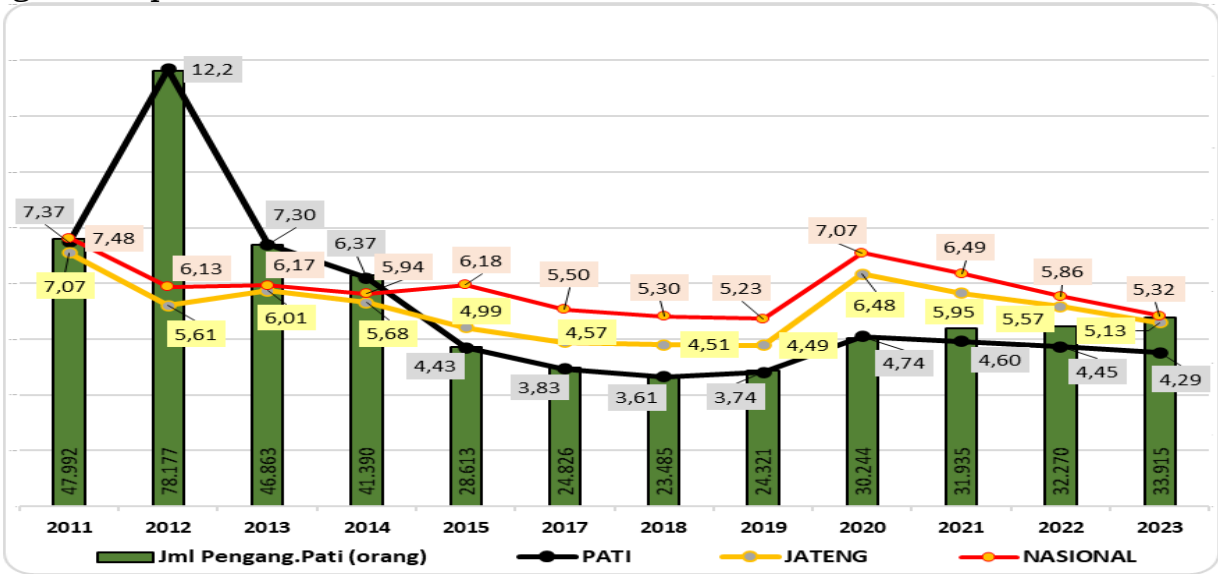
Sumber: BPS Tahun 2024

Gambar II.13. Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2023

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, baik Jawa Tengah dan Nasional berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Sementara itu, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2022, namun meningkat kembali di tahun 2023. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Pati di tahun 2023 adalah 1,2% lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem Jawa Tengah (1,1%) dan Nasional (1,12%).

d. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pati dalam satu dekade terakhir ada kecenderungan menurun dan sejak Tahun 2015 TPT Kabupaten Pati menjadi terendah angkanya dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.



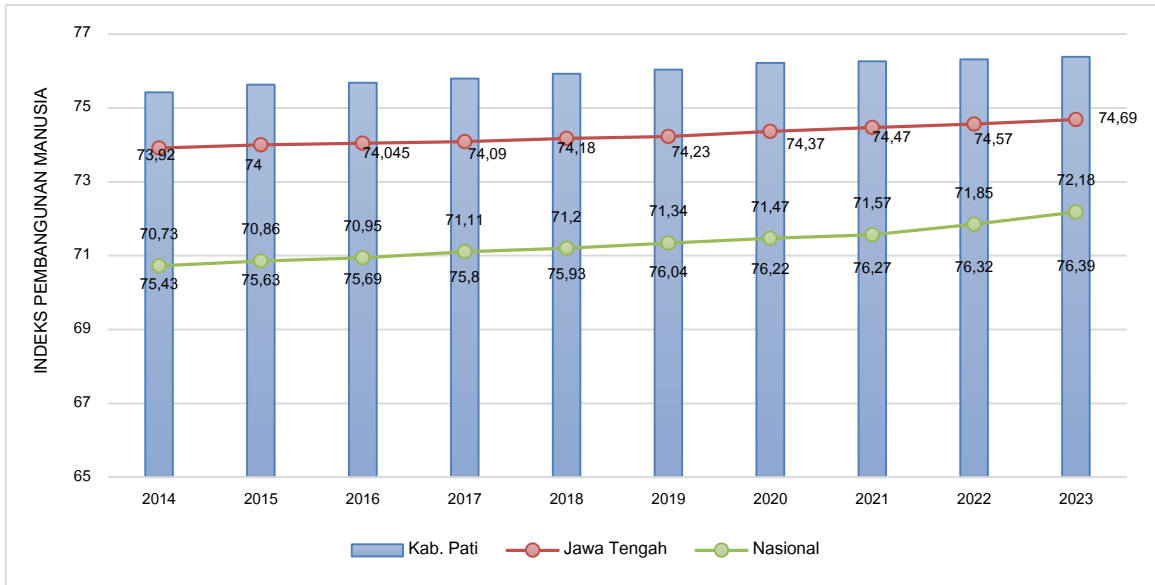
Sumber : BPS Kabupaten Pati 2011-2023

Gambar II.14 TPT Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2023

Mengacu pada grafik di atas, secara persentase TPT, Kabupaten Pati ada kecenderungan terus menurun, namun dari jumlah penganggurannya justru malah semakin meningkat khususnya sejak Tahun 2019. Fenomena ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk mendalami karakteristik penganggurannya untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang lebih efektif ke depan di bidang ketenagakerjaan. Sebagai ilustrasi singkat bahwa pengangguran di Kabupaten Pati masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat sebesar 44,32%; disusul SD 29,32%; SMP 19,02% dan Perguruan Tinggi 7,34%. Yang lebih ironi, lulusan SMK sebagai lembaga pendidikan formal dengan kurikulum siap kerja bagi lulusannya, menyumbang pengangguran sebesar 17,44% dari total jumlah penganggur.

e. Pembangunan Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati terus mengalami perbaikan selama kurun waktu 2014-2023, bahkan di tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama 10 tahun terakhir ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2023

Gambar II.15 Perbandingan IPM Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2014-2023

Sejak tahun 2014 hingga 2020, capaian IPM Kabupaten Pati selalu lebih rendah dibandingkan IPM Jawa Tengah dan Nasional. Namun demikian, sejak tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Pati lebih baik dibandingkan IPM Jawa Tengah dan Nasional. Selanjutnya, kinerja peningkatan kualitas hidup manusia juga dapat dilihat dari peruhan nilai IPM. Selama lima tahun terakhir, peningkatan IPM Kabupaten Pati masih lebih baik dibandingkan peningkatan IPM Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan IPM tertinggi Kabupaten Pati terjadi di tahun 2022, yaitu 0,86 poin, sementara peningkatan IPM terendah terjadi di tahun 2020 (0,42 poin) seiring dengan pandemi Covid-19. Tahun 2023, kinerja peningkatan kualitas SDM Kabupaten Pati mengalami penurunan. IPM Kabupaten Pati meningkat 0,45 poin, lebih rendah dari peningkatan IPM Jawa Tengah (1,1 poin), dan Nasional (0,64 poin).

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Pati lebih baik dari sebagian besar kabupaten sekitar. Capaian IPM Kabupaten Pati hanya lebih rendah dibandingkan IPM Kabupaten Kudus dan Jepara. Selain itu, perubahan IPM Kabupaten Pati juga relatif lebih baik dibandingkan lima kabupaten sekitar, kecuali di tahun 2023, dimana peningkatan IPM Kabupaten Pati adalah yang terendah dari seluruh kabupaten sekitar.

Pengukuran kualitas SDM pada aspek kesehatan dilakukan dengan melihat Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk. Selama 10 tahun terakhir (2014-2023), UHH penduduk Kabupaten Pati terus menunjukkan peningkatan sekitar 0,96 tahun. Apabila dibandingkan dengan UHH Jawa Tengah dan Nasional selama kurun waktu tersebut, UHH Kabupaten Pati selalu lebih tinggi sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2023

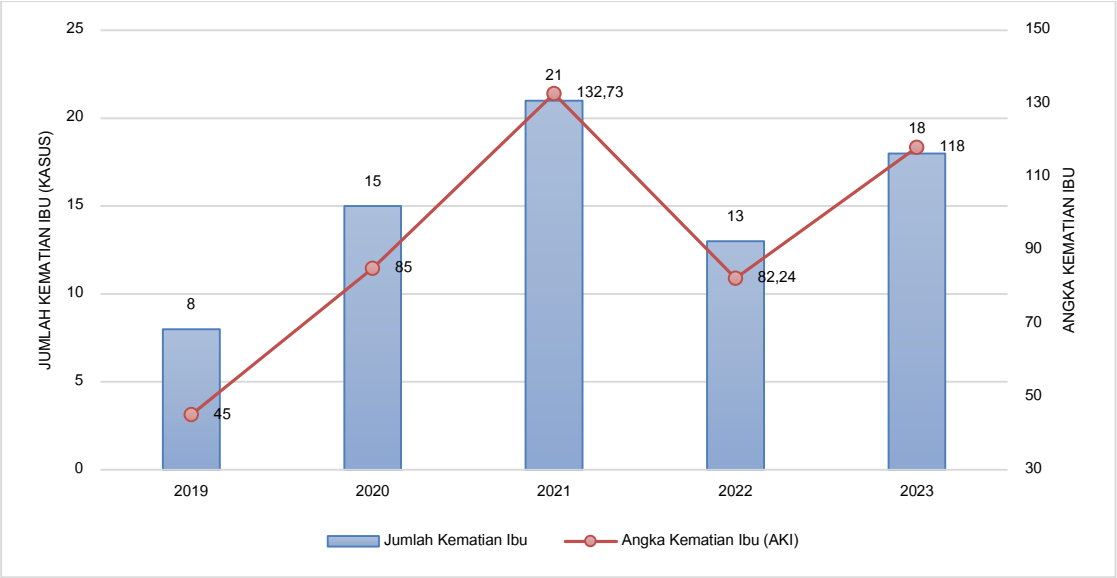
Gambar II.16 Perbandingan UHH Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2014-2023

Selama 10 tahun terakhir, terlihat bahwa UHH Kabupaten Pati jauh melampaui UHH Jawa Tengah dan Nasional. Di Tahun 2023, UHH Kabupaten Pati adalah 76,39 tahun, yang artinya, penduduk yang lahir di tahun tersebut, diharapkan akan memiliki usia mencapai lebih dari 76 tahun. Selain itu, apabila dibandingkan dengan lima kabupaten sekitar, UHH Kabupaten Pati merupakan yang tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir.

UHH yang tinggi menunjukkan kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan yang baik. Namun demikian, peningkatan UHH juga menjadi tantangan bagi pembangunan manusia, karena semakin tinggi UHH dapat berpengaruh terhadap peningkatan angka ketergantungan serta potensi peningkatan pembiayaan di bidang kesehatan terkait kerentanan kelompok usia terhadap beberapa masalah kesehatan.

Walaupun memiliki AHH yang tinggi, Kabupaten Pati masih menghadapi beberapa tantangan terkait peningkatan angka kematian dan prevalensi beberapa jenis penyakit. Selama kurun waktu lima tahun terakhir,

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pati berfluktuasi sebagaimana jumlah kematian ibu.

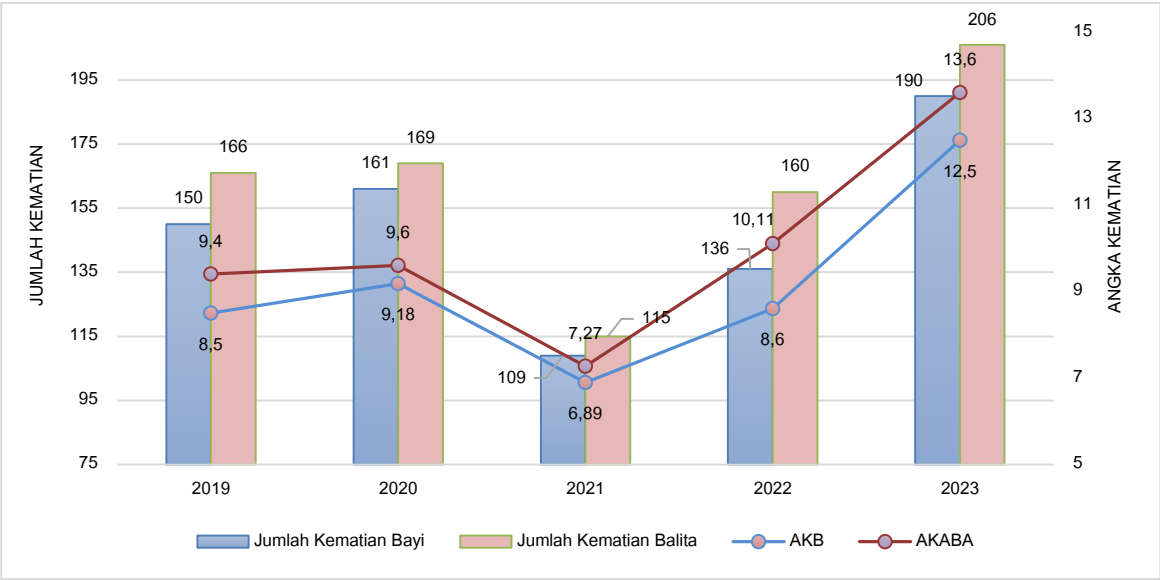


Sumber: Dinas Kesehatan (2020-2024)

Gambar II.17. Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Pati Tahun 2019-2023

Tahun 2019 hingga 2021, AKI di Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan. Di tahun 2021, AKI Kabupaten Pati mencapai angka tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan di tahun tersebut terjadi bersamaan dengan pandemi Covid-19 Gelombang kedua. Pada periode tersebut, tingkat penularan Covid-19 sangat tinggi sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Selain itu, fasilitas kesehatan juga tidak memiliki kesiapan untuk menyediakan layanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang aman dan memadai. Sebagai akibatnya, sebagian besar kehamilan yang berisiko tinggi tidak terpantau dengan baik sehingga meningkatkan jumlah kasus kematian ibu. Di tahun 2022, AKI Kabupaten Pati berhasil diturunkan, namun kembali meningkat di tahun 2023. Kematian ibu di tahun 2023 berjumlah 18 kasus dengan AKI mencapai 118. Peningkatan kematian ibu di tahun tersebut sebagian besar disebabkan oleh kehamilan yang berisiko tinggi.

Selain kematian ibu, indikator lain untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah kematian bayi dan balita. Selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kejadian dan angka kematian, baik untuk bayi dan balita mengalami fluktuasi sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan (2020-2024)

Gambar II.18. Jumlah dan Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2019-2023

Jumlah dan angka kematian bayi dan balita terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi di tahun 2021. Di tahun tersebut, jumlah kasus kematian bayi adalah 109 kasus dengan AKB sebesar 6,89. Sementara itu, kematian balita di tahun tersebut berjumlah 115 kasus dengan angka kematian sebesar 7,27. Setelahnya, jumlah maupun angka kematian bayi dan balita terus mengalami peningkatan, hingga di tahun 2023 mencapai angka tertinggi. Di tahun 2023, kematian bayi mencapai 190 kejadian dengan angka kematian sebesar 12,5, sedangkan kematian balita berjumlah 206 kejadian dengan angka kematian balita mencapai 13,6. Meningkatnya kematian, baik bayi dan balita dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kematian bayi di Kabupaten Pati didominasi oleh kematian neontal yang disebabkan oleh kehamilan risiko tinggi dan komplikasi neontal. Selain itu, faktor penyebab lain kematian bayi dan balita adalah beberapa penyakit tidak menular, seperti pnemonia dan diare.

Selain kematian, terdapat beberapa masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan pembangunan manusia selama kurun waktu lima tahun terakhir. Gambaran terkait hal tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II.8 Masalah Kesehatan Masyarakat Kabupaten

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi stunting	-	4,2	5,68	5,76	5,43	5,8
Cakupan penemuan (CDR) TB	%	62,9	46,8	26,2	72,8	94,4
Case Notification Rate (CNR) TB	Per 100.000 penduduk	141	98	49	159	185,01
Angka keberhasilan pengobatan TB		82,5	88	82	35,4	84
Kematian selama pengobatan TB	orang	114	76	113	90	126
Jumlah kasus HIV	orang	125	103	155	163	299
Jumlah kasus baru AIDS	orang	80	96	105	128	237
Jumlah kematian akibat AIDS	orang	27	66	68	69	26
Prevalensi hipertensi		60,86	64	n.a	31,7	63,6
Prevalensi diabetes melitus		18,11	24	31,276	3,2	18,1
Prevalensi penyakit jantung		5,74	8	n.1	0.07	0,9
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional				74,2	82,6	87,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pati, 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, prevalensi stunting Kabupaten Pati berfluktuasi. Prevalensi stunting terendah terjadi di tahun 2019, namun terus mengalami peningkatan di tahun selanjutnya. Tahun 2023, prevalensi stunting mencapai 5,8 sebagai yang tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Balita stunting di tahun tersebut berjumlah 4.185 jiwa, dimana jumlah tertinggi berada di Kecamatan Margorejo (464 balita/14,1%), Kecamatan Dukuhseti (355 balita/12,7%), dan Kecamatan Jakenan (298 balita/11,5%). Berdasarkan penelitian, faktor penyebab stunting di Kabupaten Pati antara lain asupan makanan dan pola asuh yang kurang memadai, tidak mendapatkan asi eksklusif, tidak mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), sanitasi lingkungan yang kurang, BBLR, dan ibu saat hamil mengalami anemia (Aeda, 2020).

Beberapa jenis penyakit infeksi juga menjadi ancaman bagi peningkatan kesehatan penduduk Kabupaten Pati, seperti Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS. Jumlah penduduk yang menderita dan mendapatkan pengobatan TB (CNR) mengalami fluktuasi selama 2019-2023, namun menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Di tahun 2023, CNR TB Kabupaten Pati adalah 185,01, lebih tinggi dari CNR TB di tahun 2022 (159). Tingginya prevalensi TB di Kabupaten Pati mengindikasikan masih tingginya penularan TB. Tingginya penularan TB tidak akan menyebabkan kefatalan jika mendapatkan pengobatan. Persentase kasus TB yang terobati dalam insiden TB (CDR) juga berfluktuasi selama kurun waktu 2019-2023. Namun demikian, selama tiga tahun terakhir CDR TB Kabupaten Pati mengalami peningkatan dan mencapai persentase tertinggi di tahun 2023 sebesar 94,4%. Peningkatan tersebut juga diiringi dengan peningkatan keberhasilan pengobatan TB. Success rate pengobatan TB selama kurun lima tahun terakhir di Kabupaten Pati sudah cukup tinggi, yaitu lebih dari (80%), namun relatif lebih rendah dibandingkan success rate TB Jawa Tengah. Namun demikian, tingkat kefatalan akibat TB di Kabupaten Pati masih relatif tinggi. Selama lima tahun terakhir, jumlah kematian akibat TB berfluktuasi, dan mencapai jumlah tertinggi di tahun 2023, mencapai 126 kasus kematian. Hal tersebut menunjukkan perlu peningkatan upaya penanganan TB yang lebih efektif.

Selain TB, HIV/AIDS juga menjadi penyakit infeksi yang paling mengancam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sejak tahun 2019, jumlah kasus baru AIDS dan jumlah penderita HIV terus mengalami peningkatan. Jumlah kasus HIV di tahun 2023 mencapai 299 jiwa, dimana jumlah tersebut tidak termasuk kasus HIV yang terjadi periode sebelumnya. Berdasarkan wilayahnya, Kecamatan Juwana menduduki peringkat pertama penderita HIV terbanyak dengan 40 kasus. Selanjutnya, jumlah kasus baru AIDS juga terus meningkat. Tahun 2023, jumlah kasus baru AIDS berjumlah 237 kasus. Bahkan, jumlah aktual kasus AIDS bisa jadi lebih tinggi karena sebagian besar kasus AIDS baru terdeteksi setelah muncul gejala selama beberapa tahun. Dari seluruh kasus baru HIV, hampir seluruhnya mendapatkan pengobatan ARV, sehingga dapat menekan kematian akibat HIV/AIDS. Di tahun 2023, kematian akibat HIV/AIDS berjumlah 26 kasus, menurun signifikan (-62,3%) dari jumlah kematian akibat HIV/AIDS di tahun sebelumnya.

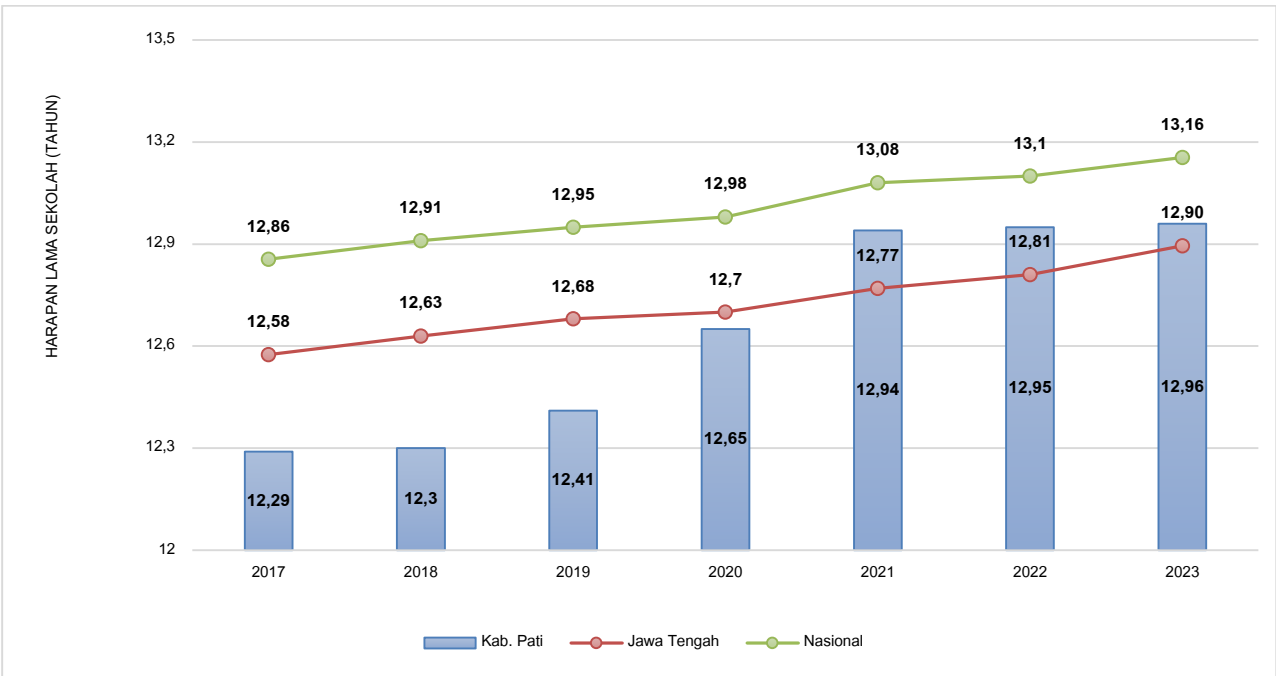
Selama lima tahun terakhir, terjadi perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit degeneratif, seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Di tahun 2023, prevalensi hipertensi mencapai 63,6%, meningkat signifikan dari prevalensi hipertensi di tahun sebelumnya sebesar 31,7%. Prevalensi Diabetes Melitus (DM) di tahun 2023

juga meningkat menjadi 18,12% dari prevelensi DM di tahun 2022 sebesar 3,2%. Kondisi yang sama juga terjadi untuk penyakit jantung. Di tahun 2023, prevelensi penyakit jantung adalah 0,9 meningkat signifikan dari prevalensi jantung di tahun sebelumnya sebesar 0,07%.

Peningkatan prevalensi beberapa jenis penyakit tersebut berpotensi meningkatkan pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Oleh karenanya kepemilikan jaminan kesehatan nasional sangat lah penting. Selama tiga tahun terakhir, kepemilikan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Pati terus meningkat. Di tahun 2023, persentase kepemilikan JKN sudah mencapai 1.186.916 jiwa atau mencakup 87,31% dari total penduduk, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 82,6%. Dari jumlah tersebut, kepesertaan JKN didominasi oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai sekitar 58,76% dari total kepemilikan JKN.

Harapan Lama Sekolah

Selama kurun waktu 7 tahun terakhir (2017-2023), Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pati menunjukkan tren meningkat. Kondisi yang sama juga terjadi pada HLS Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

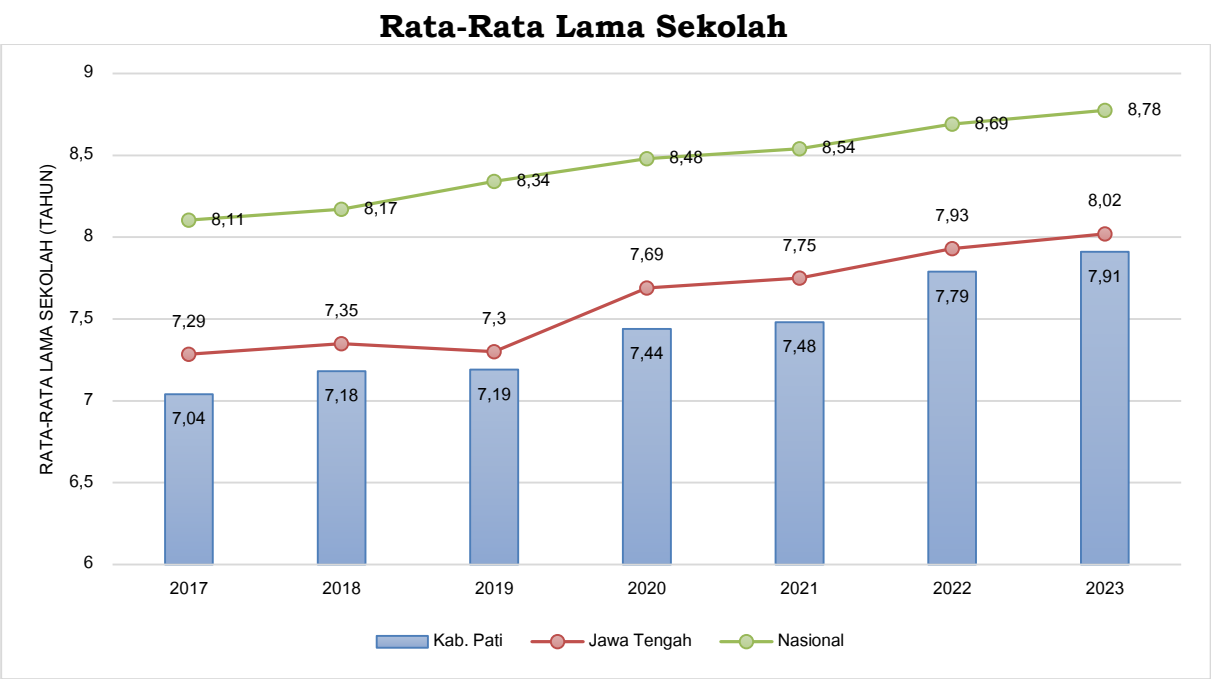


Gambar II.19 Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan grafik tersebut, HLS Kabupaten Pati di tahun 2023 adalah 12,96 tahun yang artinya penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan hingga masa mendatang akan menempuh pendidikan selama lebih dari 12 tahun (hingga tamat SMA/ sederajat). Selanjutnya, Kabupaten Pati juga menunjukkan kinerja peningkatan HLS yang lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, capaian RLS Kabupaten Pati masih lebih rendah dibandingkan HLS Jawa Tengah dan Nasional. Sejak tahun 2021, HLS Kabupaten Pati mampu melampaui HLS Jawa Tengah, walaupun masih lebih rendah dari HLS Nasional. Hal tersebut menjadi indikasi semakin baiknya penyediaan akses pendidikan sehingga dapat meningkatkan partisipasi pendidikan.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan lima kabupaten sekitar lainnya di tahun 2023, HLS Kabupaten Pati sedikit di bawah sebagian besar kabupaten sekitar. HLS Kabupaten Pati masih lebih rendah dari Kabupaten

Kudus, Grobogan, dan Jepara. HLS Kabupaten Pati hanya lebih tinggi dari HLS Kabupaten Blora dan Rembang.



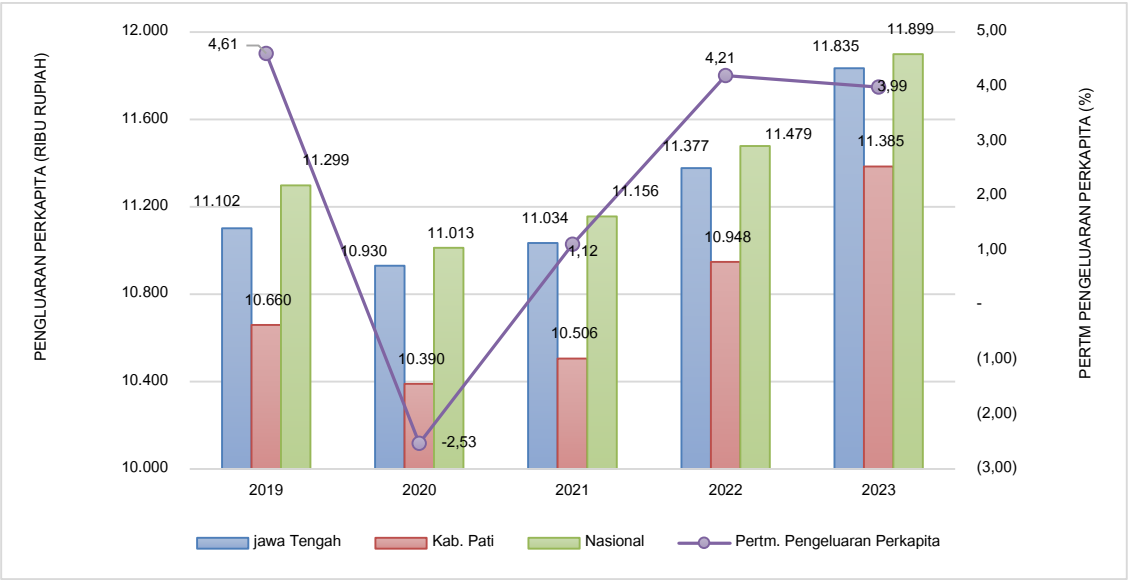
Sumber: BPS, 2023

Gambar II. 20 Perbandingan RLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2017-2023

Tahun 2023, RLS Kabupaten Pati adalah 7,91 tahun yang artinya, di tahun tersebut, penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun rata-rata menempuh pendidikan selama 8 tahun atau belum lulus SMP. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pati. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah didominasi oleh penduduk usia tua, sehingga peningkatan kepesertaan kesetaraan pendidikan menjadi tidak optimal dan menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan RLS.

Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pati menunjukkan kinerja peningkatan RLS Kabupaten Pati lebih unggul dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan RLS tertinggi untuk Kabupaten Pati terjadi di tahun 2022 sebesar 0,31 tahun. Sementara itu, di tahun 2023, RLS Kabupaten Pati meningkat sebesar 0,12 tahun dan peningkatan tersebut lebih baik jika dibandingkan peningkatan RLS Jawa Tengah (0,09 tahun) dan Nasional (0,085 tahun).

Pada dimensi ekonomi, kualitas sumber daya manusia dinyatakan melalui pengeluaran perkapita penduduk. Selama kurun lima tahun terakhir, pengeluaran perkapita Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Gambaran pengeluaran perkapita Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: BPS (2020-2024)

Gambar II.21. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Selama lima tahun terakhir, Pengeluaran perkapita Kabupaten Pati terendah berada di tahun 2020. Di tahun tersebut, pengeluaran perkapita Kabupaten Pati juga mengalami penurunan cukup drastis mencapai -2,53%. Jawa Tengah dan Nasional juga mengalami penurunan pengeluaran perkapita, walaupun dengan tingkat yang lebih rendah. Penurunan tersebut terjadi pada masa pandemi Covid-19 gelombang pertama. Pada periode tersebut, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi. Selain itu, penduduk juga masih belum memiliki adaptasi ekonomi yang cukup baik. Sebagai akibatnya, pendapatan masyarakat menurun dan menyebabkan penurunan pengeluaran perkapita.

Periode selanjutnya, pengeluaran perkapita Kabupaten Pati kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Di tahun 2023, pengeluaran perkapita Kabupaten Pati menjadi 11,385 juta, meningkat 3,99% dari pengeluaran perkapita di tahun 2022.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya
a. Pembangunan Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan institusi penting untuk pembangunan manusia dan pembentukan karakter. Salah indikator untuk mengukur kualitas keluarga adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga memiliki 17 variabel yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu Dimensi Ketenteraman, Dimensi Kemandirian, dan Dimensi Kebahagiaan. Berdasarkan Renstra BKKBN, capaian iBangga Kabupaten Pati di tahun 2022 adalah 58,72% lebih baik dari target iBangga berdasarkan sebesar 57,0%. Lebih lanjut, capaian iBangga tersebut juga lebih baik dibandingkan iBangga Nasional sebesar 57,0%. Sementara itu di tahun 2024, target iBangga Kabupaten Pati adalah 63,78 -64,67%. Sementara itu, iBangga Jawa Tengah ditargetkan mencapai 63,84% dan iBangga Nasional menjadi 61%.

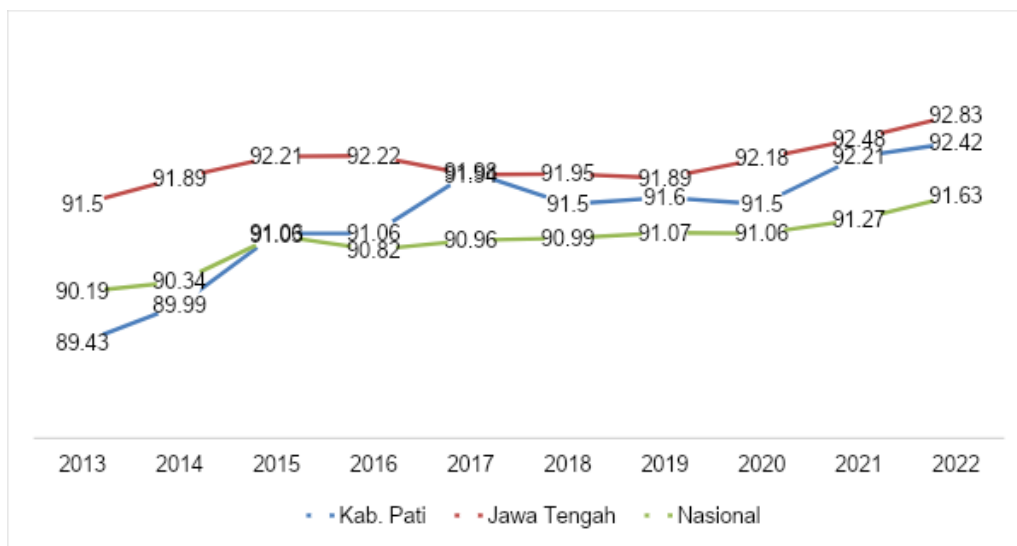
b. Perlindungan Anak

Menjamin kualitas hidup anak menjadi suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu arah kebijakan yang perlu dilakukan. Paparan media sosial yang tinggi pada anak membuat tantangan dalam peningkatan kualitas hidup anak menjadi lebih berat. Kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, tidak hanya dari segi jumlah melainkan jenis kekerasan yang dilakukan. Data kejadian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2017 – 2023. Jumlah kekerasan anak tertinggi terjadi di tahun 2017 (39 kasus). Di tahun 2022, jumlah kekerasan terhadap anak mencapai puncak tertinggi mencapai 106 kasus. Sementara di tahun 2023, kejadian kekerasan anak berjumlah 64 kasus menurun dari jumlah kasus kekerasan di periode sebelumnya. Jumlah kekerasan di tahun tersebut kemungkinan lebih besar karena kekerasan anak merupakan fenomena gunung es, dimana kasus yang dilaporkan hanya mencakup sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya. Data terkait jenis kekerasan tidak tersedia. Namun dengan mengacu kepada data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA), kekerasan seksual memiliki jumlah korban kekerasan terbanyak, dilanjutkan dengan kekerasan psikis dan fisik.

Peningkatan kasus kekerasan anak menjadi salah satu isu penting karena dapat memengaruhi kualitas dan keberlanjutan generasi yang akan datang. Oleh karenanya, perlindungan anak seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan jangka panjang, sementara kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pati terkait hal tersebut belum optimal. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Pati terakhir, yaitu di tahun 2022 yaitu 68,63. Selanjutnya, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 64,14, sedangkan Indeks Perlindungan Khusus Anak bernilai 85,51.

c. Pembangunan Gender

Kesetaraan gender menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan masyarakat yang Sejahtera. Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Selama periode 2013- 2022, Kabupaten Pati memperlihatkan peningkatan pembangunan gender, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

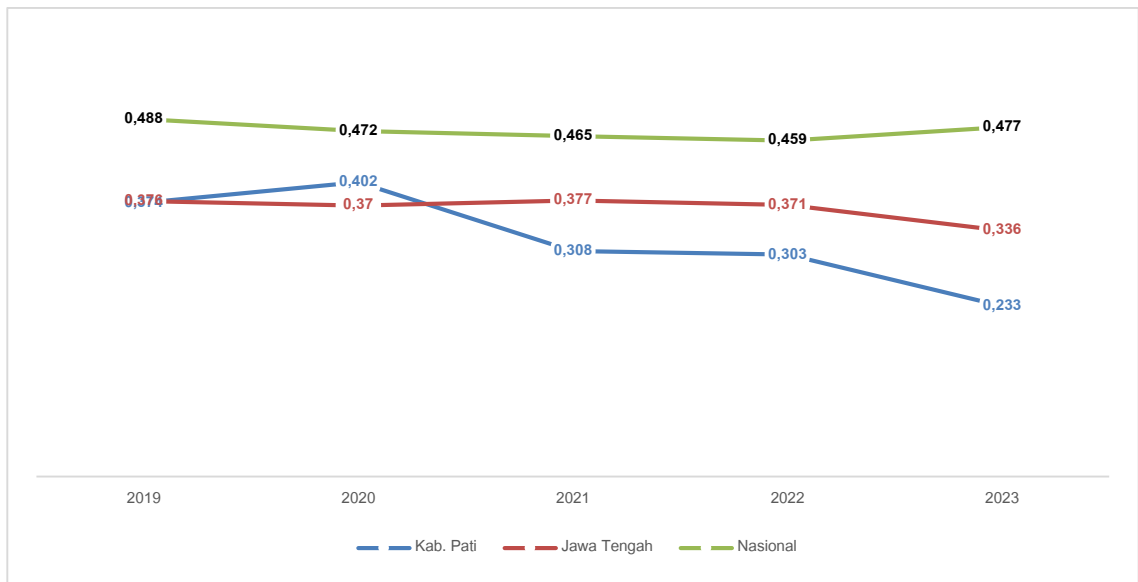


Gambar II.22 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2013-2022

Selama 10 tahun terakhir, pembangunan gender di Kabupaten Pati cenderung fluktuatif, namun secara umum mampu menunjukkan peningkatan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2022 sebesar 92,42 lebih tinggi 2,99 poin dibandingkan IPG di tahun 2013. Selain itu, IPG di tahun 2022 merupakan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, IPG Kabupaten Pati relatif lebih baik dibandingkan IPG Nasional, namun lebih rendah dibandingkan IPG Jawa Tengah.

Berdasarkan komponennya, kesenjangan gender terbesar ditemukan pada aspek ekonomi. Rasio pengeluaran perkapita penduduk perempuan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita penduduk laki-laki. Bahkan, rasio pengeluaran perkapita berdasarkan gender Kabupaten Pati di tahun 2022 (0,659) lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Pati di tahun 2013 (0,686). Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi perempuan dalam aspek ekonomi relatif masih rendah yang berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima perempuan. Pada aspek pendidikan, kesenjangan masih ditemukan pada RLS, sementara HLS telah menunjukkan peningkatan kesetaraan gender. Terkait RLS, dapat dinyatakan tingkat pendidikan penduduk perempuan masih di bawah tingkat pendidikan penduduk laki-laki. Namun demikian, dapat dikatakan terjadi peningkatan kesetaraan gender terkait RLS yang ditunjukkan semakin membaiknya rasio RLS berdasarkan gender. Selanjutnya, terkait aspek kesehatan juga ditemukan kesenjangan, dimana kualitas kesehatan penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan kualitas kesehatan penduduk perempuan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa di masa mendatang kelompok penduduk usia tua akan didominasi oleh penduduk perempuan.

Indeks Pembangunan Gender memiliki korelasi negatif dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Keberhasilan pembangunan gender selanjutnya akan diikuti dengan penurunan kesenjangan gender. Kesetaraan gender juga masih menjadi permasalahan pembangunan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir, IKG Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa IKG Kabupaten Pati lebih baik dibandingkan IKG Jawa Tengah dan Nasional. Gambaran IKG Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: BPS (2020-2024)

Gambar II.23. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun 2023, Indeks ketimpangan gender Kabupaten Pati bernilai 0,233 turun 0,7 poin dibanding IKG tahun sebelumnya. Penurunan tersebut lebih baik dibandingkan penurunan IKG Jawa Tengah (0,35) dan Nasional (-0,18). Pada aspek kesehatan, proporsi perempuan yang melahirkan tidak di faskes mengalami perbaikan dengan persentase nol persen, sementara proporsi perempuan yang melahirkan di usia kurang dari 20 tahun justru meningkat menjadi 29,2%. Pada dimensi pemberdayaan, peran perempuan dalam parlemen tidak mengalami perbaikan selama lima tahun terakhir di angka 16%, sementara itu, tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun berpendidikan SMA, mengalami penurunan, baik untuk penduduk laki-laki dan perempuan. Dimensi pasar tenaga kerja mengalami peningkatan, baik untuk penduduk laki-laki dan perempuan, dimana TPAK perempuan lebih tinggi dibandingkan TPAK laki-laki.

d. Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda seharusnya diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda, namun demikian saat ini ukuran tersebut belum digunakan. Kabupaten Pati mengukur kinerja urusan kepemudaan dengan indikator kinerja yang terkait dengan indikator jumlah wirausahawan muda, jumlah pemuda yang berwirausaha, jumlah pemuda yang berprestasi, jumlah organisasi kepemudaan, jumlah anggota organisasi kepemudaan, jumlah anggota organisasi kepemudaan yang berprestasi, jumlah pemuda yang bermitra, dan jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan.

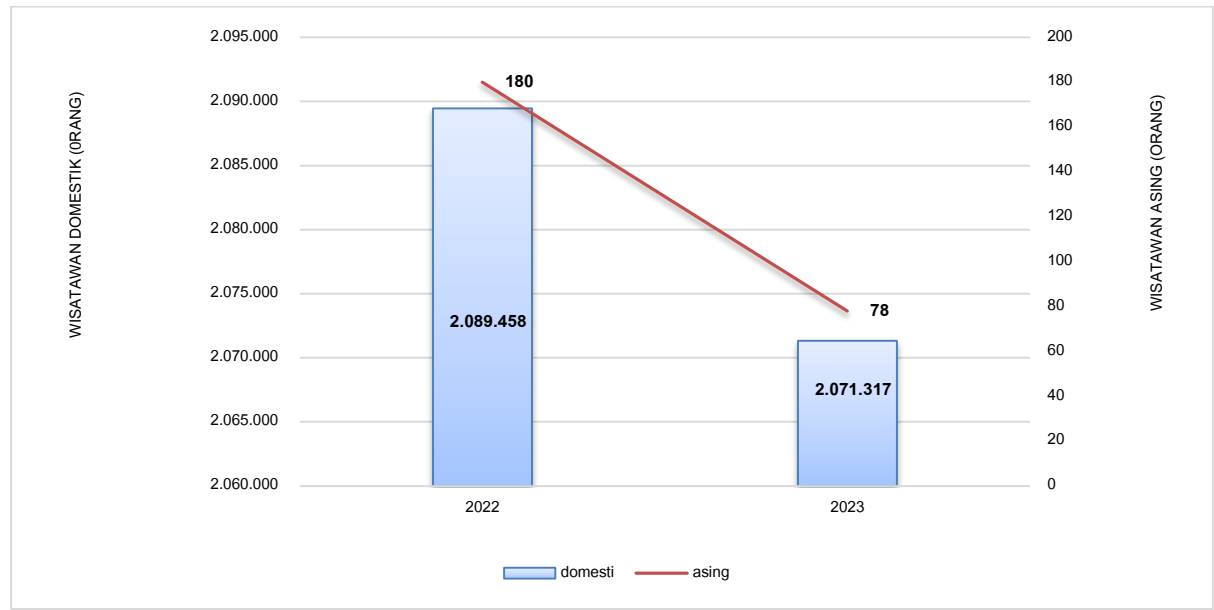
Capaian kinerja kepemudaan selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik, hanya saja jumlah pemuda yang berwirausaha yang mengalami penurunan sebesar -66,67%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan wirausaha belum menjadi prioritas pemuda dalam mendapatkan penghasilan (minat pemuda rendah). Lain hal dengan minat pemuda untuk berorganisasi dan berprestasi yang selama 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

e. Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan seharusnya diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan, namun demikian saat ini ukuran tersebut belum

digunakan. Kabupaten Pati mengukur kinerja urusan kebudayaan dengan indikator pelestarian seni dan budaya, meliputi cagar budaya dan objek pemajuan budaya.

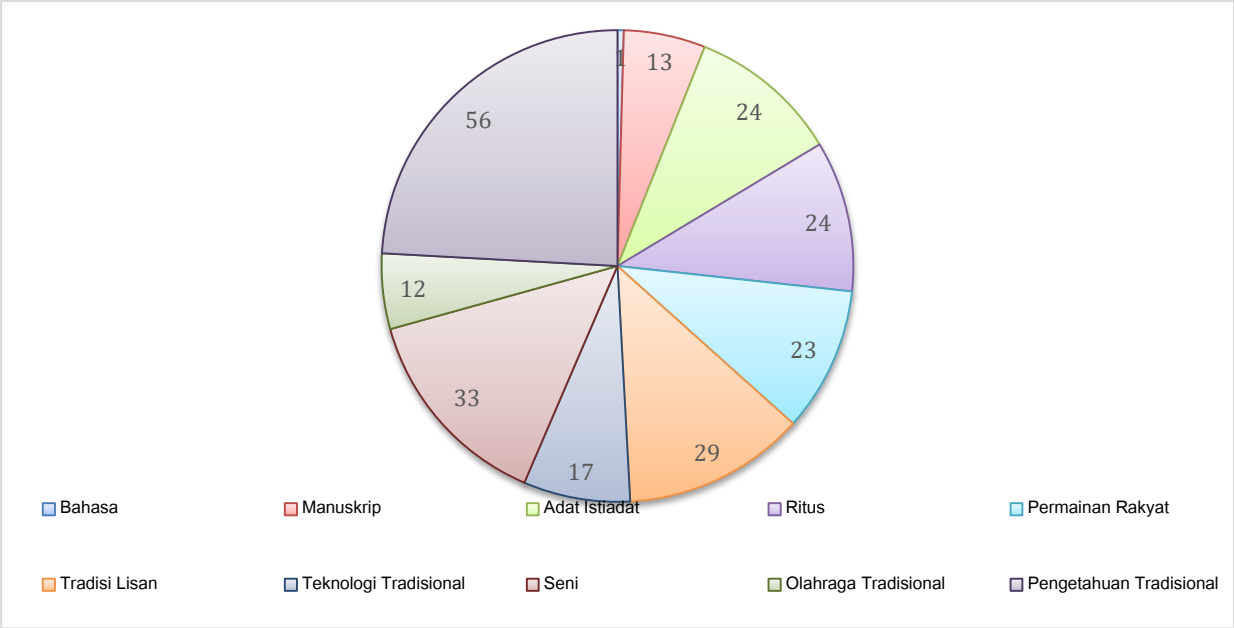
Di tahun 2022, terdapat 8 Cagar Budaya (CB) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Jumlah cagar budaya tersebut meningkat menjadi 23 di tahun 2023. Selain itu, masih terdapat 145 objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang tersebar di berbagai wilayah. keberadaan cagar budaya dan ODCB penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan sejarah dan budaya. Hal tersebut diataranya dapat dilihat dari jumlah pengunjung cagar budaya. Gambaran pengunjung cagar budaya selama dua tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut.



Gambar II.24 Pengunjung Cagar Budaya

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat apabila jumlah pengunjung cagar budaya maupun OCB di Kabupaten Pati selama 2 tahun terakhir mencapai lebih dari 2,5 juta pengunjung, Namun demikian, terdapat penurunan pengunjung sebesar 0,87% di tahun 2023. Berdasarkan asalnya, jumlah pengunjung cagar budaya di Kabupaten Pati didominasi oleh pengunjung domestik. Pengunjung mancanegara di dua tahun terakhir berjumlah kurang dari 200 pengunjung. Bagi wisatawan domestik, cagar budaya yang menarik perhatian pengunjung adalah beberapa makam tokoh penyebar agama Islam, sementara cagar budaya yang diminati oleh wisatawan mancanegara adalah cagar budaya yang dibangun pada masa penjajahan Belanda.

Kabupaten Pati juga memiliki berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dapat menjadi media peningkatan internalisasi nilai budaya. OPK tersebut memiliki beberapa bentuk, sebagai digambarkan pada grafik berikut.



Gambar II.25 Objek Pengembangan Budaya

Objek Pengembangan Budaya yang paling banyak tercatat adalah pengetahuan tradisional, diantaranya pengetahuan dalam pembuatan jamu dan makanan tradisional. Adat istiadat yang tercatat juga berjumlah cukup banyak, yaitu 23 buah dan masih dijalankan oleh masyarakat. Bahkan, salah satu diantaranya, yaitu Tradisi Meron di Sukolilo sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tidak Benda (WBTB).

2.3. Aspek Daya Saing Daerah
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah
a. Produktivitas Daerah

Sebagai gambaran secara lengkap terkait pertumbuhan sektoral, berikut disampaikan data rata- rata pertumbuhan dan distribusi menurut lapangan usaha (sektoral) Kabupaten Pati Tahun 2010–2023.

Tabel II.9 PDRB dan Rerata Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010-2023

Lapangan Usaha		PDRB ADHK 2010 (Rp. Triliun)														Rerata Tumbuh (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.236	5.386	5.678	5.902	5.834	6.281	6.532	6.701	6.886	7.157	7.314	7.300	7.608	7.6710	3,38
B	Pertambangan dan Penggalian	0.322	0.351	0.378	0.405	0.431	0.441	0.461	0.507	0.545	0.581	0.586	0.598	0.561	0.5647	5,05
C	Industri Pengolahan	4.781	5.151	5.521	5.985	6.380	6.681	6.996	7.346	7.693	8.060	8.087	8.363	8.759	9.3233	5,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.019	0.020	0.022	0.024	0.026	0.027	0.029	0.030	0.032	0.034	0.034	0.035	0.037	0.0417	7,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.021	0.0214	2,68
F	Konstruksi	1.505	1.545	1.648	1.739	1.814	1.926	2.057	2.209	2.355	2.509	2.420	2.661	2.709	2.8704	5,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.894	3.119	3.179	3.307	3.501	3.659	3.882	4.163	4.492	4.810	4.637	4.968	5.189	5.4967	5,71
H	Transportasi dan Pergudangan	0.508	0.546	0.586	0.643	0.707	0.762	0.817	0.874	0.951	1.023	0.716	0.731	1.200	1.2839	13,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.619	0.665	0.719	0.761	0.818	0.880	0.953	1.026	1.114	1.222	1.159	1.239	1.425	1.5980	8,89
J	Informasi dan Komunikasi	0.373	0.406	0.446	0.487	0.583	0.641	0.703	0.808	0.912	1.026	1.136	1.193	1.216	1.3018	10,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.489	0.506	0.521	0.547	0.567	0.602	0.643	0.685	0.724	0.750	0.768	0.789	0.797	0.8119	4,25
L	Real Estate	0.206	0.217	0.228	0.243	0.259	0.277	0.295	0.314	0.331	0.348	0.347	0.356	0.375	0.3995	5,97
M,N	Jasa Perusahaan	0.034	0.037	0.041	0.045	0.049	0.053	0.058	0.064	0.071	0.079	0.073	0.075	0.080	0.0851	9,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.754	0.775	0.785	0.805	0.817	0.859	0.895	0.918	0.931	0.952	0.941	0.929	0.939	0.9781	2,62
P	Jasa Pendidikan	0.533	0.634	0.752	0.826	0.914	0.984	1.055	1.141	1.243	1.342	1.339	1.340	1.366	1.4389	9,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.151	0.164	0.178	0.190	0.210	0.226	0.247	0.270	0.296	0.325	0.350	0.351	0.359	0.3779	7,96
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0.343	0.355	0.377	0.405	0.440	0.457	0.490	0.539	0.595	0.649	0.601	0.610	0.672	0.7204	7,62
PDRB Total		18.783	19.893	21.073	22.330	23.365	24.770	26.130	27.612	29.190	30.885	30.527	31.559	33.312	34.985	5,62

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2011-2024 (data diolah); **) : Tahun 2020 dan 2021 tidak masuk perhitungan rerata pertumbuhan.

Tabel II.10 PDRB dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2022

Lapangan Usaha		PDRB ADHB (Rp. Triliun)													Rerata Distribusi (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.236	5.767	6.470	7.124	7.486	8.455	9.011	9.426	10.025	10.651	11.070	11.177	12.095	26.16
B	Pertambangan dan Penggalian	0.322	0.367	0.409	0.458	0.543	0.602	0.660	0.767	0.860	0.930	0.949	0.979	0.962	1.95
C	Industri Pengolahan	4.781	5.481	6.183	7.029	7.872	8.431	9.160	9.911	10.655	11.364	11.668	12.435	13.700	26.79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.019	0.021	0.023	0.024	0.027	0.029	0.032	0.036	0.039	0.041	0.041	0.043	0.045	0.10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.022	0.023	0.025	0.026	0.06
F	Konstruksi	1.505	1.618	1.772	1.932	2.157	2.362	2.590	2.860	3.155	3.470	3.356	3.777	4.115	7.81
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.894	3.295	3.414	3.696	4.035	4.334	4.732	5.197	5.757	6.297	6.147	6.684	7.277	14.50
H	Transportasi dan Pergudangan	0.508	0.547	0.590	0.653	0.766	0.863	0.931	1.012	1.104	1.215	0.880	0.931	1.616	2.63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.619	0.699	0.783	0.872	0.967	1.056	1.197	1.303	1.438	1.606	1.541	1.687	2.008	3.52
J	Informasi dan Komunikasi	0.373	0.408	0.438	0.472	0.561	0.613	0.675	0.808	0.912	1.037	1.150	1.209	1.237	2.17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.489	0.523	0.585	0.638	0.689	0.757	0.835	0.925	1.014	1.067	1.091	1.174	1.292	2.50
L	Real Estate	0.206	0.221	0.234	0.254	0.286	0.317	0.349	0.381	0.411	0.441	0.442	0.458	0.488	1.02
M,N	Jasa Perusahaan	0.034	0.040	0.045	0.052	0.059	0.065	0.076	0.087	0.098	0.111	0.106	0.111	0.122	0.22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.754	0.790	0.871	0.952	1.025	1.110	1.220	1.292	1.329	1.379	1.382	1.359	1.416	3.46
P	Jasa Pendidikan	0.533	0.714	0.922	1.075	1.227	1.367	1.512	1.701	1.893	2.092	2.130	2.182	2.240	4.30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.151	0.175	0.203	0.233	0.269	0.297	0.333	0.370	0.411	0.461	0.510	0.515	0.537	0.98
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.343	0.367	0.405	0.451	0.521	0.549	0.624	0.694	0.779	0.858	0.804	0.824	0.936	1.83
PDRB Total		18.783	21.049	23.360	25.931	28.505	31.224	33.954	36.791	39.901	43.040	43.289	45.571	50.111	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2011-2024 (data diolah)

Berdasarkan pertumbuhan sektoral 3 (tiga) lapangan usaha dengan rerata pertumbuhan tertinggi yaitu transportasi dan pergudangan (13,09%), informasi dan komunikasi (10,61%) dan jasa pendidikan (9,57%). Jika hal ini terjadi secara konsisten di masa mendatang, maka struktur ekonomi di Kabupaten Pati dipastikan akan bergeser dari sektor pertanian dan industri ke sektor jasa, dan fenomena ini merupakan hal yang wajar sesuai dinamika perekonomian wilayah. Sektor dominan yaitu pertanian, industri pengolahan dan perdagangan masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 3,38%; 5,91%; dan 5,71%. Sedangkan menurut distribusi/kontribusi sektoral, lapangan usaha yang memiliki rerata kontribusi >4% terhadap PDRB Kabupaten Pati adalah industri pengolahan (26,79%); pertanian (26,99%), perdagangan (14,43%); konstruksi (7,83%); dan jasa pendidikan (4,41%).

Ditinjau dari aspek pengeluaran, PDRB Kabupaten Pati dalam kurun waktu yang sama (2010-2023), didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu rata-rata sebesar 74,71%. Selanjutnya adalah investasi (PMTB) rata-rata sebesar 25,89%; pengeluaran pemerintah daerah rata-rata sebesar 7,33%; sedangkan net ekspor masih bernilai negatif, yang berarti aktivitas perdagangan barang dan jasa lebih didominasi oleh barang dan jasa impor (dalam konteks antar daerah maupun antar negara). Berikut data perkembangan PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Pati Tahun 2010–2023.

Tabel II.11 PDRB ADHB menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah) Tahun 2010-2023

JENIS PENGELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rerata Kontribusi (%)
1. Konsumsi RT & LNPRT	14.8146	16.2883	17.7807	19.7303	21.6410	23.3364	25.0000	27.0994	29.2537	31.4064	31.4849	33.1621	36.6296	40,1048	74,60
2. Pengeluaran Pemerintah	1.5021	1.6961	1.8840	2.1149	2.2564	2.4377	2.5390	2.7315	2.8242	2.9296	2.7987	2.8507	2.8752	3,0500	7,20
3. PMTB (INVESTASI)	4.3073	5.6640	7.4985	7.7997	7.9675	7.8403	8.2869	9.0102	10.0551	10.8117	10.2641	11.1517	12.0985	12,8293	25,72
4. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.8415	-2.5997	-3.8030	-3.7135	-3.3600	-2.3512	-1.8719	-2.0505	-2.2317	-2.1078	-1.2591	-1.5938	-1.4924	-1,2087	-7,52
PDRB ADHB	18.7825	21.0487	23.3600	25.9314	28.5049	31.2631	33.9539	36.7907	39.9013	43.0400	43.2886	45.5707	50.1110	54,7754	100.00

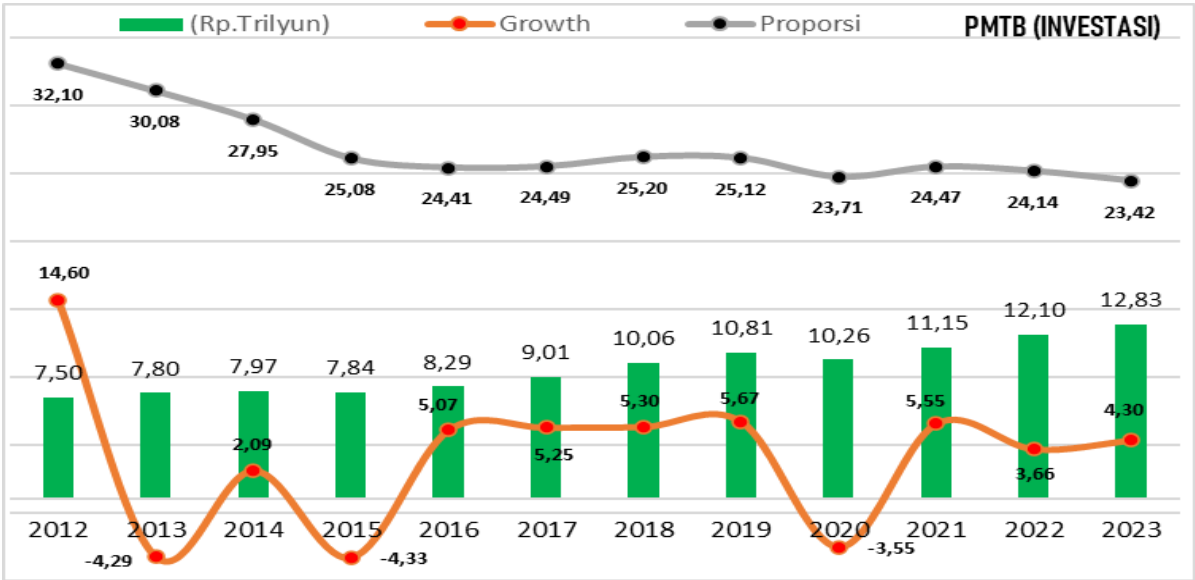
Sumber: BPS Kabupaten Pati 2011-2024 (data diolah)

Tabel II.12 PDRB ADHK menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah) Tahun 2010-2023

JENIS PENGELUARAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022	2023	Rerata Tumbuh (%)
1. Konsumsi RT & LNPRT	14.8146	15.4936	16.2702	17.1326	18.0209	18.8384	19.5950	20.5872	21.8046	22.7854	22.7592	23.3649	24.6679	26,0783	5,04
2. Pengeluaran Pemerintah	1.5021	1.5624	1.6283	1.6951	1.7291	1.7692	1.7878	1.8422	1.8753	1.9327	1.8536	1.8346	1.8390	1,8868	2,59
3. PMTB (INVESTASI)	4.3073	5.4433	6.2377	5.9704	6.0950	5.8311	6.1267	6.4481	6.7899	7.1750	6.9201	7.3044	7.5714	7,8971	5,79
4. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.8415	-2.6060	-3.0639	-2.4684	-2.4798	-1.6684	-1.3793	-1.2651	-1.2799	-1.0077	-1.0054	-0.9448	-0.7659	-0,8777	8,59
PDRB ADHB	18.7825	19.8933	21.0723	22.3297	23.3652	24.7703	26.1302	27.6124	29.1899	30.8854	30.5275	31.5591	33.3124	34,9847	5,61

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2011-2024 (data diolah); **): Tahun 2020 dan 2021 tidak masuk perhitungan rerata pertumbuhan.

Dari sisi pertumbuhan, komponen PDRB menurut pengeluaran yang memiliki rata-rata tumbuh terbesar adalah net ekspor yaitu sebesar 8,59% per tahun, meskipun masih mencatatkan angka negatif kontribusinya terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor daerah memiliki peluang yang sangat besar menjadi salah satu penopang kuat dalam perekonomian daerah ke depan. Komponen pengeluaran investasi (PMTB) memiliki rerata pertumbuhan terbesar kedua setelah net ekspor adalah Investasi atau PMTB yang rerata pertumbuhannya sebesar 5,79% pertahun. Berikutnya adalah jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 5,04%, dan yang terakhir adalah pengeluaran pemerintah daerah yang tumbuh rata-rata sebesar 2,59% per tahun. Idealnya ke depan (jangka panjang), pertumbuhan ekonomi daerah (dari sisi PDRB menurut pengeluaran) yang berkualitas, lebih didorong oleh kinerja pertumbuhan investasi (di sektor riil) karena komponen tersebut menjadi sumber atau memiliki *multiplier effect* yang besar dalam perekonomian seperti dalam hal penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, penopang daya beli masyarakat, pendapatan pemerintah, serta menjaga stabilitas harga (dari perspektif produksi/*supply side*), yang muaranya menuju kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut gambaran dinamika kinerja PMTB/Investasi Kabupaten Pati dalam 13 (tiga belas) tahun terakhir.



Sumber : BPS Kab. Pati 2012-2023

Gambar II.26 Perkembangan Investasi Kabupaten Pati 2011-2023

Secara nominal, investasi di Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya cenderung fluktuatif sehingga menyebabkan proporsi atau kontribusi terhadap PDRB Pengeluaran terus menurun. Mengacu pada kondisi di atas, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan terobosan kebijakan yang dapat lebih memacu kinerja investasi di daerah khususnya dalam hal regulasi dan jaminan kepastian usaha, kondusivitas wilayah, promosi, serta jejaring dan kerjasama antar wilayah maupun stakeholder terkait.

b. Sektor Unggulan

Di tengah arus deras globalisasi yang semakin kuat saat ini, memiliki kemampuan daya saing ekonomi menjadi suatu keniscayaan baik

oleh entitas (pemerintah/kelompok masyarakat/swasta) maupun individu sebagai pelaku ekonomi. Adapun daya saing ekonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah merupakan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta mampu menghadapi persaingan di kancah domestik maupun internasional.

Daya saing ekonomi daerah erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya ekonomi (potensi sumber daya ekonomi) yang ada serta sejauh mana daerah mampu mengidentifikasi sumber daya/sektor ekonomi yang unggul di antara beberapa/banyak potensi sumber daya yang tersedia dan mampu mengoptimalkan pemanfaatannya dalam bentuk peningkatan produktivitas maupun nilai tambah sumber daya ekonomi sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan struktur ekonomi daerah, tercermin dari kontribusi lapangan usaha/sektor ekonomi, Kabupaten Pati merupakan daerah yang aktivitas ekonominya lebih dominan pada sektor industri pengolahan, pertanian (dalam arti luas) dan perdagangan, serta jasa yang cenderung tumbuh semakin cepat.

Sektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan teori maupun beberapa hasil kajian dicirikan sebagai sektor yang : i). memiliki pertumbuhan yang tinggi; ii). mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar; iii). memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke belakang maupun ke depan (forward and backward linkage); iv). mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi, sehingga mampu menciptakan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi.

Tabel II.13 Analisis Sektor Ekonomi Unggulan

NO	Lapangan Usaha	LQ-DLQ	Klassen	Shift-Shares	Penduduk Bekerja (%)*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Basis - Prospektif	Sektor Maju & Tumbuh Pesat	Berdaya Saing	30,74
2	Pertambangan dan Penggalian	Tidak Basis - Prospektif	Sektor Potensial/Masih Dapat Berkembang Pesat	Tidak Berdaya Saing	0,68
3	Industri Pengolahan	Tidak Basis - Prospektif	Sektor Potensial/Masih Dapat Berkembang Pesat	Berdaya Saing	18,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Tidak Basis - Prospektif	Sektor Maju & Tumbuh Pesat	Berdaya Saing	0,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Tidak Basis - Prospektif	Sektor Maju & Tumbuh Pesat	Berdaya Saing	0,00
6	Konstruksi	Tidak Basis - Prospektif	Sektor Potensial/Masih Dapat Berkembang Pesat	Berdaya Saing	8,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Basis - Prospektif	Sektor Maju & Tumbuh Pesat	Berdaya Saing	20,25
8	Transportasi dan Pergudangan	Tidak Basis - Tidak Prospektif	Sektor Relatif Tertinggal	Berdaya Saing	1,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Basis - Prospektif	Sektor Maju & Tumbuh Pesat	Berdaya Saing	6,70
10	Informasi dan Komunikasi	Tidak Basis - Prospektif	Sektor Potensial/ Masih Dapat Berkembang Pesat	Berdaya Saing	0,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Tidak Basis - Tidak Prospektif	Sektor Potensial/Masih Dapat Berkembang Pesat	Berdaya Saing	0,88
12	Real Estate	Tidak Basis - Tidak Prospektif	Sektor Relatif Tertinggal	Tidak Berdaya Saing	0,00
13	Jasa Perusahaan	Tidak Basis - Tidak Prospektif	Sektor Potensial/Masih Dapat Berkembang Pesat	Berdaya Saing	0,49
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Basis - Tidak Prospektif	Sektor Relatif Tertinggal	Tidak Berdaya Saing	1,65
15	Jasa Pendidikan	Basis - Prospektif	Sektor Maju & Tumbuh Pesat	Berdaya Saing	3,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Basis - Tidak Prospektif	Sektor Maju & Tumbuh Pesat	Berdaya Saing	1,70
17	Jasa lainnya	Basis - Tidak Prospektif	Sektor Maju & Tumbuh Pesat	Berdaya Saing	3,70

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2010-2023 (data diolah)

Mendasarkan pada hasil analisa sektor/lapangan usaha dengan penghitungan menggunakan indeks LQ-DLQ (*location quotient-dynamic location quotient*), Tipologi Klassen dan *Shift-Shares Analysis*, terdapat 4 (empat) kriteria kualitas secara sektoral yaitu : i) sektor unggulan/prima (sektor basis-prospektif; sektor maju dan tumbuh pesat; berdaya saing, menyerap > 5% penduduk bekerja) meliputi sektor : pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan/manufaktur; perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa konstruksi dan penyediaan akomodasi dan makan-minum; ii) sektor andalan/berkembang (tidak basis dan memiliki prospek, potensial berkembang pesat dan/atau sektor maju dan tumbuh pesat, berdaya saing, menyerap 1% sd. <5% penduduk bekerja) meliputi sektor: pengadaan listrik, gas dan air minum; informasi dan komunikasi; iii) sektor potensial (basis dan/atau tidak basis dan prospektif, maju dan tumbuh pesat dan/atau potensial berkembang pesat, berdaya saing, menyerap 1% sd. <5% penduduk bekerja) meliputi sektor: jasa pendidikan; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya; iv) sektor tertinggal (basis dan/atau tidak basis dan tidak prospektif, relatif tertinggal dan/atau potensial berkembang pesat, tidak dan/atau berdaya saing, menyerap <1% penduduk bekerja) meliputi sektor : pertambangan dan penggalian; transportasi dan pergudangan; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Berikut ringkasan ilustrasi kinerja dan peran sektor unggulan dalam perekonomian daerah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel II.14 Peran Sektor Unggulan dalam Perekonomian Daerah Tahun 2011 – 2023

Lapangan Usaha/Sektor	Pertumbuhan Sektoral		Rerata Kontribusi Sektoral	Persentase Penduduk Bekerja
	Rerata (%)	Trend	(%)	(%)
Pertanian	3,38	Turun (-0,11)	25,82	30,74
Industri Pengolahan	5,91	Turun (-0,28)	26,99	15,43
Perdagangan	5,71	Naik (0,15)	14,43	21,10
Jasa Konstruksi	5,51	Naik (0,06)	7,83	8,08
Penyediaan Akomodasi & Makan-Minum	8,89	Naik (0,60)	3,59	6,70

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2011 – 2023

Sektor unggulan atau prima harus menjadi porsi prioritas pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan pertimbangan bahwa i) sektor-sektor ini menjadi lokomotif utama dalam perekonomian daerah, ii) memiliki keterkaitan hulu-hilir utamanya sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor hulu dan industri pengolahan dan penyediaan akomodasi makan-minum sebagai sektor hilir serta sektor perdagangan sebagai penunjang (jasa) kegiatan transaksi ekonomi; iii) menampung jumlah tenaga kerja terbesar dalam bidang ketenagakerjaan ($\pm$ 84,51% penduduk bekerja di 5 sektor unggulan tersebut); iv) berpotensi besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di masa mendatang. Sedangkan sektor andalan atau berkembang maupun sektor potensial, ke depan perlu terus didorong agar mampu berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah.

Sektor-sektor yang telah teridentifikasi sebagai unggulan, andalan maupun potensial akan sia-sia atau kurang memberikan dorongan pada perekonomian daerah tanpa adanya dukungan produktivitas di masing-masing kategori sektor/lapangan usaha dimaksud. Produktivitas menjadi hal yang sangat penting dalam ekonomi.

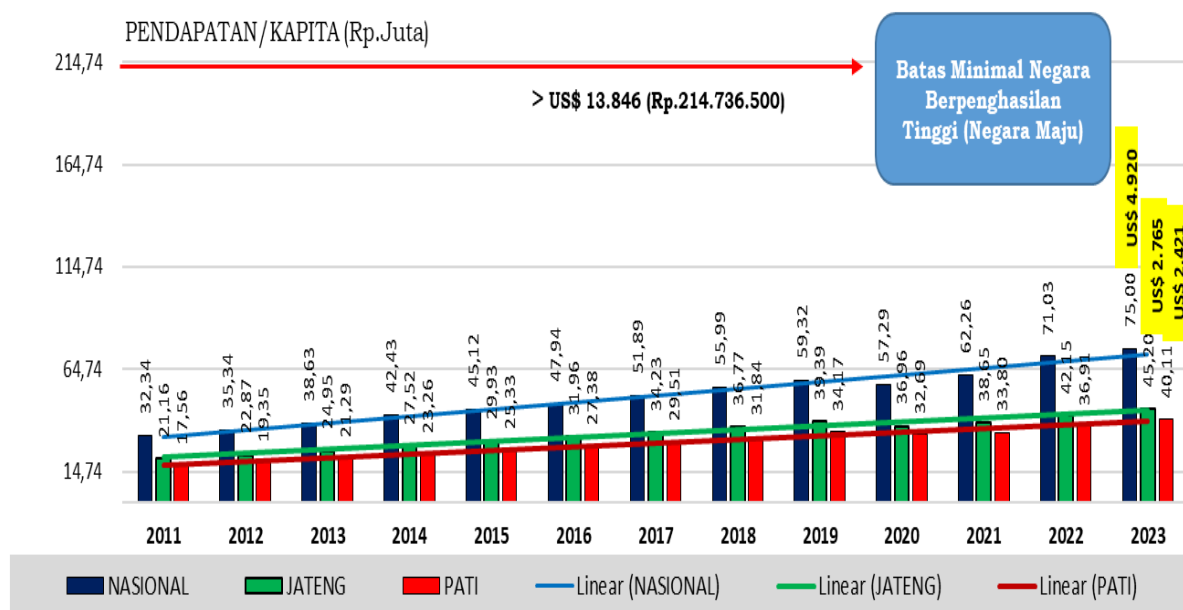
Produktivitas mencerminkan seberapa besar output atau produk dapat dihasilkan atas unit faktor produksi yang digunakan. Semakin besar output atas penggunaan faktor produksi tertentu, semakin produktif kegiatan ekonomi tersebut dan demikian sebaliknya. Faktor produksi dimaksud meliputi sumber daya alam/fisik, tenaga kerja (SDM), modal, teknologi dan informasi, kewirausahaan dan seterusnya.

Pemerintah Daerah sebagai agen pelayanan publik di daerah, harus mampu mengelola (mengorkestrasi) segenap sumber daya sumber daya (sebagai faktor produksi daerah) yang dimiliki agar memiliki kualitas unggul dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi yang semakin ketat. Kebijakan ekonomi daerah ke depan harus diarahkan/fokus pada upaya bagaimana sumber daya ekonomi tersebut bisa lebih produktif, agar bisa menjadi senjata untuk berkompetisi baik pada tataran domestik maupun internasional. Kebijakan daerah harus semakin inovatif sarat dengan terobosan sehingga mampu menghasilkan sumber daya daerah (faktor produksi) dengan produktivitas yang tinggi dan berdaya saing. Hal ini akan sejalan dan mendukung kebijakan nasional jangka panjang terkait transformasi ekonomi.

c. **Pendapatan per Kapita**

Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Melalui instrument/indikator ini, batasan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dan diperbandingkan. Guna mengklasifikasikan strata suatu negara masuk kategori negara dengan ekonomi maju, negara berkembang atau negara terbelakang, Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan pendapatan per kapita sebagai alat ukurnya. Kategori negara maju, dicirikan sebagai negara dengan penghasilan per kapita tinggi atau *high income countries*, yaitu sebesar $\geq$ US\$ 13.846 per kapita/tahun. Negara berpendapatan menengah tinggi atau *upper middle income countries*, dicirikan berpendapatan sebesar US\$ 4.466 – 13.845 per kapita/tahun. Negara berpendapatan menengah bawah atau *lower middle income countries*, yaitu negara dengan penghasilan sebesar US\$ 1.136 – 4.465 per kapita/tahun. Kategori terakhir yaitu negara berpendapatan rendah atau *low income countries*, berpendapatan sebesar $\leq$ US\$ 1.135 per kapita/tahun. Pengklasifikasian ini menggunakan acuan *Gross National Income* (GNI) atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Tahun 2022. Sedangkan untuk daerah menggunakan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Mendasarkan acuan sebagaimana deskripsi klasifikasi di atas, maka posisi pendapatan per kapita Indonesia saat ini dengan konversi/ kurs atau nilai tukar terhadap mata uang Dolar Amerika terkini (*current exchange rate*) yaitu sebesar US\$ 4.580 per kapita/tahun, masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau *upper middle income country*.



Sumber : BPS Tahun 2011-2022

Gambar II.27 Pendapatan per Kapita Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2011-2023

Berdasarkan grafik di atas, pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Pati bernominal paling rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dengan tren yang selalu meningkat ketiganya tiap tahun. Peningkatan pendapatan per kapita Nasional cenderung lebih cepat (sudut kemiringan relatif curam), sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati relatif lebih lambat (sudut kemiringan landai).

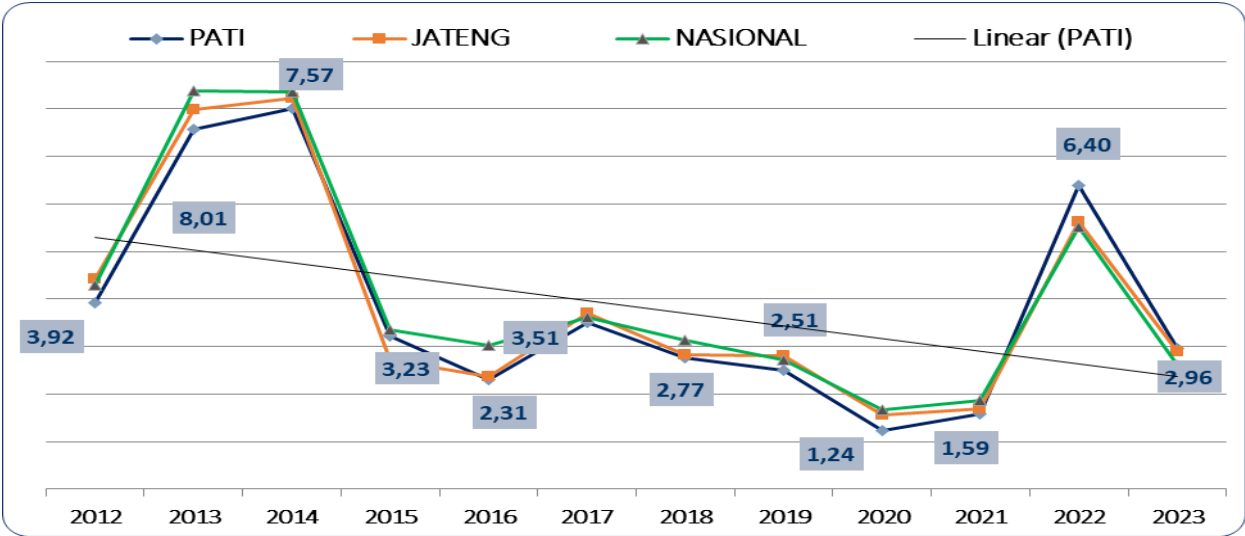
Pendapatan per kapita secara Nasional pada Tahun 2011 sebesar Rp.32,34 juta naik menjadi Rp. 75 juta Tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 21,16 juta pada Tahun 2011 menjadi Rp. 45,20 juta Tahun 2023 dan Kabupaten Pati, dengan pendapatan per kapita terendah, semula sebesar Rp.17,56 juta Tahun 2011, naik menjadi 40,11 juta Tahun 2023. Angka pendapatan per kapita daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2023 sebesar 3/5 (tiga per lima) kali atau sebesar 0,6 kali pendapatan per kapita Nasional, sedangkan angka Kabupaten Pati kurang lebih hanya separuh (setengah) angka pendapatan per kapita Nasional. Dikaitkan dengan batas bawah klasifikasi menjadi negara berpendapatan tinggi (negara maju), maka pendapatan perkapita yang dicapai pada tahun lalu (2023), Nasional baru mencapai 1/3 PDB minimal negara maju, Provinsi Jawa Tengah perlu 1/5 dan Kabupaten Pati 1/6, yang berarti masih dibutuhkan upaya yang sangat keras dan serius untuk menuju/mendukung Bangsa Indonesia menjadi Negara Maju.

Sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rancangan RPJPN 2025-2045, Negara Indonesia pada Tahun 2045 mempunyai target menjadi *salah satu negara berpendapatan tinggi* (bahkan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke 4 dunia) yaitu dengan PDB sebesar US\$ 8,89triliun dan dengan pendapatan perkapita masyarakat sebesarUS\$ 30.300/tahun. Bahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyatakan bahwa pada Tahun 2037, Indonesia diproyeksikan telah masuk menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi yaitu dengan pendapatan per kapita/tahun mencapai sebesar US\$ 21.000. Dengan target Nasional yang sangat fantastis tersebut menurut ukuran Daerah, tidak mustahil

akan menjadi beban yang cukup berat bagi Daerah untuk mendukung kebijakan Nasional dimaksud, tanpa didukung dengan kebijakan daerah yang berfokus pada pengelolaan sumber daya ekonomi yang berbasis teknologi (digitalisasi), inovasi, dan produktivitas sebagai cara atau strategi jitu untuk mendukung terwujudnya transformasi ekonomi, yaitu dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi. Bayang-bayang *middle income trap* (jebakan pendapatan menengah) bisa menjadi pemicu bagi daerah dalam menyusun kebijakannya agar bisa terlepas dari *stigma kurang sedap* tersebut atau bahkan sebaliknya, tetap terperangkap sebagai negara yang *setia* menjadi kelompok berpenghasilan menengah, paling tidak untuk jangka waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun ke depan.

d. Inflasi dan Disparitas Harga antar Daerah

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun terakhir, angka inflasi yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen terus mengalami penurunan, kecuali pada masa *pasca pandemi* Tahun 2022, yang terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi karena mulai ada pemulihan ekonomi yang ditandai dengan lonjakan permintaan barang konsumsi yang melebihi kapasitas penyediaan (produksi).



Sumber : BPS Tahun 2012-2023

Gambar II. 28 Inflasi Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2023

Inflasi Tahun 2023 di wilayah Kabupaten Pati, dengan mengacu pada kondisi inflasi Kabupaten Kudus, disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumsi pada kelompok pengeluaran (diurutkan dari andil inflasi tertinggi): i) transportasi sebesar 17,02%; ii) perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,44%; iii) makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,11%; iv) perumahan, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,66%; v) pakaian dan alas kaki sebesar 4,06%; vi) penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,89% dan kelompok pengeluaran lain yang memberikan andil inflasi kurang dari 2,5%.

Pada periode jangka panjang ke depan, akan diperhitungkan disparitas harga, yaitu perbedaan harga atas harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah (dihitung disparitas kabupaten terhadap provinsi), yang meliputi 13 (tiga belas) Komoditas Bapok (Barang Pokok) antara lain

Beras Medium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan Sederhana, Daging Sapi Paha Belakang, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Tepung Terigu, Kedelai Impor, Cabe Merah Keriting, Cabe Rawit Merah, Bawang Merah, Bawang Putih Impor Kating, dan Ikan Kembung. Penghitungan disparitas harga antar daerah, dipicu adanya ketimpangan harga di beberapa daerah dalam satu Kawasan yang terjadi akhir-akhir ini yang disebabkan oleh beberapa factor antara lain cuaca, distribusi barang dan bencana alam.

Terjaganya inflasi dan disparitas harga pada level yang rendah serta relatif stabil dapat mendukung program pemerintah terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat lapisan menengah bawah yang sangat rentan terhadap gejolak harga utamanya peningkatan harga yang dipicu oleh harga *volatile foods* seperti sembako dan harga kebutuhan pokok lain yang masuk kategori *non administered price* serta tentunya upaya menekan gejolak harga komoditas *administered price* seperti harga BBM, tarif dasar listrik, tarif angkutan dan seterusnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Pati harus memberi andil ikut menjaga kestabilan harga melalui pengelolaan sumber daya yang ada sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki secara lebih optimal. Kolaborasi dan Kerjasama antar stakeholder yang terlibat dalam proses produksi hingga distribusi harus lebih diperkuat serta penyusunan dan implementasi regulasi yang mampu memperkuat posisi dan peran kelembagaan yang telah ada.

e. Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif merujuk pada suatu sistem ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua individu, termasuk mereka yang berada di lapisan masyarakat yang kurang beruntung. Implementasi pembangunan ekonomi inklusif yang seharusnya diukur dengan Indeks Ekonomi Inklusif belum dapat didefinisikan secara kuantitatif di Kabupaten Pati.

Namun demikian, jika memandang hal tersebut pada komponen-komponennya, yaitu: (1) akses kesempatan, memberikan akses yang adil dan setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan kepada seluruh lapisan masyarakat; (2) pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. ini dapat melibatkan pembentukan usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk wirausaha; (3) inklusivitas keuangan, meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses, seperti masyarakat pedesaan atau penduduk dengan pendapatan rendah; (4) peningkatan kesejahteraan sosial, menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari segi produk domestik bruto (pdp), tetapi juga dengan peningkatan kesejahteraan sosial, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan; (5) perlindungan terhadap rentan, menyediakan perlindungan dan dukungan sosial bagi kelompok-kelompok yang rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas; dan (6) keberlanjutan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang, maka pendekatan

tersebut telah terimplimentasi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pati.

Semua lapisan masyarakat nyatanya memiliki kesempatan yang sama, termasuk kelompok rentan, untuk melaksanakan aktivitas perekonomian, perekonomian juga melibatkan kelompok UKM, serta akses perkreditan juga tersedia, khususnya dengan adanya KUR.

f. Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merujuk pada suatu sistem ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memperhatikan dampak ekologis dari kegiatan ekonomi, yaitu dengan menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kegiatan ekonomi untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Implementasi pembangunan ekonomi hijau yang seharusnya diukur Indeks Ekonomi Hijau belum dapat didefinisikan secara kuantitatif di Kabupaten Pati.

Jika memandang ciri khas ekonomi hijau yang meliputi konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, inovasi dan teknologi bersih, efisiensi energi dan produksi, pengembangan pekerjaan hijau, keterlibatan masyarakat, pendekatan siklus hidup, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pati masih pada tahap awal saja dalam implementasinya.

g. Kewirausahaan

Kinerja kewirausahaan seharusnya diukur dengan Rasio Kewirausahaan, namun demikian saat ini ukuran tersebut belum digunakan. Kabupaten Pati mengukur kinerja yang terkait dengan kewirausahaan, sebagaimana kewenangan yang dimilikinya, yaitu terkait dengan usaha kecil dan menengah, dengan indikator diantaranya adalah jumlah usaha mikro, jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha, jumlah wirausaha yang mengalami peningkatan omset, jumlah wirausaha menuju wirausaha mapan.

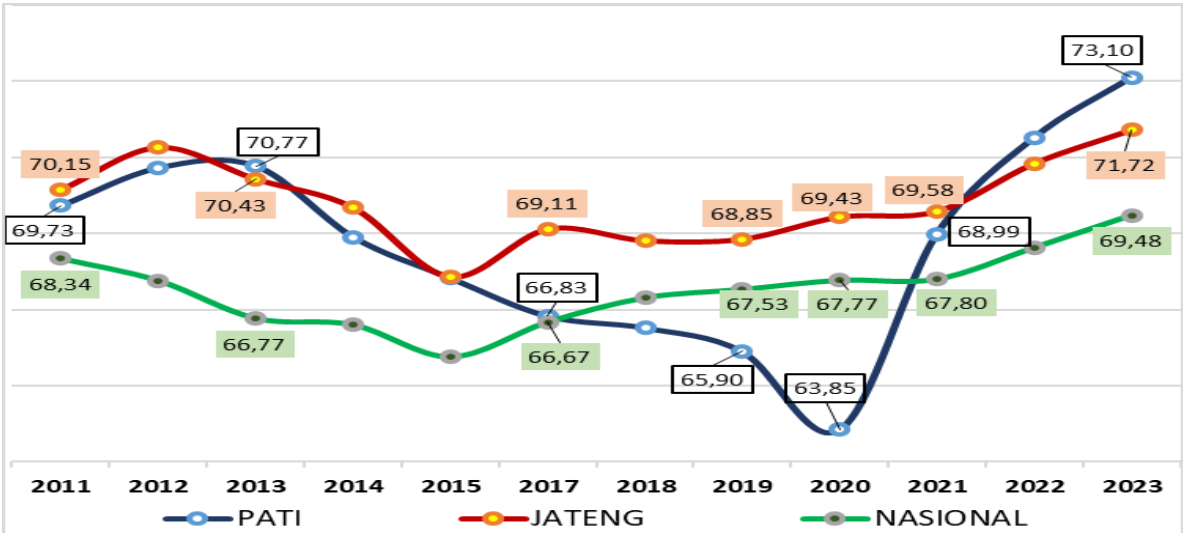
Persentase jumlah wirausaha menuju wirausaha mapan terhadap jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha selalu mengalami peningkatan selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 3,05%, 3,63%, 4,43%, 5,71% dan 7,51%. Peningkatan ini menandakan bahwa meskipun persentasenya masih sangat rendah tetapi kinerja pendampingan urusan UMKM sedikit demi sedikit menunjukkan perbaikan kinerja. Rendahnya angka persentase di atas karena kapasitas SDM pelaku usaha yang masih minim sehingga pendampingan harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam skala kelompok kecil.

Peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian juga harus terus didorong untuk memperkuat sekaligus sebagai cerminan ekonomi kerakyatan. Ke depan koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah formal bagi kelompok usaha mikro-kecil, namun juga harus bisa berperan menjadi sarana dan media pengembangan usaha layaknya sebuah korporasi, dengan sentuhan manajemen wirausaha maju.

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu wilayah/daerah dan masuk dalam kategori angkatan kerja. Semakin tinggi persentase TPAK berarti bahwa potensi penduduk untuk bekerja menjadi

tinggi. Berikut grafik perbandingan TPAK Kabupaten Pati dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 – 2023.

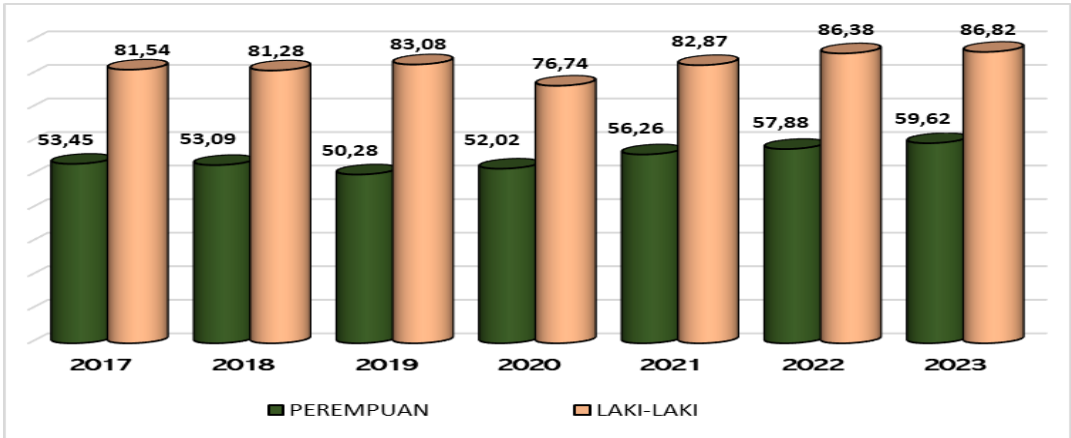


Sumber : BPS Kabupaten Pati 2011-2023

Gambar II.29 TPAK Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 – 2023

TPAK Daerah dan Nasional memiliki tren yang meningkat. Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tren peningkatan terjadi sejak Tahun 2015, sedangkan Kabupaten Pati terjadi setelah pandemi Tahun 2020. Meningkatnya persentase TPAK memberikan indikasi semakin banyaknya penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja dan tentunya harus pula dibarengi dengan semakin meningkatnya kualitas dan daya saing SDM tenaga kerja (khususnya bagi daerah), lebih-lebih saat ini merupakan momentum menuju puncak bonus demografi (penduduk usia produktif > 60%) yang diprediksi akan terjadi di awal tahun 2030 an. Rasio penduduk usia produktif Kabupaten Pati saat ini sekitar 70% dengan rasio ketergantungan di angka $\pm 43\%$. Semakin tinggi rasio ketergantungan penduduk, berarti ada potensi beban ekonomi keluarga yang harus ditanggung semakin besar dan begitu sebaliknya.

Mendasarkan TPAK di Kabupaten Pati menurut jenis kelamin (gender), secara empiris masih didominasi oleh kelompok laki-laki yang rata-rata mencapai $\pm 83\%$, sedangkan perempuan hanya $\pm 53\%$.



Sumber : BPS Kabupaten Pati 2017-2023

Gambar II.30 TPAK Kabupaten Pati Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 – 2023

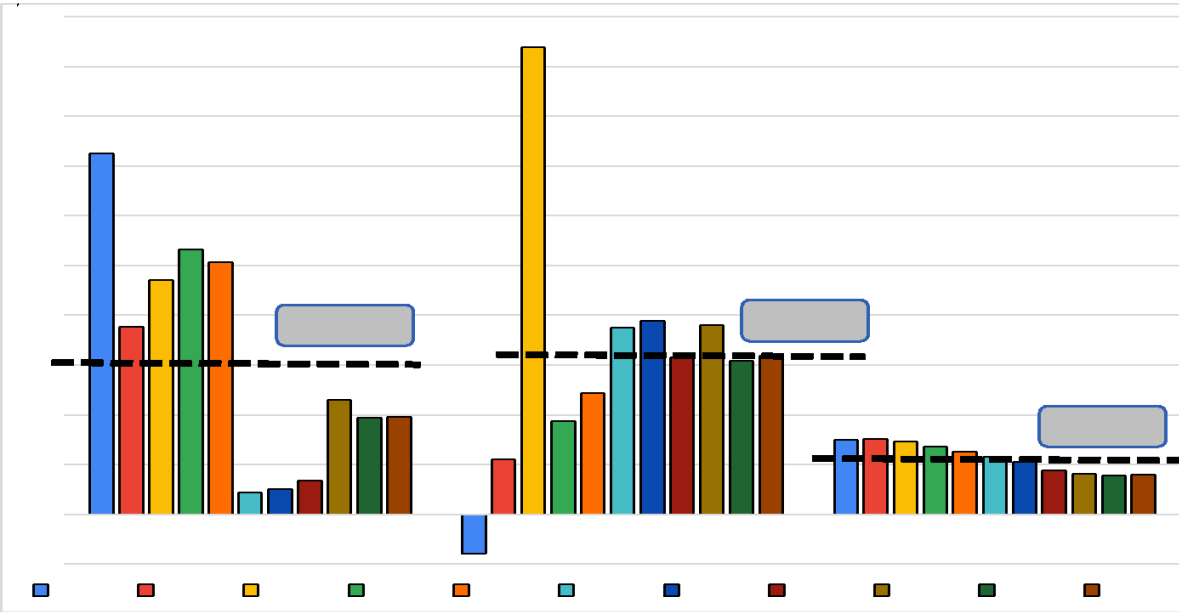
Merujuk pada Gambar di atas, TPAK laki-laki terpuruk pada masa pandemi Tahun 2020, yang kemudian terus bangkit hingga terakhir mencapai 86,82; sedangkan TPAK perempuan pada masa pendemi justru naik dibandingkan tahun sebelumnya dan memiliki tren terus meningkat. *Gap* antara TPAK laki-laki dan perempuan sebelum pandemi $\pm 30\%$ poin dan pasca pandemi sekitar 27% poin. Ada kecenderungan gap semakin mengecil dan diharapkan ke depan akan terjadi kesetaraan, atau minimal gapnya sangat kecil, sehingga kesempatan masuk ke dalam pasar kerja tidak terlalu timpang, tentunya juga harus diimbangi dengan kemampuan ketrampilan atau pengetahuan yang memadai agar memiliki daya saing.

i. Peran BUMD dalam Perekonomian

Secara umum tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum dapat dilihat dari 3 hal yaitu kontribusi terhadap perekonomian utamanya peningkatan nilai tambah atau produksi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Sejauhmana peran dan manfaat BUMD tersebut bagi daerah, tentu tidak luput dari efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada.

Return on Asset BUMD

Kinerja BUMD secara umum dapat dilihat dari kinerja keuangan yang dicapai tiap akhir periode (tahunan, semesteran atau triwulan), salah satunya dari indikator kinerja *return on asset* (RoA) atau imbal hasil atas pengelolaan asset/aktiva. Berikut data RoA BUMD (perumda dan persero yang kepemilikannya 100% milik Pemkab Pati) Tahun 2013 – 2023.



Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Pati

Gambar II.31 RoA BUMD Kabupaten Pati Tahun 2013 – 2023

Sebagaimana Gambar II 31 , imbal hasil PDAM memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dua BUMD yang lain, dengan tren kinerja RoA cenderung melampaui nilai rata-ratanya yang sebesar 6,34%. Perumda Aneka Usaha (PAU) relatif lebih bagus dibandingkan dengan BPR Bank Daerah yang memiliki tren RoA masih jauh dibawah rata-rata RoA yang bernilai 6,18%. Sedangkan BPR bank Daerah memiliki rerata RoA paling kecil dengan nilai sebesar 2,29% dan memiliki tren imbal hasil yang

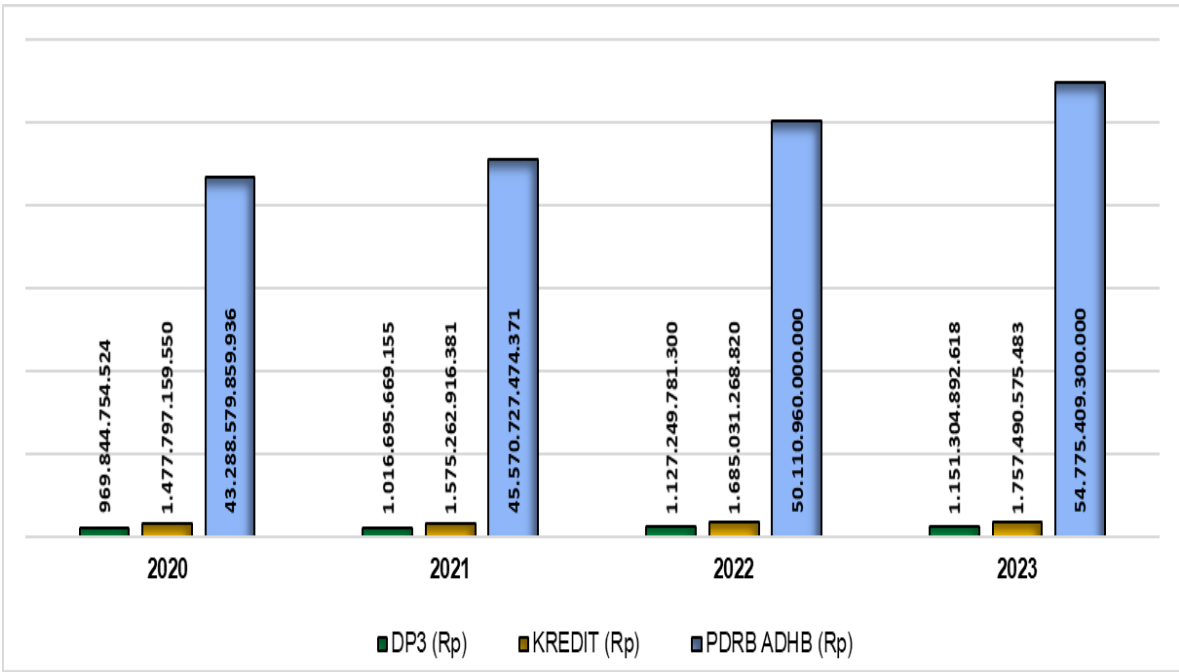
menurun dengan capaian di bawah rata-rata RoA nya. Menurut standar Bank Indonesia, nilai RoA Lembaga Perbankan (bank konvensional) kategori sehat adalah >1,21%.

BUMD yang memiliki kecenderungan kinerja keuangan (RoA) yang menurun dan di bawah rerata RoA nya perlu mendapatkan perhatian yang serius, utamanya dari sisi kualitas/profesionalisme manajerial perusahaannya dan sebaliknya, BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang baik (tren meningkat) perlu didorong untuk terus dikembangkan volume bisnisnya dan jika perlu adanya suntikan modal dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Peran Intermediasi BUMD Perbankan

Kiprah BUMD Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat perlu diperkuat guna ikut mendorong perekonomian yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan bisnis di daerah serta kemampuannya untuk mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebagai instrument untuk menjaga likuiditas perbankan agar selalu dalam kondisi sehat, yang diukur melalui instrumen *loan to deposit ratio* atau LDR yaitu perbandingan antara total kredit yang dikucurkan dengan jumlah simpanan masyarakat (pihak ke-3) plus modal, dengan kriteria sehat apabila Bank memiliki LDR pada kisaran sebesar 50% - 110%.

Berikut data rincian kinerja BUMD Perbankan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2023 sebagaimana digambarkan dalam grafik.



Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Pati

Gambar II.32 Perkembangan Kredit dan Dana Pihak ke-3 BUMD Perbankan Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2023

Gambar II.31 menggambarkan peran intermediasi 3 (tiga) lembaga keuangan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pati yaitu PT. BPR BKK Kab Pati (Perseroda), PT. Bank Jateng (Perseroda) dan PT. BPR Bank Daerah Kab Pati. Total kredit yang dikucurkan kepada masyarakat selama 4 (empat)

tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,95%; sedangkan dana pihak ke tiga yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito tumbuh rata-rata sebesar 5,88%. Ditinjau dari aspek skala ekonomi, nilai dana masyarakat yang terhimpun dalam BUMD Perbankan Tahun 2020-2023 rata-rata sebesar 2,20% dari PDRB, sedangkan rata-rata total kredit yang disalurkan sebesar 3,31% dari PDRB.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan plus tuntutan kinerja keuangan perusahaan untuk mendapatkan laba yang terus meningkat, ke depan akan senantiasa menghadapi berbagai tantangan yang besar seperti digitalisasi sektor keuangan yang sangat masif, persaingan pelaku usaha sektor keuangan yang semakin ketat, dan kebijakan moneter yang cenderung sangat dinamis akibat pengaruh global. Mengacu pada kondisi tersebut, BUMD Perbankan harus terus melakukan terobosan melalui penerapan manajemen yang inovatif dan bisa beradaptasi secara cepat mengikuti tren bisnis sektor keuangan di masa depan.

j. Daya Saing Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dijadikan sebagai unggulan dalam mendorong perekonomian daerah. Pariwisata yang maju mampu menggerakkan ekonomi dan melibatkan banyak pelaku usaha seperti perhotelan, restoran dan rumah makan (kuliner), industri kreatif, transportasi, telekomunikasi, dan usaha UMKM lainnya. Begitu besarnya multiplier effect yang ditimbulkan, memicu banyak daerah termasuk pada tataran nasional, berlomba-lomba untuk terus mengembangkan potensi wisata yang ada dikaitkan dengan karakteristik wilayah masing-masing (kearifan lokal).

Kabupaten Pati, memiliki sejumlah obyek wisata yang bisa dikembangkan. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati Tahun 2011-2030, terdapat sekitar 49 obyek wisata yang terbagi menjadi 3 jenis obyek yaitu alam, religi atau budaya dan buatan. Namun keberadaan obyek-obyek wisata tersebut kurang berkembang dan cenderung stagnan karena pengelolaanya yang tidak optimal. Pengunjung obyek wisata termasuk cukup banyak, namun masih didominasi oleh wisatawan lokal dan minim atau bahkan belum tercatat adanya wisatawan asing.

Kehadiran wisatawan asing secara intensif dan masif (banyak) yang masuk pada suatu daerah baik untuk tujuan rekreasi maupun bisnis, mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, perlu kesadaran Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan daya tarik (atraksi) destinasi yang didukung dengan aksesibilitas, amenities (hotel, restoran/rumah makan, sarana pendukung lainnya) dan kelembagaan pelaku wisata yang memiliki daya saing, sehingga mampu menyedot perhatian wisatawan, tidak hanya domestik namun juga wisatawan mancanegara.

2.3.2. Daya Saing SDM

a. Kualitas Pendidikan

Parameter pembangunan manusia pada dimensi pendidikan selanjutnya adalah kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Selama dua tahun terakhir, dapat dinyatakan bahwa kemampuan literasi

peserta didik SD maupun SMP relatif lebih baik dibandingkan kemampuan numerasinya. Gambaran kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Kabupaten Pati ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel II.15 Kemampuan Literasi dan Numerasi
Tingkat Pendidikan Dasar Tahun 2022-2023**

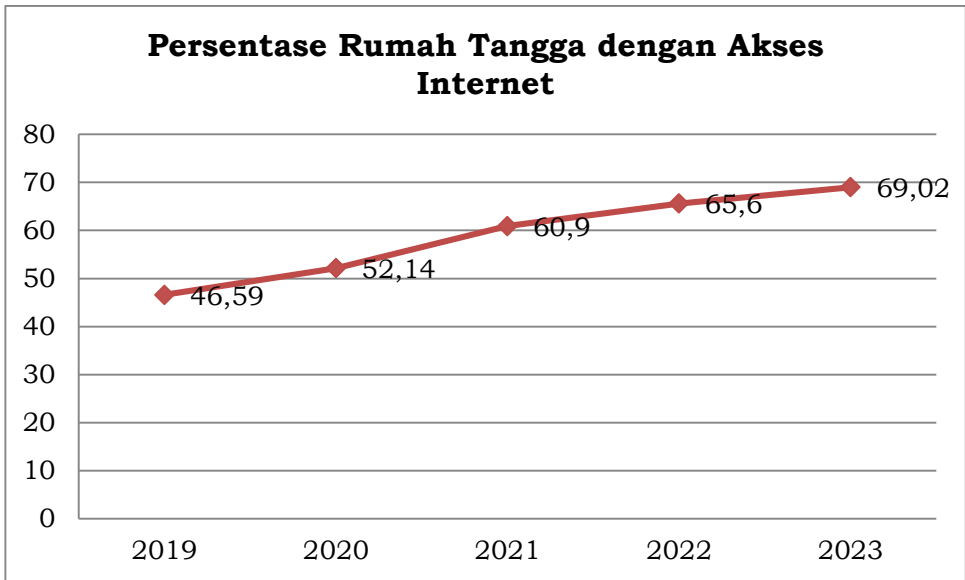
Tingkat Pendidikan	Kemampuan Literasi		Kemampuan numerasi	
	2022	2023	2022	2023
SD/ sederajat	69,52	82,74	49,75	67,83
SMP/ Sederajat	68,55	78,32	46,65	53,34

Sumber: Rapor Pendidikan Kab. Pati (2024)

Tahun 2023, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, untuk jenjang SD dan SMP meningkat dibandingkan kemampuan literasi dan numerasi di tahun 2022. Lebih lanjut, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi untuk tingkat pendidikan SD relatif lebih tinggi dibandingkan untuk jenjang pendidikan SMP. Tahun 2023, peserta didik SD yang memenuhi standar kompetensi meningkat hingga 13,22% untuk kemampuan literasi dan 18,08% untuk kemampuan numerasi. Sementara itu, di tahun yang sama, peserta didik SMP yang memenuhi standar minimal kompetensi meningkat 9,78% untuk kemampuan literasi dan 6,69% untuk kemampuan numerasi. Kesenjangan kualitas peserta didik ditemukan pada jenjang pendidikan SD. Peserta didik dari sekolah umum, cenderung memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih dibandingkan peserta didik SD agama. Namun demikian. Hal tersebut tidak terjadi untuk jenjang pendidikan SMP.

b. Literasi Digital

Secara nasional, hasil survey literasi digital nasional 2020, indeks literasi digital di Indonesia masih berada pada level “sedang”. Indeks literasi digital Indonesia kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2020 Indonesia hanya memperoleh skor 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin). Tahun 2022, Indonesia berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin. Skor tersebut menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia berada pada kategori sedang. Salah satu komponen pendukung peningkatan nilai literasi digital masyarakat yaitu besaran rumah tangga dengan akses internet. Pada tahun 2023 di Kabupaten Pati, data rumah tangga dengan akses internet sebesar 69,02%, ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 65,60%.



Sumber: Diskominfo Kab.Pati, 2024.

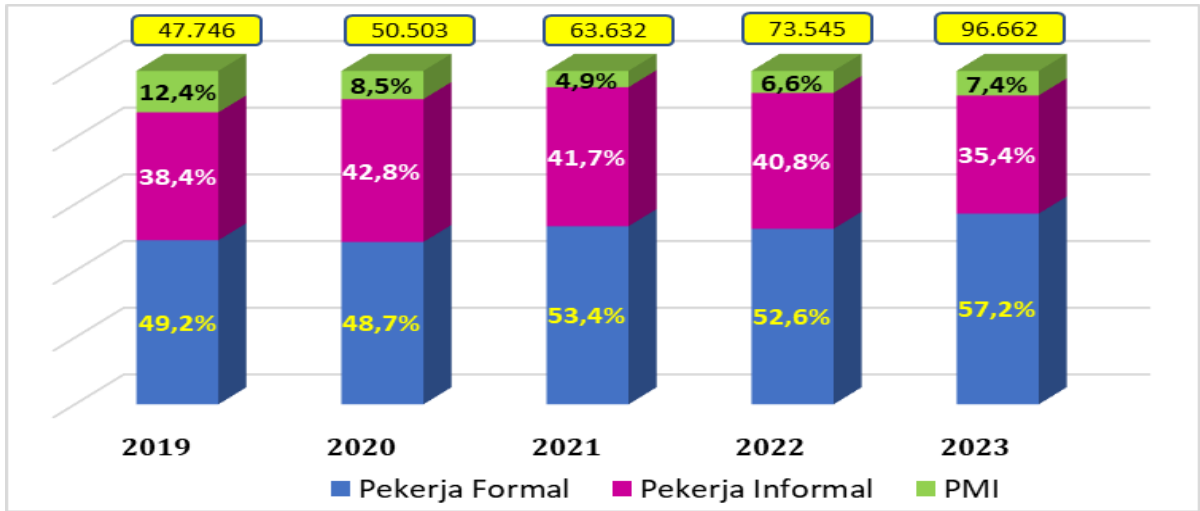
Gambar.II.33 Akses Internet

Pada masa pandemi Covid-19 akses internet mengalami tren kenaikan dimana sebagian besar masyarakat secara bertahap lebih banyak melakukan aktivitas untuk bekerja, pendidikan, bersosial, hiburan, dan mengakses layanan sosial dengan memanfaatkan internet.

c. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan program perlindungan bagi masyarakat pekerja atas berbagai macam resiko yang bisa terjadi seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, sakit, memasuki hari tua dan pensiun.

Hingga saat ini, cakupan layanan jamsostek masih didominasi oleh peserta (pekerja) yang bekerja di sektor formal, tak terkecuali di Kabupaten Pati. Data dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pati menunjukkan bahwa selama 5 (lima) terakhir rata-rata kepesertaan jamsos pekerja formal sebesar 52,2%, pekerja informal 39,8% dan pekerja migran 7,9%. Berikut data kepesertaan pekerja dalam Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Pati Tahun 2019-2023.



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pati

Gambar II.34 Kepesertaan Pekerja dalam Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pati Tahun 2019 – 2023

Layanan jaminan sosial ketenagakerjaan harus terus didorong dan diperluas cakupan layanannya, guna memberikan rasa keadilan bagi para pekerja utamanya terhadap berbagai kemungkinan negatif yang muncul pada lingkungan kerja, tidak hanya pekerja formal. namun penting juga kepada para pekerja informal maupun pekerja migran yang sangat rentan mendapatkan perlakuan tidak adil di lingkungan kerjanya. Sebagaimana amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah mendorong kepada Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk memperluas jangkauan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

a. Infrastruktur Wilayah

Kondisi infrastruktur Kabupaten Pati secara umum dalam kondisi baik didukung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Jalan kewenangan Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2023 dengan kondisi jalan mantap sebesar 78,82% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 80,49% hal ini dikarenakan kondisi cuaca ditambah drainase jalan yang kurang baik serta masih adanya kendaraan angkutan barang dengan beban melebihi kapasitas angkut. Kondisi jalan Kabupaten Pati 2023 jika dilihat dari kondisi permukaan jalan yaitu jalan kondisi baik sebesar 58,04%, dan sedang sebesar 10,78%. Sedangkan jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 8,17%, dan rusak berat sebesar 13,01%.

Prasarana perhubungan sangat penting kaitannya dengan aksesibilitas Kabupaten Pati. Transportasi Kabupaten Pati didukung oleh transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi darat terdapat terminal penumpang tipe C, namun berdasarkan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 direncanakan pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Margorejo dan terminal tipe A di Kecamatan Pati. Terminal tipe C merupakan terminal yang berfungsi melayani angkutan pedesaan. Terminal ini berada di Kecamatan Pati, Tayu dan Juwana. Kabupaten Pati juga didukung adanya transportasi laut yang mendukung sektor perikanan, yang terdiri dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo di Kecamatan Juwana, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu TPI Juwana di Kecamatan Juwana, TPI Alasdowo dan TPI Puncel di Kecamatan Dukuhseti, TPI Margomulyo dan TPI Sambiroto di Kecamatan Tayu, dan TPI Pecangaan di Kecamatan Batangan.

Prasarana sumberdaya air adalah prasarana pengembangan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan, pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah. Prasarana sumberdaya air yang ada di Kabupaten Pati yaitu waduk, embung, bendung dan sistem irigasi. Waduk di Kabupaten Pati ada dua yaitu Waduk Seloromo atau Waduk Gembong dan Waduk Gunungrowo. Waduk Seloromo atau juga disebut Waduk Gembong adalah sebuah waduk yang terletak di kaki Gunung Muria sebelah tenggara. Secara administratif, waduk ini terdapat di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Waduk ini membendung aliran Sungai Silugonggo yang merupakan anak Sungai Sani di Desa Pohgading. Luasnya sekitar 5 km² mencakup dua desa di

Kecamatan Gembong yaitu Desa Gembong dan Desa Pohgading. Normalnya waduk ini dapat menampung 9.503.000 m³ air yang berasal dari empat sungai yang tidak terlalu besar yaitu Sungai Bengkal, Sungai Juwono, Sungai Bajangan dan Sungai Sumuran. Waduk ini menjadi sumber pendapatan bagi Desa Gembong dan sekitarnya. Selain sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian (sawah) seluas 4.959.00 ha di Kecamatan Gembong dan kecamatan-kecamatan sekitar seperti Wedarijaksa, Juwana, Tlogowungu, dan Pati juga dipergunakan sebagai lokasi pembudidayaan ikan tawar. Waduk Gunungrowo merupakan sebuah waduk yang terletak di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong. Waduk ini terletak di lembah di antara beberapa puncak bukit di lereng Gunung Muria sebelah timur. Luas areal area waduknya sekitar ±320 hektar dan mampu menampung air sekitar 5,5 juta m³, sekaligus juga sebagai suplai bagi Waduk Seloromo. Dulu Waduk Gunung Rowo bersama Waduk Seloromo mampu mengairi sawah seluas sekitar 10.000 hektar, yang tersebar di wilayah Kecamatan Margorejo, Gembong, Wedarijaksa, Juwana, Tlogowungu, dan Pati.

Selain waduk, prasarana sumberdaya air waduk terdapat juga embung-embung yang ada di Kabupaten Pati. Embung-embung di Kabupaten Pati banyak digunakan sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian (sawah) dan sebagai tempat penampungan air. Dengan adanya embung-embung di Kabupaten Pati sangat berguna bagi masyarakat khususnya Pati Selatan yang memiliki kerawanan bencana kekeringan. Indeks kinerja sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, dimana mengacu kepada Sistem Jaringan Irigasi yang terdiri dari bendung, jaringan irigasi dan daerah irigasi di Kabupaten sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati terdapat 327 DI dengan luasan 20.965 Ha.

b. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Luas kawasan kumuh di Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 050/3985 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 050/4852 Tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati adalah sebesar 181,58 Ha yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Pati, Tayu, Juwana, Kayen, Batangan, Dukuhseti, dan Margoyoso. Hingga tahun 2021 luas kawasan kumuh masih tersisa 23,47 Ha yaitu di Desa Banyutowo (3,69 Ha), Puncel (10,36 Ha), dan Kayen (9,42 Ha). Namun kemudian pada Tahun 2021 identifikasi kembali kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan memasukkan kawasan kumuh yang sebelumnya belum teridentifikasi.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 050/3985 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati, luas kawasan kumuh yang ditetapkan adalah 177,89 Ha.

Pada tahun 2023 rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 70,92%, menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 72,65%. Walaupun secara kuantitas mengalami kenaikan dimana rumah layak huni tahun 2023 sebanyak 255.699 unit, sedangkan tahun 2022 sebanyak 253.073 unit. Untuk jumlah RTLH pada Tahun 2022 sebanyak 13.305 unit mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 yaitu menjadi 21.300 unit. RTLH yang ditangani dengan berbagai sumber pendanaan yaitu dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Masih banyaknya RTLH di

Kabupaten Pati memerlukan kolaborasi dan peran serta dari berbagai sektor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta (*corporate social responsibilities/ CSR*).

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2021 sebesar 15,38% terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 13,26%. rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada tahun 2021 sebesar 72,42% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 73,53%. Selanjutnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2023 sebesar 324.610 KK terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 321.236 KK.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Demokrasi

Pembahasan tentang kondisi demokrasi di Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 diukur dengan Indeks Demokrasi, dimana saat ini perhitungan indeks dimaksud baru dilakukan mulai tahun 2023 sehingga belum dapat menunjukkan kondisi eksisting maupun tren berdasar indikator dimaksud. Indeks Demokrasi merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi, dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen.

Provinsi Jawa Tengah mendapatkan indeks demokrasi peringkat ketiga nasional pada 2022 sebesar 84,79 poin, dimana hal tersebut tentu saja menggambarkan juga kondisi Kabupaten Pati sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu target indeks demokrasi dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah 78,37.

b. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum diamanatkan diukur dengan Indeks Rasa Aman dan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, dimana saat ini perhitungan indeks dimaksud belum dilakukan sehingga belum dapat menunjukkan kondisi eksisting maupun tren berdasar indikator dimaksud. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di wilayah atau komunitas. Indeks ini mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Indeks rasa aman biasanya didasarkan pada berbagai aspek seperti keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan sosial, dan lainnya. Selanjutnya Indeks Ketenteraman dan Ketertiban umumnya digunakan untuk menilai tingkat ketenteraman dan ketertiban dalam suatu wilayah. Indeks ini mungkin mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, seperti tingkat kejahatan, efektivitas penegakan hukum, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi stabilitas suatu daerah.

Kaitannya dengan indeks ketentraman dan ketertiban, kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pati diukur dengan angka penurunan penyakit masyarakat, angka kriminalitas yang tertangani, dan persentase penanganan pelanggaran K3. Penurunan penyakit masyarakat dari tahun 2018-2022 dapat terus ditingkatkan yang bermakna bahwa penyakit masyarakat terus menurun. Kriminalitas yang

tertangani juga semakin baik, dimana pada Tahun 2018 sebesar 1,5 sedangkan pada akhir 2022 meningkat menjadi 3,1. Dalam hal penanganan pelanggaran K3 mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2018 tertangani 97%, meningkat menjadi 98% pada 2020, kemudian menurun lagi menjadi 87% pada Tahun 2022.

c. Kerukunan Umat Beragama

Meskipun agama bukan merupakan kewenangan Kabupaten Pati, kerukunan umat beragama menjadi penting dalam mendukung kondusivitas wilayah. Komponen ini mestinya diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama, akan tetapi terkait dengan kewenangan tersebut saat ini perhitungan indeks dimaksud belum dilakukan sehingga belum dapat menunjukkan kondisi eksisting maupun tren berdasar indikator dimaksud. Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat terkait dengan faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengukur kerukunan antarumat beragama termasuk tingkat toleransi, dialog antaragama, hak-hak minoritas, kebebasan beragama, dan tindakan atau kebijakan pemerintah yang mendukung kerukunan beragama.

Jika dikaitkan dengan hal tersebut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kerukunan umat beragama di Kabupaten Pati dapat dikatakan sangat baik. Bukti terbaru adalah keberadaan tempat ibadah Gereja dan Vihara berdampingan dengan Masjid di desa Jrahi dan desa giling Kecamatan Gunungwungkal menjadi simbol kerukunan umat beragama. Hal itu pula yang menjadikan Kementerian Agama meresmikan Desa Jrahi dan Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal sebagai Kampung Moderasi Beragama (KMB). Perayaan Tahun Baru Imlek yang diadakan dengan menyelenggarakan Pasar Semawis yang dihadiri oleh masyarakat Kabupaten Pati, apapun agamanya, menjadi bukti bahwa kerukunan umat beragama sangat baik.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pati juga sangat strategis, dimana forum ini sering menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memupuk kerukunan umat beragama. Sebagai contoh, menjelang tahun politik FKUB juga menyelenggarakan Deklarasi 'Damai Umat Beragama' dengan pembubuhan tanda tangan para tokoh agama, menyosialisasikan Peraturan Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum Kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, ke seluruh elemen masyarakat. Isu pendirian rumah ibadah ini seringkali muncul di berbagai wilayah dan sampai saat ini tidak ada (atau sangat minimal) muncul isu tersebut di Kabupaten Pati.

d. Daya Saing Daerah

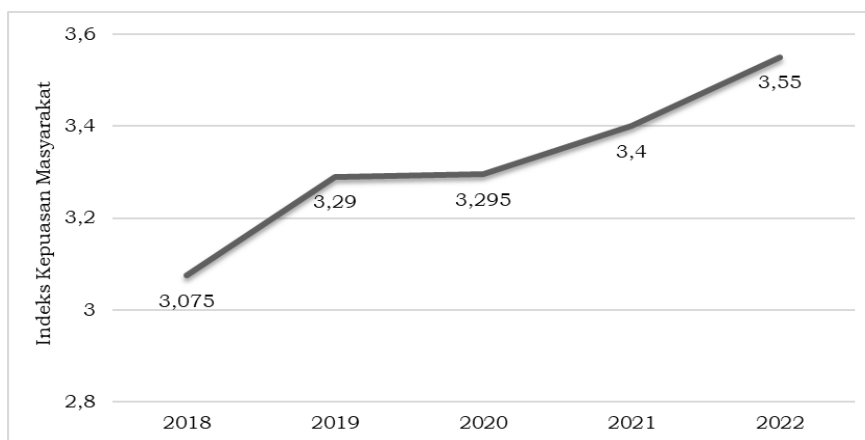
Jika merujuk pada Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 sebesar 3,37. Pemetaan daya saing Kabupaten Pati dapat ditunjukkan dalam aspek pembangunan yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia (SDM), pasar serta ekosistem inovasi. Untuk aspek lingkungan pendukung terdiri atas pilar 1 institusi dengan nilai 4,54, pilar 2 infrastruktur dengan nilai 1,51, pilar 3 adopsi TIK dengan nilai 4.51, dan pilar 4 stabilitas ekonomi makro dengan nilai 3.31. Aspek sumber daya manusia terdiri atas pilar 5 kesehatan dengan nilai 4.33, dan Pilar 6 keterampilan (skill) dengan nilai 3.45. Aspek pasar terdiri atas pilar 7 pasar produk dengan nilai 2.60, pilar 8 tenaga kerja dengan nilai 3.00, pilar 9 sistem keuangan dengan nilai

3.17, dan pilar 10 ukuran pasar dengan nilai 4.64. Sedangkan aspek ekosistem inovasi terdiri atas pilar 11 dinamika bisnis dengan nilai 3.42, dan pilar 12 kapasitas inovasi dengan nilai 1.95. Dari duabelas pilar tersebut yang masih memiliki nilai cukup rendah yaitu pilar 2 infrastruktur, pilar 7 pasar produk serta pilar 12 kapasitas inovasi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

a. Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pati pada tahun 2021 yang dirilis oleh KemenPAN RB adalah A-. Hal ini sama dengan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran kualitas pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perangkat daerah yang menyediakan pelayanan.



Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Pati (2019-2023)

Gambar II.35 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022

Selama periode lima tahun terakhir dapat dinyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan kriteria dari Kemenpan RB No. 14 tahun 2017, selama lima tahun terakhir, pelayanan publik di Kabupaten Pati berada pada kategori Baik. Peningkatan tertinggi selama periode tersebut terjadi di tahun 2019 dengan peningkatan mencapai 0,215 poin dari periode sebelumnya. Sementara itu, di tahun 2020, kepuasan masyarakat tidak berbeda jauh dengan nilai IKM di tahun 2019, yang mengindikasikan kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas belum menunjukkan peningkatan. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya penyediaan layanan publik. Perbaikan kinerja kembali ditunjukkan di tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat dari peningkatan IKM di tahun tersebut sebesar 0,105 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu melakukan transformasi penyediaan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat walaupun pandemi Covid19 masih terjadi. Selanjutnya, di tahun 2022, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kembali meningkat sebanyak 0,15 poin menjadi 3,55.

Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didasarkan pada sembilan unsur pelayanan. Dari sembilan unsur tersebut, lima unsur termasuk dalam kategori sangat baik, meliputi Persyaratan Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Kompetensi/Kemampuan Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan. Sementara itu,

empat unsur lainnya mendapat kategori Baik, meliputi Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Produk Pelayanan, dan Sarana & Prasarana. Selanjutnya, keempat unsur inilah yang membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

b. Inovasi Daerah

Kapabilitas inovasi menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses-proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. Merupakan indikator pembentuk Pilar 12 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang. Indeks kapasitas inovasi Kabupaten Pati berdasarkan data BRIN tahun 2023 sebesar 1,95 dengan rincian keanekaragaman tenaga kerja sebesar 3,91; publikasi ilmiah sebesar 2,53; aplikasi kekayaan intelektual sebesar 1,21; belanja riset sebesar 0,13; indeks keunggulan lembaga riset sebesar 0,51; serta aplikasi merk dagang sebesar 3,42.

c. E-Government

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

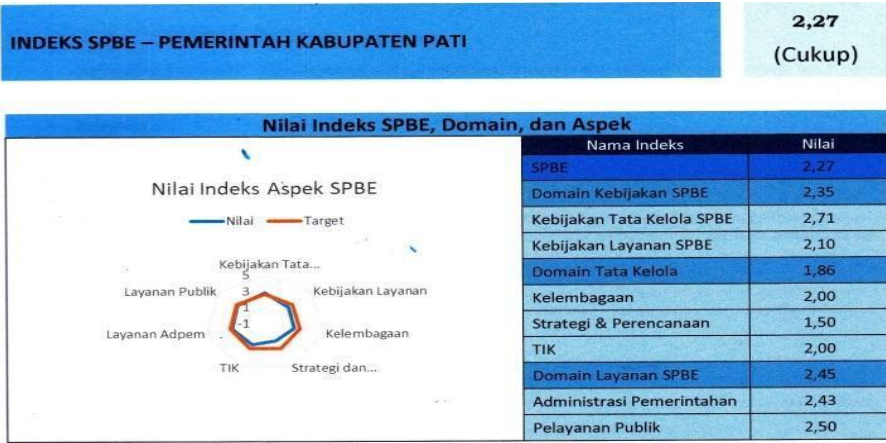
Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Pati tahun 2021 adalah 2,75 dengan predikat baik, sampai saat ini Kabupaten Pati belum ikut dilakukan penilaian lagi. Capaian ini didapat karena Kabupaten Pati

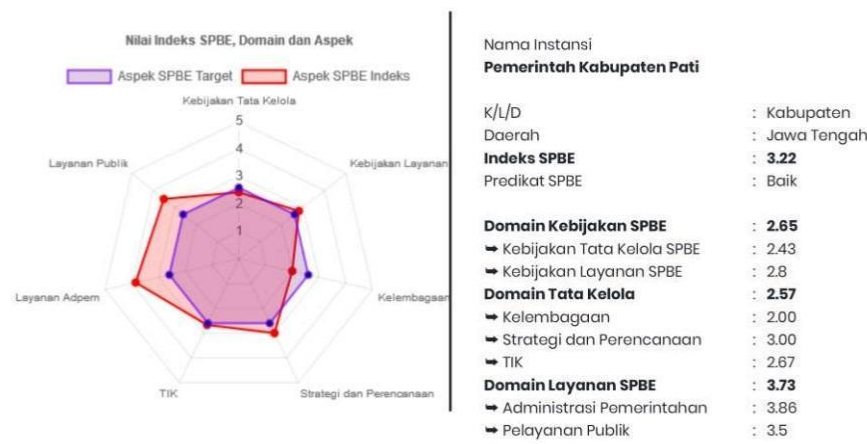
dianggap memiliki keunggulan pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dengan adanya Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah mengamanatkan koordinasi secara menyeluruh baik internal Instansi maupun lintas instansi. Pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terlihat layanan kolaborasi dengan adanya pengintegrasian aplikasi pada Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kepegawaian Layanan Kinerja Pegawai. Penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik juga terlihat layanan kolaborasi dengan adanya pengintegrasian aplikasi pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Layanan Publik Sektor 2 (Aplikasi pajak e-Go) Layanan Publik Sektor 3 (Aplikasi SIMRS). Seluruh Keunggulan saling terkait dan membuat pelaksanaan sistem pemerintahan di internal Pemerintah Kabupaten Pati menjadi efektif dan efisien baik dari anggaran maupun kinerja yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Pati juga masih terdapat kelemahan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Audit TIK. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat adanya layanan pada Layanan Kearsipan Layanan Publik Sektor 1 (Aplikasi SIM UKPBJ). Penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang memang sudah direncanakan dan telah dianggarkan namun pada pelaksanaan masih ada yang belum terlaksana sehingga seluruh layanan yang akan diberikan kepada publik masih tidak ditemukan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari layanan pemerintah.

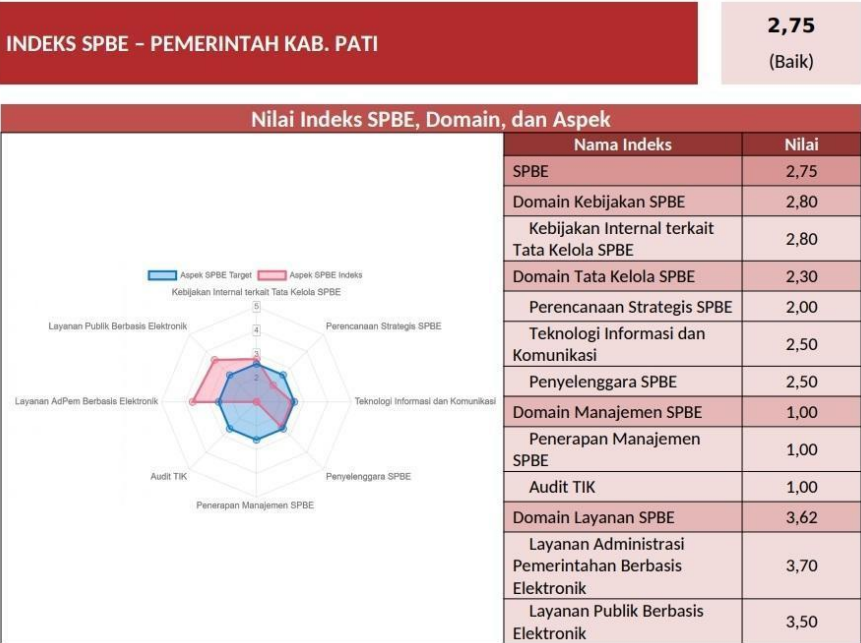
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Pati. Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Audit TIK yang belum ada agar dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku serta mengacu rencana induk di Pemerintah Kabupaten Pati. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Pati juga dapat dilengkapi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE dan aspek penerapan SPBE lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang diminta.



NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK



Gambar II.36 Indeks SPBE Tahun 2020



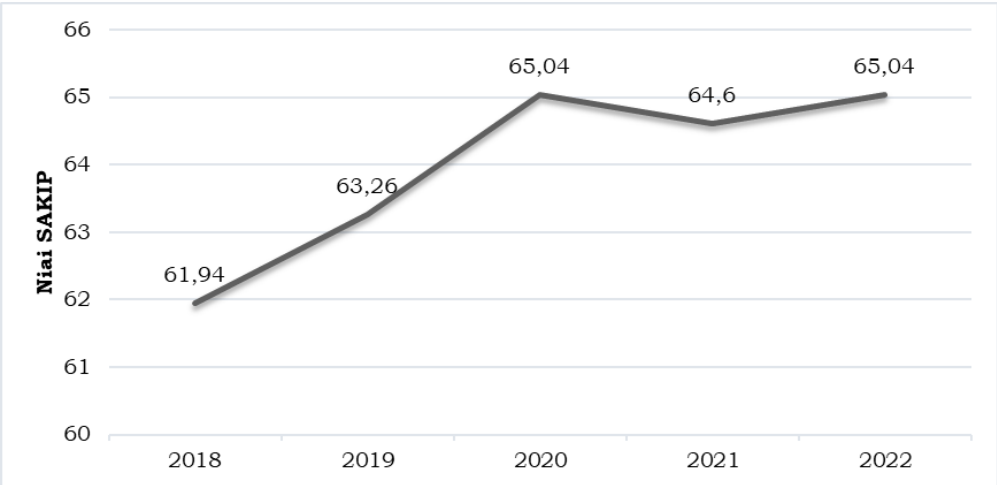
Gambar II.37 Indeks SPBE Penilaian Tahun 2021

d. Reformasi Birokrasi

Aspek Reformasi Birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh kementerian PAN RB, indeks reformasi birokrasi Pemkab

Pati di tahun 2021 adalah 63,01 dengan kategori B. Indeks RB di tahun 2021 tersebut meningkat dibandingkan Indeks RB di tahun 2020, yaitu 62,02. Tahun 2022, Indeks RB Kabupaten Pati kembali mengalami peningkatan menjadi 63,27. Analisis terhadap setiap komponen penilaian indeks RB menunjukkan komponen Reform memiliki nilai yang cukup rendah. Lebih lanjut berdasarkan review tersebut, penurunan pada hasil antara area perubahan disebabkan oleh kualitas kebijakan yang belum optimal, profesionalitas ASN yang masih rendah, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang belum memadai, dan Pemenuhan pelayanan publik yang belum sesuai standar.

Salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi adalah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui penilaian SAKIP. Penilaian SAKIP selama periode tahun 2018 hingga 2022 ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar II.38 Nilai SAKIP Kabupaten Pati Tahun 2018-2022

Hingga tahun 2020, penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2018, dimana Kabupaten Pati mampu meningkatkan peringkat menjadi B dari sebelumnya memiliki peringkat CC. Namun demikian, di tahun 2021, Kabupaten mengalami penurunan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 0,44 poin menjadi 64,6. Selanjutnya di tahun 2022, nilai SAKIP Kabupaten Pati kembali meningkat menjadi 65,04 sebagaimana capaian nilai SAKIP di tahun 2020 serta mendapatkan predikat B.

Gambaran capaian penilaian SAKIP Kabupaten Pati selama periode 2018 hingga 2022 pada setiap kategori ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II.16 Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Periode 2018-2022

Komponen	Nilai per-Komponen				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perencanaan Kinerja	19,89	20,12	21,21	21,23	21,03
Pengukuran Kinerja	16,56	16,63	17,01	16,26	21,66
Pelaporan Kinerja	9,96	10,47	10,50	10,16	9,15
Evaluasi Internal	5,58	5,91	6,06	6,21	13,20

Sumber: Hasil Penilaian Evaluasi AKIP, 2019-2022

Dari lima komponen penilaian AKIP, Perencanaan Kinerja memiliki bobot tertinggi mencapai 30. Sebagai komponen dengan bobot tertinggi, komponen perencanaan kinerja memiliki nilai tertinggi diantara komponen

SAKIP lainnya. Setelah Perencanaan Kinerja, Urutan komponen penilaian SAKIP berdasarkan bobot secara berturut-turut adalah Pengukuran Kinerja bobot (25), Capaian Kinerja (20), Pelaporan (15), dan Evaluasi Internal (10). Selama periode 2016 hingga 2020, setiap komponen mengalami peningkatan dengan nilai yang berbeda.

Analisis terhadap capaian SAKIP di tahun 2022 menunjukkan bahwa setiap komponen penilaian memiliki kelemahan yang memerlukan perbaikan. Terkait dengan perencanaan, dapat dinyatakan bahwa dokumen perencanaan telah disusun berdasarkan isu strategis daerah. Selain itu, perencanaan daerah telah dijabarkan mulai dari level pemerintah daerah hingga level jabatan terkecil. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan antara lain indikator kinerja yang disusun belum spesifik, terukur, relevan, dan cukup. Perencanaan pada level perangkat daerah, masih ditemukan sasaran strategis yang belum menjawab isu strategis sesuai dengan Tupoksi perangkat daerah tersebut. Selanjutnya, penjabaran kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan kausalitas dan pemecahan masalah yang dihadapi.

Pengukuran kinerja telah menunjukkan kinerja yang cukup baik di tahun 2022. Namun demikian, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain masih terdapatnya beberapa program kegiatan yang tidak memiliki kontribusi yang signifikan bagi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penerapan e-sakip belum optimal karena pengukuran kinerja individu masih didasarkan pada aktivitas rutin, bukan aktivitas yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Terkait dengan pelaporan kinerja, telah dilakukan dengan tepat waktu. Namun demikian, laporan kinerja pada level perangkat daerah belum dianalisis secara mendalam sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemantauan atas capaian kinerja di level perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja yang diperlukan. Kelemahan dalam tata kelola pemerintahan selanjutnya terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, utamanya terkait evaluasi yang dilaksanakan masih terbatas pada pelaksanaan program dan serapan anggaran, serta belum mengarah kepada evaluasi terhadap keselarasan antar kegiatan, hasil program, dan kinerja pada setiap perangkat daerah.

Reformasi birokrasi juga mencakup kinerja pelaporan keuangan. Capaian kinerja pelaporan keuangan Kabupaten Pati selama periode 2018-2022 tercantum dalam tabel berikut.

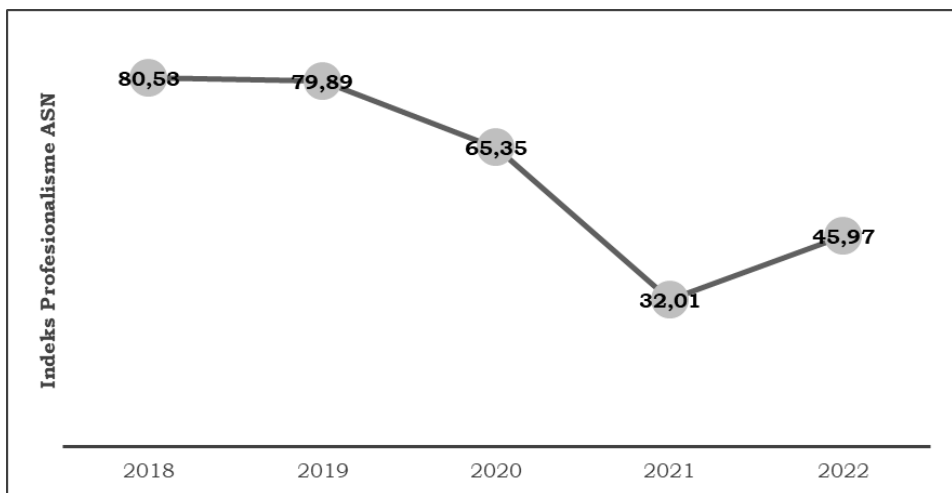
Tabel II.17 Status Pelaporan Keuangan Periode 2018-2022

Status Laporan Keuangan				
2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan apabila Kabupaten Pati mampu menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang cukup memuaskan selama lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari status Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, walaupun masih terdapat beberapa proses yang masih memiliki kelemahan dan memerlukan perbaikan.

Reformasi birokrasi tidak dapat terwujud tanpa dukungan ASN yang berkualitas. Pengukuran kualitas ASN dilakukan dengan Indeks

Profesionalisme ASN yang memiliki empat dimensi, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Capaian Kabupaten Pati dalam meningkatkan profesionalitas ASN ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: BKPP Kab. Pati (2023)

Gambar II.39 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa Indeks Profesionalitas (IP) ASN di Kabupaten Pati menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2021. Bahkan, penurunan indeks profesionalitas ASN di tahun 2021 mencapai 30 poin yang disebabkan oleh perubahan formulasi penghitungan indeks profesionalitas ASN. Selanjutnya di tahun 2022, indeks profesionalitas ASN berada di angka 45,97 yang dapat dimaknai IP ASN berada pada kategori sangat rendah (≤ 60). Analisis terhadap komponen pengukuran indeks profesionalitas ASN, kompetensi merupakan dimensi dengan capaian kinerja terendah dibandingkan komponen lainnya. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh sebagian ASN belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan yang dimiliki. Oleh karenanya penataan ASN merupakan upaya yang harus dilakukan selain mengintensifkan keikutsertaan pelatihan dan diklat sesuai dengan kebutuhan baik yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal.

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum. IRH merupakan amanat dari Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perundangan tersebut menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

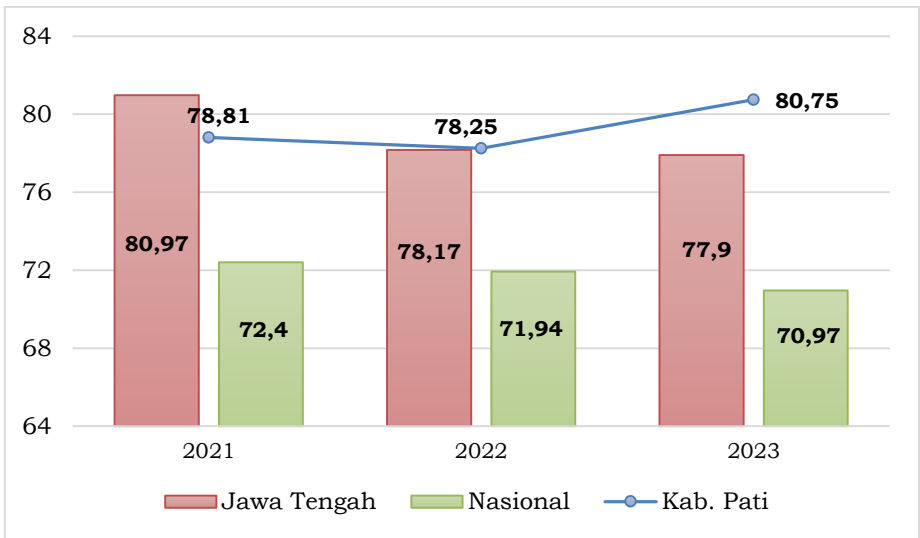
Indeks Reformasi Hukum dinilai berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu (1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan indikator (a) Pengajuan permohonan pengharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang Undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Ditjen PP/Instansi

pemrakarsa/K/L terkait); (2) Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas, meliputi: (a) Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan dan (b) Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan workshop baik secara klasikal maupun non-klasikal; (3) Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang undangan berdasarkan hasil reuiu, meliputi (a) Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan UU dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, (b) Proporsi tahunan jumlah peraturan perundang undangan yang dievaluasi, (c) Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan/peninjauan UU dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dan (d) Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, (4) Penataan Penataan Database Peraturan Perundang-Undangn, meliputi Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

e. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat integritas instansi yang terdiri tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian ekspert/ahli. Indeks Penilaian Internal, mengukur persepsi pegawai terhadap dimensi (1) budaya organisasi, (2) sistem antikorupsi, (3) pengelolaan SDM, dan (4) Pengelolaan anggaran. Indeks Penilaian Eksternal, mengukur persepsi pengguna layanan (masyarakat) terkait (1) transparansi, (2) sistem antikorupsi dan (3) integritas pegawai. Indeks Penilaian Ekspert digunakan untuk mengungkapkan permasalahan integritas pada institusi secara komprehensif terkait dimensi (1) transparansi dan (2) sistem anti korupsi.

Selama kurun waktu 2021-2023, Indeks Integritas Kabupaten Pati selalu lebih tinggi dibandingkan Indeks Integritas Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: <https://www.jaga.id/>

Gambar II.40 Indeks Integritas Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Selama kurun waktu 2021-2023, Indeks integritas Kabupaten Pati menunjukkan fluktuasi, namun lebih baik dibandingkan indeks integritas Jawa Tengah dan Nasional. Selama kurun waktu tersebut, indeks integritas Kabupaten Pati berada pada kategori terjaga, Sementara Jawa Tengah berada pada kategori waspada dan Nasional berada pada kategori rentan.

f. Kapasitas Fiskal Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwujudkan dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 dan direvisi lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pembagian kewenangan di pemerintah daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 mengenai pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Otonomi Daerah berarti pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Hak otonomi yang luas memberi jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Oleh karna itu setiap daerah dituntut dapat membiayai daerahnya masing-masing melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Sumber keuangan daerah pada umumnya masih terbatas pada kebanyakan daerah otonom sama halnya yang Kabupaten Pati alami. Pendapatan asli daerah Kabupaten Pati masih rendah dan masih membutuhkan alokasi dana tranfer dari Pemerintah Pusat maupun provinsi. Kondisi pendapatan Kabupten Pati sebagaimana pada tabel 4.1 di bawah ini.

Pendapatan daerah Kabupaten Pati selama kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun masih didominasi oleh dana transfer baik dana transfer dari provinsi maupun dari pusat. Pada Tabel 4.1. terlihat bahwa proporsi dana transfer terhadap pendapatan Kabupaten Pati selalu di atas 50% sejak tahun 2011 hingga tahun 2023 dengan rata-rata proporsi dana transfer terhadap Pendapatan sebesar 72,38%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten Pati memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan daerah pada dana perimbangan disebabkan oleh rendahnya tingkat kapasitas fiskal pada banyak daerah di Indonesia seperti Kabupaten Pati.

Tabel II.18 Proporsi Pendapatan Tahun 2011-2023 (Kapasitas Fiskal Daerah)

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAD	134.475.561.623	163.733.665.531	169.127.415.979	279.254.884.135	310.063.640.827	290.469.281.000	449.821.345.800	384.041.846.939	363.997.151.178	371.708.005.192	388.607.252.979	363.635.711.000	352.918.519.000
2	Dana Treansfer	809.997.548.224	997.544.585.124	1.094.864.463.993	1.163.930.993.710	1.214.974.988.666	1.635.956.294.000	1.689.030.336.220	2.302.274.053.924	2.355.465.506.446	2.173.448.276.835	2.218.729.244.498	2.301.704.545.000	2.194.980.989.000
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	284.536.121.441	316.714.939.102	442.039.008.028	497.389.826.286	656.653.331.608	538.751.659.000	630.391.261.452	102.739.958.991	119.418.738.557	117.219.154.979	117.828.568.804	20.428.496.000	800.000.000
	Total Pendapatan	1.229.009.231.288	1.477.993.189.757	1.706.030.888.000	1.940.575.704.131	2.181.691.961.101	2.465.177.234.000	2.769.242.943.472	2.789.055.859.854	2.838.881.396.181	2.662.375.437.006	2.725.165.066.281	2.685.768.752.000	2.548.699.508.000
	% Pad Terhadap Pendapatan	10,94	11,08	9,91	14,39	14,21	11,78	16,24	13,77	12,82	13,96	14,26	13,54	13,85
	% Dana Transfer Terhadap Pendapatan	65,91	67,49	64,18	59,98	55,69	66,36	60,99	82,55	82,97	81,64	81,42	85,70	86,12
	% Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan	23,15	21,43	25,91	25,63	30,10	21,85	22,76	3,68	4,21	4,40	4,32	0,76	0,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Pati, 2011-2023.

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen dari fiskal, khususnya dari sisi penerimaan daerah, diperoleh dan disusun berdasarkan hasil pengelolaan keuangan tahun sebelumnya guna mendanai rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Tabel.II.19 Proporsi Pendapatan Kabupaten Pati Tahun 2011-2023

No	Tahun	RasioKapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1	2022	1,390	Rendah
2	2023	1,016	Rendah

Sumber: Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2022-2023.

Menurut Tabel di atas kapasitas Kabupaten Pati masih tergolong rendah hal ini berarti bahwa kemampuan keuangan daerah masih terbatas. Dengan keuangan yag terbatas maka Kabupaten Pati sudah selayaknya memikirkan alternatif penyediaan fasilitas publik secara efisien dan efektif. Salah satu alternatif untuk menjaga efisiensi belanja daerah yaitu dengan bekerja sama dengan pihak swasta/*Public Private Partnership* (PPP) atau lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan proyek sarana layanan publik yang menguasai hajat hidup masyarakat. Mengingat kebutuhan infrastruktur Kabupaten Pati sangat tinggi sedangkan ketersediaan anggaran pembangunan terbatas. Pemerintah Kabupaten Pati lebih memiliki kesempatan menyediakan layanan infrastruktur yang memadai kepada publik dengan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berkesinambungan tentunya dengan tetap memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak dengan skema KPBU.

Pelaksanaan KPBU telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Capaian Pembangunan

Capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2005-2022, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.20 Capaian Kinerja Makro Pembangunan Tahun 2005–2022

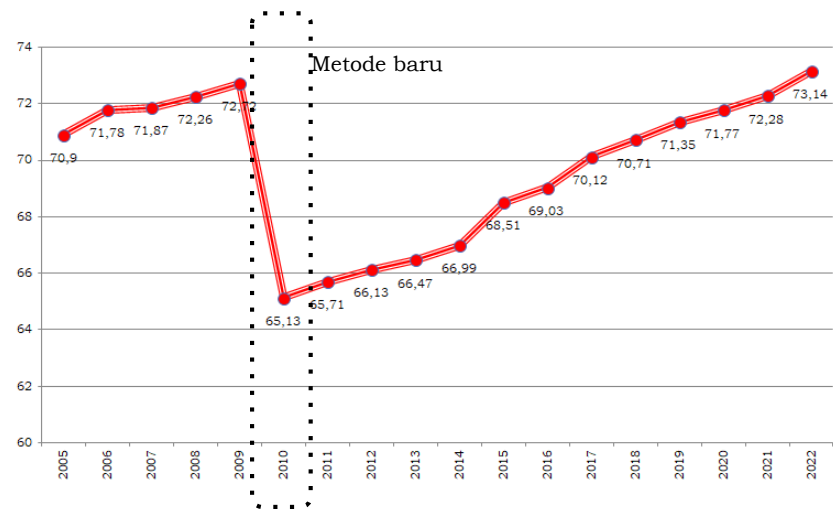
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/ penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,9	73,14	3,16	Data awal menggunakan metode penghitungan IPM lama, mulai tahun 2010 sudah menggunakan metode baru. IPM semakin meningkat
2	Angka Kemiskinan	19,82	9,33	52,93	Terjadi penurunan angka kemiskinan
3	Angka Pengangguran	4,16	4,45	6,97	Terjadi kenaikan angka pengangguran
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,94	5,56	41,12	Terjadi pertumbuhan ekonomi
5	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	4,85	37,1	664,95	Terjadi kenaikan pendapatan perkapita
6	Ketimpangan Pendapatan	0,21	0,358	70,48	Capaian awal tahun 2007, ketimpangan semakin naik
7	PDRB Perkapita (juta rupiah)	4,85	37,10	664,50	PDRB perkapita, semakin meningkat

Capaian IPM Kabupaten Pati pada awal RPJPD tahun 2005 sebesar 70,9 dengan capaian indikator penyusun IPM dapat dirinci sebagai berikut: AHH sebesar 72,58 tahun; AMH sebesar 84,31%; RLS sebesar 6,36 tahun; dan pengeluaran per kapita sebesar 632,82 ribu rupiah. Penghitungan IPM dengan menggunakan metode ini berakhir pada tahun 2013 dengan capaian Kabupaten Pati sebesar 74,58, mengalami peningkatan sebesar 3,68 poin atau 5,19% dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,64%.

Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan indikator baru dan penghitungan rata-rata indeks juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru tahun 2014. Indikator yang digunakan adalah usia harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita. Metode ini menyebabkan level IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama. Penggunaan penghitungan IPM dengan metode baru ini juga menyebabkan capaian IPM di Kabupaten Pati menjadi lebih rendah. Capaian IPM di Kabupaten Pati dari tahun 2010-2013 berturut-turut sebesar 65,13; 65,71; 66,13; dan 66,47. Angka ini menjadikan Kabupaten Pati berada pada level pembangunan manusia sedang.

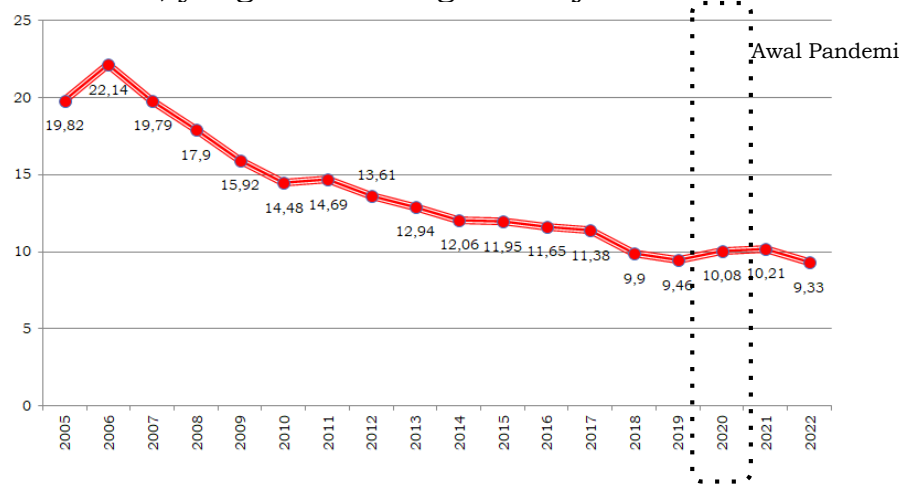
Metode baru memberikan potret pembangunan manusia lebih utuh. Pembangunan manusia Kabupaten Pati terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010-2022, IPM Kabupaten Pati telah meningkat 8,01 poin, yaitu dari 65,13 menjadi 73,14. Dalam kurun waktu itu, IPM Kabupaten Pati tumbuh 0,97% per tahun. Kemajuan ini berhasil kembali menempatkan Kabupaten Pati pada level pembangunan manusia “tinggi”. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Pati didorong oleh kemajuan indikator yang membentuk IPM. UHH di Kabupaten Pati tahun

2022 telah mencapai lebih dari 76 tahun, sementara secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan setara dengan kelas 2 SMP (belum tamat) dan penduduk usia 7 tahun ke atas berpeluang menempuh pendidikan hingga Diploma I (belum tamat). Ekonomi Kabupaten Pati yang semakin membaik turut mendorong pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Pati menjadi 10.948 ribu rupiah.



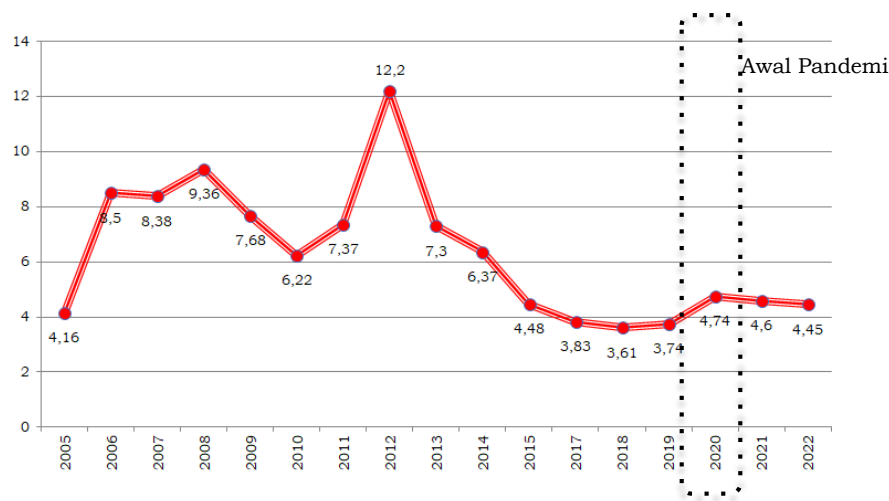
Gambar II.41 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2022

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Mengacu pada hal tersebut, penduduk miskin di Kabupaten Pati pada tahun 2005 sebesar 233 ribu jiwa atau 19,82% dengan garis kemiskinan sebesar 159.558 rupiah. Kinerja Kabupaten Pati untuk menanggulangi kemiskinan dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati turun secara signifikan menjadi 118,04 ribu jiwa atau 9,33% dengan garis kemiskinan sebesar 486.855 rupiah. Penurunan sebesar 52,93% selama periode RPJPD ini cukup baik, mengingat di akhir periode RPJMD ketiga tahun 2017-2022 kondisi perekonomian di Kabupaten Pati mengalami kontraksi karena adanya pandemi -19, yang bisa meningkatkan jumlah kemiskinan.



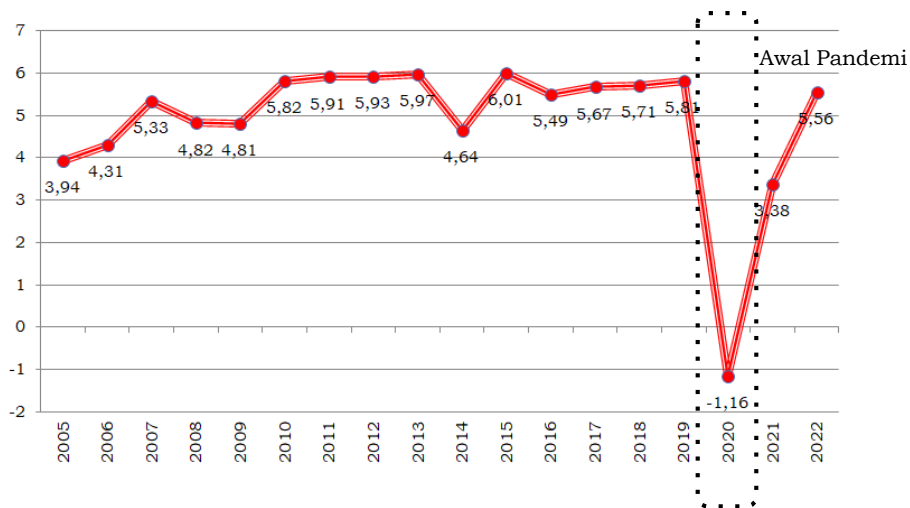
Gambar II.42 Tingkat Kemiskinan Tahun 2005-2022

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan. TPT dihitung membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja Selama periode 2005-2022, TPT maupun jumlah pengangguran di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005, TPT di Kabupaten Pati sebesar 4,16% dengan jumlah pengangguran sebesar 26.242 jiwa. Angka ini berhasil turun pada tahun 2018 menjadi 3,61% dengan jumlah pengangguran sebesar 23.485 jiwa. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang telah meruntuhkan beberapa lapangan usaha sehingga meningkatkan TPT maupun jumlah pengangguran. Sampai dengan tahun 2022, TPT di Kabupaten Pati meningkat 29 basis poin menjadi sebesar 4,45% bila dibandingkan dengan capaian awal RPJPD, dengan jumlah pengangguran meningkat 22,9% menjadi sebesar 32.270 jiwa. Peningkatan TPT maupun jumlah pengangguran tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah angkatan kerja sebagai dampak dari bonus demografi yang sedang dialami Kabupaten Pati.



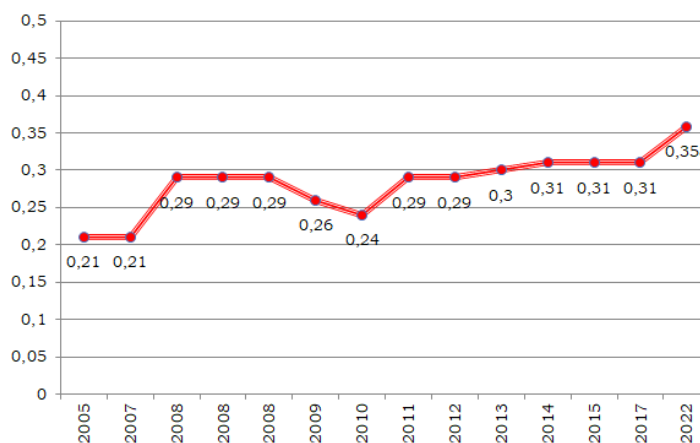
Gambar II.43 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2005-2022

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada awal RPJPD tahun 2005, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati sebesar 3,94% dan sampai dengan tahun 2022 berhasil meningkat 162 basis poin menjadi 5,56%. Selama periode 2005-2022 pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh bencana alam akibat perubahan iklim, resesi ekonomi, maupun pandemi Covid-19. Namun demikian, apabila dilihat secara rata-rata per tahun, ekonomi Kabupaten Pati mampu tumbuh sebesar 4,84%.



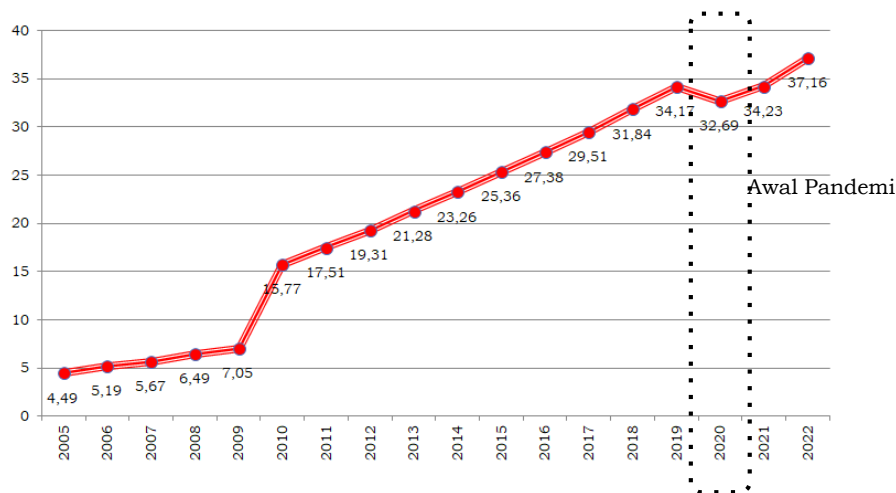
Gambar II.44 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2022

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataannya bagi seluruh masyarakat yang dapat diketahui dari indikator tingkat ketimpangan. Untuk mengukur tingkat ketimpangan, digunakan data *gini ratio* yang dikeluarkan oleh BPS. Pada tahun 2005, *gini ratio* Kabupaten Pati sebesar 0,21 dan berada pada kategori timpang rendah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, *gini ratio* di Kabupaten Pati juga mengalami peningkatan 14,8 basis poin menjadi 0,358 pada tahun 2022 dan berada pada kategori timpang sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.



Gambar II.45 Indeks Gini Tahun 2005-2022

Indikator terakhir yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dalam dokumen ini adalah pendapatan per kapita yang dihitung dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita Kabupaten Pati tahun 2005 sebesar 4,85 juta rupiah dan berhasil meningkat sebesar 664,95% menjadi 37,1 juta rupiah pada tahun 2022.



Gambar II.46 Pendapatan per Kapita Tahun 2005-2022

2.5.2. Rekomendasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, untuk menyusun RPJPD periode selanjutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Pembangunan hendaknya memprioritaskan pada kualitas sumberdaya manusia, fundamental perekonomian, kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan;
- Pelaksanaan pembangunan perlu diarahkan pada: (1) penyediaan dan pemerataan layanan, sarana, dan prasarana dasar; (2) penguatan lapangan usaha utama pendukung perekonomian daerah; (3) peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (4) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

2. Rekomendasi Gubernur atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/29 Tahun 2023 Tanggal 11 Juli 2023 Tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum:

- Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan ada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai
2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan citacita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (core value) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten pati Tahun 2025-2045, untuk:
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023;
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Indikator Makro Pembangunan
- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk:
 - 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat;
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 dengan:
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.

2.6. Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi Kabupaten Pati Tahun 2025 sd. 2045 dijabarkan dalam proyeksi jumlah penduduk, jumlah penduduk berdasarkan umur, serta berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan ketiga hal tersebut, proyeksi struktur penduduk pada tahun 2025 sd. 2045 dapat menunjukkan beberapa hal yang penting untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebutuhan sarana prasarana serta intervensi pembangunan hingga dua puluh tahun mendatang. Keseluruhan proyeksi menggunakan data tahun 2020 sebagai tahun dasar, dengan pola trend yang dibangun berdasarkan pertumbuhan penduduk alami dan migrasi. Proyeksi dilakukan oleh BPS Kabupaten Pati, berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan sebelumnya.

a. Perkembangan Jumlah Penduduk

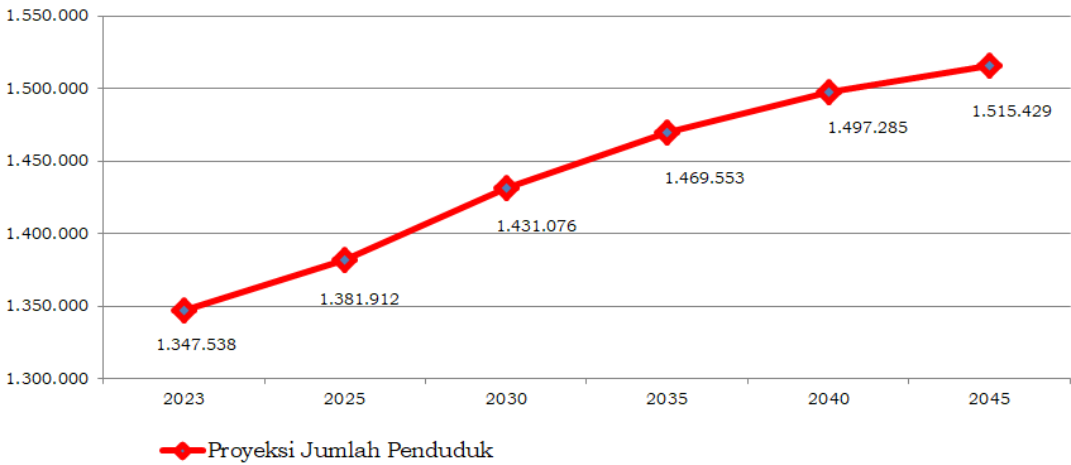
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Kabupaten Pati, jumlah penduduk Kabupaten Pati adalah 1.324.188 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Pati diproyeksikan akan terus meningkat selama 20 tahun sampai dengan Tahun 2045.

Berdasarkan analisis proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan BPS Kabupaten Pati, berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dan Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pati diproyeksikan meningkat sebesar 12,46% dari 1.347.538 jiwa pada Tahun 2022 menjadi 1.515.429 pada Tahun 2045, atau bertambah 167.891 jiwa selama 20 tahun.

Tabel II.21 Proyeksi Jumlah Penduduk

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)*	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429
Tingkat Pertumbuhan (%)					
	-	0,034	0,026	0,019	0,012

*) Menggunakan Data Tahun 2022
Sumber: Analisis BPS Kabupaten Pati, 2023



Sumber: Analisis BPS Kabupaten Pati, 2023

Gambar II.47 Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan data di atas, proyeksi penduduk pada tahun 2045 menunjukkan akan terdapat peningkatan jumlah penduduk namun dengan laju pertumbuhan yang cenderung melambat sebagai hasil dari menurunnya tingkat fertilitas, dimana pada Tahun 2030 jumlah penduduk akan tumbuh sebesar 0,034% dibanding 5 (lima) tahun sebelumnya dan pada Tahun 2045 hanya akan tumbuh sebesar 0,012%. Fenomena ini merupakan fenomena di seluruh wilayah, dimana BPS mencatat angka kelahiran di Indonesia menurun. Ini tercermin dari *total fertility rate (TFR)* hasil sensus penduduk Tahun 2020 sebesar 2,18 yang turun dari 2,41 pada satu dekade sebelumnya.

Penurunan tingkat fertilitas tersebut diikuti dengan peningkatan usia harapan hidup yang akan mengakibatkan pergeseran piramida penduduk. Struktur penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk usia produktif, namun dalam jangka panjang bergerak menuju *ageing population* (penduduk usia lanjut). Perubahan struktur penduduk berdampak pada faktor penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan.

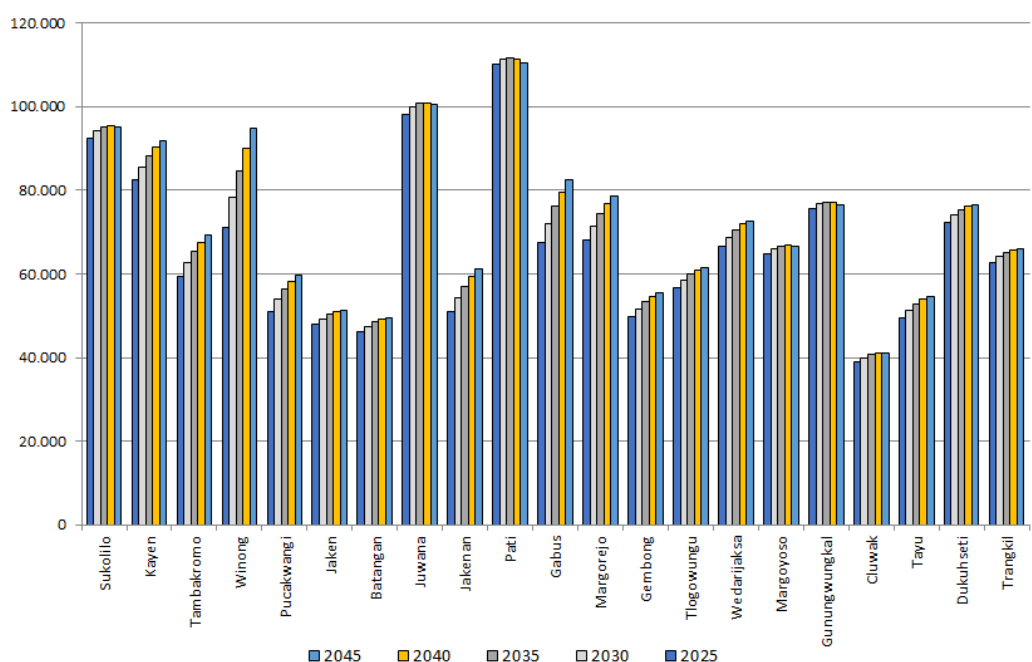
b. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dijabarkan menurut sebaran wilayah, jenis kelamin, dan kelompok umur. Masing-masing distribusi ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel II.22 Distribusi Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kecamatan

No .	Kecamatan/ Kabupaten	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)*	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sukolilo	91.158	92.450	94.074	95.034	95.354	95.131
2	Kayen	80.078	82.346	85.638	88.281	90.268	91.662
3	Tambakromo	57.086	59.261	62.527	65.299	67.556	69.334
4	Winong	66.663	71.156	78.187	84.533	90.112	94.932
5	Pucakwangi	49.200	51.072	53.883	56.269	58.211	59.740
6	Jaken	46.859	47.865	49.264	50.301	50.981	51.346
7	Batangan	45.262	46.206	47.509	48.466	49.079	49.392
8	Juwana	96.831	98.136	99.752	100.665	100.905	100.573
9	Jakenan	48.991	51.098	54.297	57.060	59.359	61.223
10	Pati	109.139	110.201	111.351	111.731	111.386	110.440
11	Gabus	64.339	67.392	72.063	76.144	79.593	82.441
12	Margorejo	65.664	67.990	71.455	74.364	76.694	78.491
13	Gembong	48.306	49.687	51.693	53.308	54.525	55.383
14	Tlogowungu	55.201	56.526	58.402	59.845	60.855	61.481
15	Wedarijaksa	64.901	66.510	68.801	70.580	71.845	72.653
16	Margoyoso	63.891	64.787	65.910	66.568	66.777	66.607
17	Gunungwungkal	74.843	75.675	76.634	77.059	76.979	76.475
18	Cluwak	38.372	39.066	39.998	40.641	41.002	41.119
19	Tayu	48.217	49.513	51.379	52.860	53.951	54.692
20	Dukuhseti	70.942	72.290	74.119	75.411	76.176	76.483
21	Trangkil	61.595	62.685	64.140	65.134	65.677	65.831
	Kabupaten Pati	1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429

*) Menggunakan Data Tahun 2022
Sumber: Analisis BPS Kabupaten Pati, 2023



Gambar II.48 Distribusi Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kecamatan

Tabel sebaran penduduk di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Pati dan Juwana tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling besar. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk, terdapat beberapa kecamatan dengan pertumbuhan menurun memasuki Tahun 2035 sd. Tahun 2045, yaitu Kecamatan Sukolilo, Juwana, Pati, Margoyoso, Gunungwungkal, dan Cluwak. Wilayah-wilayah inilah yang memberikan kontribusi penurunan pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati.

Kualitas penduduk berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik fisik maupun nonfisik (kecerdasan, mental, dan spiritual). Kualitas penduduk sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan, sebab pembangunan akan optimal jika pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan produktivitas. Data empiris menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan output perekonomian yang rendah.

Hubungan antara kualitas penduduk dan PDB per kapita bersifat timbal balik dan dinamis. Kualitas penduduk yang tinggi memiliki produktivitas yang juga tinggi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Di sisi lain, penciptaan nilai tambah yang tinggi memungkinkan negara mendapatkan sumber pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan, sehingga dengan kemampuan pembiayaan tersebut memungkinkan akselerasi pembangunan manusia. Salah satu indikator penduduk yang perlu mendapat perhatian adalah komposisi penduduk, sebab indikator ini memiliki implikasi yang luas dalam pembangunan, seperti pasar tenaga kerja, pelayanan kesehatan, penyediaan jaminan pensiun, dan pelayanan pendidikan. Komposisi penduduk yang terlalu didominasi oleh penduduk usia tua atau terlalu muda dapat berimplikasi pada tingginya beban pengeluaran negara. Sebagai contoh, apabila komposisi penduduk lebih banyak pada kelompok usia anak, maka anggaran negara akan lebih banyak dialokasikan pada pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, apabila komposisi penduduk

lebih banyak yang berusia tua, maka anggaran akan lebih banyak dialokasikan untuk biaya kesehatan dan jaminan pensiun.

Keseimbangan komposisi penduduk dapat dilihat dari indikator rasio beban ketergantungan yang menggambarkan seberapa banyak penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Rasio beban ketergantungan memengaruhi kondisi ekonomi dan kualitas manusia suatu bangsa. Keterkaitan antara rasio beban ketergantungan dengan berbagai indikator pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa rasio ketergantungan memiliki korelasi negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu rasio ketergantungan usia muda dan lansia berkorelasi kuat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan produktivitas total dimana jika rasio beban ketergantungan meningkat satu satuan, maka akan menurunkan IPM sebesar 0,6131.

Selain komposisi penduduk yang digambarkan dengan rasio ketergantungan, terdapat beberapa faktor demografi yang juga berimplikasi luas dalam pembangunan. Faktor tersebut di antaranya adalah jumlah dan kualitas penduduk, sebaran penduduk menurut wilayah, dan akses penduduk untuk peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lainnya.

Tabel II.23 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa*)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	672.299	689.964	714.784	733.790	747.239	756.060
Perempuan	675.239	691.948	716.292	735.763	750.046	759.369
Rasio	1,004	1,003	1,002	1,003	1,004	1,004

*) Menggunakan Data Tahun 2022; Sumber: Analisis BPS Kabupaten Pati, 2023

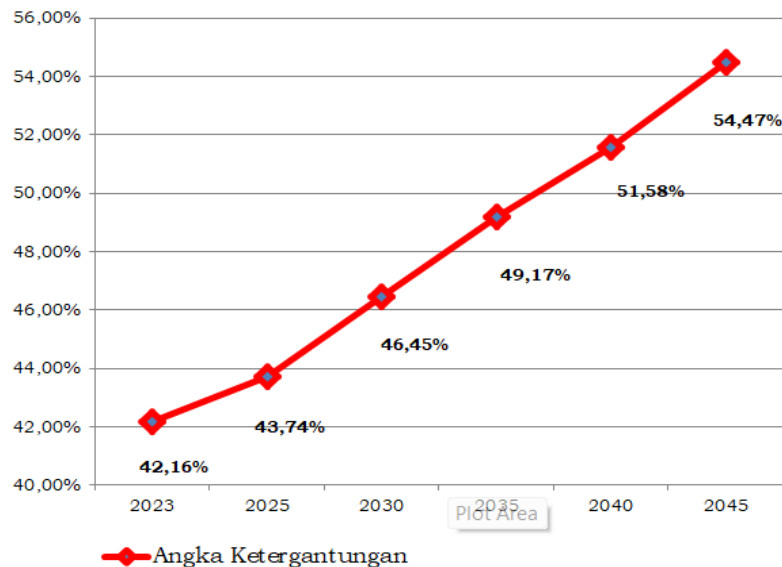
Tabel distribusi penduduk menurut jenis kelamin di atas menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2045 penduduk berjenis kelamin perempuan akan selalu lebih besar dari penduduk laki-laki meskipun dengan perbedaan jumlah yang tidak terlalu besar, dengan rasio antara 1,002 – 1,004.

Tabel II.24 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa*)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	280.463	280.515	277.900	272.032	264.344	258.569
15-64 Tahun	947.906	961.429	977.171	985.155	987.796	981.056
> 65 Tahun	119.169	139.968	176.005	212.366	245.145	275.804
Angka Ketergantungan	42,16%	43,74%	46,45%	49,17%	51,58%	54,47%

*) Menggunakan Data Tahun 2022; Sumber: Analisis BPS Kabupaten Pati, 2023

Tabel distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2045 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan >65 tahun) semakin besar jumlahnya sehingga angka ketergantungan semakin meningkat, bahkan pada tahun 2045 jumlah penduduk tidak produktif mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk produktif (54,47%), sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.



Sumber: Analisis, 2023

Gambar II.49 Perkembangan Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Pati diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun 2045, dikarenakan komposisi penduduk menurut usia akan berubah, dimana penduduk usia di atas 65 tahun akan meningkat.

c. Bonus Demografi

Bonus demografi diartikan sebagai kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia kerja) lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi menjadi mudah tercukupi. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, potensi permintaan konsumsi juga menjadi besar, sebab penduduk usia produktif secara umum memiliki konsumsi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya. Bonus demografi juga ditandai dengan kecenderungan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian sehingga menyebabkan komposisi penduduk kategori anak-anak menjadi turun dan penduduk lanjut usia (lansia) cenderung meningkat. Penurunan komposisi anak menandakan bahwa jumlah anak dalam keluarga menjadi lebih sedikit sehingga secara tidak langsung dapat mendukung produktivitas anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan ekonomi, karena mereka jadi dapat lebih fokus bekerja atau menjalankan usaha, dibandingkan apabila jumlah anak dalam keluarga lebih banyak.

Penduduk usia produktif adalah kontributor utama dalam kegiatan ekonomi. Meskipun kelompok usia anak dan lanjut usia juga dapat berkontribusi, tapi peran keduanya tidak besar dan sering kali tidak ditujukan untuk memperoleh pendapatan utama. Peran penduduk usia produktif dalam perekonomian berbanding lurus dengan nilai tambah kegiatan ekonomi yang diciptakan. Hasil kajian terhadap data persentase banyaknya penduduk usia produktif dan PDRB per kapita menunjukkan bahwa provinsi dengan komposisi penduduk usia produktif yang besar cenderung memiliki nilai PDRB per kapita yang besar juga.

Kontribusi aktif penduduk usia produktif dalam perekonomian akan semakin memberikan dampak positif bagi pembangunan jika memiliki

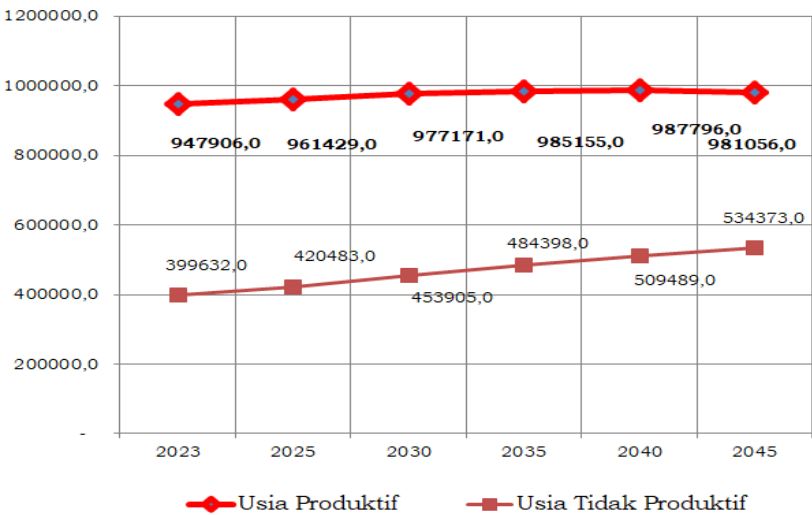
kualitas yang baik. Kualitas tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas. Namun demikian, untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas diperlukan upaya bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, dan masing-masing individu. Upaya pemerintah dalam penyiapan lapangan pekerjaan tidak akan memberikan pengaruh yang optimal bagi penyerapan tenaga kerja jika penduduk usia produktif tidak memiliki kualitas yang sesuai. Penduduk usia produktif yang terjun ke dunia kerja diharapkan dapat memenuhi standar kemampuan atau kompetensi, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif (Utomo, 2010). Peningkatan kemampuan (skill) dan kompetensi berkaitan dengan peningkatan potensi diri melalui peningkatan ilmu pengetahuan (Emilia dkk, 2020). Idealnya, hal ini bersesuaian dengan permintaan pasar tenaga kerja yang dinamis. Kemampuan dan kompetensi perlu ditingkatkan pada dua sisi secara seimbang, yaitu antara hard skill dan soft skill. Dari sisi hard skill, penduduk usia produktif bisa meningkatkan skill-nya dengan mengikuti pelatihan, menempuh pendidikan yang berkualitas, hingga mengambil sertifikasi. Sementara dari soft skill dapat diperoleh atau ditingkatkan melalui kegiatan yang meningkatkan kreativitas, inovasi, optimisme, dan pemikiran positif.

Bonus demografi adalah keadaan saat jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja berusia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan usia nonproduktif, 0-14 tahun dan di atas 64 tahun. Perbandingan antara usia produktif dan usia non produktif sampai dengan Tahun 2045 digambarkan dalam Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel II.25 Proyeksi Perbandingan antara Usia Produktif dan Usia Non Produktif

Kelompok Usia	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Usia Produktif	947.906	961.429	977.171	985.155	987.796	981.056
Usia Tidak Produktif	399.632	420.483	453.905	484.398	509.489	534.373
Jumlah Penduduk	1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429

*) Menggunakan Data Tahun 2022
Sumber: Analisis BPS Kabupaten Pati, 2023



Sumber: Analisis, 2023
Gambar II.50 Proyeksi Perbandingan antara Usia Produktif dan Usia Non Produktif

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2045, jumlah penduduk produktif masih akan lebih banyak daripada penduduk non produktif yang telah dimulai sejak tahun 2018, yang bermakna bahwa dalam 20 tahun ke depan Kabupaten Pati masih akan memiliki bonus demografi.

Namun demikian, peningkatan usia non produktif lebih tinggi dari usia produktif, dimana pada Tahun 2045 proporsi usia non produktif telah meningkat menjadi 54,47%.

d. Penduduk Usia Tua

Selain bonus demografi, data komposisi penduduk menurut umur juga menginformasikan tentang rasio ketergantungan, yaitu perbandingan komposisi usia nonproduktif dengan usia produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antargenerasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Indikator ini juga dapat dirinci menurut kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak dan usia lanjut. Rasio ketergantungan di Indonesia masih didominasi ketergantungan penduduk umur anak-anak (0-14 tahun) sebagaimana terlihat di Tabel 3. Rasio ketergantungan yang tinggi pada kelompok umur anak-anak berimplikasi munculnya kebutuhan investasi yang lebih tinggi pada pembangunan sekolah dan perawatan anak. Secara perlahan, rasio ketergantungan penduduk usia anak-anak mulai turun dari waktu ke waktu, tetapi rasio ketergantungan penduduk lansia (65 tahun ke atas) meningkat sebagai dampak dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama penurunan angka kematian bayi dan peningkatan umur harapan hidup. Perubahan struktur penduduk yang mengarah pada peningkatan jumlah usia kerja diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian. Namun demikian, hal ini sepenuhnya dapat terwujud secara optimal. Kajian BPS (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi akibat transisi demografi dan mobilitas penduduk ternyata belum menunjukkan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pertambahan kapital, bukan teknologi (Total Factor Productivity/ TFP). Hasil kajian juga menunjukkan bahwa lamanya window opportunity untuk setiap provinsi berbeda-beda.

Seperti disebutkan sebelumnya, bonus demografi umumnya diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran (TFR) sebagai pengaruh dari program KB yang masih berjalan hingga saat ini dan menurunnya kematian pada kelompok umur lansia yang disebabkan perbaikan kondisi kesehatan.

Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan selanjutnya populasi mengalami fase penuaan penduduk (ageing population). Pada tahun 2040, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 57 juta penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) atau lebih dari 18 % jumlah populasi (BPS, Bappenas, UNFPA, 2018).

Perubahan struktur umur yang mengarah pada penuaan penduduk juga memiliki dampak terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, dampak tersebut bervariasi antarnegara. Hal ini dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki, kondisi domestik dan global, respons kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara. Penuaan penduduk mengakibatkan penurunan kapasitas fisik dan perubahan preferensi dan kebutuhan individu. Penuaan penduduk yang dibarengi

dengan perlambatan pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Secara umum terdapat hubungan negatif antara penuaan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (Lisenkova, dkk, 2012). Proporsi yang lebih tinggi pada kelompok lansia diyakini dapat menurunkan tingkat produktivitas suatu negara, terutama bila tidak diimbangi dengan peningkatan investasi dan teknologi.

2.7. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Pesatnya pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan peningkatan aktivitas pembangunan menyebabkan peningkatan kebutuhan seperti perumahan, infrastruktur, lahan, dan kebutuhan sarana prasarana lainnya. Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi faktor penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan pada suatu wilayah di Indonesia sebagian besar selalu tertinggal dibandingkan dengan kecepatan laju pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data empiris menunjukkan bahwa populasi penduduk yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan upaya yang tepat dan mencukupi dalam menjaga lingkungan telah berkontribusi terjadinya kerusakan. Hal inilah yang kemudian menjadikan daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi menghadapi permasalahan berkembangnya pemukiman kumuh, peningkatan jumlah sampah, serta pencemaran air, udara, tanah.

Daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi memiliki tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Penyediaan sarana kebutuhan masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lain menjadi lebih banyak, sementara ruang yang tersedia terbatas. Kepadatan penduduk yang tinggi juga memerlukan kegiatan ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja yang mencukupi. Jika kegiatan ekonomi yang tercipta kurang memiliki daya serap tenaga kerja, dapat menimbulkan masalah pengangguran dan bila tidak tertangani akan memunculkan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerenggangan sosial.

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun ke depan disusun berdasarkan hasil proyeksi demografi yang dirinci per lima tahun. Kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan meliputi kebutuhan: (1) Rumah/tempat tinggal; (2) Air bersih; (3) Energi/listrik; (4) Persampahan; (5) Sarana Kesehatan; (6) Sarana Pendidikan; dan (7) Sarana Proteksi Kebakaran.

2.7.1. Rumah/ Tempat Tinggal dan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan

permukiman. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, perkembangan budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu bidang strategis dalam upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan kebutuhan rumah layak dalam lingkungan sehat tentunya menjadi kewajiban masyarakat sendiri, pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga memberikan peluang kepada dunia usaha menyediakan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan rumah dan kawasan permukiman hingga dua puluh tahun mendatang perlu dilakukan analisis kebutuhan rumah yang menjadi dasar penyediaan rumah ke depan. Berikut merupakan hasil analisis kebutuhan rumah di Kabupaten Pati hingga tahun 2045:

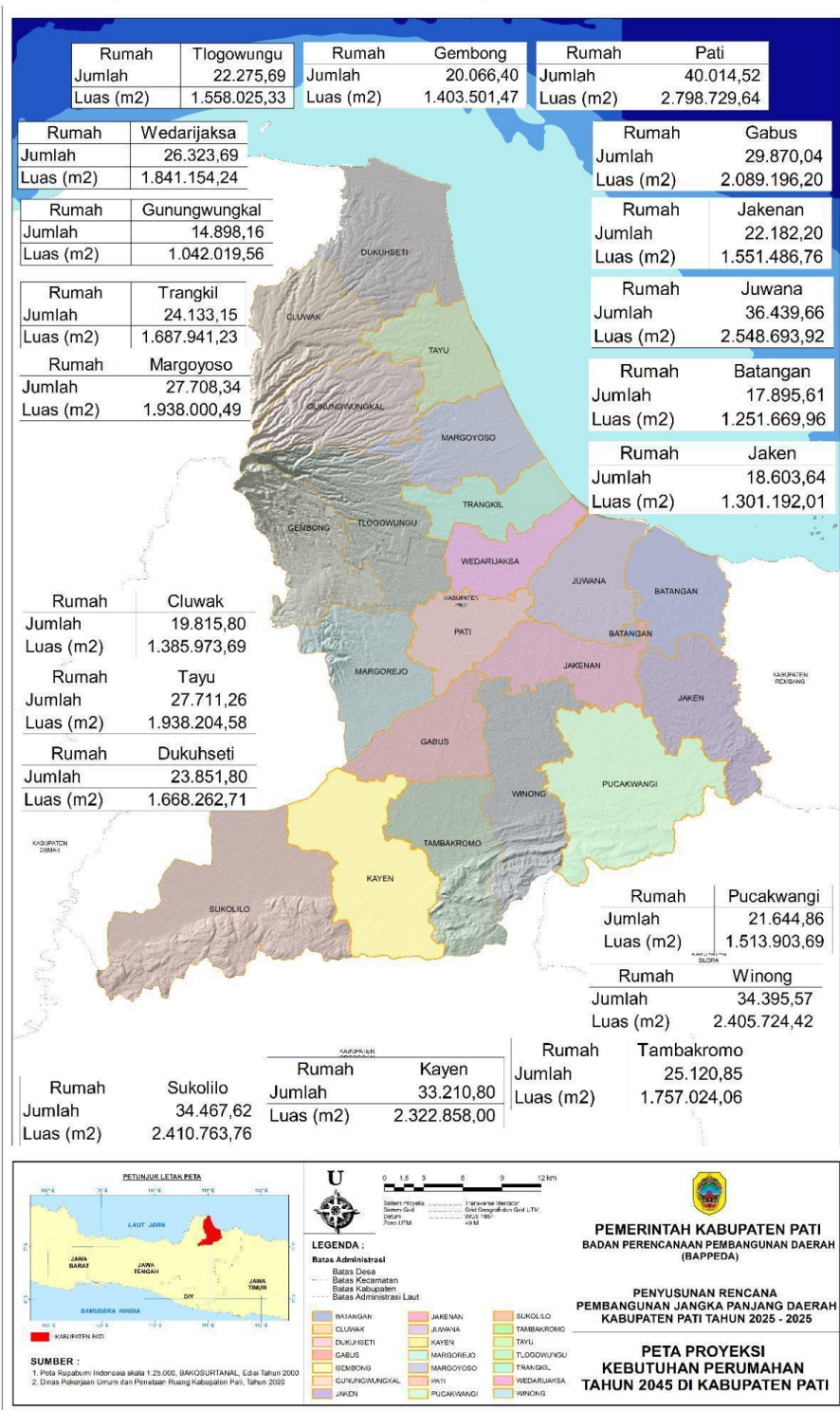
Tabel II.26 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa*)	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah		500.693	518.506	532.447	542.495	549.068
Proyeksi Luas Kebutuhan Rumah (m2)		35.019.882	36.265.777	37.240.846	37.943.620	38.403.418

*) Menggunakan Data Tahun 2022

Jika dilihat dari proyeksi penduduk per kecamatan maka kebutuhan rumah tertinggi hingga tahun 2045 ada pada Kecamatan Pati dengan kebutuhan rumah sebesar 40.015 unit dengan luas 279,87 Ha. Hal tersebut sejalan dengan pengembangan kawasan perkotaan Pati yang diarahkan menjadi pusat pemerintahan dan pusat kawasan permukiman dengan status sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan kebutuhan rumah terendah ada pada Kecamatan Gunungwungkal yaitu sebesar 14.898 unit atau seluas 104,2 Ha. Hal tersebut mengingat kondisi topografi Kecamatan Gunungwungkal yang berbukit sehingga menyulitkan pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Selengkapny proyeksi kebutuhan rumah hingga tahun 2045 dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Hasil analisa terhadap daya dukung permukiman di Kabupaten Pati diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Pati memiliki Daya Dukung Lahan Bangunan yang baik dan sedang. Nilai DDLB Kabupaten Pati sebagian besar menunjukkan hasil yang baik sebanyak 13 kecamatan yang berarti bahwa pembangunan lahan terbangun di Kabupaten Pati masih dimungkinkan untuk pembangunan.



Gambar II.51 Proyeksi Kebutuhan Rumah per Kecamatan Tahun 2045

2.7.2. Air Bersih

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak terbatas dan berkelanjutan. Peningkatan kebutuhan ini disebabkan oleh

peningkatan jumlah penduduk, peningkatan derajat kehidupan warga serta perkembangan kawasan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi warga. Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum dan untuk treatment air sanitasi. Persyaratan ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, fisik dan biologis. Menurut Permenkes No.492/2010 Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum.

Kebutuhan air bersih adalah banyaknya air yang diperlukan untuk melayani kebutuhan penduduk pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan air bersih dalam kebutuhannya bagi masyarakat, antara lain adalah iklim, karakteristik penduduk, lokasi perindustrian, kualitas air dan harga air. Untuk memproyeksi jumlah kebutuhan air bersih dapat dilakukan berdasarkan perkiraan kebutuhan air untuk berbagai macam tujuan dan beberapa faktor kebutuhan. Berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Pati hingga tahun 2045.

Tabel II.27 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

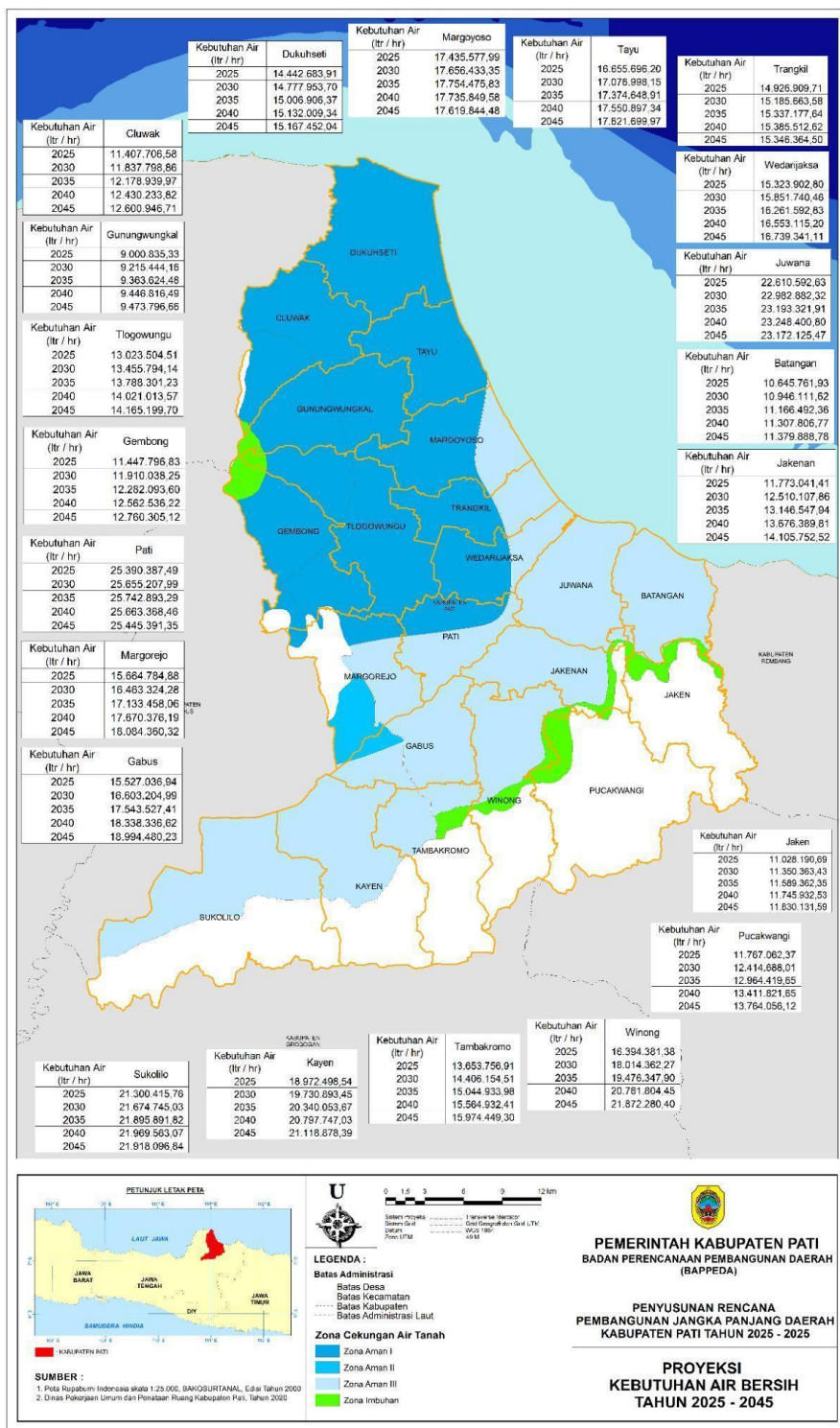
Uraian	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)*	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (ltr/hr)		318.392.064	329.720.832	338.584.320	344.974.464	349.154.842

*) Menggunakan Data Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, proyeksi kebutuhan air bersih menunjukkan peningkatan hingga tahun 2045 yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Pati. Kebutuhan air bersih pada tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 349.154.842 liter/hari untuk memenuhi kebutuhan penduduk sejumlah 1.515.429 jiwa. Mengingat besarnya kebutuhan air bersih dalam jangka waktu 20 tahun mendatang diperlukan upaya-upaya yang serius untuk pendayagunaan sumber daya air mulai dari konservasi di hulu hingga hilir.

Distribusi kebutuhan air bersih per kecamatan sejalan dengan jumlah penduduk dimana Kecamatan Pati merupakan kecamatan dengan proyeksi kebutuhan air terbesar pada tahun 2045 yaitu 25.445.391 liter/hari disusul dengan kecamatan juwana sebesar 23.172.125 liter/hari. Sementara itu kecamatan yang diproyeksikan mempunyai kebutuhan air bersih paling kecil adalah Kecamatan Gunungwungkal sebesar 9.473.797 liter / hari. Peningkatan kebutuhan air bersih yang didorong oleh peningkatan jumlah penduduk perlu direspon melalui kebijakan yang menysasar peningkatan ketersediaan, kualitas dan pengoptimalan penyaluran dan jaringan air bersih yang ada di Kabupaten Pati ke depan.

Selengkapnya proyeksi kebutuhan air bersih per kecamatan hingga tahun 2045 dapat dilihat pada peta dibawah ini.



Gambar II.52 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih per Kecamatan Tahun 2045

2.7.3. Energi/ Listrik

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang penting sebagai salah satu sumber daya ekonomis yang dibutuhkan untuk berbagai kegiatan. Ketergantungan terhadap ketersediaan energi listrik semakin hari semakin meningkat baik secara nasional maupun daerah. Peningkatan intensitas berbagai macam bentuk aktivitas di masyarakat dan sektor industri skala nasional maupun internasional, sangat tergantung terhadap ketersediaan energi listrik. Oleh karena itu sektor

ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan, dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mendorong berjalannya roda perekonomian pada suatu wilayah. Dalam waktu yang akan datang kebutuhan listrik akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi, perkembangan teknologi termasuk didalamnya perkembangan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakat. Oleh karena itu kedepan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus menganut asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Pati kedepan perlu dilakukan proyeksi berdasarkan jumlah penduduk agar dapat mewujudkan pembangunan energi kelistrikan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Pati hingga tahun 2045.

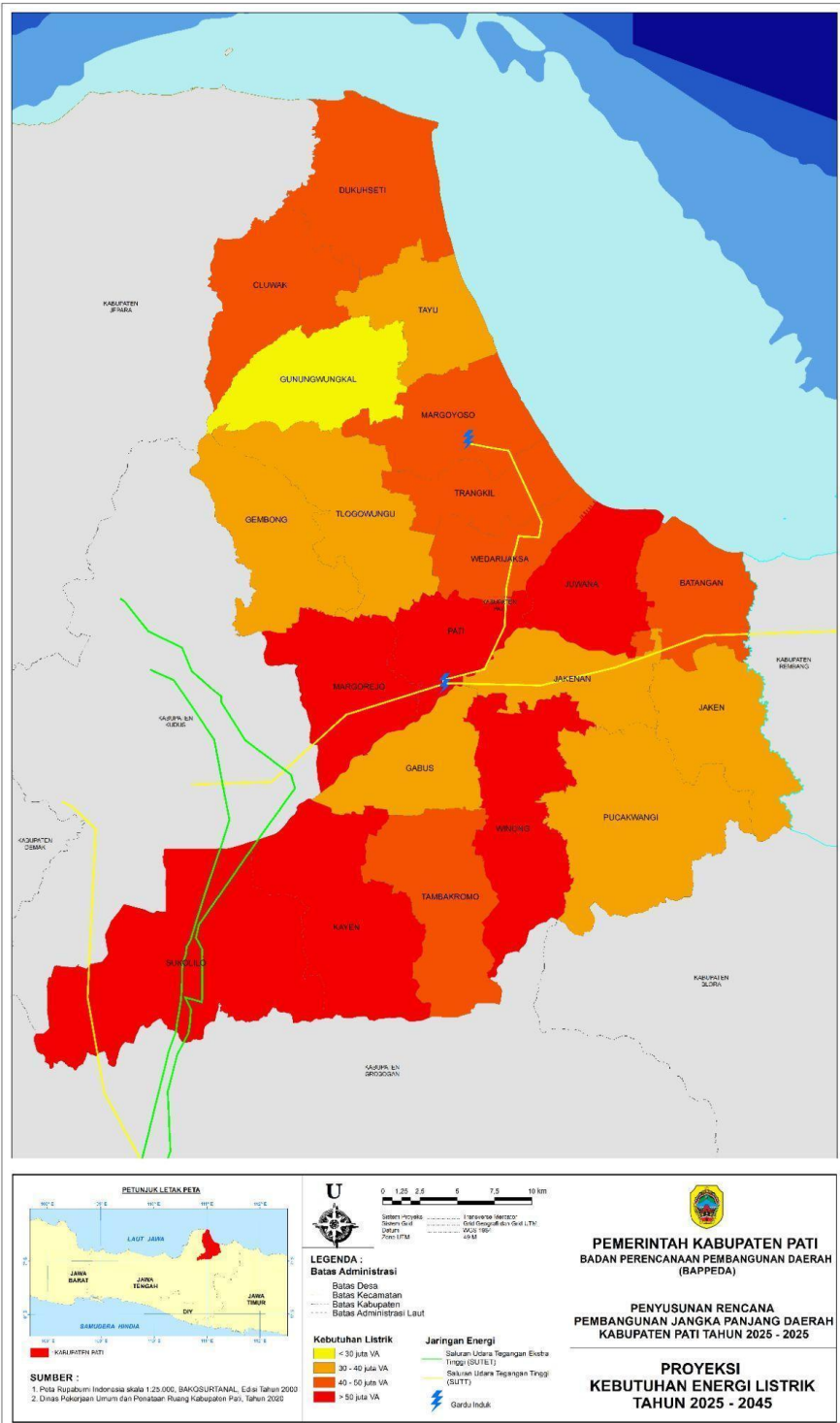
Tabel II.28 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)*	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429
Jumlah Rumah		500.693	518.506	532.447	542.495	549.068
Proyeksi Kebutuhan Listrik (VA)	448.120.950	870.603.300	901.580.400	925.816.500	943.289.550	954.720.270
Kekurangan Kebutuhan Listrik (VA)		422.482.350	453.459.450	477.695.550	495.168.600	506.599.320

**) Menggunakan Data Tahun 2022*

Berdasarkan hasil proyeksi di atas, Kabupaten Pati diperkirakan mengalami defisit energi listrik mencapai 506,6 juta VA pada tahun 2024. Hal tersebut tentu saja membutuhkan penanganan yang serius ke depan terutama dalam mendorong penghematan penggunaan energi listrik serta mengembangkan alternatif sumber energi listrik selain dari bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan.

Proyeksi kebutuhan listrik per kecamatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan listrik terbesar hingga tahun 2045 adalah Kecamatan Pati sebesar 69.577.242 VA disusul Kecamatan Juwana dengan kebutuhan listrik sebesar 63.361.281 VA. Kebutuhan listrik terkecil ada di Kecamatan Gunungwungkal yaitu sebesar 25.904.913 VA. Namun jika dibandingkan dengan ketersediaan daya listrik terpasang saat ini, Kecamatan yang diproyeksikan akan mengalami kekurangan listrik terbesar pada tahun 2045 adalah Kecamatan Winong yang akan mengalami defisit sebesar 38.315.607 VA. Selengkapnya proyeksi kebutuhan dan kekurangan listrik per kecamatan dapat dilihat pada peta dibawah ini.



Gambar II.53 Proyeksi Kebutuhan Listrik per Kecamatan Tahun 2045

2.7.4. Persampahan

Sampah berdasarkan undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah dapat pula didefinisikan sebagai buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pengelolaan sampah akan menjadi masalah serius kedepan. Permasalahan yang ditimbulkan karena pengelolaan

sampah yang kurang tepat adalah terjadinya gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu bagian dari perencanaan berkelanjutan. Pengelolaan sampah bukan suatu hal yang mudah, oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus dan penyediaan fasilitas penunjang dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan dampak negatif yang diakibatkan dari masalah sampah. Oleh karena itu untuk memperhitungkan dampak permasalahan sampah kedepan diperlukan perhitungan yang matang berkaitan dengan timbulan sampah yang dihasilkan. Berikut adalah hasil proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Pati hingga tahun 2045.

Tabel II.29 Proyeksi Timbulan Sampah

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)*	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)		497,48	515,18	529,03	539,02	545,55

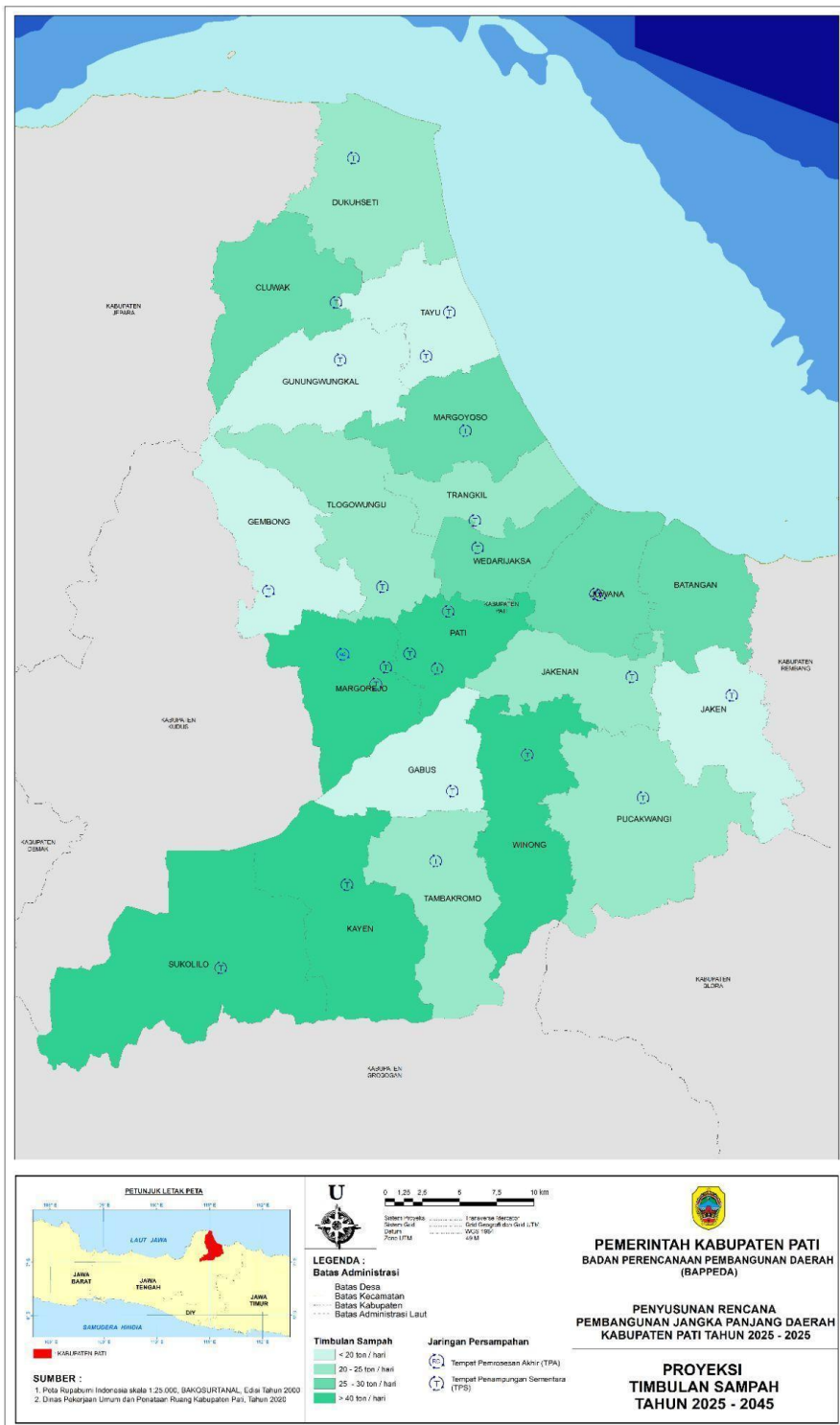
*) Menggunakan Data Tahun 2022

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia, volume sampah yang dihasilkan berkisar pada 2,75 hingga 3,25 liter per orang per hari dan berat sampah pada 0,70 hingga 0,80 kg per orang per hari. Laju pertumbuhan timbulan sampah di Kabupaten Pati pada tahun 2025 hingga 2045 mencapai 8 %. Maka dari itu, kebijakan pengelolaan sampah yang lebih inovatif dan terintegrasi dari hulu ke hilir perlu diterapkan untuk memastikan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Penerapan inovasi dalam pengelolaan sampah diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan timbulan sampah. Sementara itu kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kedepan hingga tahun 2024 diproyeksikan sebagaimana dibawah ini.

Tabel II.30 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tahun	Jumlah Penduduk	Tong Sampah (5 jiwa)	Bak Sampah Besar (2500 jiwa)	Mobil Sampah (30.000 jiwa)	Tempat Daur Ulang Sampah (> 480.000 jiwa)
2025	1.381.912	276.382	553	46	3
2030	1.431.076	286.215	572	48	3
2035	1.469.553	293.911	588	49	3
2040	1.497.285	299.457	599	50	3
2045	1.515.429	303.086	606	51	3

Proyeksi timbunan sampah per kecamatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dimana Kecamatan Pati menjadi penyumbang terbesar timbunan sampah yang mencapai 40 ton / hari disusul dengan Kecamatan Juwana yang mencapai 36 ton / hari. Timbunan sampah terkecil ada di Kecamatan Gunungwungkal yaitu sebesar 15 ton/hari. Selengkapnya proyeksi timbunan sampah per kecamatan dapat dilihat pada peta dibawah ini.



Gambar II.54 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan per Kecamatan Tahun 2045

2.7.5. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak serta dapat melaksanakan kegiatan secara

aktif dan produktif. Amanat pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan serta negara bertanggung jawab untuk mengatur agar hak hidup sehat bagi penduduknya dapat terpenuhi. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas, diperlukan kesehatan yang prima. Dalam upaya mewujudkan kesehatan yang prima tersebut, perlu disediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dari tingkat daerah hingga nasional.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Pati maka perlu dilakukan perhitungan secara mendetail terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan untuk menjamin setiap masyarakat mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan.

SNI 03-1733-2004 mengatur bahwa kebutuhan fasilitas kesehatan meliputi: (1) posyandu; (2) balai pengobatan warga; (3) balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin); (4) puskesmas dan balai pengobatan; (5) puskesmas pembantu dan balai pengobatan; (6) tempat praktek dokter; dan (7) apotik. Standar kebutuhan berbasis jumlah penduduk yang akan dilayani dan radius pencapaian. Dalam konteks proyeksi kebutuhan ini hanya berbasis kebutuhan berdasar penduduk yang akan dilayani saja.

Tabel II.31 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa dan unit*)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Ketersediaan Tahun 2023						
• Rumah Sakit	10					
• Apotik	189	46	48	49	50	51
• Tempat praktek dokter	70	276	286	294	299	303
• Puskesmas	29	12	12	12	12	13
• Puskesmas pembantu	369	46	48	49	50	51
• BKIA/ Klinik Bersalin	49	46	48	49	50	51
• Balai pengobatan warga	55	553	572	588	599	606
• Posyandu	1.618	1.106	1.145	1.176	1.198	1.212

*) Menggunakan Data Tahun 2022

Analisis kebutuhan di atas (dengan belum mempertimbangkan radius) menunjukkan bahwa sebagian fasilitas kesehatan telah terpenuhi, termasuk jika menggunakan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2045, misalnya Puskesmas, posyandu, dan apotik, hanya saja perlu dilihat kembali kualitas layanan dan radius layanannya utamanya di kecamatan dengan kepadatan rendah. Praktek dokter masih jauh dari kebutuhan masyarakat meskipun selain dokter sudah banyak tenaga kesehatan yang

melakukan praktek sesuai keahliannya untuk menangani kesehatan masyarakat.

2.7.6. Pendidikan

Sebagaimana kesehatan, pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak serta dapat melaksanakan kegiatan secara aktif dan produktif serta merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu pembangunan. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas, yaitu masyarakat yang memiliki rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, perlu disediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

SNI 03-1733-2004 mengatur bahwa kebutuhan fasilitas pendidikan meliputi: (1) taman kanak-kanak; (2) sekolah dasar; (3) sekolah menengah pertama; (4) sekolah menengah atas. Standar kebutuhan berbasis jumlah penduduk yang akan dilayani dan radius pencapaian serta lokasi penyelesaian dan rombongan belajar. Dalam konteks proyeksi kebutuhan ini hanya berbasis kebutuhan berdasar penduduk yang akan dilayani saja. SNI dimaksud juga mengatur bahwa kebutuhan dihitung berbasis kelompok umur yang akan dilayani sesuai dengan kebutuhannya, yaitu: TK (5-6 tahun); SD (6-12 tahun); SMP (13-15 tahun); dan SMA (16-18 tahun).

Untuk melakukan proyeksi kebutuhan diperlukan sebaran penduduk menurut usia dan saat ini belum tersedia di BPS Kabupaten Pati, dikarenakan data struktur penduduk menggunakan rentang 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14, dst).

Tabel II.32 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa*)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.347.538	1.381.912	1.431.076	1.469.553	1.497.285	1.515.429
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan dan Ketersediaan Tahun 2023						
• TK	551	549	532	516	504	498
• SD/ MI	679	683	681	660	640	625
• SMP/MTs	97	97	97	97	94	91
• SMA/ MA/ SMK	77	74	74	74	74	71

*) Menggunakan Data Tahun 2022

3.1.1. Proteksi Kebakaran

Peningkatan kepadatan serta pertumbuhan penduduk yang terpusat di perkotaan menyebabkan aktivitas di kawasan ini menjadi semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan peluang terjadinya kebakaran di kawasan perkotaan menjadi lebih besar. Peningkatan pertumbuhan penduduk juga menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan permukiman. Tingginya permintaan permukiman oleh masyarakat di perkotaan yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan penyediaan lahan permukiman yang layak, menjadikan masyarakat terpaksa menempati kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran sebagai tempat tinggal mereka.

Akibatnya akan semakin banyak masyarakat kota yang terkonsentrasi menetap pada kawasan yang rentan terhadap resiko bencana kebakaran, jika terjadi kebakaran di kawasan tersebut makan probabilitas jatuhnya korban juga akan semakin besar. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu usaha yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi atau menghilangkan resiko akibat bencana kebakaran terhadap manusia dan harta bendanya terutama di kawasan - kawasan terbangun seperti kawasan permukiman padat yang memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan kepadatan rendah.

Tabel II.33 Proyeksi Kebutuhan Sarana Proteksi Kebakaran

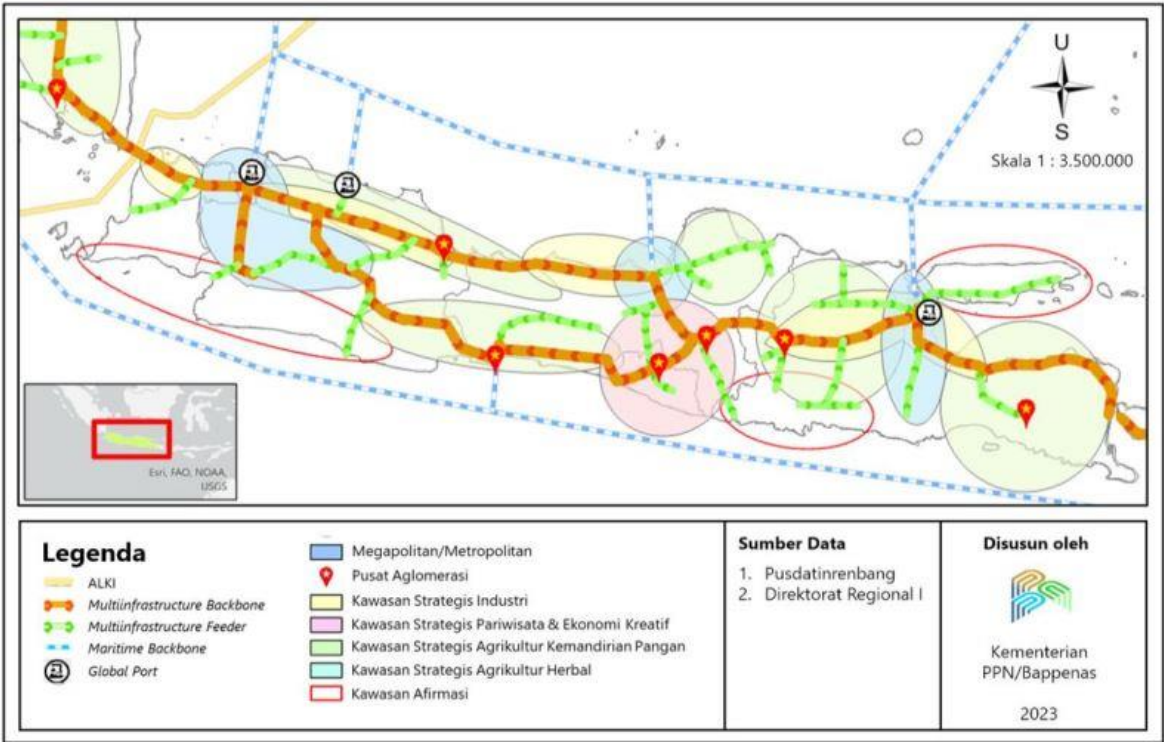
Tahun	Jumlah Penduduk	Pos Kebakaran	Mobil Pemadam Kebakaran	Satlakar
2025	1.381.912	15	31	1.382
2030	1.431.076	16	32	1.431
2035	1.469.553	16	33	1.470
2040	1.497.285	17	33	1.497
2045	1.515.429	17	34	1.515

2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.8.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan RPJPN 2025-2045 dengan tujuan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, Kabupaten Pati termasuk dalam perwilayahan pembangunan Koridor Ekonomi Jawa dengan pengembangan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi tinggi. Dalam konstelasi kawasan di Pulau Jawa, Kabupaten Pati sebagai salah satu kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan yang memberikan peran Kabupaten Pati menjadi salah satu sentra produksi pangan (*foodcluster*) dan sumber ekonomi baru di kawasan/wilayah Wanarakuti (Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora) yang menginduk pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Semarang.

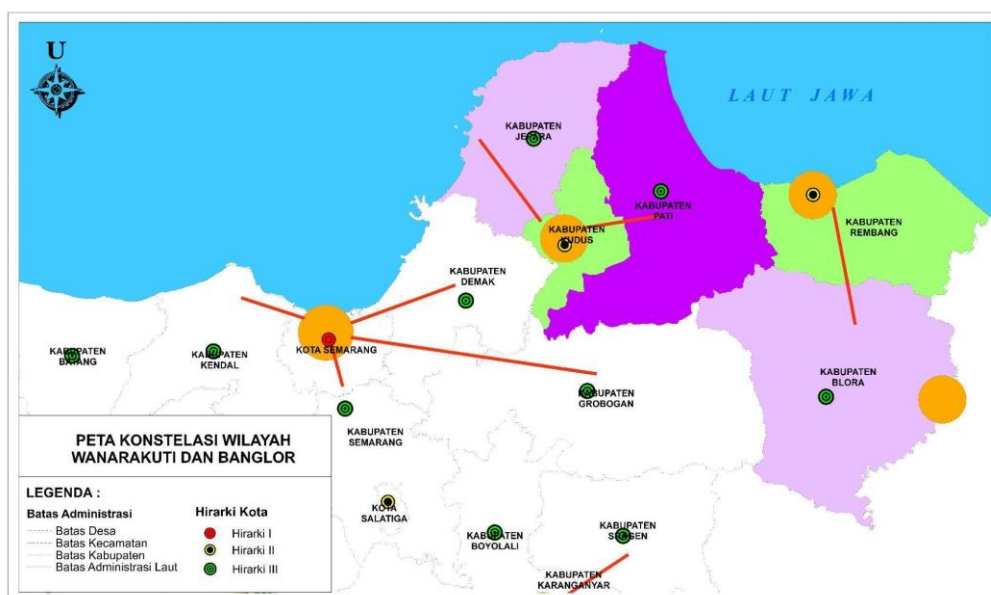
Gambar di bawah ini menunjukkan tema pembangunan dan arah kebijakan wilayah Jawa dengan Kabupaten Pati sebagai salah satu kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan pada wilayah Jawa Tengah.



Sumber: RPJPN Indonesia Emas 2025-2045

Gambar II.55 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Jawa dalam RPJPN 2025-2045

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Pati berada dalam Kawasan Wanarakuti (Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora) dimana sektor unggulan yang menjadi andalan yaitu pertanian, industri, pertambangan, perikanan, minyak dan gas bumi. Sedangkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tiga kawasan perkotaan di Kabupaten Pati yaitu Pati, Juwana dan Tayu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan. Sedangkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kudus dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Semarang. Kabupaten Pati termasuk dalam satuan Wilayah Pengembangan Wanarakuti dengan memadukan pembangunan kawasan perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati, dengan sektor unggulan yang dikembangkan yaitu pertanian, industri, perdagangan dan jasa, perikanan, dan pertambangan. Selain itu penetapan Kabupaten Pati sebagai salah satu Kawasan Agropolitan dan Minapolitan juga semakin mengukuhkan kedudukan Kabupaten Pati sebagai kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan di Jawa Tengah.



Gambar II.56 Kabupaten Pati dalam Konstelasi Wilayah Regional

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pati, rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten Pati terdiri atas:

1. Rencana penetapan pusat pelayanan perkotaan yang meliputi:
 - a. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu;
 - b. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Ibu Kota Kecamatan Kayen;
 - c. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Ibu Kota Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Gabus, Gembong, Jaken, Jakenan, Kayen, Margoyoso, Pucakwangi, Tambakromo, Trangkil dan Winong;
 - d. Pengembangan PPL meliputi PPL Plaosan dan Ngablak di Kecamatan Cluwak, PPL Puncel di Kecamatan Dukuhseti, PPL Karaban di Kecamatan Gabus, PPL Gunungwungkal di Kecamatan Gunungwungkal, PPL Ronggo di Kecamatan Jaken, PPL Margorejo di Kecamatan Margorejo, PPL Sokopuluhan di Kecamatan Pucakwangi, PPL Sukolilo dan Prawoto di Kecamatan Sukolilo, PPL Maitan di Kecamatan Tambakromo, PPL Tlogorejo dan Lahar di Kecamatan Tlogowungu, PPL Wedarijaksa di Kecamatan Wedarijaksa dan PPL Danyangmulyo di Kecamatan Winong; dan
 - e. Kawasan perkotaan yang meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, Kawasan Perkotaan Tayu, Ibu Kota Kecamatan Trangkil dan Ibu Kota Kecamatan Kayen.

Rencana penetapan pusat pelayanan perkotaan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten Pati.

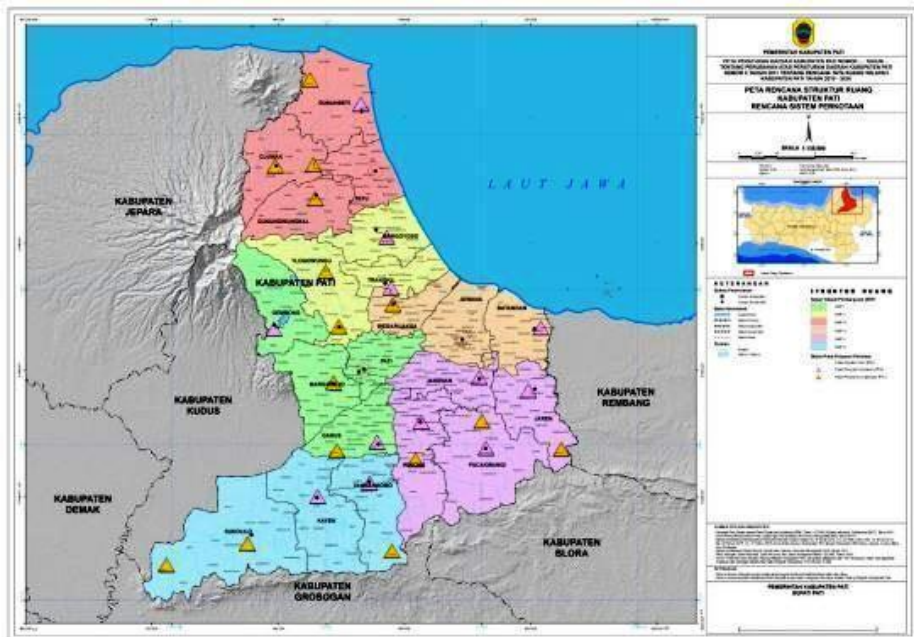
Tabel II.34 Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan

No.	Jenis Fasilitas	Skala Pelayanan		
		PKL	PPK	PPL
1	Kelembagaan	• Pusat Pemerintahan Kabupaten; • Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; • Kantor Pos; • Bank • Pelayanan polisi resort • Pemadam kebakaran	• Pelayanan Pemerintahan Kecamatan • Kantor Pos • Bank Unit • Polsek	• Kantor Desa
2	Perekonomian	• Pasar Raya • Pusat Perbelanjaan • Pasar Kecamatan • Swalayan	• Pasar Kecamatan • Pusat belanja lingkungan • Swalayan • Toko • Warung	• Pasar Desa • Toko • Warung
3	Pendidikan	• Perguruan Tinggi • Perpustakaan Daerah • Akademi • SLTA	• SLTA • SLTP • SD • TK	• SLTA • SLTP • SD • TK
4	Kesehatan	• Rumah Sakit • Puskesmas • Rawat Inap dan IGD • Puskesmas • Rumah Bersalin • Apotik	• Puskesmas • Puskesmas Pembantu • Poliklinik • Apotik • Balai Pengobatan • Bidan	• Puskesmas • Poliklinik desa • Apotik • Balai Pengobatan • Bidan desa
5	Peribadatan	• Masjid Besar • Masjid • Mushola • Gereja	• Masjid • Mushola • Gereja	• Masjid • Mushola • Gereja
6	Olahraga & Rekreasi	• Gelanggang Olahraga dan Rekreasi • Gedung Pertunjukan • Kolam Renang	• Kolam Renang • Taman Bermain • Lapangan Olahraga	• Lapangan
7	Transportasi	• Terminal Tipe A • Terminal Tipe B • Terminal Tipe C • Stasiun	• Sub Terminal • Halte	

Sumber: RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

2. Rencana Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), menjadi 6 SWP meliputi:
- a. SWP I meliputi: Kecamatan Pati, Margorejo, Gembong, dan Gabus. Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing SWP I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati dengan fungsi utama: pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa,

- pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, industri, dan pariwisata.
- SWP II meliputi: Kecamatan Trangkil, Tlogowungu, dan Margoyoso, dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil dengan fungsi utama: agro industri; pertanian tanaman pangan; pertanian hortikultura; perikanan; industri; dan pariwisata.
 - SWP III meliputi: Kecamatan Tayu, Cluwak, Gunungwungkal, dan Dukuhseti, dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu dengan fungsi utama: perdagangan dan jasa; pertanian tanaman pangan; pertanian hortikultura; perikanan; industri; dan pariwisata
 - SWP IV meliputi: Kecamatan Juwana, Wedariaksa, dan Batangan dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana dengan fungsi utama: perdagangan dan jasa; perikanan; industri ; garam; pertanian tanaman pangan; pertanian hortikultura; dan pariwisata
 - SWP V meliputi: Kecamatan Jakenan, Jaken, Winong, dan Pucakwangi dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan dengan fungsi utama: pertanian tanaman pangan; pertanian hortikultura; perdagangan dan jasa; industri; kehutanan; dan pariwisata.
 - SWP VI meliputi Kecamatan Kayen, Sukolilo, dan Tambakromo dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen dengan fungsi utama: pertanian tanaman pangan; pertanian hortikultura; perdagangan dan jasa; kehutanan; pertambangan; industri; dan pariwisata.

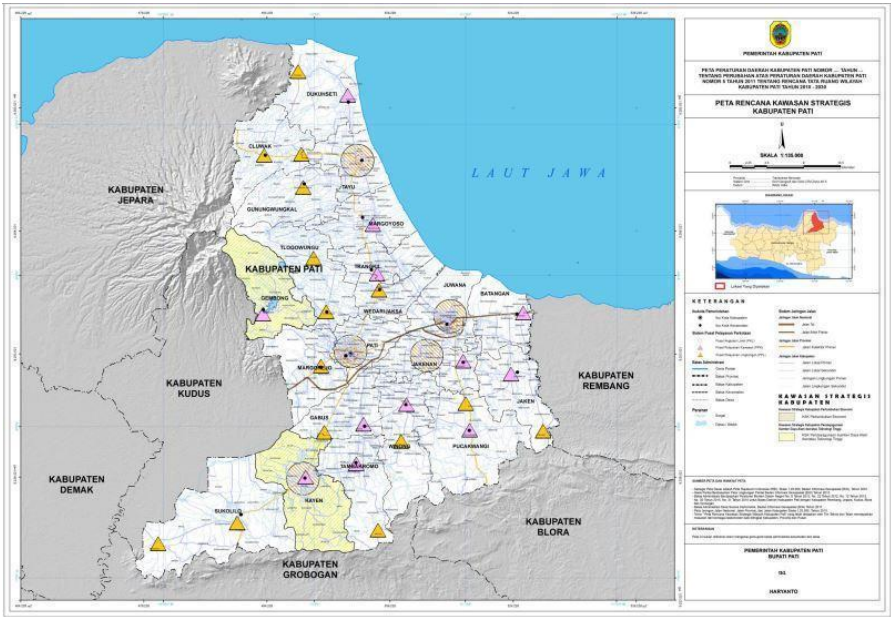


Sumber: RTRW Kabupaten Pati 2010-2030

Gambar II.57 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Pati

Dalam rangka percepatan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Pati telah ditetapkan Rencana Kawasan Strategis dimana kawasan ini penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala kabupaten. Rencana Kawasan Strategis dimaksud meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi Ibu Kota Kecamatan Jakenan, Ibu Kota Kecamatan Kayen, Ibu Kota Kecamatan Pati, Ibu Kota Kecamatan Juwana, dan Ibu Kota Kecamatan Tayu (JAKATINATA); dan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah kawasan agropolitan berada di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen.



Sumber: RTRW Kabupaten Pati 2010-2030

Gambar II.58 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pati

2.8.2. Indikasi Program/Proyek Strategis

Indikasi program strategis dari dokumen rencana regional diambil dari Program Utama RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RPJPN dengan waktu pelaksanaan pada rentang waktu 2024-2044. Berbagai program utama pada perwujudan struktur ruang, baik pada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi pada beberapa bagian tidak secara langsung menyebutkan lokasi spesifik pada Kabupaten Pati, namun mengikuti peran yang disematkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada konstelasi regional dan nasional. Tabel di bawah ini menunjukkan program strategis yang terkait pembangunan wilayah Kabupaten Pati pada rencana-rencana tersebut.

Tabel II.35. Program pada RPJPN, RTRWN, dan RTRWP yang terkait dengan Pengembangan Wilayah Tahun 2025-2045

No	Program Strategis	Tahun Rencana
	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)	
	Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (<i>green chemistry</i>), dan teknologi nano hijau (<i>green nanotechnology</i>), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan Pelabuhan seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah , dan Metropolitan Surabaya.	2025-2045
	Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy pada perairan-perairan tersebut;	2025-2045
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa ;	2025-2045

No	Program Strategis	Tahun Rencana
	Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa , termasuk Masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila, dari banjir 100 tahunan;	2025-2045
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;	2025-2045
	Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa ;	2025-2045
	Pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistic serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah.	2025-2045
	Pembangunan kereta antar kota termasuk pengembangan kereta cepat (Jakarta-Surabaya), serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan antar dan fasilitas antar moda.	2025-2045
	Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.	2025-2045
	Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 % sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diubah menjadi produk bernilai ekonomis.	2025-2045
	RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)	
	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG NASIONAL	
	Jaringan Jalan Bebas Hambatan; Demak - Tuban (IV/6)	2020-2027
	Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta Api; Jaringan jalur Ganda KA lintas Utara Pulau Jawa	2020-2027
	Pemantapan Pelabuhan Pengumpul; Juwana (Provinsi Jawa Tengah) (III3)	2020-2024
	Perwujudan Sistem Jaringan SDA konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air; DAS Seluna (S.Serang, Lusi, dan Juana).	2020-2027
	PERWUJUDAN POLA RUANG NASIONAL	
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Cagar Alam dan Cagar Alam Laut; Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo	2020-2027
	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian	2020-2027
	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan	2020-2027
	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Industri Pengolahan	2020-2027
	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Industri Perikanan	2020-2027
	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Kelautan	2020-2027
	RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI JAWA TENGAH	
	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	
	Perwujudan keterpaduan pembangunan wilayah antar Kabupaten/Kota dalam WP (Wilayah Pembangunan) WANARAKUTI	2020-2029
	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemerlihaaran jalan arteri primer	2020-2029
	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemerlihaaran jalan tol	2020-2029
	Peningkatan/ Pengembangan terminal penumpang Terminal Tipe A dan B	2020-2029
	Pengembangan terminal barang	2020-2029
	Program pengembangan kereta api regional meliputi Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo - Bojonegoro;	2020-2029
	Peningkatan dan pembangunan dry port; Wilayah Pengembangan Wanarakuti;	2020-2029
	Pengembangan dan peningkatan pelabuhan pengumpan regional; Pelabuhan Juwana di Kabupaten Pati;	2020-2029
	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); Pelabuhan Perikanan Bajomulyo di Kabupaten Pati;	2020-2029
	Pelabuhan Perikanan Alas Dowo; Pelabuhan Perikanan Banyutowo; Pelabuhan Perikanan Margomulyo; Pelabuhan Perikanan Pecangan; Pelabuhan Perikanan Puncel; Pelabuhan Perikanan Sambiroto	2020-2029
	Pengembangan sitem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik	2020-2029
	Peningkatan pengelolaan sungai; Wilayah Sungai Jratun Seluna;	2020-2029
	Pembangunan dan peningkatan waduk dan bendung; waduk seloromo dan gunungrowo	2020-2029
	Pembangunan dan pemeliharaan embung	2020-2029
	Pembangunan jaringan air bersih perpipaan	2020-2029
	Peningkatan jaringan irigasi teknis untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan	2020-2029

No	Program Strategis	Tahun Rencana
	Pengembangan dan peningkatan jaringan pipa gas regional; Kepodang- Rembang – Pati – Jepara – Semarang;	2020-2029
	Pengembangan TPA regional di Wilayah Pengembangan Wanarakuti;	2020-2029
	Pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional Wanarakuti;	2020-2029
	PERWUJUDAN POLA RUANG NASIONAL	
	Perwujudan kawasan lindung geologi; Rehabilitasi dan konservasi kawasan Kars Sukolilo	2020-2029
	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif Bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2020-2029
	Peningkatan sistem jaringan irigasi	2020-2029
	Pengembangan Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri	2020-2029
	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni	2020-2029
	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni	2020-2029
	Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan	2020-2029

Sumber: RPJPN 2025-2045, RTRWN, dan Revisi RTRWP Jawa Tengah 2009-2029

Merujuk pada posisi Kabupaten Pati dalam RTRWN dan RTRWP Jawa Tengah 2009-2029, beberapa kata kunci muncul sebagai fungsi utama dalam konstelasi perwilayahan, yaitu: kawasan agro-mina politan, sentra produksi pangan, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kabupaten Pati selain sebagai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani kegiatan skala baik kabupaten atau beberapa kecamatan juga dalam konteks regional menunjukkan peran sebagai daerah pendukung (*hinterland*) bagi Kudus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maupun Metropolitan Semarang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Daerah pendukung (*hinterland*) memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan, penyedia tenaga kerja terampil, dan pemenuhan kebutuhan dan mitra pembangunan bagi kota (pusat pertumbuhan).

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dalam 20 tahun ke depan, pertumbuhan Kabupaten Pati akan diarahkan sebagai daerah pendukung (*hinterland*) bagi Metropolitan Semarang dan kota-kota lainnya dengan memanfaatkan keberadaannya di jalur Pantura sebagai akses penghubung nasional. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan pembangunan Kabupaten Pati perlu diarahkan pada pengembangan infrastruktur kewilayahan, perluasan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, penguatan sumber daya manusia terampil, pengelolaan pertanian terpadu serta pengembangan industri pengolahan yang berorientasikan kepada pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Selain indikasi program utama pada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah, pusat pertumbuhan juga dibentuk dari struktur internal wilayah dengan indikasi program yang bersumber pada RTRW Kabupaten Pati tahun 2010-2030. Tabel di bawah ini menunjukkan indikasi program utama yang terdapat pada RTRW Kabupaten Pati.

Tabel II.36 Indikasi Program RTRW Tahun 2010-2030

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	TAHAPAN	
			PJM III	PJM IV
			2021 s/d 2025	2026 s/d 2030
1	2	3	4	5
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG			
I	Sistem Perkotaan			
1.1	Perwujudan Sistem Perwilayahan Pembangunan			
	a. Pengembangan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	SWP I meliputi Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus		
		SWP II meliputi Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso		
		SWP III meliputi Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Dukuhseti;		
		SWP IV meliputi Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan		
		SWP V meliputi Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi		
		SWP VI meliputi Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo		
	b. Pengembangan fungsi masing-masing SWP	SWP I s.d. SWP VI		
1.2	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan			
	1. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	Kawasan Perkotaan Pati, Juwana dan Tayu.		
	2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Ibukota Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Gabus, Gembong, Jaken, Jakenan, Kayen, Margoyoso, Pucakwangi, Tambakromo, Trangkil, dan Winong.		
	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Baru	Ibukota Kecamatan Kayen		
	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	PPL Plaosan dan Ngablak di Kecamatan Cluwak, PPL Puncel di Kecamatan Dukuhseti, PPL Karaban di Kecamatan Gabus, PPL Gunungwungkal di Kecamatan Gunungwungkal, PPL Ronggo di Kecamatan Jaken, PPL Margorejo di Kecamatan Margorejo, PPL Sokopuluhan di Kecamatan Pucakwangi, PPL Maitan di Kecamatan Tambakromo, PPL Tlogorejo dan PPL Lahar di Kecamatan Tlogowungu, PPL Sukolilo dan PPL Prawoto di Kecamatan Sukolilo, PPL Wedarijaksa di Kecamatan Wedarijaksa; dan PPL Danyangmulyo di Kecamatan Winong.		
	Penyusunan rencana rinci tata ruang	Kawasan Perkotaan Pati, Juwana, Tayu, Trangkil dan Kayen.		
II	Perwujudan Sistem Prasarana			
2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi			
2.a	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan			
	a. Pengembangan jaringan prasarana jalan			
	1. Pembangunan jalan tol dan penambahan interchange jalan tol	Menghubungkan Demak – Tuban yang melewati Kabupaten Pati		
	2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri primer	Ruas Batas Kabupaten Pati Utara – Kota Pati dan Batas Kota Pati – Kota Rembang yang melewati Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana dan Kecamatan Batangan		
	3. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi	Ruas Pati - Batas Lingkar Pati; Ruas Jalan Tunggal Wulung; Ruas Jalan		

1	2	3	4	5
		Diponegoro; Ruas Batas Lingkar Pati – Pati; Ruas Jalan Soponyono; Ruas Jalan Kembangjoyo; Ruas Keling / Batas Kabupaten Jepara – Tayu; Ruas Jalan Pati –Tayu; Ruas Jalan Dr. Susanto; Ruas Juwana – Todanan / Batas Kabupaten Blora; Ruas Pati – Kayen – Sukolilo / Batas Kabupaten Grobogan; Ruas Jalan Mr. Iskandar; dan Ruas Jalan Lingkar Selatan.		
	4. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten	Wilayah Kabupaten Pati		
	5. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan desa	Wilayah Kabupaten Pati		
	6. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya	Wilayah Kabupaten Pati		
	7. Pengembangan sempadan jalan dengan tutupan pohon atau tanaman	Wilayah Kabupaten Pati		
	b. Pengembangan prasarana terminal penumpang dan terminal barang			
	1. Pengembangan prasarana terminal angkutan penumpang umum terminal penumpang Tipe A	Kecamatan Pati		
	2. Pengembangan prasarana terminal angkutan penumpang umum terminal penumpang Tipe B	Kecamatan Margorejo		
	3. Pengembangan prasarana terminal angkutan penumpang umum terminal penumpang Tipe C	Kecamatan Tayu, Juwana, Kayen dan lainnya.		
	4. Pengembangan prasarana terminal barang	Kecamatan Batangan; dan lainnya		
	5. Peningkatan ruang terbuka hijau pada kawasan sekitar terminal	Wilayah Kabupaten Pati		
	2.b Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api			
	Pengembangan sistem kereta api antarkota	Menghubungkan Semarang-Demak-Kudus-Pati- Juwana-Rembang-Lasem-Jatirogo-Bojonegoro		
	Pembangunan stasiun	Kecamatan Pati, Juwana dan Lokasi lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.		
	Peningkatan sempadan kereta api dengan tutupan pohon atau tanaman	Wilayah Kabupaten Pati		
	2.c Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut			
	1. Pengembangan sistem prasarana laut berupa pelabuhan umum	Pelabuhan pungumpul di Kecamatan Juwana		
	2. Pengembangan sistem prasarana laut berupa terminal khusus	Terminal khusus untuk kepentingan tertentu di Kecamatan Batangan		
	3. Pengembangan sistem prasarana laut berupa pelabuhan perikanan	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo berada di Kecamatan Juwana		
		Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi Kecamatan Dukuhseti (PPI Alasdowo; PPI Banyutowo; dan PPI Puncel); Kecamatan Tayu (PPI Margomulyo; dan PPI Sambiroto); Kecamatan Batangan (PPI Pecangaan).C51		
	4. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran	Wilayah Kabupaten Pati		
	5. Perlindungan mangrove dan penanaman mangrove untuk meminimalkan kerawanan abrasi dan gelombang pasang	Wilayah Kabupaten Pati		
	2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi			
	1. Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Peningkatan pelayanan listrik	Wilayah Kabupaten Pati		
	3. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik	Wilayah Kabupaten Pati		
	4. Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	Jaringan SUTET melalui Kecamatan Sukolilo;		

1	2	3	4	5
		Jaringan SUTT melalui Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Batangan; Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan lainnya;		
		Jaringan SUTM dan SUTR terdapat diseluruh wilayah Daerah;		
		Gardu Induk meliputi Kecamatan Pati, Margoyoso,, dan Kecamatan lainnya.		
	5. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	Wilayah Kabupaten Pati		
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi			
	1. Peningkatan dan pengembangan jaringan tetap	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Peningkatan dan pengembangan jaringan bergerak	Wilayah Kabupaten Pati		
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air			
	a. Peningkatan pengelolaan sumber air meliputi:			
	1. Sumber air permukaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Sumber air tanah	Wilayah Kabupaten Pati		
	b. Peningkatan dan pembangunan prasarana sumberdaya air meliputi:			
	1. Waduk	Waduk Seloromo/Gembong, Waduk Gunungrowo dan lokasi lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan		
	2. Bendung	Bendung di WS Jratunseluna sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air WS Jratunseluna		
	3. Embung	Wilayah Kabupaten Pati		
	4. Sistem jaringan irigasi	1. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat berupa Daerah Irigasi Klambu, Daerah Irigasi Waduk Gembong, dan Daerah Irigasi Waduk Gunungrowo, dan DI Logung;		
		2. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi berupa Daerah Irigasi Medani, Daerah Irigasi Sentul, dan Daerah Irigasi Widodaren; dan		
		3. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.		
	5. Sistem penyediaan air baku	Wilayah Kabupaten Pati		
	6. Sistem pengendalian daya rusak air	Wilayah Kabupaten Pati		
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya			
	a. Sistem Jaringan Persampahan			
	1. Peningkatan dan pengembangan TPA	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST	Wilayah Kabupaten Pati		
	3. Program pengelolaan sampah 3R	Wilayah Kabupaten Pati		
	4. Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan	Kawasan Perkotaan		
	5. Pembangunan dan pengelolaan bank sampah	Kawasan Perkotaan		
	6. Pengurangan sampah melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik	Wilayah Kabupaten Pati		
	b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
	1. Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR)	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Pembangunan dan Pengembangan jaringan perpipaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	3. Pembangunan reservoir	Wilayah Kabupaten Pati		
	4. Pengembangan sistem bukan jaringan perpipaan, meliputi:			

1	2	3	4	5
	o penggalian atau pemanfaatan air permukaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	o pengeboran air tanah secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan	Wilayah Kabupaten Pati		
	c. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)			
	1. Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri	Kawasan peruntukan Industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan lokasi kegiatan industri besar, industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga		
	2. Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja	Wilayah Kabupaten Pati		
	3. Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja rumah tangga perkotaan berbasis masyarakat, meliputi:			
	o peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja di sekitar TPA	Wilayah Kabupaten Pati		
	o pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja	Wilayah Kabupaten Pati		
	4. Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan, meliputi:			
	o Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	Wilayah Kabupaten Pati		
	o Pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik	Wilayah Kabupaten Pati		
	d. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana			
	1. Pengembangan jalur evakuasi bencana	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Pengembangan ruang evakuasi bencana	Wilayah Kabupaten Pati		
B	PERWUJUDAN POLA RUANG			
I	Perlindungan Kawasan Peruntukan Lindung			
	1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya			
	a) Kawasan Hutan Lindung			
	1. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung	Kawasan hutan lindung		
	2. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Kawasan hutan lindung		
	3. Percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung	Kawasan hutan lindung		
	4. Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kawasan hutan lindung		
	b) Kawasan Resapan Air			
	1. Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah	Kawasan Resapan Air		
	2. Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kawasan Resapan Air		
	3. Penghijauan	Kawasan Resapan Air		
	2) Kawasan Perlindungan Setempat			
	a) Sempadan Pantai			
	1. Penertiban bangunan di atas sempadan pantai	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Upaya konservasi pada kawasan sempadan pantai	Wilayah Kabupaten Pati		
	3. Penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak	Wilayah Kabupaten Pati		
	b) Sempadan Sungai			

1	2	3	4	5
	1. Penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Penertiban bangunan diatas sempadan sungai	Wilayah Kabupaten Pati		
	3. Penghijauan	Wilayah Kabupaten Pati		
	c) Kawasan Sekitar Waduk			
	1. Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Penghijauan			
	d) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan			
	1. Inventarisasi dan pemantapan fungsi RTH Kawasan Perkotaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Pembangunan, pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	3. Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Wilayah Kabupaten Pati		
	3) Kawasan Lindung Geologi			
	a) Kawasan Cagar Alam Geologi			
	1. Perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst	Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo		
	2. Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo		
	b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah			
	Kawasan Sempadan Mata Air			
	1. Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Penghijauan	Wilayah Kabupaten Pati		
	4) Kawasan Rawan Bencana			
	1. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah			
	1. Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Pembangunan dan pengembangan jalur dan ruang evakuasi	Wilayah Kabupaten Pati		
	3. Penghijauan	Wilayah Kabupaten Pati		
	4. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana gerakan tanah	Wilayah Kabupaten Pati		
	5) Kawasan Ekosistem Mangrove			
	1. Pelarangan kegiatan yang tidak menunjang pelestarian kawasan ekosistem mangrove	Kawasan ekosistem mangrove		
	2. Pembibitan dan penghijauan hutan bakau	Kawasan ekosistem mangrove		
II	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya			
	a. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi			
	1. Rehabilitasi dan pemanfaatan fungsi kawasan hutan produksi			
	2. Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi	Kawasan Hutan Produksi		
	3. Reboisasi, pada hutan produksi	Kawasan Hutan Produksi		
	b. Perwujudan Kawasan Pertanian			
	1. Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan			
	1. Penyediaan sumber air untuk pertanian melalui pemanfaatan air tanah, peningkatan saluran irigasi, pembangunan embung dan waduk	Kawasan Tanaman Pangan		
	2. Peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, perbaikan pola tanam pada tanaman pangan dan peningkatan indeks penanaman	Kawasan Tanaman Pangan		
	3. Efisiensi penggunaan air untuk pertanian dengan menerapkan irigasi berselang (<i>intermitten irrigation</i>) guna	Kawasan Tanaman Pangan		

1	2	3	4	5
	mendukung peningkatan daya dukung air			
	2. Perwujudan Kawasan Perkebunan			
	1. Peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, tanaman hutan, dan peternakan	Kawasan Perkebunan		
	2. Penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen	Kawasan Perkebunan		
	3. Pengembangan agrowisata, agroindustri dan prasarana sarana pendukungnya	Kawasan Perkebunan		
	4. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah hasil perkebunan	Kawasan Perkebunan		
	c. Perwujudan Kawasan Perikanan			
	1. Pengembangan perikanan budidaya air payau	Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Juwana, Margoyoso, Tayu, Trangkil dan Wedarijaksa		
	2. Pengembangan perikanan budidaya air tawar	Kecamatan Gabus, Kayen, Margorejo dan Kecamatan lainnya.		
	3. Pengolahan hasil perikanan	Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Juwana, Sukolilo, Tayu dan Kecamatan lainnya.		
	4. Pengembangan industri dan tambak garam	Kecamatan Batangan, Juwana, Trangkil dan Kecamatan Wedarijaksa.		
	d. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi			
	1. Kajian potensi tambang	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan pertambangan	Wilayah Kabupaten Pati		
	e. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri			
	1. Inventarisasi industri di luar kawasan peruntukan industri dan yang berada di kawasan peruntukan industri	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Pengarahan kegiatan industri sesuai klasifikasinya ke Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri		
	3. Pengawasan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan industri	Kawasan Peruntukan Industri		
	4. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri	Kawasan Peruntukan Industri		
	5. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja	Kawasan Peruntukan Industri		
	f. Perwujudan Kawasan Pariwisata			
	1. Pengembangan atraksi wisata	Kawasan pariwisata		
	2. Pengembangan pusat informasi wisata	Kawasan pariwisata		
	3. Pembangunan dan pengembangan desa wisata	Kawasan pariwisata		
	4. Pembangunan dan pengembangan objek wisata atau kawasan wisata	Kawasan pariwisata		
	g. Perwujudan Kawasan Permukiman			
	1. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan			
	- Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas permukiman perkotaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	- Pembangunan dan pengembangan rumah susun	Wilayah Kabupaten Pati		
	- Penataan kawasan permukiman sesuai standar teknis yang dipersyaratkan	Wilayah Kabupaten Pati		
	- Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Wilayah Kabupaten Pati		
	2. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	- Pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Wilayah Kabupaten Pati		
	- Penyediaan berbagai prasarana, sarana dan utilitas yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman perdesaan	Wilayah Kabupaten Pati		

1	2	3	4	5
	h. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan			
	1. Perlindungan kawasan dari aktivitas sekitar yang mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan		
	2. Penyediaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan		
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS			
	1. Perwujudan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi			
	- Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri, dan jasa	JAKATINATA		
	- Pembangunan outlet pemasaran komoditas Daerah	JAKATINATA		
	- Pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan	JAKATINATA		
	- Peningkatan tata kelola air melalui pembangunan kolam tampungan dan daerah resapan air	JAKATINATA		
	- Peningkatan ruang terbuka hijau	JAKATINATA		
	2. Perwujudan Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi			
	1. Pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi	Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen		
	2. Pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani	Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen		
	3. Pengembangan kawasan agro industri			
	4. Peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian			

Sumber: Perda Kabupaten Pati No 2 tahun 2021 tentang Perubahan terhadap Perda Kabupaten Pati No 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati 2010-2030

Secara internal Kabupaten Pati, dalam 20 tahun memiliki tantangan peran regional sebagai daerah pendukung (*hinterland*), menunjukkan kebutuhan terhadap keberlanjutan pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia terampil, penguatan ketahanan daerah terhadap bencana, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk itu, arah pembangunan Kabupaten Pati hingga 2045 perlu diarahkan pada:

1. Penguatan fungsi pusat pelayanan pada lima pusat pertumbuhan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Ibu Kota Kecamatan Jakenan, Ibu Kota Kecamatan Kayen, Ibu Kota Kecamatan Pati, Ibu Kota Kecamatan Juwana, dan Ibu Kota Kecamatan Tayu (JAKATINATA). Diharapkan lima pusat pertumbuhan ini akan memberikan pelayanan terhadap kecamatan sekitar atau wilayah lainnya;
2. Mempertahankan keberadaan lahan-lahan pertanian lestari ditengah tingginya kebutuhan akan lahan serta adanya ancaman alih fungsi lahan. Selain itu perlu adanya peningkatan keterkaitan (*linkages*) antara kegiatan pertanian, industri (pengolahan maupun kreatif), serta perdagangan dan jasa yang berwawaskan lingkungan;
3. Penguatan ketangguhan wilayah termasuk masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim serta pengelolaan resiko bencana dengan peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, literasi mayarakat akan potensi bencana, serta penguatan mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Selain itu perlu adanya upaya perbaikan lingkungan

dan pemanfaatan kearifan lokal (local wisdom) dalam meminimalisir kejadian bencana.

2.8.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana sesuai RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan RPJPN yang terkait dengan pembangunan sarana prasarana pertumbuhan wilayah di Kabupaten Pati sebagai berikut.

A. Arah Kebijakan Transformasi Sosial

1. Perbaikan kualitas lingkungan sehat di pemukiman kumuh kota;
2. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi serta sarana prasarana penanganan limbah medis.
Implikasi dari arah kebijakan transformasi sosial dalam kebijakan pengembangan Kabupaten Pati untuk 2025-2045 adalah melalui pengembangan sarana prasarana yang mendukung: sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi yang didukung dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan sekitar serta berbudaya hidup bersih dan sehat;
3. Pengelolaan dan pengembangan perumahan dan perkantoran dengan konsep ramah lingkungan (green building) dan meminimalisir penggunaan lahan untuk bangunan (konsep bangunan vertikal), pengembangan dan pelestarian ruang-ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sarana prasarana transportasi yang ramah pesepeda, pejalan kaki dan disabilitas.

B. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

1. Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan Pelabuhan seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya.
2. Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy* pada perairan-perairan tersebut;
3. Pengembangan perkotaan (mengacu pada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan *Internet of Think (IoT)*, pengembangan *Transit Oriented Development (TOD)* dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*;

Implikasi dari arah kebijakan transformasi ekonomi dalam kebijakan pengembangan Kabupaten Pati 2025-2045 adalah pengembangan sarana prasarana yang mendukung:

1. Industri pengolahan berbasis hasil-hasil pertanian, perikanan dan sumber daya alam lainnya, pembentukan kemitraan antara industri besar dengan industri kecil menengah (IKM), serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
2. Kabupaten Pati sebagai salah satu lumbung pangannya Jawa Tengah, pusat produksi perikanan tangkap dan budidaya serta sentra produksi garam terbesar Jawa Tengah;

3. Pemanfaatan ruang terbuka di area pemukiman penduduk menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian (*urban farming*) dalam rangka membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga, salah satu keuntungannya adalah mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian.

C. Arah Kebijakan Ekologi

1. Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian;
2. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
3. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif;
4. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
5. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
6. Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk Masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila, dari banjir 100 tahunan;
7. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;
8. Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa.

Implikasi dari arah pembangunan ekologi terhadap arah kebijakan pengembangan sarana prasarana kewilayahan Kabupaten Pati untuk 2025-2045 adalah:

1. Perencanaan tata ruang perkotaan yang konsisten dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan menetapkan pemanfaatan lahan berdasarkan perlindungan terhadap kawasan pendukung lingkungan. Hal ini penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan Kabupaten Pati sebagai salah satu kawasan sentra produksi pangan Jawa Tengah;
2. Perluasan penghijauan/ reboisasi yang tidak hanya pada lahan-lahan perbukitan yang kritis, namun juga diarahkan pada ruang-ruang terbuka, lahan-lahan non produktif maupun halaman pekarangan kantor ataupun rumah yang akan berfungsi sebagai regulator udara yang akan meningkatkan kualitas udara;
3. Penguatan ketangguhan wilayah termasuk masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan perubahan karakter bencana serta pengelolaan resiko bencana dan penguatan kemampuan mitigasi bencana, selain itu juga perlu adanya upaya perbaikan lingkungan dan pemanfaatan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam meminimalisir kejadian bencana.

D. Arah Kebijakan Ketahanan Sumber Daya Air Terpadu

1. Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
2. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai;

3. Normalisasi Sungai yang melintas di Tengah perkotaan;
4. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan;

Implikasi pada arah kebijakan pengembangan Kabupaten Pati untuk 2025-2045 untuk ketahanan sumberdaya air terpadu adalah:

1. Pengembangan sumber alternatif untuk cadangan air baku guna mendukung penyediaan cadangan air baku yang diarahkan pada penyediaan lahan untuk sarana cadangan air antara lain kolam retensi, embung, bendung, atau waduk;
2. Penguatan tata kelola air melalui modernisasi irigasi dan penambahan pasokan air baku serta memulihkan kondisi daerah aliran sungai (DAS) dengan melibatkan masyarakat sehingga akan memperkuat fungsi *water catchment area* serta dengan didukung pengendalian rencana tata ruang wilayah sepanjang daerah aliran sungai (DAS) untuk memastikan keberlanjutan fungsi hidrologi;
3. Pengembangan teknologi pengolahan dan peningkatan kualitas air yang murah serta ramah lingkungan;

E. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

1. (Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa;
2. Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
3. Pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistic serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah.
4. Pembangunan kereta antar kota termasuk pengembangan kereta cepat (Jakarta-Surabaya), serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antar moda.
5. Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.

Implikasi pada arah kebijakan pengembangan Kabupaten Pati untuk 2025-2045 untuk Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan adalah:

1. Peningkatan keterhubungan (*linkages*) dengan daerah kabupaten sekitar serta penguatan kerja sama antar daerah lingkup Wanarakuti Banglor;
2. Mempersiapkan sarana prasarana pendukung sesuai kewenangan pemerintah kabupaten terkait program pengembangan jalan bebas hambatan dan jalur kereta antar kota;
3. Peningkatan peran kawasan non-perkotaan/ perdesaan sebagai pendukung ketahanan pangan dan ketahanan lingkungan dengan perbaikan aksesibilitas dan konektivitas serta jalur distribusi perdagangan;

F. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana Dasar lainnya yaitu:

1. Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan;
2. Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal;

3. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan karakteristik daerah;
4. Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
5. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; serta
6. Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diubah menjadi produk bernilai ekonomis.

Implikasi dari agenda kebijakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan terhadap arah kebijakan pengembangan Kabupaten Pati untuk 2025-2045 adalah:

1. Pemenuhan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur dengan tetap mempertahankan ciri khas budaya serta unsur kearifan lokal;
2. Penyediaan dan perlindungan sumber air, pemanfaatan teknologi pengolahan air bersih, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan air bersih secara efisien;
3. Pengurangan limbah serta peningkatan akses maupun kualitas akses terhadap sanitasi;
4. Penguatan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri melalui perluasan dan pengembangan bank sampah serta pengelolaan TPS 3R yang memanfaatkan sampah menjadi produk bernilai ekonomis, serta pengurangan beban sampah di TPST dan TPA

2.8.4. Arah Kebijakan Kewilayahan dalam KLHS RPJPD dan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045

A. Arah kebijakan kewilayahan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Pati:

1. Penguatan ketahanan pangan daerah yang didukung dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah serta peningkatan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian;
2. Peningkatan sektor industri dan penggunaan energi ramah lingkungan yang didukung dengan peningkatan jumlah perusahaan peserta proper, peningkatan limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan perundangan serta peningkatan perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001;
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung dengan peningkatan akses terhadap layanan sumber air minum layak dan aman, peningkatan Kapasitas prasarana air baku, pengelolaan infrastruktur sumber daya air, dan pengembangan energi, peningkatan kualitas air, peningkatan layanan moda transportasi umum di perkotaan, penguatan tata kelola sampah, peningkatan kualitas udara dan tutupan lahan hijau serta perluasan RTH publik;
4. Penurunan tingkat emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim;
5. Penurunan resiko bencana melalui penurunan kerugian ekonomi langsung akibat bencana serta psikososial korban bencana sosial.

B. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pati dalam analisis RTRW Kabupaten Pati 2021-2041 sebagai berikut:

1. Memantapkan peran Kawasan Perkotaan Pati, Juwana; dan Tayu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta memperkuat hirarkhi kedudukannya sebagai simpul distribusi dan pemasaran yang memiliki keterhubungan dengan wilayah sekitarnya;
2. Pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal melalui pengembangan sistem jaringan transportasi, pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi, dan pengembangan prasarana sumberdaya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi;
3. Pelestarian kawasan lindung yang didukung upaya peningkatan kualitas perlindungan kawasan lindung, penegasan lokasi kawasan resapan air dan dapat digunakan sebagai kawasan budidaya serta dapat mempertahankan fungsi resapan air, pemberian fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dilindungi, pembatasan dan pemindahan secara bertahap permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan rawan bencana longsor, serta pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
4. Pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang didukung dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, perluasan jaringan irigasi dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, pengembangan dan perluasan pemasaran komoditas hasil pertanian;
5. Pengembangan kawasan pesisir yang didukung penetapan kawasan pengembangan budidaya perikanan tambak, perlindungan dan penanaman kawasan hutan mangrove pada lahan-lahan tepi pantai untuk melestarikan kelangsungan tambak, pantai, habitat perikanan, pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan wisata alam, dan pengembangan pemasaran komoditas perikanan dan industrialisasi perikanan;
6. Pemanfaatan potensi pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dengan melakukan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin, pengendalian produksi pertambangan dalam rangka konservasi penerapan dan peningkatan recovery pertambangan, penerapan pemanfaatan kegiatan pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan; dan penguatan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menerapkan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
7. Pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengaturan kegiatan industri yang berada di luar kawasan peruntukan industri dengan melakukan penyediaan lokasi kawasan peruntukan industri, pengembangan prasarana dan sarana pendukung industri termasuk sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan, pengendalian perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri, pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan/atau rumah tangga, pengaturan aktivitas industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan penerapan sistem produksi bersih pada proses produksi industri;
8. Pengembangan kawasan permukiman yang dilakukan melalui penyediaan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas permukiman;
9. Pengembangan kawasan strategis yang akan dilakukan yaitu pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi meliputi Ibu Kota Kecamatan Jakenan, Ibu Kota Kecamatan Kayen, Ibu Kota Kecamatan Pati, Ibu Kota Kecamatan Juwana, dan Ibu Kota Kecamatan Tayu (JAKATINATA); dan pengembangan kawasan pertanian (agropolitan) yaitu kawasan agropolitan berada di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen.

BAB III

PERMASALAHAN

DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, serta diwarnai dengan hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan, selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan yang disajikan dalam bab ini merupakan permasalahan yang dominan dalam pembangunan jangka panjang.

3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada aspek geografis dan demografis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan alih fungsi lahan dari sawah dan tegalan menjadi lahan terbangun. Hal ini berimplikasi pada risiko ketahanan pangan, terutama terkait dengan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan, yang berakibat kepada penurunan peran Kabupaten Pati sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah.
2. Kualitas lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan yang disebabkan masih adanya pencemaran udara dan air dan penurunan kualitas lahan. Hal ini berimplikasi kepada penurunan kualitas hidup.
3. Ketahanan daerah masih rendah, baik dalam aspek ketahanan terhadap bencana, ketahanan air, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Hal ini berimplikasi pada kerentanan dan daya saing daerah.
4. Penurunan ketersediaan air yang disebabkan kerusakan DAS, penyempitan tepi sungai dan kawasan imbuhan air yang kritis, sehingga hal ini berakibat pada terjadinya krisis air.
5. Tingkat pertumbuhan penduduk menurun menyebabkan proporsi penduduk usia lanjut (*ageing people*) cukup besar. Transisi demografi ke arah struktur penduduk tua menambah angka ketergantungan. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan sosial, dan layanan publik ramah lansia secara inklusif.

3.1.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Kesejahteraan Ekonomi

1. Sektor unggulan pertanian (dalam arti luas) dan industri pengolahan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah serta sebagai penyedia lapangan kerja terbesar mengalami tren penurunan dalam satu dekade terakhir. Kinerja sektor unggulan yang cenderung melemah akan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.
2. Kesenjangan ekonomi masyarakat kurun waktu 16 tahun terakhir cenderung meningkat. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat berimplikasi luas pada masyarakat khususnya gangguan kamtibmas dan masalah sosial yang lain.
3. Kondisi kemiskinan masih kurang baik, terutama kemiskinan ekstrim. Kesenjangan kemiskinan yang ditunjukkan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih kurang baik.
4. Tingkat pengangguran terbuka secara agregat cenderung terus menurun, namun bila ditinjau dari sisi jumlah penduduk yang menganggur jumlahnya terus meningkat terutama lulusan SMA/ sederajat.
5. Kualitas pembangunan manusia belum yang terbaik di kawasan sekitar. Dalam hal kualitas pembangunan manusia, terdapat beberapa permasalahan, yaitu: (1) tingginya usia harapan hidup yang berpotensi meningkatkan biaya kesehatan utamanya pada usia lanjut, akibat angka kesakitan yang akan cukup tinggi; (2) tingkat pendidikan masih rendah; dan (3) pengeluaran perkapita masih kurang baik yang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat masih rendah;

b. Kesejahteraan Sosial Budaya

6. Perlindungan anak belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya kekerasan pada anak;
7. Masih terjadi kesenjangan pembangunan gender, terutama pada aspek pengeluaran perkapita perempuan yang masih di bawah laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih dihargai daripada perempuan, utamanya pada sektor non formal;
8. Dalam hal kebudayaan, era keterbukaan mengakibatkan rendahnya pemanfaatan budaya lokal dan warisan budaya dalam aktivitas masyarakat.

3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada aspek daya saing adalah sebagai berikut:

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produktivitas sektor pertanian dan perdagangan memiliki produktivitas masih rendah sehingga kedua sektor ini memiliki daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi daerah dalam satu dekade terakhir cenderung turun, sehingga berpengaruh terhadap kontribusi yang semakin menurun dalam perekonomian.
3. Sektor unggulan belum dikelola secara optimal dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pendapatan perkapita masyarakat saat ini masih jauh dari target pendapatan negara maju (mengacu pada target Nasional Visi Indonesia Emas 2045), yaitu sebesar US\$ 23.000,- s/d US\$ 30.000,-;
5. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum berdampak secara signifikan pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat serta pada aspek sosial yang lain.
6. Kegiatan pembangunan belum berorientasi ramah lingkungan (rendah emisi karbon), efisien dalam penggunaan sumber daya dan penciptaan kesejahteraan sosial secara inklusif.
7. Kewirausahaan daerah relatif masih rendah. Koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat, juga belum mampu memberikan peran secara optimal dalam perekonomian daerah.
8. Peran BUMD belum maksimal dalam mendukung perekonomian daerah.
9. Pengelolaan pariwisata belum optimal, kurang memiliki daya tarik, sehingga kurang berdaya saing, khususnya dalam menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik non lokal.

b. Daya Saing SDM

10. Digital Ethics dan Digital Culture perlu ditingkatkan, perlindungan data pribadi yang masih masalah esensial, kemampuan masyarakat untuk dapat membedakan dan mengidentifikasi informasi hoaks terkait dengan keterbatasan kemauan masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi yang diterima. Selain itu masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas untuk bersosial, hiburan, belajar/bekerja, dan mengakses layanan sosial dibanding yang lebih produktif.
11. Partisipasi angkatan kerja masih relatif rendah dan mengacu pada isu gender, partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi masih dibawah laki-laki.
12. Tingginya ketergantungan diiringi dengan menurunnya rasio penduduk usia produktif, serta penduduk usia produktif perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk usia produktif laki-laki.
13. Layanan jaminan sosial ketenagakerjaan belum banyak menyasar pada sektor informal.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

14. Kapasitas dan kualitas jalan belum memenuhi standar serta belum cukup tersedianya kelengkapan jalan yang terpasang, ditambah dengan pertumbuhan kendaraan yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun berimplikasi pada aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah menjadi kurang efektif;
15. Kinerja sistem irigasi saat ini kondisinya belum cukup baik, khususnya jika dilihat dari prasarana fisik, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi serta kondisi kelembagaan P3A, sehingga hal ini berakibat kepada produktivitas tanaman yang belum optimal;
16. Masih adanya kebutuhan rumah layak huni yang belum terpenuhi sehingga berimplikasi pada bertambahnya kawasan kumuh;
17. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum aman dan sanitasi aman yang akan berakibat kepada penurunan kualitas hidup masyarakat;

d. Daya Saing Iklim Investasi

18. Kriminalitas masih tinggi dan pelanggaran K3 masih belum semua tertangani;
19. Daya saing daerah masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional khususnya pada pilar infrastruktur, pasar produk dan kapasitas inovasi.

3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan publik sudah baik namun perlu peningkatan efektifitas dan wajah pelayanannya;
2. Kapasitas inovasi masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
3. Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik sudah baik, dimana domain yang masih perlu ditingkatkan adalah manajemen SPBE.
4. Kapasitas Fiskal masih dalam kategori rendah dalam hal Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RFKD) serta proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah yang tercermin dari tingkat desentralisasi fiskal yang baru mencapai $\pm 14\%$ (ketergantungan fiskal daerah terhadap pendapatan transfer masih sangat tinggi yaitu sebesar $\pm 86\%$).

3.1.5. Permasalahan berdasar KLHS

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Pati telah dirumuskan permasalahan pembangunan jangka panjang dan isu strategis sebagai mana tabel berikut:

Tabel III.1 Isu Strategis dan Permasalahan berdasar KLHS

PILAR	PERMASALAHAN BERDASARKAN CAPAIAN TPB DAN ANALISIS PENDUKUNG	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PILAR SOSIAL	Masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Kemiskinan
	Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas miskin	
	Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki hunian layak dan terjangkau	
	Keterbatasan lembaga pendidikan bagi disabilitas	Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan
	Penggunaan kontrasepsi masih belum optimal	
	Masih cukup tingginya Unmet need KB	
	Masih cukup tingginya angka kematian ibu	
	Masih kurangnya puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	
	Belum adanya lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA	
	Masih cukup tingginya angka penyalahgunaan narkoba	
	Masih minimnya proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	
	Masih minimnya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	
	Masih minimnya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	
PILAR EKONOMI	Masih rendahnya proporsi tenaga kerja formal	Belum optimalnya daya saing dan investasi daerah
	Pendapatan per kapita masyarakat relatif rendah	
	Pengangguran terbuka	
	Setengah pengangguran	
	Proporsi masyarakat peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	
	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata	
	Masih sedikitnya perusahaan peserta Proper	Masih minimnya pengembangan industri ramah lingkungan
	Masih banyaknya limbah B3 yang belum terkelola sesuai peraturan perundangan	
	Masih minimnya perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	
PILAR LINGKUNGAN	Akses terhadap layanan sumber air minum layak belum mencapai 100%	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan
	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau belum mencapai 100%	
	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan belum mencapai 100%	
	Indeks Kualitas Air masuk kategori kurang	
	Masih rendahnya pengguna moda transportasi umum di perkotaan	

PILAR	PERMASALAHAN BERDASARKAN CAPAIAN TPB DAN ANALISIS PENDUKUNG	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
	Masih rendahnya sampah perkotaan yang tertangani	
	Masih rendahnya persentase timbunan sampah yang didaur ulang	
	Penurunan tutupan lahan hijau	Penurunan kualitas sumber daya lahan
	Keterbatasan tutupan lahan hijau	
	Keterbatasan RTH publik	
	Masih tingginya Indeks Resiko Bencana	Belum optimalnya mitigasi bencana
	Masih tingginya kerugian ekonomi langsung akibat bencana	
	Masih minimnya pendampingan psikososial korban bencana sosial	
	Emisi gas rumah kaca meningkat	Emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim
	Kerentanan terhadap dampak perubahan iklim sangat tinggi di beberapa bagian wilayah	
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Masih rendahnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang unggul
	Masih rendahnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak	
	Masih minimnya lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur	

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Pati Tahun, 2023

Dari hasil analisis menggunakan metode *scoring* yang menunjukkan derajat penting tidaknya pengaruh isu pembangunan berkelanjutan strategis terhadap masing-masing muatan, maka penentuan urutan prioritas isu strategis tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim;
2. Belum optimalnya mitigasi bencana;
3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan;
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan;
5. Kemiskinan;
6. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan.

Adapun uraian untuk masing-masing isu strategis tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim

Perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Keseimbangan tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asam arang atau karbon dioksida (CO2), metana (CH4) dan nitrous oksida (NO) yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca (GRK). Saat ini konsentrasi GRK sudah mencapai tingkat yang membahayakan iklim bumi dan keseimbangan. Kelompok Gas Rumah Kaca terdiri dari karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitro oksida (N2O),

hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), sampai sulfur heksafluorida (SF₆). Emisi GRK yang timbul, pada umumnya dihasilkan oleh penggunaan batubara, minyak bumi, gas dan penggundulan hutan serta pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Kegiatan tersebut dapat menghasilkan gas-gas rumah kaca yang makin lama makin banyak jumlahnya di atmosfer. Kabupaten Pati dalam konteks perubahan iklim menghasilkan GRK dari kegiatan ekonomi, utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah. Untuk mengetahui tingkat, status, dan kecenderungan emisi di Kabupaten Pati, maka dilakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Penyusunan inventarisasi GRK ini bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di Kabupaten Pati. Kedua, informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim di daerah. Inventarisasi GRK meliputi empat sektor yakni pengadaan dan penggunaan energi; proses dan produk industri; pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan; serta pengelolaan limbah.

Pada tahun 2020, Kabupaten Pati melakukan inventarisasi GRK untuk periode Tahun 2015-2019. Penyusunan dokumen laporan inventarisasi GRK, dilakukan dengan pelibatan unsur dari berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan karakteristik, potensi emisi serta prioritas rencana pembangunan daerah. Pelibatan OPD di Kabupaten Pati sejak dari awal proses sampai dengan akhir dimaksudkan sebagai upaya menjaga kualitas dan akurasi data sumber emisi GRK. Tindak lanjut dalam mengurangi emisi GRK di sektor pertanian antara lain dengan menerapkan pertanian rendah emisi. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penggunaan pupuk organik, karena penggunaan pupuk kimia yang diaplikasikan ke tanah akan mengemisikan GRK berupa N₂O dan CO₂.

Dalam mengelola lahan sawah, saat ini penggunaan air irigasi dilakukan dengan penggenangan areal pertanaman padi secara terus-menerus sehingga akan mengemisikan jumlah gas metana (CH₄) yang lebih tinggi ke atmosfer. Oleh karena itu perlu dilakukan penggunaan air irigasi secara berselang. Pada subsektor peternakan, emisi disumbangkan dari fermentasi enterik dan juga pengelolaan dari kotoran ternak, sehingga diperlukan pemilihan pakan ternak yang rendah emisi serta perlu dikembangkan pemanfaatan teknologi biogas.

2. Belum optimalnya mitigasi bencana

Wilayah Kabupaten Pati juga masih rentan terhadap risiko bencana, di mana intensitas kejadian bencana cukup tinggi dan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan beserta sumber daya alam perlu terus dijaga agar daya dukung dan daya tampung lingkungan mampu bertahan secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat hidup

berkualitas serta berperan dalam Pembangunan. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana masih berada di kategori “rendah” (IRBI, 2022). Beberapa aspek yang masih lemah adalah terkait Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan; Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis kewilayahan. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pula perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan Pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Mitigasi bencana yang menjadi masalah bukan hanya bencana secara fisik melainkan juga bencana sosial. Berdasarkan hasil analisis capaian TPB, indikator Masih minimnya pendampingan psikososial korban bencana sosial masih menjadi permasalahan yang perlu diangkat.

3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan

Pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan di Kabupaten Pati masih belum optimal. Masih minim Perusahaan yang benar-benar mentaati peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu permasalahan utama adalah pengolahan limbah yang belum sesuai peraturan bahkan dibuang ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Sebagai perwujudan ekonomi yang ramah lingkungan diperlukan pengembangan *Green Economy* yang merupakan sebuah sistem kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi, produksi dan konsumsi barang serta jasa yang memperoleh peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, tanpa menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan atau kelangkaan ekologis (UNEP, 2011). Ekonomi hijau dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki kaitan yang erat. Konsep ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pengurangan polusi, dan pemanfaatan energi terbarukan.

Implementasi ekonomi hijau perlu *Jurisdictional Approach* (pendekatan yurisdiksi) karena Perlu kebijakan pemerintah (Pusat & Daerah) yang suportif, komprehensif, konsisten, tegas dan jelas. Selain itu perlu membangun *trust* (pemerintah, swasta dan masyarakat) agar memudahkan kolaborasi, serta menyatukan semua sumber daya dengan *Pentahelix Approach*. Sebagai langkah nya perlu menyusun *roadmap* untuk menjadi referensi Bersama (prioritas sektor, *timeframe*, dan lain-lain). Ekonomi hijau sangat luas. Menetapkan visi dan misi transformasi menuju ekonomi hijau sangat penting bagi Pemerintah Daerah. Untuk ke depannya Pemerintah daerah dapat menyiapkan strategi dengan berbagai instrument kebijakan. Dengan pendekatan

yurisdiksi (Menyusun komitmen), *roadmap* Kabupaten dan menetapkan sektor prioritas, potensi *financing*, *timeframe*. Sektor manufaktur yang tumbuh di Kabupaten Pati dan menjadi salah satu pintu untuk memulai ekonomi hijau. Ketidakpastian ekonomi global mengganggu *global supply chain* di Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan sektor yang cukup komprehensif dapat menawarkan sebagai hub penting *domestic supply chain*.

Penerapan Ekonomi Hijau merupakan bagian dari model ekonomi sirkuler yang didesain untuk menggantikan model ekonomi linear, di mana produk didesain untuk dibuat, dipakai, dan dibuang (prinsip *take-make-dispose*) sehingga produsen akan terus menerus mengambil sumber daya alam untuk menghasilkan produk baru, dengan asumsi bahwa sumber daya alam tak terbatas. Dalam ekonomi sirkuler, nilai manfaat sebuah produk sejatinya dapat terus dimanfaatkan dalam sebuah siklus sehingga dapat memperpanjang masa pakai produk tersebut. Pertumbuhan sektor industri yang ramah lingkungan perlu ditingkatkan keberadaannya di Kabupaten Pati. Pengembangan kegiatan industri yang diarahkan pada Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana pendukung penerapan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau berkaitan dengan isu strategis lainnya seperti kemiskinan, infrastruktur hijau, serta daya saing dan investasi daerah. Keberhasilan penerapan ekonomi hijau di masa mendatang tidak hanya berpengaruh pada kelestarian lingkungan melainkan juga kesejahteraan Masyarakat.

4. Belum optimalnya Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan

Peningkatan jumlah penduduk menimbulkan beberapa permasalahan seperti hunian padat, kawasan kumuh, penyediaan air minum dan sanitasi. Beberapa indikator *SDG's* untuk infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di Kabupaten Pati masih belum mencapai target *SDG's*. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, perlu pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, *smart*, dan inovatif. Pembangunan suatu wilayah khususnya di wilayah perkotaan tidak hanya menyediakan infrastruktur, tapi juga pembangunan yang berkelanjutan. Ke depan, Indonesia akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan perkotaan.

Masalah infrastruktur yang perlu ditangani di Kabupaten Pati adalah penyediaan air minum yang layak dan aman, sanitasi yang layak dan aman, pengembangan transportasi massal dan berkelanjutan, serta pengelolaan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan (infrastruktur hijau) dibutuhkan kolaborasi dan dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk dengan pihak akademisi. Disamping itu, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, penting untuk menerapkan hasil penelitian dan

pengembangan di bidang teknologi infrastruktur. Dikatakannya juga bawa kota-kota masa depan tidak mengedepankan pengembangan teknologi, tetapi juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Dengan pengembangan infrastruktur hijau, selain menjawab permasalahan ketersediaan air minum, sanitasi, hunian layak, serta transportasi yang layak, juga memberikan keamanan bagi keberlanjutan lingkungan hidup di suatu wilayah.

5. Kemiskinan

Salah satu parameter untuk mengukur kemiskinan adalah garis kemiskinan. BPS (2022) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNMM).

Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan di Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 4%. Peningkatan garis kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2022 sedangkan peningkatan garis kemiskinan terendah terjadi di tahun 2019. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan peningkatan nilai pengeluaran masyarakat. Dibandingkan dengan lima kabupaten sekitar, Kabupaten Pati memiliki garis kemiskinan tertinggi. Hal tersebut menandakan tingkat pengeluaran di Kabupaten Pati relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar.

Selanjutnya, garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk miskin. Penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan lebih rendah dari garis kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin. Selama periode lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi, dimana jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021. Peningkatan jumlah penduduk miskin di periode tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan ekonomi selama pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat memberikan dampak kepada kelompok rentan miskin dan hampir miskin sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin

Selama lima tahun terakhir yaitu Tahun 2019-2022, angka kemiskinan di Kabupaten Pati dan kabupaten sekitarnya menunjukkan fluktuasi. Kinerja penurunan angka kemiskinan terbaik dicapai di tahun 2018. Pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Pati menunjukkan penurunan kinerja pengurangan kemiskinan yang ditunjukkan dengan peningkatan angka kemiskinan. Kinerja pengurangan kemiskinan terendah terjadi di tahun 2020.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pati di tahun 2022 menunjukkan kinerja yang baik dengan meningkatnya capaian Indek

Pembangunan Manusia (IPM) di tahun tersebut. Namun demikian, kualitas SDM pada aspek pendidikan dan kesehatan masih memerlukan upaya peningkatan. Permasalahan utama pada aspek pendidikan adalah masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, yaitu masih kurang dari 8 tahun (tidak lulus SMP). Masalah tersebut berpotensi menjadi lebih berat karena jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah cukup tinggi. Permasalahan aspek pendidikan selanjutnya terkait indeks numerasi dan literasi peserta didik yang masih rendah dari capaian nasional. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh belum optimalnya kualitas layanan pendidikan. Hingga tahun 2022, kinerja penyediaan layanan pendidikan dasar sudah cukup baik, namun masih menunjukkan ketimpangan. Layanan pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan dasar non-agama relatif lebih baik dibandingkan layanan pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan dasar berbasis agama. Selanjutnya, kualitas pendidikan yang belum optimal juga disebabkan oleh belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan, dimana sebagian sekolah memiliki rasio tenaga pendidik dan siswa yang lebih rendah dari ketentuan, sementara di sekolah lain memiliki rasio guru dan siswa yang lebih tinggi. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pada aspek pendidikan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Di tahun 2022, kondisi indeks pembangunan literasi sudah pada tingkat yang baik, namun memerlukan upaya serius di beberapa komponen.

Kualitas SDM pada aspek kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian, sebagaimana pada aspek pendidikan. Secara umum, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pati sudah lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Namun kondisi tersebut berpotensi memunculkan tantangan dalam penyediaan dan pembiayaan layanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut. Tantangan dalam pembangunan manusia pada aspek kesehatan terkait dengan masih tingginya tingkat kematian dan meningkatnya angka kesakitan. Di tahun 2022, Kabupaten Pati masih mencatatkan tingkat kematian ibu, bayi, dan balita yang masih cukup tinggi. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan peningkatan persalinan pada remaja usia 15-19 tahun, sehingga meningkatkan jumlah kehamilan berisiko tinggi. Kualitas maternal yang rendah bersama dengan pengetahuan tentang kesehatan yang juga rendah berpotensi menurunkan kualitas kesehatan anak yang diantaranya ditunjukkan oleh peningkatan prevalensi stunting di tahun 2022. Tantangan dalam pembangunan manusia di aspek kesehatan juga terkait peningkatan angka kesakitan. Kondisi tersebut, utamanya disebabkan peningkatan prevalensi penyakit, baik penyakit menular (TB, HIV/AIDS, dan DB), maupun penyakit degeneratif (jantung, hipertensi, dan diabetes). Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari level keluarga, sebagai unit masyarakat terkecil. Namun, upaya tersebut belum maksimal di

jalankan di Kabupaten Pati. Nilai indeks Keluarga Sehat (IKS) masih jauh di bawah kriteria keluarga sehat. Bahkan, beberapa kecamatan memiliki nilai lebih rendah dibandingkan capaian daerah.

Kesenjangan juga menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas hidup manusia di tahun 2022. Selain kesenjangan dalam konteks kewilayahan, kesenjangan kualitas hidup manusia juga terkait dengan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG), namun aspek pendidikan dan ekonomi masih perlu menjadi prioritas di tahun 2024. Kesenjangan pada aspek pendidikan ditunjukkan dengan tingkat pendidikan penduduk perempuan yang lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Namun demikian, penduduk perempuan memiliki harapan mengenyam pendidikan lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Kesenjangan gender pada aspek pendidikan selanjutnya turut berkontribusi pada kesenjangan gender pada aspek ekonomi, dimana pengeluaran perkapita penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Kesenjangan gender yang masih terjadi di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh upaya pemberdayaan gender yang belum optimal sebagaimana ditunjukkan oleh capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang relatif masih rendah, terutama untuk keterlibatan perempuan dalam parlemen dan perempuan yang menduduki jabatan eksekutif.

3.2. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis dilakukan sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Isu strategis disusun dengan memperhatikan isu strategis global, isu strategis RPJPN tahun 2025-2045, isu strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045, isu dari KLHS, identifikasi potensi daerah serta harapan masyarakat yang diperoleh dari penjaringan aspirasi masyarakat.

3.2.1. Isu Global

Sebagaimana telah diketahui secara global, dalam jangka panjang akan muncul isu global yang kemudian disebut dengan Megatrend. Megatrend dunia 2045 adalah serangkaian perubahan besar yang diperkirakan akan terjadi di dunia dalam dua puluh tahun ke depan. Perubahan-perubahan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Sebagaimana diuraikan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, isu dalam megatrend meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Geopolitik dan Geoekonomi; yaitu eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan baru.

Nilai output negara berkembang mencapai 71%

2. Demografi Global; penduduk dunia akan menjadi 9,4 milyar jiwa, dengan porsi lansia akan meningkat.
3. Disrupsi Teknologi; teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini.
4. Perdagangan Internasional; perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun.
5. Urbanisasi Dunia; Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 65%, sementara itu peranan perkotaan dalam menyumbang PDB sebesar 70%.
6. Luar Angkasa; Isu luar angkasa akan mencakup ekonomi antariksa; kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.
7. Keuangan Internasional; akan terjadi pergeseran dominasi mata uang dunia dari USD menjadi multi *currencies*.
8. Perubahan Iklim; akan terjadi peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrim dan bencana di seluruh dunia;
9. Persaingan SDA; peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
10. Penduduk Kelas Menengah; Jumlah middle dan upper income class akan mencapai lebih dari 90% (8,8 milyar).

3.2.2. Isu Nasional dalam RPJPN 2025-2045

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat
2. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
4. Belum optimalnya pemanfaatan ekonomi laut
5. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB
6. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih tertinggal
7. Pembangunan belum sepenuhnya belum menerapkan prinsip berkelanjutan
8. Akses serta efisiensi energi belum merata dan berkualitas
9. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
10. Literasi digital masih terbatas
11. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik (keterkaitan ekonomi dalam wilayah)
12. Rendahnya peran perkotaan dalam pertumbuhan ekonomi
13. Target kemiskinan 0% (belum meratanya akses dan kualitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial)
14. Kualitas pendidikan masih rendah
15. Belum ratanya akses jaminan kesehatan
16. Disharmonisasi regulasi

17. Kelembagaan instansi publik (fragmentasi birokrasi), proses bisnis dan tata kelola
18. Kualitas pelayanan publik
19. Kepastian hukum dan tingkat partisipasi politik
20. Ketahanan sosial budaya
21. Ketimpangan antar wilayah
22. Pembangunan infrastruktur masih dibawah kebutuhan
23. Kualitas perencanaan dan penganggaran

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah dalam RPJPD 2025-2045

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis regional, yaitu sebagai berikut:

1. Transisi Demografi menuju penduduk usia tua
2. Kemiskinan
3. SDM yang berdaya saing dan berkarakter (Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender).
4. Ketimpangan antar wilayah (Pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas.
5. Penerapan ekonomi hijau yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular, dan pengembangan pembiayaan hijau
6. Dampak Perubahan iklim
7. Hilirisasi komoditas unggulan dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
8. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
9. Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan
10. Kondusivitas Wilayah

3.2.4. Potensi Daerah

Berdasarkan RPJPN 2025-2045 dinyatakan bahwa tujuan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dimana Kabupaten Pati termasuk dalam perwilayahan pembangunan Koridor Ekonomi Jawa dengan pengembangan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi tinggi. Dalam konstelasi kawasan di Pulau Jawa, Kabupaten Pati sebagai salah satu kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan yang memberikan peran Kabupaten Pati menjadi salah satu sentra produksi pangan (*foodcluster*) dan sumber ekonomi baru di kawasan/wilayah Wanarakuti (Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora) yang menginduk pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Semarang.

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Pati berada dalam Kawasan Wanarakuti (Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora) dimana sektor unggulan yang menjadi andalan yaitu pertanian, industri, pertambangan, perikanan, minyak dan gas bumi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kawasan perkotaan Pati, Juwana, dan Tayu dalam perencanaan struktur ruang

Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kabupaten Pati masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Jekuti, yang selanjutnya disebut dengan WP Jekuti dengan pusat pengembangan baru berpusat di kawasan perkotaan Kudus terdiri dari Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati. Tema pengembangan Kawasan Jekuti adalah pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam. Kabupaten Pati merupakan pusat pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, dan industri. Kegiatan industri dipusatkan di Kecamatan Margorejo-Pati sedangkan kegiatan perikanan dipusatkan di Kecamatan Juwana. Selain itu penetapan Kabupaten Pati sebagai salah satu Kawasan Agropolitan dan Minapolitan juga semakin mengukuhkan kedudukan Kabupaten Pati sebagai kawasan strategis agriculture kemandirian pangan di Jawa Tengah.

3.2.5. Aspirasi Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi masyarakat, telah dilaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik secara luring, daring, maupun diskusi kelompok berfokus dalam kelompok tema pembangunan yang meliputi isu: kelestarian lingkungan, ketimpangan antar wilayah, SDM berdaya saing, kemiskinan, pelestarian seni, budaya dan olah raga, tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah, kesenjangan gender, kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, produktivitas daerah, kualitas pelaku usaha, pengembangan pariwisata, dan ketahanan pangan.

Aspirasi masyarakat disampaikan dalam matriks permasalahan, kebijakan yang diharapkan, dan harapan di masa depan yang selanjutnya harapan Masyarakat pada setiap isu diuraikan berikut ini.

a. Pelayanan Publik

Pada masa depan Masyarakat berharap agar pelayanan publik lebih baik, efektif dan dengan wajah pelayanan yang ramah dan manusiawi: indeks pelayanan publik dapat menjadi termasuk yang tertinggi di Jateng; IKM tertinggi; profesionalitas ASN (sesuai dengan pendidikan dan keahliannya) sangat baik dengan manajemen ASN lebih baik; dilakukan penelitian kualitatif terkait pelayanan publik dengan pengukuran pelayanan publik di setiap unit pelayanan serta dapat memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan.

b. SDM Berdaya Saing

SDM yang kompeten dan berkualitas, memiliki keunggulan, merupakan masyarakat yang bermartabat dengan nilai-nilai yang baru (kemandirian dan kesejahteraan).

c. Kebencanaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Sumber daya air merupakan sumber daya yang harus menjadi prioritas untuk mewujudkan ketersediaan dan keberlanjutannya. Selain itu mitigasi dan penanganan bencana (utamanya bencana banjir yang selalu terjadi setiap tahun) juga perlu dilakukan. Isu produksi karbon yang akan

berdampak pada perubahan iklim juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan.

d. Produktivitas dan Potensi Ekonomi Daerah

Terciptanya peningkatan ekonomi Masyarakat Desa hutan dengan tetap mempertahankan ekologi lingkungan (termasuk peningkatan ekonomi masyarakat desa hutan); infrastruktur memadai pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan tidak rentan terhadap perubahan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas; Sebagai pusat produk UMKM (dan semakin maju); Memiliki daya saing dan kontinuitas produksi serta sustainable; Ketahanan pangan lebih bisa terwujud dengan ketersediaan air yang cukup; Beragamnya diversifikasi olahan dan akses pasar meluas sehingga kesejahteraan pengolah ikan meningkat;

e. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata semakin berkembang, wisatawan banyak yang berkunjung, kesejahteraan meningkat, serta menjadi PAD yang dapat diandalkan; kawasan wisata yang berbasis hutan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa hutan; Akses mudah ditempuh dan tempat wisata mudah ditemukan; Desa wisata berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat; Kemitraan dan strategi hilirisasi;

f. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Infrastruktur wilayah lebih maju dan meningkatkan perekonomian; Mengurangi bencana terutama banjir; Meningkatnya konektivitas transportasi di wilayah; Kebutuhan air baku dan air permukaan terpenuhi; Aset jaringan irigasi tidak hilang; 401 Desa di Kabupaten Pati mendapatkan layanan internet; meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas; masyarakat menggunakan angkutan umum, menurunkan angka kecelakaan, kemacetan lalu lintas, serta menurunkan emisi karbon; Pelayanan persampahan terkelola dengan baik lewat transfer depo untuk dipilah dan mengurangi residu yang terbuang di TPA tidak hanya skala perkotaan, adanya UPTD Penangan Persampahan, investasi bidang infrastruktur pelayanan persampahan akan mengurangi pembiayaan dalam mengatasi permasalahan persampahan;

3.2.6. Rumusan Isu Strategis

Selanjutnya perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kualitas hidup masyarakat

Manusia sebagai subjek pembangunan, sudah semestinya menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang. Kualitas hidup masyarakat yang baik menjadi salah pondasi untuk mewujudkan daya saing pembangunan yang berkualitas dan unggul. Selama kurun waktu 10 terakhir, Kabupaten Pati berhasil menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, bahkan hingga periode terakhir RPJPD periode

sebelumnya, kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pati lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Namun demikian, masih peningkatan kualitas hidup masyarakat masih harus dilakukan mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat yang diiringi dengan perubahan dan peningkatan kebutuhan masyarakat. Di tahun 2045, penduduk Kabupaten Pati diproyeksikan berjumlah lebih dari 1,5 juta jiwa. Implikasinya, kebutuhan akan bahan makanan akan semakin meningkat. Pertanian sebagai salah satu sektor usaha terbesar diharapkan dapat menjadi penopang kebutuhan pangan, tidak hanya di tingkat lokal bahkan juga daerah sekitar.

Sejak lima tahun terakhir, Kabupaten Pati telah memasuki periode bonus demografi. Berbeda dengan nasional yang akan merasakan bonus demografi hingga tahun 2045, bonus demografi di Kabupaten Pati diprediksi mulai akan berakhir di tahun 2030-an. Setelahnya, struktur demografi akan mengalami pergeseran, dimana jumlah penduduk usia tidak produktif, terutama penduduk usia tua akan meningkat. Peningkatan penduduk usia tua berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan dasar untuk penduduk lansia, terutama terkait cakupan layanan kesehatan untuk lansia dan layanan perlindungan sosial. Selain itu, pemberdayaan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis penduduk lansia.

Selain peningkatan kebutuhan layanan penduduk lansia, pembangunan manusia di aspek kesehatan juga terkendala oleh peningkatan prevalensi beberapa penyakit degeneratif, penyakit infeksi, dan gangguan jiwa. Peningkatan prevalensi penyakit tersebut akan berimplikasi pada peningkatan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh penduduk dan negara, bahkan untuk jangka panjang, penurunan kualitas kesehatan masyarakat akan berdampak terhadap penurunan produktivitas. Salah satu kendala penurunan prevalensi penyakit tersebut adalah masih belum optimalnya peran keluarga sebagaimana ditunjukkan oleh ketercapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS). Hingga tahun 2022, skor IKS Kabupaten Pati masih berada pada kategori “Keluarga Tidak Sehat”.

Peningkatan jumlah penduduk usia tua yang akan terjadi di masa mendatang diperkirakan tidak selaras dengan pertambahan penduduk usia muda karena Total Fertility Rate (TFR) yang menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kebutuhan layanan dasar, terutama layanan pendidikan. Jumlah anak yang menempuh pendidikan dasar akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemenuhan akses layanan pendidikan dasar lebih baik difokuskan pada layanan pendidikan kesetaraan, mengingat Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk yang masih rendah.

Selain penyediaan layanan pendidikan, tantangan terbesar lainnya untuk mewujudkan masyarakat unggul di tahun 2045 adalah peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Pati relatif masih rendah sebagaimana ditunjukkan oleh skor kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Di tahun 2022, Kompetensi literasi siswa Kabupaten

Pati untuk jenjang SD dan SMP masih berada pada kategori “mencapai kompetensi minimum”, bahkan kompetensi numerik memiliki kualitas yang lebih rendah. Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh belum optimalnya kualitas penyedia layanan pendidikan.

Manusia yang berdaya saing dan bermartabat di tahun 2045 akan terwujud melalui karakter manusia yang adaptif terhadap perubahan, namun tetap memegang teguh budaya dan kepribadian Bangsa Indonesia. Di masa yang akan datang, globalisasi akan berlangsung cepat hingga penetrasi budaya luar serta perkembangan teknologi komunikasi berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan lingkungan yang suportif bagi pengembangan karakter generasi muda perlu diupayakan. Perlindungan anak menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan upaya tersebut, terutama terkait hak pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, keluarga memiliki peran sentral dalam mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. Sebagai unit terkecil dalam tatanan masyarakat, keluarga menjadi institusi utama untuk perkembangan anak. Namun, kondisi tersebut belum optimal dilakukan di Kabupaten Pati, sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) yang masih berada pada kategori “Siaga”.

Diskrepansi kualitas penduduk berdasarkan gender masih menjadi tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pati di tahun 2022 sudah relatif baik dibandingkan Jawa Tengah maupun Nasional, namun ketimpangan masih terlihat nyata pada aspek politik dan ekonomi. Ketimpangan gender tersebut, utamanya disebabkan oleh belum optimalnya upaya pemberdayaan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

2. Penanganan kemiskinan

Tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kondisi kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Pati masih cukup tinggi meskipun sudah kembali turun menjadi satu digit namun tetap menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dari nasional meskipun masih lebih rendah dari Jawa Tengah meskipun dari tahun ke tahun memang terus mengalami penurunan meskipun tidak terlalu besar.

Jika dilihat lebih mendalam, permasalahan kemiskinan adalah kesenjangan diantara penduduk miskin, dimana jika dilihat dari kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pati masih perlu mendapatkan perhatian.

3. Kualitas lingkungan hidup

Faktor Lingkungan merupakan masalah krusial dalam pembangunan karena berkaitan dengan kelangsungan sumber daya di masa yang akan datang. Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Pati

diantaranya adalah kualitas air serta pengelolaan persampahan. Kualitas air di beberapa sungai di Kabupaten Pati menunjukkan nilai di bawah minimum. Penyebab utama kondisi tersebut adalah pembuangan limbah domestik oleh rumah tangga serta pembuangan limbah industri khususnya oleh industri rumah tangga dan kecil. Sementara itu, berkaitan dengan persampahan, pelayanan persampahan hanya menjangkau wilayah perkotaan dan sekitarnya utamanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas TPA. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah atau melakukan pemilahan sampah masih rendah. Sementara itu ketersediaan air juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian karena pada saat musim kemarau di beberapa wilayah terjadi kekeringan. Hal ini dipicu oleh kerusakan lahan di daerah tangkapan air baik di wilayah CAT Kudus maupun Rembang. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun juga merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian karena bisa berpengaruh pada daya tampung maupun daya dukung lingkungan. Di sisi lain wilayah Kabupaten Pati juga masih rentan terhadap risiko bencana, di mana intensitas kejadian bencana cukup tinggi dan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.

Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan beserta sumber daya alam perlu terus dijaga agar daya dukung dan daya tampung lingkungan mampu bertahan secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat hidup berkualitas serta berperan dalam pembangunan.

4. Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah saat ini telah banyak mengalami peningkatan dibanding dua dekade sebelumnya, tetapi masih jauh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur didorong untuk memperkuat aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan layanan dasar serta pelayanan public lainnya. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam Pembangunan infrastruktur masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi antara lain ketersediaan Infrastruktur wilayah dirasa masih kurang dan belum merata antar wilayah, kurangnya sumber pendanaan alternatif diluar pemerintah untuk Pembangunan infrastruktur dimana selama ini masih didanai melalui anggaran pemerintah daerah, propinsi maupun pusat, infrastruktur layanan dasar masih dirasakan belum dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkannya, lemahnya tatakelola dan koordinasi antara Lembaga dalam mengelola dan menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun, serta belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga belum memberikan dampak ekonomi dan social yang lebih besar bagi Masyarakat.

Dalam hal pemenuhan infrastruktur layanan dasar tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian

layak dan terjangkau, terbatasnya ruamh tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, serta infrastruktur layanan dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana dalam pemanfaatan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti serta produktivitas air yang rendah.

Dalam hal konektivitas regional dan nasional tantangan utama yang dihadapi adalah rencana Pembangunan jalan tol Demak-Tuban serta reaktivasi jalur rel kereta api Pantai utara Jawa, Dimana perlu dukungan daerah terhadap keberlanjutan program tersebut serta dampak yang akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Tantangan lainnya yaitu masih terbatasnya sistem angkutan massal baik diwilayah perkotaan maupun perdesaan.

Keberlanjutan Pembangunan infrastruktur sangatlah penting dalam menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan Pembangunan.

5. Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Produktivitas menjadi kunci untuk mewujudkan daya saing perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami tren penurunan, khususnya pada sektor-sektor unggulan, disebabkan oleh nilai tambah produk yang dihasilkan dan produktivitas sumber daya input belum optimal untuk mendorong pertumbuhan. Guna mendukung kebijakan Nasional Visi Indonesia Emas Tahun 2045, perlu dilakukan terobosan kebijakan yang mampu mendorong dan menciptakan daya saing ekonomi daerah yang tinggi. Selain itu, capaian pembangunan harus bisa dirasakan secara berkeadilan oleh masyarakat dengan menciptakan kemudahan akses seluas-seluasnya kepada semua sumber daya ekonomi yang ada.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang unggul dan adaptif

Isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik agar lebih optimal mengarah pada tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif sehingga menghasilkan birokrasi berkelas dunia yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya berbagai macam inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang unggul bermakna bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, berorientasi pada hasil serta adanya keterlibatan masyarakat luas. Sedangkan tata kelola pemerintahan yang adaptif bermakna bahwa pemerintahan mudah beradaptasi terhadap kondisi

apapun, untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga diharapkan mampu meminimalisir resiko dari setiap kondisi baik skala nasional, regional dan global. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Kabupaten Pati dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah disusun sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Visi Kabupaten Pati untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang mempertimbangkan lingkungan internal, lingkungan eksternal, arah pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045, dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan visi memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia;
- Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya;
- Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional;
- Berkelanjutan berarti sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Rumusan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 adalah “Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penumpu pangan nasional, bermakna Jawa Tengah dengan faktor iklim, geologis dan letak geografis yang strategis memiliki potensi pertanian dalam arti luas, dan selama ini telah menunjukkan potensi sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi PDRB sektor pertanian peringkat tiga besar di Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan memiliki kemampuan untuk tetap menjadi penumpu pangan nasional dengan didukung oleh modernisasi pertanian yang berdasarkan riset, teknologi, pengembangan inovasi, SDM dan kelembagaan pertanian yang semakin meningkat kapasitasnya, serta pengendalian alih fungsi lahan. Di sisi lain sejalan dengan transformasi ekonomi, pembangunan industri dalam dua puluh tahun ke depan fokus pada peningkatan nilai tambah secara signifikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Hilirisasi menjadi faktor kunci karena mampu memberikan peningkatan nilai tambah komoditas, memperkuat nilai ekspor, menciptakan perluasan penyediaan lapangan pekerjaan, serta multiplier effect yang lain. Keberadaan kawasan strategis industri di sepanjang pantura menjadikan posisi Jawa Tengah menjadi sangat penting dalam rantai nilai industri Nasional.
- Jawa Tengah Maju merupakan bentuk upaya menjawab tantangan nasional sebagai kontributor perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta menjawab isu strategis daerah yaitu perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia. Jawa Tengah Maju akan menjadi Jawa Tengah yang memiliki perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif.
- Jawa Tengah Sejahtera digambarkan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga didukung dengan tersedianya prasarana sarana seperti perumahan, air bersih, prasarana sarana pelayanan publik, transportasi, dan teknologi, serta akses terhadap lingkungan hidup berkualitas dan sumber daya alam. Jawa Tengah Sejahtera juga dapat memberikan jaminan pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun nonfisik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, serta hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, dan tepo seliro. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu pemenuhannya baik secara fisik dan nonfisik harus dilakukan secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya

untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera secara berkesinambungan.

- Cita-cita menjadikan Jawa Tengah maju di tengah globalisasi dan modernisasi yang saat ini terjadi baik dari aspek teknologi maupun komunikasi berimplikasi terhadap lunturnya nilai-nilai luhur suatu bangsa dan berdampak pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Untuk itu, Jawa Tengah berbudaya menjadi salah satu cita-cita pembangunan Jawa Tengah 2045 dengan mengedepankan peran dan fungsi agama secara mendalam dan inklusif dalam upaya mewujudkan Jawa Tengah yang berbudaya melalui aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan budaya masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya yang ingin diwujudkan adalah dengan membangun identitas Jawa Tengah dalam karakter, wajah, cerminan, dan kearifan lokal Jawa sebagai warisan leluhur masyarakat Jawa yang adiluhung berupa etika luhur, berbudi luhur, moral luhur, norma luhur ke dalam pola pikir dan ideologi masyarakat. Jawa Tengah berbudaya mewujudkan dalam perilaku masyarakat yang santun, memiliki tata karma tinggi, tepo seliro, unggah ungguh, dan kerukunan antarkelompok masyarakat.
- Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Jawa Tengah dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan kearifan lokal, serta mempertimbangkan efek domino kerusakan lingkungan yang akan terjadi, serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Jawa Tengah yang berkelanjutan akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, mendapatkan lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran air, udara, sampah, serta kondisi hutan dan lahan, sumber daya air baik air permukaan, air tanah, serta pesisir laut yang semakin terjaga dengan baik. Selain itu, Jawa Tengah berkelanjutan juga mempertimbangkan risiko bencana dalam setiap proses pembangunan mengingat Jawa Tengah memiliki potensi dan keterpaparan jenis bencana alam yang beragam.

Dalam rangka penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (a.n. Gubernur Jawa Tengah) Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, bahwa Dalam rangka menjaga keselarasan visi RPJPD Kabupaten/Kota dengan visi RPJPD Provinsi dan RPJPN, maka visi kabupaten/kota agar memuat substansi dan esensi visi Maju dan Berkelanjutan, yaitu: (a) “maju” terkait dengan daya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, dan aman; dan (b) “berkelanjutan” terkait dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung keberlangsungan pembangunan, serta risiko bencana;

Selanjutnya rekomendasi rumusan visi oleh KLHS RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel IV.1 Rekomendasi Muatan Visi dan Misi berdasar KLHS

No.	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Rekomendasi Muatan Visi	Rekomendasi Muatan Misi
1.	Emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim	Pilar Lingkungan	Tangguh, Berkelanjutan	Ketahanan lingkungan dan kelestarian alam
2.	Belum optimalnya mitigasi bencana	Pilar Lingkungan	Tangguh	Ketahanan lingkungan
3.	Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan	Pilar Ekonomi	Modern, Makmur	Transformasi ekonomi
4.	Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Pilar Lingkungan	Berkelanjutan	Sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan
5.	Kemiskinan	Pilar Sosial	Sejahtera	Transformasi sosial
6.	Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan	Pilar Sosial	Unggul	Transformasi sosial

Sumber: KLHS RPJPD Kab Pati Tahun 2025-2045 (2024)

Oleh karena itu, rumusan Visi Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah:

“Pati Bumi Mina Tani, Unggul, Sejahtera, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.

Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pati Bumi Mina Tani

Pati Bumi Mina Tani menggambarkan suatu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki keanekaragaman hayati dan budaya dan memiliki potensi unggulan di sektor pertanian (tani) dan perikanan (mina). Ke depan Pati diharapkan dapat menjadi lumbung pangan nasional dan menjadi gerbang bahari di kawasan Pantai Utara Jawa.

2. Unggul

Unsur visi unggul mengacu pada unsur visi Indonesia Emas “Maju”, yaitu memiliki ketangguhan, kemandirian dan kewenangan mengatur kehidupan bermasyarakat karena memiliki daya saing. Wilayah yang unggul memuat makna wilayah yang berdaya saing di antara wilayah lain di sekitar. Wilayah yang unggul memiliki sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial yang cakap serta kuat.

Unggul mencerminkan proses kemajuan. Pada aspek ekonomi ditandai adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan dampak *multiplier* dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi daerah, serta daya saing daerah. Pada aspek kependudukan, ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya smart people, yaitu masyarakat yang

cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan ketrampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi. Dari sisi tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik. Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional, bermakna wilayah Kabupaten Pati mampu menampilkan peran strategis yang kompetitif.

Keunggulan yang ingin dicapai meliputi keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, dimana unggul juga dibandingkan dengan wilayah sekitar atau yang setara.

3. Sejahtera

Unsur visi **sejahtera** mengacu pada unsur visi Indonesia Emas “Negara Nusantara”. Merupakan kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil), sosial maupun spirituil, dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, tersedianya infrastruktur yang memadai, dan meningkatnya profesionalisme aparatur untuk pelayanan publik;

Hakikat kesejahteraan berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan kesatuan dalam perbedaan serta gotong royong. Kesejahteraan tidak hanya dinilai dari dimensi ekonomi, tetapi juga psikologi yaitu terpenuhinya kebutuhan spiritual seperti ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan;

Pati Bumi Mina Tani Sejahtera merujuk pada masyarakat Kabupaten Pati yang mampu memenuhi kebutuhan hak dasar hidupnya (pangan, sandang, papan, pendapatan/modal) secara berkeadilan, berkualitas, aman, nyaman, serta bebas dari ketakutan ancaman yang berkelanjutan.

Secara khusus, **Sejahtera** adalah gambaran puncak masa depan Kabupaten Pati yang disertai dengan atribut wilayah yang **Unggul, Bermartabat, dan Berkelanjutan**.

4. Bermartabat

Unsur visi **bermartabat** mendukung visi Indonesia Emas “Berdaulat”, dimana Kabupaten Pati merupakan bagian dari NKRI yang memiliki budaya khas. Lebih dari itu, sebagai manusia religius, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka segala aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Pati seharusnya dilandasi oleh budi pekerti yang luhur yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta warisan budaya dan tradisi (terutama Budaya Jawa) yang *adi luhung*, yang pada akhirnya setiap derajat setiap manusia yang memilikinya akan dimuliakan.

Bermartabat merujuk pada suatu keadaan atau sifat yang memiliki harga diri, kehormatan, dan keadilan, menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Pati memiliki nilai dan kehormatan, serta nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan harga diri.

5. Berkelanjutan

Unsur visi **berkelanjutan** mengacu pada unsur Visi Indonesia Emas “Berkelanjutan”, yaitu mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan seimbang antara ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan;

Berkelanjutan merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan atau mempertahankan suatu keadaan atau proses dalam jangka waktu yang panjang tanpa merusak lingkungan, sumber daya, atau keseimbangan ekosistem. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Prinsip berkelanjutan adalah: (1) Memastikan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; (2) Memperhatikan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat; (3) Menciptakan sistem ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat kepada semua sektor masyarakat; (dan (4) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi keberlanjutan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal;

Pembangunan Kabupaten Pati di masa depan tidak hanya berorientasi pada keunggulan untuk kemajuan, tetapi juga berorientasi kelestarian dan keberlanjutan. Kabupaten Pati tumbuh dan berkembang secara ekonomi tetapi tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Kabupaten Pati menuju wilayah yang tangguh menghadapi risiko perubahan iklim dan risiko bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Keberlanjutan hanya akan terjadi jika dilandasi kolaborasi pemerintah, komunitas masyarakat, dunia usaha-industri dan partisipasi aktif masyarakat;

Gambaran keselarasan unsur visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2 Keselarasan Unsur Visi

RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Tengah	KLHS RPJPD	RPJPD Kabupaten Pati
Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional, Sejahtera	Sejahtera, Makmur	Pati Bumi Mina Tani, Sejahtera
Berdaulat	Berbudaya	Tangguh	Bermartabat
Maju	Maju	Unggul, Modern	Unggul
Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan

Sumber: Analisis, 2024

Tabel IV.3 Penyelarasan Visi RPJPD dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten Pati
Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.	Pati Bumi Mina Tani, Unggul, Sejahtera, Bermartabat, dan Berkelanjutan.
a. Maju, meliputi substansi: - Daya saing - Modern - Inovatif - Mandiri - Tangguh - Aman	a. Unggul, meliputi substansi: - Tangguh - Mandiri - Maju - Daya saing
b. Berbudaya, meliputi substansi: - Karakter, wajah, cerminan, dan kearifan lokal	b. Bermartabat, meliputi substansi: - Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - Budi pekerti yang luhur,
c. Berkelanjutan, meliputi substansi: - Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup - Risiko bencana	c. Berkelanjutan, meliputi substansi: - Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup - Risiko bencana dan perubahan iklim
d. Tema khusus: - Penumpu pangan dan industri nasional	d. Tema khusus: - Bumi Mina Tani

Sumber: Analisis, 2024

Guna mengukur keberhasilan pencapaian visi daerah, berikut adalah sasaran, indikator target visi jangka panjang Kabupaten Pati.

Tabel IV.4 Sasaran Visi, Indikator, dan Target

No.	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1	Meningkatnya pendapatan perkapita	PDRB perkapita	Rp Juta	44,02-44,32	61,09-65,11	95,23-106,68	146,44-169,04	214,72-252,19	
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	%	22,96	21,51	20,07	18,62	17,17	
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	28,28	28,94	30,25	32,23	34,86	
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	%	8,37-8,9	7,53-8,06	5,86-6,37	3,35-3,83	0,00-0,45	
		Rasio Gini	Angka	0,358	0,35	0,33	0,29	0,25	
3	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,31	78,11	81,6	85,1	89,28	
4	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	3.489.006,62	8.224.415,80	17.695.234,17	31.901.461,72	50.843.098,45	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,29	72,47	72,69	72,90	73,17	

Sumber: Analisis, 2024

Gambaran keselarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.5 Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Pati	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita (Rp.Juta)	Meningkatnya pendapatan perkapita	PDRB perkapita (Rp.Juta)
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Angka)		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)
		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)
		Rasio Gini (Angka)		Rasio Gini (Angka)
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)		-
3	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi (Angka)	-	-
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (Angka)	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK f/o)	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission	Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)

Sumber: Analisis, 2024

4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2045. Perumusan misi memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan visi, maka Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1, Mewujudkan Transformasi Sosial

Transformasi sosial dibutuhkan untuk menjawab tantangan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan bermartabat di tengah modernisasi dan globalisasi. Fokus dari transformasi Sosial adalah mewujudkan penduduk yang sehat, cerdas, berdaya saing, unggul dan adaptif terhadap perubahan, namun tetap memiliki martabat sebagai manusia Indonesia.

Pertama, transformasi sosial akan diarahkan untuk penyediaan pangan secara mandiri dan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang merata, berkualitas, dan inklusif. Layanan dasar yang merata dapat diartikan sebagai layanan dasar yang menjangkau seluruh masyarakat tanpa batasan wilayah. Layanan dasar yang berkualitas dimaknai bahwa layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat serta memenuhi standar-standar yang ditentukan. Selanjutnya, pemenuhan layanan dasar inklusif berarti pemerintah memastikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar yang berkualitas. Selain itu, pemerintahan juga menjamin tersedianya layanan yang sesuai dengan

kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, dan lain-lain.

Kedua, transformasi sosial juga akan diarahkan untuk mewujudkan manusia yang berbudaya dan mempertahankan identitas dan jati diri sebagai manusia Indonesia. Manusia yang berbudaya dapat dimaknai sebagai manusia yang memahami bahwa dirinya sebagai manusia Jawa, sehingga tetap menerapkan nilai-nilai luhur budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, manusia yang mempertahankan jati diri sebagai manusia Indonesia adalah manusia yang memahami posisinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan segala keragaman agama, ras, dan budaya. Oleh karena itu, perwujudan dari manusia Indonesia adalah karakter manusia yang memegang teguh agama namun tetap memiliki toleransi serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Mewujudkan manusia yang berbudaya dan berkarakter Pancasila perlu dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, transformasi sosial juga akan diarahkan untuk penyediaan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan fisik dan psikologis anak yang dimulai di tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

b. Misi 2, Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Sektor unggulan daerah akan menjadi tulang punggung daerah dalam menggerakkan perekonomian. Sektor-sektor ini dalam 12 (dua belas) tahun terakhir, rata-rata per tahun memberikan andil yang besar dalam perekonomian daerah yaitu sebesar 75,27% yang terdiri dari sektor : 1) pertanian dalam arti luas (26,16%); 2) industri pengolahan (26,79%); 3) sektor perdagangan (14,50%); 4) penyediaan akomodasi makan minum (3,52%); dan 5) jasa pendidikan (4,30%). Selain itu sektor unggulan juga banyak menyerap tenaga kerja dengan total penduduk bekerja di sektor ini sebesar 80,02% dari total penduduk bekerja. Sektor unggulan perlu didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) ketenagakerjaan yang mumpuni untuk mendukung produktivitas yang tinggi. Selain SDM, digitalisasi ekonomi dan penguatan keterkaitan hulu-hilir dalam sektor unggulan akan menjadi prioritas untuk pencapaian produktivitas tinggi dan berdaya saing. Investasi diarahkan pada sektor riil yang mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan agar tercipta efisiensi dan nilai tambah pada setiap sektor dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai bagian prinsip pengelolaan kelestarian lingkungan serta didukung dengan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian.

c. Misi 3, Mewujudkan Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam

Misi ini untuk menjawab isu degradasi lingkungan, melingkupi kualitas lingkungan hidup masih rendah (pencemaran air dan udara, serta lahan kritis), alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan terbangun, penurunan ketersediaan air, volume timbunan sampah yang belum terkelola masih besar, serta tingginya risiko bencana.

Mewujudkan ketahanan lingkungan memiliki makna lingkungan masyarakat yang bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan serta iklim global, yang dilakukan dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Sedangkan kelestarian alam dimaknai oleh kemampuan menjaga keseimbangan ekosistem dan menjalankan daur ekosistem untuk

menjamin keberlanjutan mutu lingkungan berkualitas untuk generasi yang akan datang.

d. Misi 4, Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan

Misi ini untuk menjawab isu terkait pemerataan infrastruktur wilayah. Infrastruktur wilayah sebagai penyangga utama pada setiap aktivitas wilayah yang dikembangkan di Kabupaten Pati pada tiga elemen dasar perencanaan infrastruktur, yaitu (1) penyediaan, (2) pemanfaatan, dan (3) dampak. Infrastruktur wilayah pada tahun 2045 akan mencapai kondisi berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Infrastruktur yang dimaksudkan meliputi infrastruktur pendukung fungsi aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan antar moda, infrastruktur kewilayahan baik infrastruktur ekonomi maupun sosial serta infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan dasar, seperti infrastruktur permukiman, pendidikan, kesehatan, ruang publik untuk hiburan, pengembangan budaya dan olahraga.

Infrastruktur yang berkualitas dimaknai sebagai penyediaan layanan infrastruktur yang memenuhi standar dan mampu secara optimal beradaptasi dengan perubahan lingkungan pemanfaatan, baik perubahan yang dibawa oleh bencana maupun perubahan karakter masyarakat sebagai pengguna. Infrastruktur yang inklusif dimaknai sebagai pemanfaatan layanan infrastruktur yang menyeluruh dari perspektif masyarakat, dengan prinsip “no one left behind” yang menjamin kesetaraan (baik antar kelompok vertikal maupun horizontal) dalam akses dan kesempatan berkembang dalam semangat memanusiakan manusia. Infrastruktur yang berkelanjutan dimaknai sebagai layanan infrastruktur yang diselenggarakan secara cerdas yang meminimasi dampak penurunan kapasitas ruang baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Secara ekonomi, infrastruktur wilayah sedapat mungkin mandiri secara finansial dan memperkecil ketimpangan wilayah. Secara sosial, infrastruktur wilayah tidak memicu konflik dalam pemanfaatan oleh masyarakat. Infrastruktur wilayah yang dimaksudkan meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, konektivitas antar wilayah, infrastruktur sosial budaya lainnya.

e. Misi 5, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Pelayanan publik yang prima serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien, maka diperlukan transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan unggul, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat. Birokrasi yang unggul adalah birokrasi pemerintahan yang selalu berkualitas tercermin dari upaya pelayanan publik yang semakin baik dan berkelanjutan (*continuous improvement*), tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil, meningkatnya peran serta masyarakat, digitalisasi tata kelola

pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien termasuk perubahan mindset dan budaya kerja agar lebih berintegritas, deregulasi kebijakan, pengawasan yang independen dan berintegritas, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Birokrasi adaptif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Berbagai tantangan dalam dua puluh tahun kedepan akan semakin besar, sehingga diperlukan birokrasi yang mudah beradaptasi tanpa mengurangi kualitas agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

Gambaran keselarasan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

**Tabel IV.6 Penyelarasan Misi RPJPD
dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045**

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Pati
1	Transformasi Sosial	1	Mewujudkan Transformasi Sosial
2	Transformasi Ekonomi	2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		4	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan
3	Transformasi Tata Kelola	5	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1	Mewujudkan Transformasi Sosial
		2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		5	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1	Mewujudkan Transformasi Sosial
		3	Mewujudkan Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		4	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan
7	Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	3	Mewujudkan Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam
		4	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan
8	Kesinambungan Pembangunan	2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		5	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: Analisis, 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 tahapan, tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

Arah kebijakan pembangunan RPJPN 2025-2045 terdiri dari 17 arah kebijakan yaitu:

1. Kesehatan untuk semua;
2. Pendidikan Berkualitas yang merata;
3. Perlindungan Sosial Adaptif;
4. Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Makro;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan;
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan;
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;

Sementara itu, kerangka implementasi yang akan dilaksanakan meliputi tiga hal, yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan kewilayah yg merata & berkualitas;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana yg berkualitas & ramah lingkungan;
3. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Dalam rangka keselarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, arahan Pemprov Jateng adalah:

1. Arah Kebijakan Kabupaten/Kota selaras dengan Arah Kebijakan Provinsi memuat tahapan dan upaya transformatif yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota serta Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Sasaran Pokok Kabupaten/Kota selaras dengan Sasaran Pokok Provinsi yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota serta Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

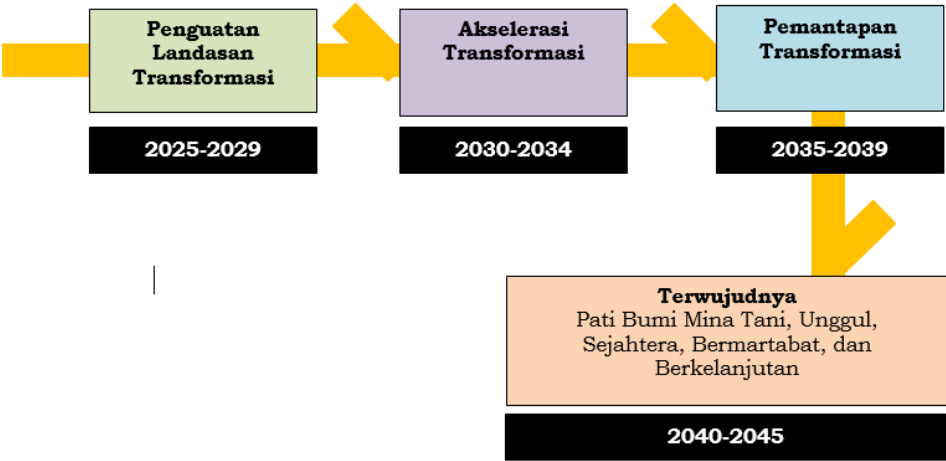
RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 memuat 6 sasaran pokok dan 17 arah kebijakan sebagaimana gambar di bawah ini:



Rekomendasi Muatan Misi	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
	pendidikan yang inklusif untuk peningkatan kualitas hidup dalam keluarga yang berkualitas	berkualitas, dan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul dan keluarga berkualitas	manusia yang unggul dan keluarga yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial	masyarakat yang sejahtera
Sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan upaya promotif-preventif dan budaya perilaku hidup sehat melalui pemenuhan sanitasi, layanan sampah, dan air bersih aman.	Pemerataan akses layanan sampah, sanitasi dan air bersih aman dengan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana layanan dan distribusi untuk semua	Percepatan dan pemantapan pemerataan akses sanitasi, layanan sampah, dan air bersih aman yang menjangkau seluruh wilayah	Perwujudan akses sanitasi, layanan sampah dan air bersih aman yang merata dan berkelanjutan untuk semua

Sumber: KLHS RPJPD Kab Pati Tahun 2025-2045

Berdasarkan analisis dan sintesis substansi arah kebijakan dari berbagai sumber, maka rumusan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 serta tema setiap tahapan pembangunan sebagaimana dijelaskan pada bagian di bawah ini.



Gambar V.2 Tema Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan

Gambaran keselarasan Periode dan Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel V.2 Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Periode	RPJPD Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Kabupaten Pati
2025-2029	Penguatan Landasan Transformasi	Penguatan Landasan Transformasi
2030-2034	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Transformasi
2035-2039	Pemantapan Transformasi	Pemantapan Transformasi
2040-2045	Perwujudan Visi	Terwujudnya Pati Bumi Mina Tani, Unggul, Sejahtera, Bermartabat, dan Berkelanjutan

Sumber: Analisis, 2024

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Penguatan Landasan Transformasi

Tema penguatan landasan pada tahap ini selaras dengan tema RPJPN Tahap 2025-2029, yaitu “Penguatan Landasan Transformasi”.

Penguatan landasan transformasi sosial pada tahap pertama dilakukan dengan meningkatkan perluasan akses layanan kesehatan, pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil. Oleh karena itu, fokus peningkatan layanan dasar adalah meningkatkan ketersediaan fasilitas dan jenis layanan dasar di seluruh wilayah. Selain itu, pada tahap pertama pembangunan, juga akan menitikberatkan penyediaan infrastruktur pendukung dan sistem penyediaan pangan yang merata untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemantapan transformasi sosial juga diwujudkan melalui pembangunan karakter manusia berbudaya dan berjiwa diri bangsa Indonesia yang dimulai sejak dini melalui pendidikan karakter dan budaya, peningkatan peran keluarga, dan peran perempuan dalam pembangunan.

Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi fokus pada perbaikan dan peningkatan produktivitas serta kemudahan akses ke sektor unggulan (sektor pertanian dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan- minum plus jasa pendidikan) berbasis kelestarian alam. Fokus penguatan landasan transformasi ekonomi diarahkan kepada sektor unggulan yang didukung dengan keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA), ketersediaan SDM ketengakerjaan yang kompeten dan memiliki daya saing, penguatan penguasaan iptek dan informasi sebagai landasan digitalisasi dan pengembangan riset dan inovasi, pembangunan disertai penguatan kelembagaan UMKM dan ekonomi kreatif untuk mendorong bekerjanya hilirisasi (sector primer ke sector sekunder dan tersier), investasi yang berkarakter *downstream*, *pro job* dan *pro environment*, pembangunan destinasi wisata unggulan berbasis kawasan. Strategi ini akan dilakukan secara simultan, terintegrasi dan berbasis spasial sehingga efektivitas pencapaian tujuan di tahapan ini bisa diperoleh yaitu terwujudnya peningkatan produktivitas dan kemudahan akses ke sumber daya ekonomi unggulan guna mendorong daya saing dan pemerataan ekonomi dengan tetap mengutamakan kelestarian alam.

Pada tahap ini ketahanan lingkungan dan kelestarian alam diarahkan pada penguatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (pengendalian pencemaran air dan udara), peningkatan rehabilitasi lahan kritis, pengendalian fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun, peningkatan tata kelola sumber daya air sebagai upaya menjaga ketersediaan air, pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dengan penekanan pada peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pada tahap ini penguatan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada penguatan infrastruktur TIK yang didukung dengan pendidikan literasi digital masyarakat dan ketersediaan SDM TIK yang berkualitas, penguatan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi terutama angkutan umum massal, penyediaan transportasi ramah lingkungan, implementasi penataan ruang, penataan kawasan permukiman, pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, peningkatan akses layanan sanitasi yang aman

dan akses rumah layak huni dan terjangkau, penguatan pengelolaan layanan air siap minum, penguatan tata kelola sumber daya air, peningkatan ketersediaan sumber cadangan air baku, Peningkatan pengelolaan sistem irigasi, waduk dan embung, serta penyediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan air baku.

Penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis dengan fokus pada: Penguatan pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan berkelanjutan, penguatan tata kelola organisasi, penguatan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, penguatan penataan regulasi, dan penguatan akuntabilitas kinerja

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi

Tema akselerasi pada tahap ini selaras dengan tema RPJPN Tahap 2030-2034, yaitu “Akselerasi Transformasi”.

Akselerasi Transformasi Sosial pada tahap kedua ini fokus pada penguatan pondasi transformasi sosial yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Penguatan dilakukan dengan percepatan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, fokus peningkatan layanan dasar adalah meningkatkan ketersediaan fasilitas dan jenis layanan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah. Selain itu, pada tahap ini, juga akan menitikberatkan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sistem pendukung ketahanan pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri dan merata. Selanjutnya, ketahanan pangan juga mulai diarahkan untuk menopang kebutuhan pangan daerah sekitarnya. Penguatan transformasi sosial juga diwujudkan melalui penguatan pembangunan karakter manusia berbudaya dan berjiwa kebangsaan Indonesia yang dimulai sejak dini melalui pendidikan karakter dan budaya, peningkatan peran keluarga, dan peran perempuan dalam pembangunan.

Transformasi Ekonomi pada tahap ini fokus pada percepatan peningkatan produktivitas dan kemudahan akses ke sektor unggulan berbasis kelestarian alam. Landasan sumber daya ekonomi (SDA, SDM, teknologi dan informasi, investasi, kelembagaan dan potensi wisata serta riset dan inovasi) pada sektor unggulan (sektor pertanian dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan- minum plus jasa pendidikan) yang telah terbentuk akan diakselerasi kompetensi, kapasitas, dan daya dorong guna memantapkan dinamika kemajuan transformasi ekonomi dalam bentuk terciptanya produktivitas yang semakin tinggi dan kemudahan akses yang semakin besar yang bermuara pada daya saing dan pemerataan ekonomi yang semakin tinggi berorientasi pada kelestarian alam.

Pada tahap ini ketahanan lingkungan dan kelestarian alam diarahkan pada peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (pengurangan pencemaran air dan udara), kualitas lahan terjaga yang bisa menjaga ketersediaan air dan mendukung produktivitas pertanian, masyarakat mampu berpartisipasi dalam

pengelolaan sampah dan limbah, meningkatnya masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.

Pada tahapan ini percepatan pengembangan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada percepatan perluasan layanan, peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK diberbagai sektor, peningkatan literasi digital masyarakat, akselerasi peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas, peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, pengembangan transportasi ramah lingkungan, percepatan implementasi penataan ruang, percepatan penataan kawasan permukiman, pembenahan kawasan kumuh, pemenuhan perumahan dan permukiman layak, kemudahan akses layanan sanitasi aman dan rumah layak huni yang terjangkau, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air siap minum, peningkatan tata kelola sumber daya air, peningkatan ketersediaan pasokan cadangan air baku, Peningkatan pengelolaan sistem irigasi, waduk dan embung, serta percepatan penyediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan air baku.

Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada percepatan transformasi tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan dinamis dengan fokus pada: peningkatan kualitas dan digitalisasi pelayanan publik; peningkatan pengawasan pelaksanaan pemerintahan; penerapan manajemen talenta dan sistem merit, peningkatan penguatan regulasi; percepatan implementasi pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Pemantapan Transformasi

Tema menuju perwujudan pada tahap ini selaras dengan tema RPJPN 2025-2039, yaitu “Ekspansi Global”. Pemantapan Transformasi Sosial pada tahap ketiga berfokus pada pemantapan tranformasi sosial yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Pemantapan dilakukan dengan pemantapan perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, fokus pemantapan layanan dasar adalah pemantapan ketersediaan fasilitas dan jenis layanan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah. Selain itu, pada tahap ini, juga akan menitikberatkan pada pemantapan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sistem pendukung ketahanan pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri dan merata.

Selanjutnya, ketahanan pangan juga mulai diarahkan untuk menopang kebutuhan pangan daerah sekitarnya. Pemantapan transformasi sosial juga diwujudkan melalui pemantapan pembangunan karakter manusia berbudaya dan berjiwa diri bangsa Indonesia yang dimulai sejak dini melalui pendidikan karakter dan budaya, peningkatan peran keluarga, dan peran perempuan dalam pembangunan.

Tahap pemantapan transformasi ekonomi fokus pada pencapaian produktivitas yang tinggi dan akses yang mudah ke sektor unggulan berbasis kelestarian alam. Peningkatan produktivitas disertai kemudahan akses pada sektor ekonomi unggulan (sektor pertanian dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum plus jasa pendidikan) secara progresif, inklusif serta berkelanjutan, terus didorong hingga pada fase produktivitas tinggi dan

akses yang luas/besar serta ramah lingkungan menuju *ultimate goal* transformasi ekonomi.

Pada tahap ini ketahanan lingkungan dan kelestarian alam diarahkan pada pemantapan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (penurunan pencemaran air dan udara), pemantapan penguatan pengelolaan sumber daya alam, penguatan pembangunan rendah karbon, terwujudnya masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif.

Pada tahapan pemantapan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada optimalisasi layanan, pengembangan dan pemanfaatan TIK diberbagai sektor, pemantapan literasi digital masyarakat, pengembangan infrastruktur konektivitas, peningkatan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan pada kawasan strategis, pengembangan kawasan permukiman, dan pencegahan munculnya kawasan kumuh, pemerataan pemenuhan perumahan dan permukiman layak, pemerataan dan kemudahan akses layanan sanitasi aman dan rumah layak huni yang terjangkau, perluasan akses dan layanan air siap minum, pengembangan tata kelola sumber daya air, peningkatan ketersediaan pasokan cadangan air baku berkelanjutan, optimalisasi pengelolaan sistem irigasi, waduk dan embung, serta pengembangan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan air baku.

Pada tahapan ini, menuju pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang difokuskan: pemerataan dan perluasan pelayanan publik yang berkualitas; peningkatan tata kelola yang semakin efektif, efisien, berorientasi pada hasil, serta berbasis riset dan risiko; pemantapan implementasi pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan akuntabilitas kinerja; pemantapan profesionalitas ASN, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Pati Bumi Mina Tani, Unggul, Sejahtera, Bermartabat, dan Berkelanjutan

Tema mewujudkan pada tahap ini mendukung terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045, dimana Sasaran Pokok RPJPN untuk Indonesia Emas 2045 adalah: (i) Menciptakan manusia Indonesia unggul; (ii) membawa Indonesia keluar dari *Middle Income Trap*; dan (iii) Menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.

Implementasi dari kebijakan atas hasil transformasi sosial adalah sumber daya yang unggul dan bermartabat. Perwujudan transformasi sosial dilakukan dengan mewujudkan perluasan akses dan layanan yang dasar yang berkualitas, terutama untuk kesehatan, pendidikan, kecukupan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara inklusif. Oleh karena itu, fokus perwujudan layanan dasar adalah perwujudan ketersediaan fasilitas dan jenis layanan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah. Selain itu, pada tahap ini, juga akan menitikberatkan pada perwujudan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sistem pendukung ketahanan pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri dan merata. Selanjutnya, ketahanan pangan juga mulai diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Pati sebagai

lambung pangan Jawa Tengah. Perwujudan transformasi sosial juga terlihat melalui perwujudan sumber daya yang berbudaya dan berjiwa diri Bangsa Indonesia yang dimulai sejak dini melalui pendidikan karakter dan budaya, peningkatan peran keluarga, dan peran perempuan dalam pembangunan.

Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan ramah lingkungan. Fase akhir periode perencanaan jangka panjang daerah ditandai dengan telah terwujudnya transformasi ekonomi secara utuh dan komprehensif yaitu Kabupaten Pati yang memiliki daya saing tinggi, pemerataan ekonomi yang luas serta alam yang lestari beserta atribut keanekaragaman hayatinya (*bio diversity*).

Pada tahap ini ketahanan lingkungan dan kelestarian alam diarahkan pada perwujudan ketahanan lingkungan hidup dan alam yang lestari sehingga menjadikan Kabupaten Pati menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali (bebas pencemaran air dan udara, serta lahan kritis), alih fungsi lahan yang terkendali, kontinuitas ketersediaan air, pengelolaan sampah terintegrasi terutama perubahan perilaku masyarakat, ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Pada tahapan dari perwujudan infrastruktur wilayah yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan, ini tergambarkan dengan pemanfaatan TIK diberbagai sektor yang didukung dengan literasi digital masyarakat yang baik, infrastruktur wilayah yang berkualitas, memenuhi standar, nyaman, aman dan dapat diakses oleh semua termasuk bagi kelompok marginal maupun kalangan disabilitas, dan ramah lingkungan, kemudahan akses terhadap rumah tinggal dan sanitasi yang layak, serta tercukupinya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya air.

Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Unggul dan Adaptif yang digambarkan melalui pelayanan publik yang akuntabel, ramah, dan adaptif; terwujudnya harmonisasi kebijakan; terwujudnya tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adaptif, terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas.

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan.

Perumusan sasaran pokok memperhatikan rekomendasi sasaran pokok dalam KLHS RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 dalam rangka mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.2 Rekomendasi Muatan Sasaran Pokok berdasar KLHS

No.	Rekomendasi Muatan Misi	Rekomendasi Sasaran Pokok Daerah	Indikator Sasaran Rekomendasi Pokok Daerah
1.	Ketahanan lingkungan dan kelestarian alam	Terwujudnya ketahanan lingkungan dan kelestarian alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Penurunan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.
			Indeks Resiko Bencana
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
2.	Transformasi ekonomi	Terwujudnya transformasi ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
			Rasio PDRB Industri Pengolahan
3.	Transformasi sosial	Terwujudnya transformasi sosial	Tingkat kemiskinan
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
			Harapan Lama Sekolah
			Indeks Keluarga Sehat
			Indeks Ketimpangan Gender
4.	Sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Terwujudnya sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
			Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota
			Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan

Sumber: KLHS RPJPD Kab Pati Tahun 2025-2045

Tabel V.3 Rekomendasi Tahapan Pencapaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan berdasar KLHS

No.	Rekomendasi Sasaran Pokok Daerah	Indikator Sasaran Pokok Daerah	Target Capaian			
			2025-2029	2030-2034	2034-2039	2040-2045
1.	Terwujudnya ketahanan lingkungan dan kelestarian alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,47	72,69	72,90	73,17
		Penurunan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	80.740	90.599	95.966	100.205
		Indeks Resiko Bencana	150,44 - 145,87	140,95 - 133,52	131,46 - 121,16	121,97- 108,81
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	30,19	50,13	70,06	90
2.	Terwujudnya transformasi ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	86,70 - 96,29	129,37 - 148,26	172,05 - 200,22	214,72- 252,19
		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	23,66 - 24,36	25,26 - 26,36	26,66 - 28,36	28,16-30,36
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	29,93	31,57	33,22	34,86
3.	Terwujudnya transformasi sosial	Tingkat kemiskinan	5,85-6,89	3,85-4,90	1,85-2,91	0,00-0,45
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,41	8,82	9,22	9,62

No.	Rekomendasi Sasaran Pokok Daerah	Indikator Sasaran Pokok Daerah	Target Capaian			
			2025-2029	2030-2034	2034-2039	2040-2045
		Harapan Lama Sekolah	14,13	14,69	15,24	15,80
		Indeks Keluarga Sehat	0,38	0,43	0,48	0,53
		Indeks Ketimpangan Gender	0,25 - 0,22	0,21 - 0,17	0,18 - 0,12	0,14-0,07
		Indeks Pembangunan Manusia	78,11	81,6	85,1	89,28
4.	Terwujudnya sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	84,86	89,91	94,95	100,00
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	90,99	92,33	93,66	95,00
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	43,89	48,77	53,65	59,60
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	30,42	40,02	49,61	96,00
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	25,00	50,00	75,00	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kab Pati Tahun 2025-2045

Berdasar analisis dan sintesis substansi sasaran pokok, maka rumusan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 serta indikator kinerja pembangunan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Dalam rangka penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (a.n. Gubernur Jawa Tengah) Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pembangunan (IUP) termasuk sebagian besar target telah ditentukan. IUP dimaksud bersifat "imperatif" sebagaimana disampaikan dalam Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Nomor: 000.7/1030, tanggal 18 Mei 2024, perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Selanjutnya IUP dimaksud memang tidak seluruhnya pada level dampak (impact), sehingga dalam rencana jangka menengah maupun pendek nantinya dapat digunakan sesuai dengan level nya.

5.2.1. Sasaran Pokok 1: Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bermartabat

Sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat menjadi salah satu modal penting pembangunan. Oleh karenanya, keberhasilan transformasi sosial terwujud dalam sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing, adaptif, namun berbudaya dan berjati diri Bangsa Indonesia. Oleh karena transformasi sosial dilakukan dengan memastikan layanan dasar, kecukupan ekonomi, dan perlindungan sosial yang berkualitas dapat diakses oleh semua masyarakat secara adil dan inklusif. Dalam rangka mewujudkan transformasi sosial, pembangunan jangka panjang Kabupaten Pati diarahkan pada:

1) Pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif .

Pendidikan yang berkualitas dicapai melalui transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, layanan pendidikan berbasis teknologi, layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan selaras dengan kebutuhan global di masa yang akan datang dan penerapan Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun. Pendidikan yang berkualitas juga tidak terbatas pada peningkatan kompetensi teknis siswa, melainkan juga pembentukan karakter dan kepribadian siswa yang selaras dengan nilai agama, budaya, berbangsa dan bernegara. Layanan pendidikan yang berkualitas tersebut juga harus memenuhi prinsip inklusifitas, dimana layanan pendidikan harus menjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

2) Kesehatan untuk semua;

Kesehatan menjadi prasyarat bagi terwujudnya manusia yang unggul dan bermartabat. Oleh karena itu, transformasi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif bagi semua, termasuk kelompok rentan, seperti anak, perempuan, orang tua, dan disabilitas. Transformasi kesehatan juga difokuskan untuk penurunan prevalensi beberapa penyakit degeneratif, infeksi, dan gangguan jiwa melalui upaya preventif dan kuratif. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan seluruh *stakeholders*, keterlibatan keluarga untuk mewujudkan lingkungan yang sehat.

3) Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanganan kemiskinan dengan prinsip keadilan dan inklusif dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kelompok dengan kerentanan tinggi. Perlindungan sosial di Kabupaten Pati diarahkan pada a) penguatan sistem jaminan sosial yang efektif dan tepat sasaran; b) penguatan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif, baik secara sosial dan ekonomi, terutama kelompok rentan, seperti kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya; c) penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mampu menciptakan dan menjaga lingkungan yang kondusif bagi usaha kesejahteraan sosial; dan d) penguatan tata kelola kelembagaan data dalam penentuan kelompok sasaran, dimulai dari perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi pelaksanaan.

4) Ketahanan Pangan

Kebijakan pangan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan bagi Kabupaten Pati. Kebijakan tersebut akan diarahkan pada pemenuhan atas hak dasar atas pangan yang berkelanjutan; kebutuhan pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,

dan aman; penjaminan akses; diversifikasi dan hilirisasi pangan; pengembangan dan biofortifikasi dan fortifikasi pangan; jaminan kualitas produk pangan; penguatan pengendalian harga bahan pangan; pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan pangan lokal mandiri; dan pencegahan pemborosan pangan

5) Peningkatan kualitas akhlaq dan budi pekerti dengan penguatan nilai-nilai agama dan budaya

Ketahanan budaya diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang bermartabat. SDM yang bermartabat merupakan manusia yang masih mampu mempertahankan nilai agama, budaya, dan Pancasila dalam komunitas global. Ketahanan budaya dapat diwujudkan melalui internalisasi nilai agama, budaya, dan Pancasila melalui edukasi sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta peningkatan peran keluarga dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perwujudan manusia yang bermartabat.

6) Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan merupakan perwujudan prinsip inklusifitas dan jaminan atas keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak; keterbukaan kesempatan bagi perempuan terkait ekonomi dan akses terhadap lapangan pekerjaan; meningkatkan keterlibatan perempuan dalam parlemen dan pemerintahan; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan kolaborasi stakeholders, termasuk keluarga dalam upaya kesetaraan gender dan perlindungan anak;

Perwujudan Transformasi Sosial yaitu pembangunan manusia yang unggul dan bermartabat di Kabupaten Pati dapat diukur dari capaian indikator kinerja dengan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.4 Indikator Kinerja Sasaran Pokok 1

No.	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target			
					2025	I	II	III	IV
1	Perlindungan Sosial	1	Tingkat Kemiskinan	%	8,37-8,9	7,53-8,06	5,86-6,37	3,35-3,83	0,00-0,45
2	Ketahanan Pangan	2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	7,41	6,87	5,80	4,19	2,04
		3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	89,82	90,28	91,20	92,58	94,42
3	Kesehatan untuk Semua	4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,68	77,1	77,64	78,18	82,96
		5	Kasus Kematian Ibu	Kasus	17,00	15,00	13,00	9,00	3,00
		6	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,08	13,22	11,50	8,91	5,47
		7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00	91,00	93,00	96,00	100,00
		8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,00	90,50	91,50	93,00	95,00
		9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	91,72	92,05	92,70	93,69	95,00

No.	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						I	II	III	IV
4	Pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif	10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	64,60	66,19	69,38	74,16	80,54
			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	61,31	64,21	70,02	78,73	90,34
			c) Numerasi SD/Sederajat	%	52,37	56,14	63,67	74,97	90,04
			d) Numerasi SMP/Sederajat	%	36,84	41,39	50,48	64,y12	82,30
		11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,01	8,17	8,49	8,98	9,62
		12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,57	13,79	14,24	14,91	15,80
		13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,68	9,27	10,46	12,24	14,61
		14	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	%	94,09	94,68	95,86	97,64	100,00
		15	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,02	0,55	1,08	1,87	2,66
5	Peningkatan kualitas akhlaq dan budi pekerti dengan penguatan nilai-nilai agama dan budaya	16	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100,00	100	100	100	100,00
		17	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	21,93	23,46	26,51	31,08	37,18
		18	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	2.090.000	2.091.000	2.092.000	2.093.000	2.094.000
		19	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	24,72	25,82	28,01	31,30	35,68
		20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	n/a	0	0	0	0
21	Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	21	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,55 - 65,95	66,09- 67,46	69,16- 70,48	73,78- 75,00	79,93 - 81,04
22		22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,28- 0,27	0,27- 0,25	0,24- 0,21	0,20- 0,15	0,14- 0,07

Sumber: SE Sekda Prov Jateng Nomor 000.7/0002940, Surat Kepala Bappeda Prov Jateng Nomor:000.7/ 1030, dan Perhitungan Tim Penyusun dikoordinasikan dengan Pemprov Jateng, 2024

5.2.2. Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam

Sektor ekonomi unggulan akan menjadi basis untuk mendukung terwujudnya transformasi ekonomi yang berorientasi pada kelestarian alam. Mengacu pada hasil kajian untuk menentukan sektor (lapangan usaha) unggulan, terdapat 5 (lima) sektor ekonomi unggulan yaitu pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan, perdagangan, konstruksi serta penyediaan akomodasi dan makan minum plus 1 (satu) sector yang sangat potensial yaitu jasa pendidikan. Upaya peningkatan kolaborasi dan

keterkaitan/integrasi antar sektor yang saling mendukung di antara keenam sector dimaksud menjadi fokus intervensi (kebijakan) guna mendukung terciptanya ekosistem proses pembentukan sumber daya ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, kreatif dan inovatif, adaptif terhadap dinamika global, nasional maupun regional, serta berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup.

Arah pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Produktivitas ekonomi berwawasan lingkungan;
- b. Pemanfaatan iptek, riset-inovasi, dan digitalisasi ekonomi;
- c. Peningkatan kapasitas produksi lokal guna stabilisasi pasar domestik dan produk berorientasi ekspor;

Selanjutnya arah pembangunan tersebut akan diimplementasikan pada sektor-sektor unggulan yang secara rinci diuraikan pada bagian di bawah ini.

- **Peningkatan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan**

Pertanian dan perikanan merupakan penopang utama perekonomian daerah. Hingga 2022, lebih kurang 30,74% penduduk bekerja berada pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan juga merupakan salah satu penyumbang PDRB terbesar kedua setelah industri pengolahan yaitu berkontribusi rata-rata sebesar 26,16% (periode tahun 2010-2022).

Kebijakan sektor pertanian dan perikanan dalam jangka panjang diarahkan pada upaya : a) penguatan kelembagaan pelaku usaha pertanian dan perikanan berbasis kewirausahaan menuju korporatisasi; b) modernisasi pertanian dan perikanan; c) penciptaan ekosistem agribisnis yang lebih kuat dan luas sebagai upaya membangun keterkaitan hulu-hilir (*downstreaming* pertanian); d) peningkatan diversifikasi produk pertanian dan perikanan; e) pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perikanan secara serius berbasis sistem informasi; f) pengembangan pertanian dan perikanan ramah lingkungan (berkelanjutan); serta g) peningkatan keterlibatan pemuda dalam sector pertanian dan perikanan berbasis teknologi informasi, h) peningkatan infrastruktur dan keterpaduan industrialisasi sektor perikanan Kabupaten Pati.

- **Peningkatan Sektor Industri Pengolahan**

Industri Pengolahan menjadi kontributor ekonomi daerah terbesar yaitu 26,79% (rata-rata pada kurun 2010-2022) dan hingga tahun 2022, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 18,74% atau berada di urutan ketiga besar setelah sector pertanian dan perdagangan. Nilai produksi sector industri pengolahan menjadi yang tertinggi karena memiliki nilai tambah dan tingkat produktivitas yang relative lebih tinggi dibandingkan sector yang lain.

Kebijakan Sector Industry Pengolahan periode jangka panjang difokuskan kepada : a) penguatan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi (secara kelembagaan) pelaku industry khususnya industry kecil/industry skala rumah tangga; b) penguatan dan pengembangan agroindustry guna memperkuat hilirisasi dan penciptaan nilai tambah; c) mendorong investasi di sector riil industry pengolahan berbasis bahan baku lokal berorientasi pada padat karya dengan skill tinggi (kreatif dan inovatif) serta ramah lingkungan; d) optimalisasi pengelolaan kawasan peruntukan

industry dan/atau kawasan industry yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai serta ramah lingkungan.

- Peningkatan Sektor Perdagangan

Sektor Perdagangan menjadi kontributor terbesar ketiga dalam struktur perekonomian daerah, rata-rata berkontribusi sebesar 14,50% (tahun 2010-2022). Sektor ini juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 20,25% dari total penduduk bekerja atau menempati urutan kedua terbesar setelah sector pertanian.

Guna mendukung kebijakan transformasi ekonomi dalam jangka panjang, Sector Perdagangan difokuskan pada upaya : a) peningkatan pemenuhan standar kualitas dan output produk unggulan daerah berorientasi ekspor; b) peningkatan dan penguatan kompetensi dan kapasitas (kelembagaan) pelaku usaha perdagangan berbasis teknologi informasi dan berorientasi *go internasional*; c) peningkatan kapasitas dan kemampuan pengendalian harga bergejolak (*volatile food*) khususnya terkait optimalisasi peran kelembagaan baik dari aspek regulasi, koordinasi, kolaborasi, mitigasi serta penguatan dan perluasan jejaring/kemitraan dengan pihak luar; d) penguatan dan peningkatan pengelolaan system distribusi perdagangan;

- Peningkatan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum erat kaitannya dengan aktivitas sub sector pariwisata. Sektor ini menyumbang PDRB rata-rata sebesar 3,52% (tahun 2010-2022) dan menyerap tenaga kerja sebesar 6,70% dari total penduduk bekerja atau terbesar keempat setelah sector industry pengolahan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan peningkatan kapasitas Sector Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam jangka panjang diarahkan kepada upaya : a) pembangunan destinasi (kawasan) wisata unggulan berbasis *local content and wisdom* sebagai motor penggerak bagi sub sector yang lain seperti perhotelan, kuliner, industri kreatif, perdagangan skala mikro-kecil dan sub sector yang lain; b) peningkatan kapasitas dan kompetensi kelembagaan pelaku usaha akomodasi dan makan minum serta pelaku usaha terkait jasa kepariwisataan; c) peningkatan kemitraan antar pelaku usaha terkait; d) peningkatan advokasi pariwisata unggulan daerah baik pada level regional, nasional maupun internasional.

- Peningkatan Sektor Konstruksi

Jasa Konstruksi menyumbang rata-rata sebesar 7,83% dari total PDRB (tahun 2011-2023) serta menyerap tenaga kerja sebesar 8,08% dari total penduduk bekerja atau urutan ke-empat setelah sektor industri pengolahan.

Sektor Jasa Konstruksi telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah, dan juga memegang peranan yang sangat penting dan bahkan menjadi garda terdepan dalam penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang berkualitas sesuai dengan standar kebutuhan public dan juga sebagai pendukung utama terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Mengingat output yang dihasilkan oleh sector konstruksi adalah berupa benda fisik, maka dalam proses konstruksi melibatkan tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan pemasok bahan bangunan sehingga mampu menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah. Guna peningkatan kontribusi Sektor Konstruksi dalam perekonomian, dalam jangka panjang akan difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas/kompetensi SDM pelaku Sektor Konstruksi agar

lebih kompetitif dan bisa lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur fisik baik di level local, regional maupun nasional bahkan internasional.

• Peningkatan Sektor Jasa Pendidikan

Meskipun Sektor Jasa Pendidikan dibandingkan dengan 5 (lima) sektor unggulan di atas relative lebih rendah perannya dalam perekonomian saat ini, tapi memiliki tren yang sangat prospektif dan memiliki daya ungkit yang kuat khususnya di bidang ekonomi dan social. Jasa Pendidikan secara empirik menyumbang rata-rata sebesar 4,30% dari total PDRB (tahun 2010-2022) serta menyerap tenaga kerja sebesar 3,58% dari total penduduk bekerja atau urutan kelima setelah sector penyediaan akomodasi dan makan-minum.

Sektor Jasa Pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah, dan juga memegang peranan yang sangat penting dan bahkan menjadi garda terdepan dalam penyediaan SDM berkualitas khususnya melalui Pendidikan Non Formal kaitannya dengan pemenuhan di bursa ketenagakerjaan. Fokus kebijakan jangka panjang Sector Jasa Pendidikan Non Formal dan Formal (Milik Pemerintah dan Swasta) adalah : a) peningkatan penyediaan sarana-prasarana Pendidikan Non Formal berbasis teknologi tinggi terkini dan berorientasi pada pasar kerja; b) peningkatan kemitraan dengan Lembaga Pendidikan lainnya baik yang ada di dalam negeri maupun asing dalam rangka transfer pengetahuan maupun informasi; c) peningkatan kemitraan secara ekspansif dengan dunia industry dan asosiasi pelaku bisnis baik dalam maupun luar negeri. d) peningkatan keterlibatan swasta dalam peningkatan dan pengembangan jasa pendidikan melalui penciptaan iklim yang mendukung tumbuhnya Sector Jasa Pendidikan.

Perwujudan Transformasi Ekonomi yaitu terciptanya daya saing dan pemerataan ekonomi berbasis kelestarian alam di Kabupaten Pati dapat diukur dari capaian indikator kinerja dengan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.5 Indikator Kinerja Sasaran Pokok 2

No.	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						I	II	III	IV
1	Produktivitas ekonomi berwawasan lingkungan	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	28,28	28,94	30,25	32,23	34,86
		2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,29	4,65	5,37	6,44	7,88
		3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	25	33	48	71	100
		4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,44	4,52	4,69	4,94	5,27
		5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	5,46	6,00	7,09	8,72	10,90
		6	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,29	1,63	2,31	3,32	4,68
		7	Persentase Desa Mandiri	%	5,99	8,28	12,87	19,75	28,93
		8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,04-3,74	3,78-3,48	3,27-2,97	2,49-2,19	1,46-1,16
		9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,02	62,62	65,81	70,61	77,00
		10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	2,95	3,15	3,55	4,15	4,95
		11	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	44,02-44,32	61,09-65,11	95,23-106,68	146,44-169,04	214,72 - 252,19

No.	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
						I	II	III	IV
		12	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	22,16-22,36	22,76-23,16	23,96-24,76	25,76-27,16	28,16-30,36
		13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,51	0,53	0,56	0,61	0,67
		14	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	%	2,30	3,00	4,00	6,00	8,50
		15	Total Kredit pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	%	3,50	4,00	5,00	7,00	10,00
2	Peningkatan kapasitas produksi lokal dan berorientasi ekspor	16	Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
		17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	22,86	23,14	23,71	24,56	25,7
3	Pemanfaatan iptek, riset-inovasi, dan digitalisasi ekonomi	18	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,00	2,38	2,75	3,13	3,50

Sumber: SE Sekda Prov Jateng Nomor 000.7/0002940, Surat Kepala Bappeda Prov Jateng Nomor:000.7/ 1030, dan Perhitungan Tim Penyusun dikoordinasikan dengan Pemprov Jateng, 2024

Disamping itu, dalam rangka mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dan Koperasi sebagaimana amanah Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pati akan terus mendorong dalam penggunaan barang dan jasa produk domestic melalui pengadaan barang dan jasa Pemda maupun dengan terus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mencintai dan menggunakan/mengkonsumsi produk buatan bangsa sendiri, serta terus mendorong dan memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM dan Koperasi untuk semakin berperan dalam penyediaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri.

5.2.3. Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam

Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya lingkungan dan lestarnya alam akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Kebijakan dalam upaya terwujudnya ketahanan lingkungan dan kelestarian alam dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada:

1. Perwujudan Lingkungan Hidup Berkualitas;

Kebijakan dalam upaya terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas diarahkan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan arah kebijakan perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan; peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau; reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga yang diprioritaskan pada upaya pemilahan dari sumber, perbaikan retribusi mendukung pembiayaan persampahan, dan penerapan teknologi tepat guna pada tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah; penyediaan layanan pengelolaan, pemilahan dan pemanfaatan sampah secara terpadu sejak dari sumber dengan sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai

ekonomis; dan peningkatan konservasi tanah dan sumber daya air, terutama di Kawasan Pati Selatan, Kawasan Lindung dan Kawasan Karst;

2. Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

Kebijakan dalam upaya terwujudnya ketahanan terhadap perubahan iklim diarahkan pada penguatan aksi Pembangunan rendah karbon melalui peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku Masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan; peningkatan tata kelola sumber daya air, penerapan pertanian konservasi dan pertanian regenerative di sektor pertanian dan perikanan.

Kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan terhadap bencana diarahkan pada identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana, Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Perwujudan ketahanan lingkungan hidup dan kelestarian alam di Kabupaten Pati dapat diukur dari capaian indikator kinerja dengan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.6 Indikator Kinerja Sasaran Pokok 3

No.	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	2025 Baseline	Target			
						I	II	III	IV
1	Perwujudan Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*)	Angka	72,29	72,47	72,69	72,90	73,17
		2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	10,25	18,23	34,18	58,10	90,00
2	Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	159,93-158,22	156,13 – 153,28	148,54 – 143,40	137,15 – 128,57	121,97-108,81
		4	Penurunan Emisi GRK*)	TonCO 2eq	3.489.006,62	8.224.415,80	17.695.234,17	31.901.461,72	50.843.098,45

Sumber: SE Sekda Prov Jateng Nomor 000.7/0002940, Surat Kepala Bappeda Prov Jateng Nomor:000.7/ 1030, dan Perhitungan Tim Penyusun dikoordinasikan dengan Pemprov Jateng, 2024

5.2.4. Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan

Keberadaan infrastruktur berkualitas sangatlah penting dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur pendidikan, dan kesehatan, kelancaran aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, keselamatan perjalanan dan pergerakan orang serta kemudahan distribusi barang dan jasa diharapkan akan dapat untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Penyediaan infrastruktur bagi masyarakat (termasuk untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) juga menjadi salah satu prasyarat bagi mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran pokok Infrastruktur Berkualitas, inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pati dalam jangka panjang diarahkan pada:

1. Transformasi Digital

Perwujudan transformasi digital diarahkan pada kebijakan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hingga menjangkau ke seluruh desa, peningkatan layanan jaringan komunikasi digital sampai tingkat perdesaan, peningkatan utilitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diberbagai sektor, peningkatan literasi digital masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang

TIK serta peningkatan fasilitas pendukung teknologi informasi dan komunikasi;

2. Infrastruktur Wilayah Berkualitas;

Perwujudan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas diarahkan pada kebijakan pengembangan infrastruktur konektivitas, pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah; peningkatan keselamatan perjalanan transportasi dan pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan, implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang serta pengembangan kawasan pusat pertumbuhan pada kawasan strategis.

3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hidup layak

Perwujudan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hidup layak diarahkan kepada kebijakan penataan kawasan permukiman dan pembenahan kawasan kumuh, pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi yang aman, serta peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;

4. Tata kelola sumber daya air;

Perwujudan tata kelola sumber daya air diarahkan kepada kebijakan percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air siap minum, peningkatan ketersediaan pasokan cadangan air baku, pengelolaan sumber daya air yang efisien, optimalisasi pengelolaan sistem irigasi, waduk dan embung, serta penyediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan air baku di tengah ancaman krisis air.

Perwujudan infrastruktur berkualitas, inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pati dapat diukur dari capaian indikator kinerja dengan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.7 Indikator Kinerja Sasaran Pokok 4

No.	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	2025 Baseline	Target			
						I	II	III	IV
1	Transformasi Digital	1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet*)	%	46,49	52,14	60,90	65,60	69,02
2	Infrastruktur Wilayah Berkualitas	2	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota*)	%	89,65	90,19	91,26	92,86	95,00
		3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota*)	%	39,99	43,89	48,77	53,65	59,50
3	Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Hidup Layak	4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	18,69	26,42	41,88	65,08	96,00
		5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak.	%	79,81	81,83	85,87	91,92	100,00
4	Tata Kelola Air	6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0,00	10,00	30,00	60,00	100,00
		7	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota*)	Angka	53,35	53,57	53,72	53,80	53,84

Sumber: SE Sekda Prov Jateng Nomor 000.7/0002940, Surat Kepala Bappeda Prov Jateng Nomor:000.7/ 1030, dan Perhitungan Tim Penyusun dikoordinasikan dengan Pemprov Jateng, 2024

5.2.5. Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Kabupaten Pati dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan. Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan kolaboratif.

Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang unggul dan birokrasi pemerintahan yang semakin adaptif. Kebijakan transformasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) Penguatan pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan berkelanjutan, 2) penguatan tata kelola organisasi yang semakin efektif, efisien, berorientasi pada hasil, serta berbasis riset dan risiko, 3) penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan, 4) digitalisasi tata kelola pemerintahan, 5) peningkatan profesionalitas ASN dan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, 6) harmonisasi regulasi 7) manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas, serta 8) penguatan akuntabilitas kinerja. Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.8 Indikator Kinerja Sasaran Pokok 5

No.	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	2025 Baseline	Target			
						I	II	III	IV
1	Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	65,54	66,99	69,88	74,22	80,00
		2	Indeks Reformasi Hukum	Angka	45,05	49,55	58,54	72,02	90,00
		3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*)	Angka	3,75	3,85	4,05	4,35	4,75
		4	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,69	3,82	4,08	4,48	5,00
		5	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,38	84,01	87,27	92,15	98,67

Sumber: SE Sekda Prov Jateng Nomor 000.7/0002940, Surat Kepala Bappeda Prov Jateng Nomor:000.7/ 1030, dan Perhitungan Tim Penyusun dikoordinasikan dengan Pemprov Jateng, 2024

Selanjutnya keterkaitan antara Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.9 Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Pati Bumi Mina Tani, Unggul, Sejahtera, Bermartabat, dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan Transformasi Sosial	Meningkatkan perluasan akses layanan kesehatan, pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil.	Percepatan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.	Pemantapan perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata	Mewujudkan akses dan layanan yang dasar yang berkualitas, terutama untuk kesehatan, pendidikan, kecukupan ekonomi, serta perlindungan sosial sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara inklusif	Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bermartabat	Tingkat Kemiskinan	7,53-8,06	5,86-6,37	3,35-3,83	0,00-0,45
							Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	6,87	5,80	4,19	2,04
							Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	90,28	91,20	92,58	94,42
							Usia Harapan Hidup (UHH)	77,1	77,64	78,18	82,96
							Kasus Kematian Ibu	15,00	13,00	9,00	3,00
							Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	13,22	11,50	8,91	5,47
							Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	91,00	93,00	96,00	100,00
							Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	90,50	91,50	93,00	95,00
							Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	92,05	92,70	93,69	95,00
							Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):				
							e) Literasi Membaca SD/Sederajat	66,19	69,38	74,16	80,54
							f) Literasi Membaca SMP/Sederajat	64,21	70,02	78,73	90,34
							g) Numerasi SD/Sederajat	56,14	63,67	74,97	90,04
							h) Numerasi SMP/Sederajat	41,39	50,48	64,y12	82,30
							Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,17	8,49	8,98	9,62

							Harapan Lama Sekolah	13,79	14,24	14,91	15,80
							Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,27	10,46	12,24	14,61
							Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	94,68	95,86	97,64	100,00
							Tingkat pemanfaatan perpustakaan	0,55	1,08	1,87	2,66
							Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	100	100	100,00
							Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	23,46	26,51	31,08	37,18
							Jumlah pengunjung tempat bersejarah	2.091.000	2.092.000	2.093.000	2.094.000
							Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	25,82	28,01	31,30	35,68
							Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	0	0	0
							Indeks Pembangunan Keluarga	66,09-67,46	69,16-70,48	73,78-75,00	79,93 - 81,04
							Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,27-0,25	0,24-0,21	0,20-0,15	0,14-0,07

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Perbaikan dan peningkatan produktivitas serta kemudahan akses ke sektor unggulan (sektor pertanian dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan-minum plus jasa pendidikan) berbasis kelestarian alam.	Percepatan peningkatan produktivitas dan kemudahan akses ke sektor unggulan berbasis kelestarian alam	Pencapaian produktivitas yang tinggi dan akses yang mudah ke sektor unggulan berbasis kelestarian alam	Perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, merata dan ramah lingkungan.	Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Rasio PDRB Industri Pengolahan	28,94	30,25	32,23	34,86
							Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	4,65	5,37	6,44	7,88
							Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	33	48	71	100
							Rasio Kewirausahaan Daerah	4,52	4,69	4,94	5,27
							Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	6,00	7,09	8,72	10,90
							Return on Aset (ROA) BUMD	1,63	2,31	3,32	4,68
							Persentase Desa Mandiri	8,28	12,87	19,75	28,93
							Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78-3,48	3,27-2,97	2,49-2,19	1,46-1,16
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	62,62	65,81	70,61	77,00
							Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	3,15	3,55	4,15	4,95
							Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	61,09-65,11	95,23-106,68	146,44-169,04	214,72-252,19
							Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	22,76-23,16	23,96-24,76	25,76-27,16	28,16-30,36
							Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,53	0,56	0,61	0,67
							Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	3,00	4,00	6,00	8,50
							Total Kredit pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	4,00	5,00	7,00	10,00

							Disparitas Harga	± 10	± 10	± 10	± 10
							Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,14	23,71	24,56	25,7
							Kapabilitas Inovasi	2,38	2,75	3,13	3,50
VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
	3. Mewujudkan Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (pengendalian pencemaran air dan udara), peningkatan rehabilitasi lahan kritis, pengendalian aih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun, peningkatan tata kelola sumber daya air sebagai upaya menjaga ketersediaan air, pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dengan penekanan pada peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (pengurangan pencemaran air dan udara), kualitas lahan terjaga yang bisa menjaga ketersediaan air dan mendukung produktivitas pertanian, masyarakat mampu berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan limbah, meningkatnya masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.	Pemantapan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (penurunan pencemaran air dan udara), pemantapan penguatan pengelolaan sumber daya alam, penguatan pembangunan rendah karbon, terwujudnya masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif.	Perwujudan ketahanan lingkungan hidup dan alam yang lestari sehingga menjadikan Kabupaten Pati menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali (bebas pencemaran air dan udara, serta lahan kritis), alih fungsi lahan yang terkendali, kontinuitas ketersediaan air, pengelolaan sampah terintegrasi terutama perubahan perilaku masyarakat, ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, dan penurunan emisi gas rumah kaca.	Terwujudnya Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,47	72,69	72,90	73,17
							Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	18,23	34,18	58,10	90,00
							Indeks Risiko Bencana (IRB)	156,13 – 153,28	148,54 – 143,40	137,15 – 128,57	121,97- 108,81
							Penurunan Emisi GRK	8.224.415,80	17.695.234,17	31.901.461,72	50.843.098,45

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
	4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan infrastruktur TIK yang didukung dengan pendidikan literasi digital masyarakat dan ketersediaan SDM TIK yang berkualitas, penguatan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi terutama angkutan umum massal, penyediaan transportasi ramah lingkungan, implementasi penataan ruang, penataan kawasan permukiman, pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, peningkatan akses layanan sanitasi yang aman dan akses rumah layak huni dan terjangkau, penguatan pengelolaan layanan air siap minum, penguatan tata kelola sumber daya air, peningkatan ketersediaan sumber cadangan air baku, Peningkatan pengelolaan sistem irigasi, waduk dan embung, serta penyediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan air baku.	Percepatan perluasan layanan, peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK diberbagai sektor, peningkatan literasi digital masyarakat, akselerasi peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas, peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, pengembangan transportasi ramah lingkungan, percepatan implementasi penataan ruang, percepatan penataan kawasan permukiman, pembenahan kawasan kumuh, pemenuhan perumahan dan permukiman layak, kemudahan akses layanan sanitasi aman dan rumah layak huni yang terjangkau, pemerataan dan peningkatan akses layanan air siap minum, peningkatan tata kelola sumber daya air, peningkatan ketersediaan pasokan cadangan air baku, Peningkatan pengelolaan sistem irigasi, waduk dan embung, serta percepatan penyediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan air baku	Optimalisasi layanan, pengembangan dan pemanfaatan TIK diberbagai sektor, pemantapan literasi digital masyarakat, pengembangan infrastruktur konektivitas, peningkatan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan pada kawasan strategis, pengembangan kawasan permukiman, dan pencegahan munculnya kawasan kumuh, pemerataan pemenuhan perumahan dan permukiman layak, pemerataan dan kemudahan akses layanan sanitasi aman dan rumah layak huni yang terjangkau, perluasan akses dan layanan air siap minum, pengembangan tata kelola sumber daya air, peningkatan ketersediaan pasokan cadangan air baku berkelanjutan, optimalisasi pengelolaan sistem irigasi, waduk dan embung, serta pengembangan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan air baku	Pemanfaatan TIK diberbagai sektor yang didukung dengan literasi digital masyarakat yang baik, infrastruktur wilayah yang berkualitas, memenuhi standar, nyaman, aman dan dapat diakses oleh semua termasuk bagi kelompok marginal maupun kalangan disabilitas, dan ramah lingkungan, kemudahan akses terhadap rumah tinggal dan sanitasi yang layak, serta tercukupinya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya air	Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet*) Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota*) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota*) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabpaten/Kota*)	52,14 90,19 43,89 26,42 81,83 10,00 53,57	60,90 91,26 48,77 41,88 85,87 30,00 53,72	65,60 92,86 53,65 65,08 91,92 60,00 53,80	69,02 95,00 59,50 96,00 100,00 100,00

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
	5. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis dengan fokus pada: Penguatan pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan berkelanjutan, penguatan tata kelola organisasi, penguatan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, penguatan penataan regulasi, dan penguatan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas dan digitalisasi pelayanan publik; peningkatan pengawasan pelaksanaan pemerintahan; penerapan manajemen talenta dan sistem merit, peningkatan penguatan regulasi; percepatan implementasi pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Pemeraatan dan perluasan pelayanan publik yang berkualitas; peningkatan tata kelola yang semakin efektif, efisien, berorientasi pada hasil, serta berbasis riset dan risiko; pemantapan implementasi pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan akuntabilitas kinerja; pemantapan profesionalitas ASN, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pelayanan publik yang akuntabel, ramah, dan adaptif; terwujudnya harmonisasi kebijakan; terwujudnya tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adaptif, terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Hukum Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*) Indeks Pelayanan Publik Indeks Integritas Nasional	66,99 49,55 3,85 3,82 84,01	69,88 58,54 4,05 4,08 87,27	74,22 72,02 4,35 4,48 92,15	80,00 90,00 4,75 5,00 98,67

Sumber: SE Sekda Prov Jateng Nomor 000.7/0002940, Surat Kepala Bappeda Prov Jateng Nomor:000.7/ 1030, dan Perhitungan Tim Penyusun dikoordinasikan dengan Pemprov Jateng, 2024

Gambaran keselarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel V.10 Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Pati	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif	CJ01. Kesehatan Untuk Semua	Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bermartabat	Kesehatan untuk Semua
		CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif		Pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif
		CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Produktivitas ekonomi berwawasan lingkungan
		CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau		Produktivitas ekonomi berwawasan lingkungan
		CJ06. Transformasi Digital	Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Pemanfaatan iptek, riset-inovasi, dan digitalisasi ekonomi
			Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Transformasi Digital
		CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Peningkatan kapasitas produksi lokal dan berorientasi ekspor
		CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Peningkatan kapasitas produksi lokal dan berorientasi ekspor
			Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Infrastruktur Wilayah Berkualitas
				Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hidup layak
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif	Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif
4	Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokasi Substansial	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif	Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif
			Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bermartabat	Peningkatan kualitas akhlaq dan budi pekerti dengan penguatan nilai-nilai agama dan budaya

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Pati	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Peningkatan kapasitas produksi lokal dan berorientasi ekspor
		CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wlayah	Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Peningkatan kapasitas produksi lokal dan berorientasi ekspor
			Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bermartabat	Peningkatan kualitas akhlaq dan budi pekerti dengan penguatan nilai-nilai agama dan budaya
5	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bermartabat	Peningkatan kualitas akhlaq dan budi pekerti dengan penguatan nilai-nilai agama dan budaya
		C114. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
6	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam	Lingkungan Hidup Berkualitas
		CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Tata Kelola Sumber Daya Air
			Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bermartabat	Ketahanan Pangan
		CJ17, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam	Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

Sumber: Analisis, 2024

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 secara substansi mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Secara teknis penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi masyarakat dan analisis teknokratis yang akan diwujudkan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah yang akan menjadi dasar penyusunan RPJMD dengan mendasarkan pada tahapan prioritas dan target sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. RPJPD Tahun 2025-2045 juga akan menjadi pedoman transisi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan.

6.1. Manajemen Risiko

Guna mengantisipasi risiko yang muncul dalam dinamika pelaksanaan rencana jangka panjang ini yang akan menghambat tercapainya visi, misi, dan sasaran pokok yang ditetapkan, perlu dilakukan identifikasi risiko serta Rencana Tindak Pengendalian dalam dokumen terpisah.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD diukur dari ketercapaian indikator sasaran pokok yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025–2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatan secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
3. Bupati Pati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD dan secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Perencanaan;
4. Sasaran pokok beserta indikator yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pati dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam setiap periode perencanaan.

6.3. Pedoman Transisi

Pada saat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode peralihan belum tersusun, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pj. BUPATI PATI,

ttd

SUJARWANTO DWIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001